



# LAPORAN TAHUNAN

# 2013

## Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



## **KATA PENGANTAR**

Seraya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat menyampaikan "**Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2013**".

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2013 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan dan tugas di Sub Sektor Perhubungan Darat dari bulan Januari sampai Desember 2013, yang menyajikan berbagai informasi mengenai moda transportasi darat, yang meliputi bidang lalu lintas jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkotaan dan keselamatan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai lingkup kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi darat pada khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas untuk kemajuan transportasi dan

**Jakarta, April 2014**

**Direktur Jenderal Perhubungan Darat**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I.1</b>
A. MAKSUD DAN TUJUAN	I.2
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	I.2
C. VISI DAN MISI	I.3
D. RUANG LINGKUP	I.4
<b>BAB II KEGIATAN PELAYANAN DAN ADMINISTRATIF</b>	<b>II.1</b>
A. BIDANG PERENCANAAN	II.1
B. BIDANG KEUANGAN	II.5
C. BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	II.19
D. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	II.42
<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013</b>	<b>III.1</b>
A. BIDANG PEMERINTAHAN	III.1
1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	III.1
2. DIREKTORAT LLAJ	III.9
3. DIREKTORAT LLASDP	III.34
4. DIREKTORAT BSTP	III.43
5. DIREKTORAT KTD	III.58
<b>BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2013</b>	<b>IV.1</b>
A. LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	IV.1
1. Umum	IV.1
2. Perkembangan Prasarana LLAJ	IV.2
3. Perkembangan Sarana LLAJ	IV.6
4. Penegakan Hukum Bidang LLAJ dan PPNS Bidang LLAJ	IV.7
5. Kegiatan.kegiatan Strategis	IV.8
6. Permasalahan Yang Dihadapi	IV.9
7. Upaya Pemecahan	IV.11

B.	LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN	IV.12
1.	Umum	IV.12
2.	Perkembangan Prasarana LLASDP	IV.13
3.	Perkembangan Sarana LLASDP	IV.22
4.	Perkembangan Kinerja Angkutan Penyeberangan	IV.24
5.	Kegiatan.kegiatan Strategis	IV.24
6.	Permasalahan yang dihadapi	IV.28
7.	Upaya Pemecahan	IV.28
C.	DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN	IV.29
1.	Umum	IV.29
2.	Perkembangan Prasarana Angkutan Perkotaan	IV.34
3.	Perkembangan Sarana Angkutan Perkotaan	IV.40
4.	Kinerja Angkutan Perkotaan	IV.41
5.	Kegiatan.kegiatan Strategis	IV.41
6.	Permasalahan yang dihadapi	IV.42
7.	Upaya yang dilakukan	IV.42
D.	DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	IV.42
1.	Umum	IV.42
2.	Perkembangan Kecelakaan Transportasi Jalan	IV.43
3.	Kegiatan.Kegiatan Strategis	IV.44
4.	Permasalahan yang dihadapi	IV.72
5.	Permasalahan Pemecahan	IV.72
<b>BAB</b>	<b>V KINERJA BALAI, K.OPP DAN UPT PENYEBERANGAN</b>	<b>V.1</b>
A.	BPLJSKB BEKASI	V.1
B.	BLLAJSDP JAMBI	V.11
C.	BLLAJSDP PALU	V.33
D.	BLLAJSDP PALANGKARAYA	V.39
E.	K.OPP MERAK	V.45
F.	K.OPP GILIMANUK	V.60
G.	K.OPP LEMBAR	V.72
H.	K.OPP PAGIMANA	V.87
I.	UPT KARIANGAU	V.90

J. UPT GORONTALO	V.95
K. UPT KALABAHI	V.105

**BAB VI PENUTUP** **VI.1**

**LAMPIRAN**

- I. Laporan Analisis dan Evaluasi Realisasi Data Penumpang Angkutan Lebaran Tahun 2013 (1434 H) Periode Arus Mudik (H.7 S.D. H+1)
- II. Laporan Analisa dan Evaluasi Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014
- III. Laporan Evaluasi Realisasi Daya Serap DIPA TA. 2013

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Pelantikan Pejabat Eselon 3&4 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Pada Tanggal 8 Januari 2013	II.32
Gambar II.2	Press Background Angkutan Perkotaan	II.33
Gambar II.3	Pembekalan Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	II.33
Gambar II.4	Peresmian Pelabuhan Penyeberangan Paciran, Lamongan	II.34
Gambar II.5	Penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha	II.34
Gambar II.6	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu 2013	II.35
Gambar II.7	Peninjauan Jalur Nagrek	II.35
Gambar II.8	Kunjungan Presiden SBY ke Posko Angkutan Lebaran Terpadu	II.36
Gambar II.9	Peringatan Hari Perhubungan Nasional	II.36
Gambar II.10	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2013	II.37
Gambar II.11	Kegiatan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Gabungan D III Kebawah	II.46
Gambar II.12	Kegiatan Pengembangan Karakter Pegawai	II.46
Gambar II.13	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	II.46
Gambar II.14	Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Ditjen Hubdat	II.47
Gambar II.15	Perawatan Kamar Mandi	II.48
Gambar III.1	Penyuluhan Kepada Perusahaan Karoseri	III.16
Gambar III.2	Herregistrasi, Klasifikasi dan Pembinaan Angkutan Perusahaan Jalan 2013	III.22
Gambar III.3	Ceremonial Penganugrahan PO. Terbaik Tahun 2013 oleh Menteri Perhubungan	III.24
Gambar III.4	Survai ke Perusahaan Otobis sebagai Nominasi Pemilihan Perusahaan Terbaik Tahun 2013	III.24
Gambar III.5	Acara Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan Angkutan Jalan Tahun 2013 di Semarang	III.25
Gambar III.6	Pelaksanaan Survai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	III.26
Gambar III.7	Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum AKAP	III.26
Gambar III.8	Monitoring Tarif Angkutan Umum Tahun 2013	III.27
Gambar III.9	Fasilitas Kedatangan/Keberangkatan Angkutan Pemadu Moda	III.28
Gambar III.10	Pelaksanaan Acara Pelatihan Mutu Pelayanan Perizinan Angkutan Jalan	

	Tahun 2013 di Batam	III.30
Gambar III.11	Penyuluhan Keselamatan dan Kelaikan Sarana Kapal Sungai Dan Danau di Kabupaten Agam	III.41
Gambar III.12	Penyuluhan Keselamatan dan Kelaikan Sarana Kapal Sungai dan Danau di Kabupaten Polewali Mandar	III.41
Gambar III.13	Bimbingan Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2013	III.46
Gambar III.14	Kondisi Jalan di Kota Manado	III.46
Gambar III.15	Bimbingan Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2013	III.47
Gambar III.16	Kondisi Jalan Pandanaran, Kab. Boyolali	III.47
Gambar III.17	Bimbingan Teknis Sistem Lalu Lintas Tahun 2013	III.49
Gambar III.18	Kegiatan Workshop Forum ATCS Tahun 2013 di Wilayah I	III.49
Gambar III.19	Kondisi Arus Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional di Kota Muara Bungo Tahun 2013	III.49
Gambar III.20	Bimbingan Teknis Sistem Lalu Lintas Tahun 2013	III.50
Gambar III.21	Kegiatan Workshop Forum ATCS Tahun 2013 di Wilayah II	III.50
Gambar III.22	Tampak Kendaraan Mother Station Parkir di SPBG Sukanto Tahun 2013	III.57
Gambar III.23	Aktivitas Komersil di Jalan Gatot Subroto Tahun 2013	III.58
Gambar III.24	Bundaran/Simpang Ubung	III.58
Gambar IV.1	KMP. Gili Iyang	IV.26
Gambar IV.2	KMP. Kalabia	IV.26
Gambar IV.3	Grafik Perkembangan Kecelakaan Lalu Lintas	IV.43
Gambar IV.4	Tahapan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan	IV.64
Gambar V.1	Struktur Organisasi Balai Bekasi	V.2
Gambar V.2	Struktur Organisasi Balai LLAJSDP Jambi	V.12
Gambar V.3	Susunan Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan	V.49
Gambar V.4	Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak	V.50
Gambar V.5	Susunan Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan	V.63
Gambar V.6	Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk	V.64
Gambar V.7	Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar	V.74
Gambar V.8	Pelabuhan Penyeberangan Lembar	V.75
Gambar V.9	Pelabuhan Penyeberangan Padangbai	V.76
Gambar V.10	Pelabuhan Penyeberangan Kayangan	V.77
Gambar V.11	Pelabuhan Penyeberangan Pototano	V.78



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Neraca per 31 Desember 2013	II.15
Tabel II.2	Posisi Rancangan Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ	II.23
Tabel II.3	MoU Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah	II.25
Tabel II.4	Kegiatan KSLN Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2013	II.37
Tabel II.5	Perjanjian, MoU, Arrangement dan Declaration Ditjen Perhubungan Darat	II.40
Tabel II.6	Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	II.42
Tabel II.7	Pegawai Berdasarkan Golongan	II.43
Tabel II.8	Pegawai Berdasarkan Pendidikan	II.43
Tabel II.9	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II.43
Tabel II.10	Pegawai Berdasarkan Golongan	II.43
Tabel II.11	Pegawai Berdasarkan Eselonering	II.43
Tabel III.1	Penerbitan SUT	III.14
Tabel III.2	Penerbitan SRUT	III.15
Tabel III.3	Penguji Kendaraan Bermotor	III.15
Tabel III.4	Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	III.17
Tabel III.5	Sertifikasi Bengkel BBG	III.17
Tabel IV.1	Panjang Jalan Nasional	IV.2
Tabel IV.2	Jumlah Bus AKAP dan Pariwisata Tahun 2013	IV.2
Tabel IV.3	Jumlah Pengangkutan Alat Berat dan B3 Tahun 2013	IV.4
Tabel IV.4	Perusahaan Kendaraan Umum yang Berdomisili Kuching untuk melayani trayek Kuching . Pontianak	IV.5
Tabel IV.5	Perusahaan Kendaraan Umum yang Berdomisili di Pontianak untuk melayani trayek Pontianak . Kuching	IV.5
Tabel IV.6	Pengesahan dan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	IV.6
Tabel IV.7	Pemberian Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Tahun 2013	IV.7
Tabel IV.8	Daftar Jumlah PPNS Bidang LLAJ Tahun 2008.2013	IV.7
Tabel IV.9	Rekap Penjatuhan Sanksi Angkutan Lebaran Tahun 2013 Berdasarkan Domisili Perusahaan Angkutan AKAP	IV.8

Tabel IV.10	Kondisi Perkembangan Lintas Penyeberangan	IV.13
Tabel IV.11	Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan	IV.14
Tabel IV.12	Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota	IV.14
Tabel IV.13	Jenis Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	IV.16
Tabel IV.14	Lintas Penyeberangan Komersil	IV.16
Tabel IV.15	Lintas Penyeberangan Bersubsidi	IV.17
Tabel IV.16	Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan	IV.21
Tabel IV.17	Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan oleh PT.ASDP	IV.21
Tabel IV.18	Jumlah Alur Pelayaran Sungai dan Danau	IV.21
Tabel IV.19	Jumlah Kapal SDP yang Beroperasi	IV.22
Tabel IV.20	Jumlah Kapal Penyeberangan yang beroperasi berdasarkan Kepemilikan	IV.22
Tabel IV.21	Subsidi Kapal Perintis Tahun 2008 - 2013	IV.23
Tabel IV.22	Jenis dan Karakteristik Kapal Sungai	IV.23
Tabel IV.23	Jenis dan Karakteristik Kapal Penyeberangan	IV.23
Tabel IV.24	Produksi Angkutan Penyeberangan Tahun 2008 - 2013	IV.24
Tabel IV.25	Kapal yang selesai dibangun di Tahun 2013	IV.25
Tabel IV.26	Kinerja Ruas Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek	IV.30
Tabel IV.27	Tingkat Pelayanan Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek	IV.30
Tabel IV.28	Data Pelayanan Taksi di Kawasan Perkotaan	IV.31
Tabel IV.29	Rekapitulasi Data Angkutan Pemandu Moda, Angkutan Jalan dengan Angkutan Udara	IV.32
Tabel IV.30	Data Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perkotaan Tahun 2013	IV.35
Tabel IV.31	Fasilitas Pendukung LLAJ dan Persimpangan dengan APILL	IV.31
Tabel IV.32	Data Lalu Lintas Tahun 2013	IV.39
Tabel IV.33	Jumlah Angkutan Umum	IV.40
Tabel IV.34	Jumlah Kecelakaan dan Korban Kendaraan Bermotor Berdasarkan Tingkat Kecelakaan Tahun 2009 - 2013	IV.43
Tabel IV.35	Data Jumlah Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tahun 2009 - 2013	IV.51
Tabel IV.36	Keikutsertaan Provinsi Dalam Kegiatan AKUT Selama 9 Tahun	

	Terakhir Tahun 2005 - 2013	IV.62
Tabel IV.37	Lokasi Pelaksanaan Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	IV.65
Tabel IV.38	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Di Bidang Audit Keselamatan Jalan	IV.66
Tabel IV.39	Jumlah Peserta Pelatihan Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	IV.67
Tabel IV.40	Data Jumlah Peserta Pelatihan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan	IV.68
Tabel IV.41	Jumlah Peserta Pelatihan Inspeksi Keselamatan Jalan	IV.69
Tabel IV.42	Jumlah Peserta Pelatihan Investigasi Kecelakaan ASDP, Audit dan Inspeksi Keselamatan Alur Pelayaran Sungai Tahun 2007 - 2013	IV.70
Tabel IV.43	Jumlah Peserta Pemberdayaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan dan ASDP	IV.72
Tabel V.1	Komposisi Pegawai Balai Bekasi menurut Pangkat/Golongan	V.2
Tabel V.2	Realisasi PNPB Tahun 2012 - 2013	V.3
Tabel V.3	Rekapitulasi Resume Pengujian Kendaraan Tahun 2013	V.4
Tabel V.4	Rekapitulasi Resume Pengujian Kendaraan Berdasarkan Tipe Kendaraan Tahun 2013	V.4
Tabel V.5	Wilayah Kerja Balai LLAJSDP Jambi	V.13
Tabel V.6	Realisasi Belanja Modal Tahun 2013	V.15
Tabel V.7	Realisasi Belanja Barang Tahun 2013	V.15
Tabel V.8	Rincian Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja	V.35
Tabel V.9	Rekapitulasi Daya Serap Anggaran Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak Tahun 2013	V.51
Tabel V.10	Realisasi Anggaran Tahun 2013	V.52
Tabel V.11	Fasilitas Dermaga Pelabuhan Merak	V.52
Tabel V.12	Fasilitas Bangunan Gedung di Pelabuhan Merak Tahun 2013	V.53
Tabel V.13	Fasilitas Dermaga Pelabuhan Bakauheni Tahun 2013	V.53
Tabel V.14	Fasilitas Dermaga Pelabuhan Muntok	V.54
Tabel V.15	Fasilitas Dermaga Pelabuhan Telaga Pungkur	V.55
Tabel V.16	Fasilitas Dermaga Pelabuhan Tanjung Uban	V.56
Tabel V.17	Realisasi Anggaran Tahun 2013	V.65
Tabel V.18	Rekapitulasi Data Produksi Angkutan di Pelabuhan Ketapang Tahun 2013	V.66
Tabel V.19	Rekapitulasi Data Angkutan di Pelabuhan Gilimanuk Tahun 2013	V.67

Tabel V.20	Rekapitulasi Data Produksi di Lintas Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk Tahun 2013	V.67
Tabel V.21	Data Angkutan Enam Tahun Terakhir	V.68
Tabel V.22	Data Produksi Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Serdang – Batu Licin	V.69
Tabel V.23	Lintas Penyeberangan dari Pelabuhan Penyeberangan Lembar	V.77
Tabel V.24	Data Produksi di Pelabuhan Penyeberangan Lembar	V.79
Tabel V.25	Data Produksi di Pelabuhan Penyeberangan Padangbai	V.80
Tabel V.26	Data Produksi di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan	V.81
Tabel V.27	Data Produksi di Pelabuhan Penyeberangan Pototano	V.82
Tabel V.28	Dana Anggaran Belanja Tahun 2013	V.83
Tabel V.29	Kegiatan Studi KOPP Lembar Tahun 2013	V.84
Tabel V.30	Program dan Kegiatan Satker OPP Pagimana	V.89
Tabel V.31	Data Produksi Angkutan Penyeberangan Lintasan Balikpapan . Mamuju	V.92
Tabel V.32	Data Produksi Angkutan Penyeberangan Lintasan Kariangau . Penajam	V.93
Tabel V.33	Data Produksi Angkutan Penyeberangan Lintasan Balikpapan . Taipa	V.94
Tabel V.34	Data Produktifitas Angkutan Lintasan Gorontalo.Pagimana Tahun 2013	V.101
Tabel V.35	Data Produktifitas Angkutan Lintasan Gorontalo – Wakai Tahun 2013	V.102
Tabel V.36	Data Produktifitas Angkutan Lintasan Marisa – Dolong Ampara Parigi Tahun 2013	V.103
Tabel V.37	Data Pegawai Operasional UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	V.108
Tabel V.38	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013	V.110
Tabel V.39	Inventarisasi Barang Milik Negara	V.111
Tabel V.40	Lintasan yang Dilayani Oleh Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	V.113

## BAB I

## PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu komponen yang mutlak penting bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional masa kini dan mendatang. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dalam pencapaian tujuan pembangunan adalah negara-negara yang memiliki sistem transportasi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan dinamis penduduknya, *vice versa*. Namun demikian, agar pembangunan transportasi nasional lebih efisien, efektif dan memberikan nilai tambah bagi sektor lain serta tidak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, maka perlu disusun dan dirumuskan rencana pembangunannya.

Kemajuan transportasi memiliki korelasi erat dengan pembangunan peradaban, dan keberhasilannya sangat berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas dari faktor-faktor lainnya, seperti kualitas, biaya dan tingkat pelayanan sistem transportasi itu sendiri. Tanpa perhatian terhadap faktor-faktor ini, maka hampir dipastikan kemajuan transportasi nasional dapat menimbulkan berbagai biaya sosial (*social costs*) baik berupa kecelakaan, kemacetan, kebisingan, dan polusi.

Untuk mengurangi paradoks atau dampak negatif dari pengembangan sistem transportasi pada pembangunan peradaban dimaksud, maka perlu disusun rumusan rencana pengembangan sistem transportasi nasional. Pentingnya rumusan rencana ini tidak saja dimaksudkan agar langkah pencapaian tujuan yang diharapkan dapat lebih terarah dan sistematis, namun juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pencapaian tujuan pengembangan transportasi nasional yang diinginkan.

Hingga saat ini transportasi jalan masih mempunyai peran yang sangat dominan hampir 84% total perjalanan antar propinsi menggunakan transportasi jalan, sedangkan peran angkutan kereta api masih sangat kecil sekitar 7% karena jasa angkutan penumpang kereta api nasional hanya ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sementara peran angkutan sungai danau dan penyeberangan juga masih relatif kecil yakni berkisar 5%.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah berupaya meningkatkan kinerjanya melalui capaian (*out-come*) selama satu tahun anggaran sejalan dengan Sistem Transportasi Nasional pada bidang Angkutan Jalan maupun bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat setiap tahun menyampaikan hasil pelaksanaan tugas yang disusun dalam bentuk laporan tahunan.

## **A. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2013 disusun dengan maksud sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga sebagai wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

### **2. Tujuan**

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2013 disusun dengan tujuan untuk melaporkan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## **B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

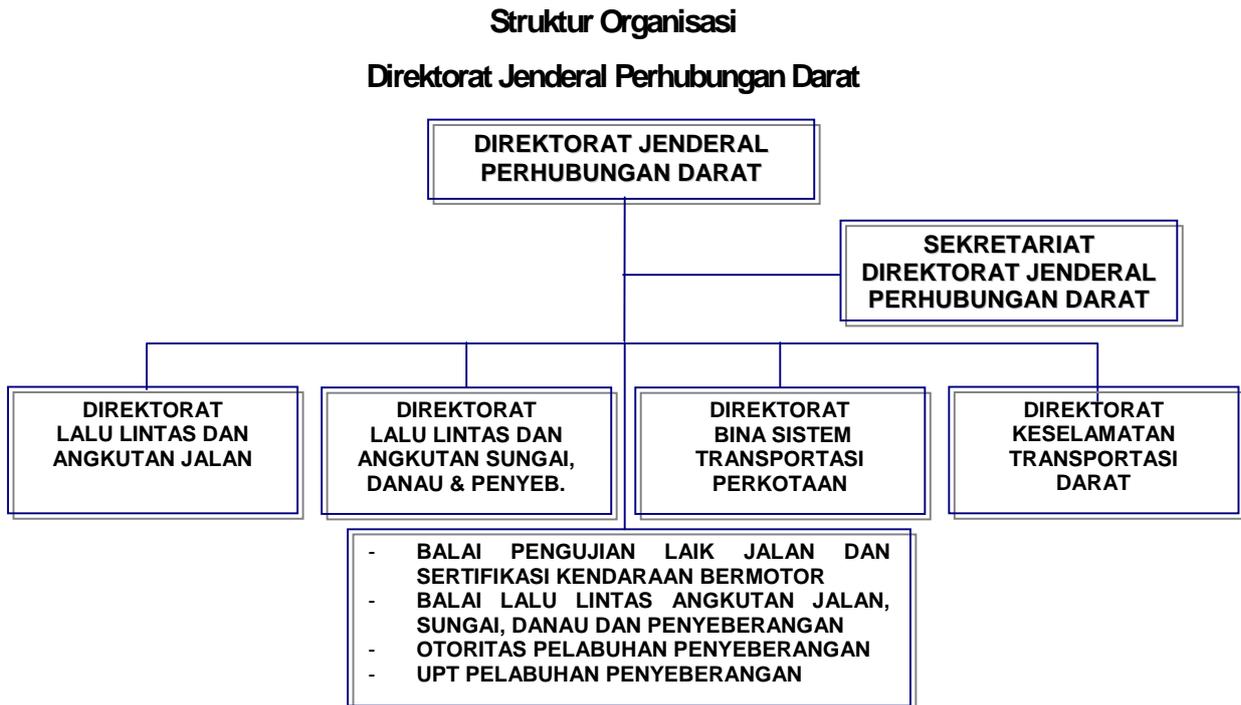
Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka tugas pokok Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Selanjutnya, pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengembangkan organisasi dengan dibentuknya Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) di 8 (delapan) lokasi melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 dan 86 Tahun 2011.

Adapun Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :



## C. VISI DAN MISI

### 1. Visi

“Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggung-jawabkan”

### 2. Misi

- a. Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
- b. Menciptakan dan mengorganisasikan transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan, perkotaan, keselamatan transportasi darat yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.
- c. Mendorong berkembangnya tata niaga dan industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel.
- d. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

## **D. RUANG LINGKUP**

Penyusunan buku ini mencakup pelaksanaan kegiatan Sub Sektor Perhubungan Darat, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

### **1. Bidang Pemerintahan**

Kegiatan di bidang pemerintahan mencakup kegiatan non fisik yang bersifat rutin maupun kegiatan-kegiatan fisik, seperti : penyusunan petunjuk dan pedoman teknis, kebijakan-kebijakan dan lain-lain.

### **2. Bidang Pembangunan**

Kegiatan di bidang pembangunan mencakup kegiatan fisik, dimana pendanaannya baik rutin dan pembangunan dibiayai oleh APBN yang tersusun dalam Rencana Kerja Anggaran.

### **3. Bidang Operasional**

Kegiatan di bidang operasional mencakup perencanaan teknis, fasilitas perlengkapan ataupun pendukung yang mana kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut pada pembinaan teknis.

**BAB II****KEGIATAN PELAYANAN  
DAN ADMINISTRATIF****A. BIDANG PERENCANAAN**

Berdasarkan proses perencanaan yang tertuang dalam Pedoman Perencanaan KM. 31 Tahun 2006 di lingkungan Kementerian Perhubungan, di bidang Perencanaan telah dilakukan kegiatan tahun 2013, antara lain :

1. Penetapan Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2013;

Dalam penetapan kinerja berdasarkan pada prioritas program transportasi darat tahun 2013 sebagai berikut :

- a. Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- b. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.
- c. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.
- d. Peningkatan Kualitas SDM dan Peraturan Perundangan.
- e. Peningkatan Penggunaan Teknologi yang Efisien dan Ramah Lingkungan di Bidang Transportasi Darat.

2. Penyusunan RKA-KL, DIPA, PO dan LK Tahun 2013;

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat untuk tahun 2013.

3. Memantau, mengevaluasi, menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2013;

4. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi tugas pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemaduan jaringan transportasi darat tahun 2013.

5. Pemantauan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Tahun 2013;

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Hibah dan Luar Negeri (PHLN) pada tahun 2013 dengan total pagu sebesar Rp. 14.000.000.000,- tetapi, tidak

dapat terserap dikarenakan terdapat permasalahan pada Proses Pencairan dan Persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

6. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2013;

LAKIP disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada tahun 2013, ada beberapa kegiatan yang belum dapat dinilai hasil kinerjanya dikarenakan ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap.

7. Menyusun Laporan Tahunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2012;

Sebagai wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan bertujuan untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

8. Penyusunan Data Statistik Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2012;

- a. Menyusun format struktur data dan informasi perhubungan darat.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi primer dan sekunder.
- c. Melakukan updating data perhubungan darat.
- d. Melakukan kompilasi data dan informasi.
- e. Melakukan pemetaan data dan informasi kondisi dan perkembangan perhubungan darat.
- f. Melakukan editing dan pengelompokan data terhadap data yang sifatnya tahunan (*time series*).

9. Pengembangan Sistem Informasi;

- a. Melakukan finalisasi terhadap Master Plan Teknologi Informasi Perhubungan Darat.
- b. Melakukan pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN) Ditjen Perhubungan Darat secara bertahap dan berkelanjutan.
- c. Melakukan pembangunan Pusat Informasi Perhubungan Darat.
- d. Melakukan pembuatan video Profil dan Kinerja Perhubungan Darat Tahun 2013.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas *Bandwidth* jaringan komputer Ditjen Perhubungan Darat.
- f. Melakukan Pengembangan Data Perhubungan Darat pada Profil dan Kinerja Perhubungan Darat Tahun 2013.

10. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2013;

Rakornis Ditjen Hubdat dilaksanakan di Shangri-La Hotel, Surabaya pada tanggal 2 s.d 4 Oktober 2013 dan diikuti oleh kurang lebih 1.000 peserta yang terdiri dari pejabat di

lingkungan Kemenhub, Dishub Propinsi, Kabupaten/Kota, BUMN dan UPT dilingkungan Ditjen Hubdat.

Hasil Rumusan Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2013 yang telah disepakati antara lain :

- a. Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di bidang LLAJ, perlu dibentuk sistem yang terintegrasi antara pengujian kendaraan bermotor, terminal dan jembatan timbang, termasuk pengujian kendaraan bermotor swasta dan kalibrasi alat uji;
- b. Dalam rangka meningkatkan manfaat transportasi, perlu dilakukan langkah optimalisasi fungsi terminal/stasiun;
- c. Dalam rangka membenahan sistem penyelenggaraan dalam bidang angkutan jalan maka diperlukan langkah-langkah konkrit oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki sistem perijinan penyelenggaraan angkutan umum, diantaranya penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), pengawasan dan pembinaan Agen Pemegang Merk (APM), pembatasan umur kendaraan dan *database* angkutan;
- d. Untuk mengatasi permasalahan angkutan perintis perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada propinsi, kabupaten dan kota mengenai mekanisme proses pelelangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjadi pedoman bagi pemerintah propinsi/kab/kota dalam menyelenggarakan pelelangan dengan benar;
- e. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan angkutan perintis diantaranya yaitu pengadaan kendaraan/bus untuk angkutan perintis yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, adanya *sharing* dana antara pemerintah pusat dan daerah, pengoperasian dan perawatan kendaraan angkutan perintis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak ke-3;
- f. Dalam rangka membenahan sistem penyelenggaraan dalam bidang pengujian kendaraan bermotor diperlukan langkah-langkah diantaranya pemerintah pusat perlu melakukan pembinaan teknis kepada pemerintah propinsi/kabupaten/kota dan membuat juknis/SOP terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor diserahkan kepada pihak swasta. Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyiapkan anggaran perawatan dan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki dan wajib melaksanakan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor sekali dalam setahun. Pemerintah propinsi melakukan monitoring setahun dua kali terhadap pengoperasian alat uji tersebut. Selanjutnya Pemerintah pusat diharapkan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam penyediaan alat uji mekanis;

- g. Dalam pengembangan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan diperlukan komitmen dan kesiapan pemerintah daerah dan/atau badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana ASDP dalam bentuk partisipasi pembangunan, termasuk penyediaan jalan akses pelabuhan, serta anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharannya;
- h. Dalam membenahan sistem penyelenggaraan ASDP diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk integrasi pelayanan, meliputi dukungan fasilitas integrasi fisik dan layanan angkutan dari dan ke pelabuhan penyeberangan, penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis, dan penyempurnaan regulasi khusus ASDP;
- i. Dalam upaya peningkatan kinerja transportasi perkotaan, perlu di bentuk “Desk” atau satuan kerja khusus transportasi perkotaan, yang berfungsi sebagai koordinasi, fasilitasi, monitoring evaluasi dan implementasi terbatas (*fill in the gap*) transportasi perkotaan lintas wilayah administrasi sehingga pelayanan transportasi dapat diselenggarakan secara utuh tanpa kendala batas administratif;
- j. Dalam rangka membenahan sistem dan peningkatan kinerja angkutan perkotaan, diperlukan kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah yang lebih berpihak pada penyelenggaraan angkutan umum perkotaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;
- k. Dalam melaksanakan program-program keselamatan perlu didukung kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, termasuk di dalamnya tenaga penguji dan auditor jalan;
- l. Agar program-program keselamatan di daerah perlu dimasukkan dalam perumusan RPJMD baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota;
- m. Sosialisasi penanganan keselamatan termasuk tindak-lanjut dari Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) perlu secara lebih intensif lagi dilakukan terutama bagi para pengambil keputusan;
- n. Diusulkan kepada Menteri Perhubungan agar dapat mempertimbangkan adanya pengusulan prosentase alokasi dana yang diperuntukan dalam pembangunan di sektor perhubungan;
- o. Dalam kaitannya dengan Dana Alokasi Khusus perlu dipertimbangkan kembali bukan berdasarkan pemerataan daerah tetapi perlu mempertimbangkan juga potensi daerah yang bersangkutan;
- p. Perlu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang tindak-lanjut RUNK yang harus dilaksanakan oleh daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota;

- q. Penganggaran terhadap program-program pembangunan di bidang keselamatan transportasi darat perlu dilakukan pengalokasian dalam penganggaran APBD;
- r. Perlu ada asistensi dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tentang tupoksi yang terkait dengan keselamatan transportasi darat sehingga dapat diwujudkan persamaan persepsi dalam pelaksanaannya;
- s. Berkembangnya wacana bahwa guna mendukung program keselamatan dalam RUNK, mengusulkan agar ditegaskan/dicantumkan dukungan anggaran dalam Undang-Undang (misalnya, 20% dari APBN seperti pada sektor pendidikan).

## B. BIDANG KEUANGAN

### 1. Pelaksanaan Anggaran

- a. Pagu Awal DIPA T.A 2013 sebesar **Rp. 2.842.471.214.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

1) Rincian per Sumber Dana :			
RM	:	Rp.	2.826.671.032.000,-
PNBP	:	Rp.	1.800.093.000,-
PLN	:	Rp.	14.000.089.000,-
2) Rincian per Jenis Belanja :			
Belanja Pegawai	:	Rp.	51.775.276.000,-
Belanja Barang	:	Rp.	1.698.380.536.000,-
Belanja Modal	:	Rp.	1.092.315.402.000,-

- b. Pagu Revisi DIPA Induk ke-1 T.A 2013 sebesar **Rp. 3.014.777.225.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

1) Rincian per Sumber Dana :			
RM	:	Rp.	2.998.977.043.000,-
PNBP	:	Rp.	1.800.093.000,-
PLN	:	Rp.	14.000.089.000,-
2) Rincian per Jenis Belanja :			
Belanja Pegawai	:	Rp.	51.775.276.000,-
Belanja Barang	:	Rp.	1.834.066.890.000,-
Belanja Modal	:	Rp.	1.128.935.059.000,-
3) Penambahan atau pengurangan DIPA T.A 2013 disebabkan:			
Optimalisasi	:	Rp.	125.000.000.000,- (+)
APBN-P	:	Rp.	68.907.909.000,- (+)

Pemotongan : Rp. 21.601.898.000,- (-)

c. Pagu Revisi DIPA Induk ke-2 T.A 2013 sebesar **Rp. 3.013.165.225.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rincian per Sumber Dana :
  - RM : Rp. 2.997.365.043.000,-
  - PNBP : Rp. 1.800.093.000,-
  - PLN : Rp. 14.000.089.000,-
- 2) Rincian per Jenis Belanja :
  - Belanja Pegawai : Rp. 51.775.276.000,-
  - Belanja Barang : Rp. 1.833.346.937.000,-
  - Belanja Modal : Rp. 1.128.043.012.000,-

Pengurangan pagu Revisi ke-2 DIPA T.A 2013 disebabkan karena adanya pemotongan untuk **Tunjangan Kinerja** sebesar **Rp. 1.612.000.000,-** dari **Satker Direktorat Keselamatan Transportasi Darat** sebesar **Rp. 505.090.000,-** dan **Satker Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan** sebesar **Rp. 1.106.910.000,-**.

d. Realisasi Penyerapan Anggaran T.A 2013 sebesar **Rp. 2.676.674.735.763,-** dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Rincian per Sumber Dana :
  - RM : Rp. 2.675.045.640.763,-
  - PNBP : Rp. 1.629.095.000,-
  - PLN : Rp. NIHIL
- 2) Rincian per Jenis Belanja :
  - Belanja Pegawai : Rp. 34.061.885.249,-
  - Belanja Barang : Rp. 1.631.870.764.936,-
  - Belanja Modal : Rp. 1.010.742.085.578,-

e. Target, Realisasi Penerimaan PNBP T.A 2013

Target penerimaan PNBP T.A 2013 sebesar **Rp. 5.590.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Rp. 1.000.000.000,-
- 2) UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi Rp. 20.000.000,-
- 3) UPT Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Rp. 70.000.000,-
- 4) Balai PLJSKB di Bekasi Rp. 4.500.000.000,-

Realisasi Penerimaan PNBPN T.A 2013 sebesar **Rp. 5.802.008.509,-** dengan rincian sebagai berikut:

- |  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| 1) UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau | Rp. | 933.048.383,-   |
| 2) UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi  | Rp. | 27.183.914,-    |
| 3) UPT Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo | Rp. | 82.000.212,-    |
| 4) Balai PLJSKB di Bekasi                | Rp. | 4.759.776.000,- |

f. Kegiatan yang tidak Terserap T.A 2013

Total Sisa Anggaran yang tidak terserap pada T.A 2013 yaitu **Rp. 460.946.806.554,-** yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1) Dana Blokir / Bertanda Bintang Reguler sebesar **Rp. 5.123.275.000** yang terdiri dari :

- |   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| a) Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dana Non Alokasi Pengadaan Peralatan Poliklinik)   | Rp. | 101.595.000,-   |
| b) Satker Direktorat LLAJ (Kegiatan Dukungan MTQ Nasional (Pembayaran)) karena sudah dianggarkan di Satker Direktorat LLASDP  | Rp. | 1.200.000.000,- |
| c) Satker Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Provinsi Bali (Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional R-4 (Dana Non Alokasi) karena tidak ada dasar hukumnya / tidak diperbolehkan.  | Rp. | 50.000.000,-    |
| d) Satker Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak di Provinsi Banten (Kegiatan Operasional Tug Boat) karena belum ada dasar hukum untuk OPP Merak yang mengoperasikannya, dan belum ada MOU antara OPP Merak dengan PT. ASDP (Persero). | Rp. | 3.771.680.000,- |

2) Kegiatan blokir/tanda bintang APBN-P sebesar **Rp. 60.000.000.000,-** yang terdiri dari :

- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| a) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Timur (Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ di Provinsi Jawa Timur) | Rp. | 10.000.000.000,- |
| b) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Timur (Kegiatan Pengembangan lanjutan Peningkatan                                     | Rp. | 1.200.000.000,-  |

- Terminal Batu Ampar Kaltim termasuk supervisi)
- c) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Tenggara:
- Desain Pengerukan Alur Penyeberangan Wanci Rp. 350.000.000,-
  - Fisik Pekerjaan Pengerukan Alur Penyeberangan Wanci Rp. 1.330.000.000,-
- d) Satker Pengembangan LLASDP NTT (Kegiatan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ndao) Rp. 10.000.000.000,-
- e) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur (Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai Kunjang Tahap II) Rp. 12.000.000.000,-
- f) Satker Pengembangan LLASDP Maluku Utara:
- Pembangunan Dermaga Gebe Tahap II Rp. 10.000.000.000,-
  - Pembangunan Dermaga Kayoa Tahap II Rp. 5.120.000.000,-
- g) Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (Kegiatan Lanjutan Pembangunan Terminal Wonogiri) Rp. 10.000.000.000,-
- 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 60.273.934.000,-** yang terdiri dari :
- a) Satker Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (Kegiatan Teknis Penerapan Fasilitas Angkutan Perkotaan Bagi Penumpang yang berkebutuhan khusus karena gagal lelang ulang) Rp. 550.000.000,-
- b) Satker Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (Kegiatan Perencanaan Database Kinerja Angkutan Perkotaan di Kota-kota Metropolitan karena tidak ada peminat dari peserta lelang) Rp. 800.000.000,-
- c) Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan untuk Gedung Arsip karena belum adanya serah terima operasional Gedung Arsip) Rp. 2.345.440.000,-

- |   |                      |
|---|----------------------|
| d) Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Kegiatan Renovasi Ruang ULP karena belum tersedianya Ruang ULP)  | Rp. 75.000.000,-     |
| e) Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari:   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loan ADB (Integrated Vehicle Overloading Control Strategy) karena belum adanya balasan surat NOL (No Objection Letter) dari Sesditjen Perhubungan Darat kepada Direktur Bimtek Kementerian PU sebagai Project Manager Unit (PMU))</li> </ul> | Rp. 4.000.089.000,-  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loan ADB (Road Safety Awareness Campaign and Training) karena belum adanya balasan surat NOL (No Objection Letter) dari Sesditjen Perhubungan Darat kepada Direktur Bimtek Kementerian PU sebagai Project Manager Unit (PMU))</li> </ul>     | Rp. 10.000.000.000,- |
| f) Satker Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Kegiatan Pelaksanaan Hari Korban Kecelakaan karena gagal lelang)   | Rp. 400.000.000,-    |
| g) Satker Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kegiatan Pengadaan Buku Tilang pada Kantor Pusat Kementerian Perhubungan karena belum ada payung hukum/RPP)  | Rp. 100.000.000,-    |
| h) Satker Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Dukungan KTM OKI (Pembayaran) karena adanya kesalahan di pencatatan DIPA halaman IV yang mengakibatkan kendala dalam pencairan di KANML DJPB</li> </ul>   | Rp. 31.350.000,-     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Dukungan MTQ Nasional (Pembayaran) karena adanya kesalahan di pencatatan DIPA halaman IV yang</li> </ul>  | Rp. 359.180.000,-    |

- mengakibatkan kendala dalam pencairan di KANMIL DJPB
- Dana Non Alokasi Rp. 2.014.470.000,-
- i) Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri dari:
- Pembayaran Penugasan Pengoperasian KMP Rokatenda untuk mengangkut Bus dalam Rangka Mendukung Kelancaran MTQ di Ambon Rp. 253.856.000,-
  - Pembayaran Dukungan Kegiatan Sail Morotai Tahan 2012 di Teluk Daruba Propinsi Maluku Utara Rp. 1.465.107.000,-
  - Dana Non Alokasi Rp. 281.037.000,-
- j) Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Kegiatan Pembayaran Dukungan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena keterbatasan waktu dalam pengusulan) Rp. 2.500.000.000,-
- k) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Timur (Kegiatan Subsidi Operasi Bus Perintis Trayek Sambas – Aruk, Trayek Bengkayang – Jagol Babang, Trayek Pontianak – Bangkalan Bun karena gagal lelang) Rp. 1.398.405.000,-
- l) Satker Pengembangan LLAJ Banten pada Kegiatan:
- Rehabilitasi Terminal Tipe A Pakupatan Lanjutan karena waktu pelaksanaan tidak memungkinkan akibat adanya perbaikan gambar desain Rp. 3.000.000.000,-
  - Rehabilitasi Terminal Terpadu Merak Lanjutan karena waktu pelaksanaan tidak memungkinkan akibat adanya perbaikan gambar desain Rp. 3.000.000.000,-

- |  |                     |
|--|---------------------|
| m) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah (Kegiatan Rehabilitasi Terminal Mamboro Tahap II karena waktu pelaksanaan tidak memungkinkan akibat adanya perbaikan gambar desain)  | Rp. 2.000.000.000,- |
| n) Satker Pengembangan LLAJ Maluku (Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe B Passo karena waktu pelaksanaan tidak memungkinkan akibat adanya perbaikan gambar desain)  | Rp. 2.000.000.000,- |
| o) Balai Pengujian Laik Jalan dan Serifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi (Kegiatan Pemeliharaan Alat Uji Emisi (EURO 2) Passanger Car karena waktu pelaksanaan tidak memungkinkan)  | Rp. 200.000.000,-   |
| p) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur (Kegiatan Pengerukan Alur Penyeberangan Sungai Wain Balikpapan 1 jt m <sup>3</sup> karena hasil pengerukan harus dibuang di darat, sehingga perlu AMDAL (tidak diperoleh) dan tidak ada lokasi darat untuk pembuangannya) | Rp. 5.000.000.000,- |
| q) Satker Pengembangan LLASDP Maluku pada Kegiatan:  |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Dermaga Penyeberangan Wailey Tahap IV karena permasalahan gugatan kepemilikan lahan yang belum diselesaikan oleh Pemda Seram Bagian Barat</li> </ul>  | Rp. 8.500.000.000,- |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Namlea karena belum adanya Studi AMDAL</li> </ul>  | Rp. 5.000.000.000,- |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Galala karena adanya Klaim kepemilikan lahan dari masyarakat</li> </ul>  | Rp. 5.000.000.000,- |
| 4) Sisa Dana sebesar Rp. 335.549.597.554,- terdiri dari :  |                     |
| a) Sisa Dana Belanja Pegawai Rp. 17.710.204.784,- terdiri dari:  |                     |

- Sisa dana gaji pegawai (gaji, pembulatan, uang makan, lembur) Rp. 5.147.402.389,-
- Sisa dana tunjangan pegawai Rp. 770.106.395,-
- Sisa dana transit Rp. 11.792.696.000,-
- b) Sisa Dana Belanja Barang Rp. 200.785.960.963,-  
terdiri dari:
  - Belanja Barang Rp. 200.785.960.963,-
- c) Sisa Dana Belanja Modal Rp. 117.053.431.807,-  
terdiri dari:
  - Belanja Modal Rp. 117.053.431.807,-

## 2. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)

Dalam rangka penatausahaan barang inventaris milik negara, telah dilaksanakan kegiatan Pencatatan Atas Laporan Barang Milik Negara yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

### a. Ringkasan Laporan Barang

#### 1) Tanah

Saldo Tanah pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2013 sebesar Rp. **449.596.863.669,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. **488.149.713.669,-** mutasi kurang Rp. **38.552.850.000,-**

#### 2) Peralatan dan Mesin

Saldo BMN berupa Peralatan dan Mesin Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2013 sebesar Rp. **2.206.958.989.377,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. **1.261.339.647.514,-** mutasi tambah Rp. **1.203.387.652.778,-** dan mutasi kurang Rp. **257.768.310.915,-**

#### 3) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2013 sebesar Rp. **640.161.474.590,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. **357.541.529.471,-** mutasi tambah Rp. **399.112.485.005,-** dan mutasi kurang Rp. **116.492.539.886,-**

#### 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2013 sebesar Rp. **1.330.964.141.599,-**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo

awal **Rp. 924.948.038.161,-** mutasi tambah **Rp. 718.467.576.251,-** dan mutasi kurang **Rp. 312.451.472.813,-**

5) Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo aset tetap dalam renovasi pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2013 sebesar **Rp. 288.328.929.344,-**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 144.994.305.572,-** mutasi tambah **Rp. 169.003.404.064,-** mutasi kurang **Rp. 25.668.780.292,-**.

6) Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2013 sebesar **Rp. 22.232.557.249,-**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 23.640.961.249,-** mutasi kurang terdiri dari transfer keluar **Rp. 1.384.164.000,-** dan reklasifikasi keluar **Rp. 24.240.000,-**.

7) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Disamping konstruksi dalam pengerjaan yang tertuang dalam Laporan BMN pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2013 **Rp. 3.795.737.223.672,-**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 3.702.230.439.810,-** mutasi tambah **Rp. 2.159.745.426.832,-** mutasi kurang **Rp. 2.066.238.642.970,-**.

8) Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2013 sebesar **Rp. 463.246.200.429,-**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal **Rp. 372.284.176.047,-** mutasi tambah **Rp. 101.427.506.882,-** dan mutasi kurang **Rp. 10.124.898.500,-**.

9) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah adalah aset-aset yang sudah dikeluarkan dari pencatatan sebagai aset definitif karena sudah tidak digunakan lagi oleh pemerintah atau sudah diserahkan pengoperasionalnnya kepada pihak lain, dan sedang diproses untuk penghapusan, penetapan status penggunaan dan atau hibah.

Saldo aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat per 31 Desember 2013 sebesar **Rp. 1.904.808.357.264,-** menurun dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar **Rp. 2.063.458.657.948,-**.

10) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2013 adalah senilai **Rp.**

**1.324.097.428.704,-** terdiri dari:

a) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 654.426.682.562,-
b) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 61.191.172.573,-
c) Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	Rp. 64.341.063.807,-
d) Akumulasi Penyusutan Irigasi	Rp. 63.305.065.638,-
e) Akumulasi Penyusutan Jaringan	Rp. 185.844.793,-
f) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya	Rp. 205.764.208,-
g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya	Rp. 15.000.000,-
h) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	Rp. 482.666.833.986,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.326.337.427.567,-</b>

11) Persediaan

Saldo persediaan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat per 31 Desember 2013 sebesar **Rp. 56.397.918.563,-** terjadi kenaikan dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar **Rp. 7.673.163.505,-**. Yang terdiri dari:

a) Barang Konsumsi	Rp. 664.391.669,-
b) Bahan untuk Pemeliharaan	Rp. 10.114.493,-
c) Suku Cadang	Rp. 1.689.000,-
d) Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	Rp. 5.817.300.192,-
e) Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	Rp. 501.423.000,-
f) Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan ke Masyarakat	Rp. 672.650.000,-
g) Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat	Rp. 8.732.248.000,-
h) Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	Rp. 37.335.255.000,-
i) Bahan Baku	Rp. 7.785.709,-
j) Persediaan Lainnya	Rp. 2.658.061.500,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 56.397.918.563,-</b>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Neraca per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1. Neraca per 31 Desember 2013**

Uraian	Jumlah
Barang Konsumsi	Rp 661.391.669
Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 10.114.493
Suku Cadang	Rp 1.689.000
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp 5.817.300.192
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp 501.423.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp 672.650.000
Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp 8.732.248.000
Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp 37.335.255.000
Bahan Baku	Rp 7.785.709
Persediaan Lainnya	Rp 2.658.061.500
Tanah	Rp 449.596.863.669
Peralatan dan Mesin	Rp 2.206.958.989.377
Gedung dan Bangunan	Rp 640.161.474.590
Jalan dan Jembatan	Rp 924.845.021.718
Irigasi	Rp 402.590.999.168
Jaringan	Rp 3.528.120.713
Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 288.328.929.344
Aset Tetap Lainnya	Rp 22.232.557.249
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 3.795.737.223.672
Paten	Rp 23.167.000
Software	Rp 1.932.059.000
Hasil Kajian/Penelitian	Rp 72.828.096.600
Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 388.804.461.829
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Rp -
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	Rp 1.904.808.357.264
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 11.158.774.239.756</b>

Sumber : Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat – 2013.

b. Satker yang sudah mengusulkan Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahun 2013 untuk pekerjaan T.A 2012 dan 2013, adalah sebagai berikut :

1) Program LLAJ terdapat 31 Satker yang telah mengusulkan serah terima sebagai berikut :

a) Satker Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Standarisasi Perencanaan Jaringan Transportasi Jalan
- Pengawasan Operasional dan Keperintisan Angkutan LLAJ
- Pengembangan Fasilitas LLAJ

- b) Satker Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat
  - c) Satker Bina Sistem Transportasi Perkotaan
  - d) Satker Pengembangan LLAJ NAD
  - e) Satker Pengembangan LLAJ Sumatera Barat
  - f) Satker Pengembangan LLAJ Kepulauan Riau
  - g) Satker Pengembangan LLAJ Jambi
  - h) Satker Pengembangan LLAJ Sumatera Selatan
  - i) Satker Pengembangan LLAJ Bengkulu
  - j) Satker Pengembangan LLAJ Banten
  - k) Satker Pengembangan LLAJ Lampung
  - l) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Barat
  - m) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah
  - n) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Timur
  - o) Satker Pengembangan LLAJ Bali
  - p) Satker Pengembangan LLAJ Nusa Tenggara Barat
  - q) Satker Pengembangan LLAJ Nusa Tenggara Timur
  - r) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Barat
  - s) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Tengah
  - t) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Timur
  - u) Satker Pengembangan LLAJ Gorontalo
  - v) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah
  - w) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tenggara
  - x) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Selatan
  - y) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Barat
  - z) Satker Pengembangan LLAJ Maluku
  - å) Satker Pengembangan LLAJ Maluku Utara
  - ä) Satker Pengembangan LLAJ Papua
  - ö) Balai LLAJSDP Jambi
  - aa) Balai LLAJSDP Denpasar
  - bb) Balai LLAJSDP Palu
- 2) Program LLASDP terdapat 24 Satker yang telah mengusulkan serah terima sebagai berikut :
- a) Satker Direktorat LLASDP
  - b) Satker Pengembangan LLASDP NAD

- c) Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Utara
- d) Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Barat
- e) Satker Pengembangan LLASDP Riau
- f) Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Selatan
- g) Satker Pengembangan LLASDP Bengkulu
- h) Satker Pengembangan LLASDP Lampung
- i) Satker Pengembangan LLASDP Jawa Tengah
- j) Satker Pengembangan LLASDP Daerah Istimewa Yogyakarta
- k) Satker Pengembangan LLASDP Jawa Timur
- l) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Tengah
- m) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Selatan
- n) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara
- o) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Tengah
- p) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Tenggara
- q) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Selatan
- r) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Barat
- s) Satker Pengembangan LLASDP Maluku
- t) Satker Pengembangan Sarana LLASDP Maluku
- u) Satker Pengembangan LLASDP Maluku Utara
- v) Satker Pengembangan LLASDP Papua Barat
- w) Kantor OPP Pelabuhan penyeberangan Merak
- x) Kantor OPP Pelabuhan penyeberangan Pagimana

### 3. Verifikasi dan Akuntansi

- a. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan anggaran, Usulan calon pengelola anggaran dan proses tindak lanjut LHA yang dilakukan oleh instansi/Badan Pemeriksa/Pengawas Keuangan Negara, secara rinci meliputi kegiatan:
  - 1) Menyiapkan Rencana Jaringan Kerja (*Network Planning*), Bagan Balok (*Barchart*) dan Kurva S, Sub. Sektor Transportasi Darat;
  - 2) Meneliti dan mengevaluasi Usulan Calon Pengelola Anggaran di lingkungan Sub. Sektor Transportasi Darat meliputi: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran;

- 3) Meneliti dan memverifikasi serta mengevaluasi data dukung tindak lanjut Laporan Hasil Audit Badan/Instansi Pemeriksa dan menyiapkan surat kepada KPA Satker baik Surat Teguran maupun pengembalian Indikasi Kerugian Negara (TGR);
  - 4) Meneliti/memverifikasi dan mengevaluasi Surat Sanggahan Banding maupun Surat Pengaduan dari Peserta Lelang/LSM.
- b. Pembahasan Usulan Calon Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2013
- 1) Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (SATKER) meliputi:
    - Program LLAJ : 34 Satuan Kerja
    - Program LLASDP : 35 Satuan Kerja
    - Balai / UPT / Kantor Pusat : 13 satuan Kerja
  - 2) Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima/pengeluaran UPT meliputi:
    - a) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
    - b) UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
      - (1) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
      - (2) Pelabuhan Penyeberangan Kariangau
      - (3) Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo
      - (4) Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi
      - (5) Balai LLAJSDP Jambi di Jambi
      - (6) Balai LLAJSDP Denpasar di Bali
      - (7) Balai LLAJSDP Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah
      - (8) Balai LLAJSDP Palu di Provinsi Sulawesi Tengah
      - (9) Kantor OPP Pelabuhan Penyeberangan Merak di Provinsi Banten
      - (10) Kantor OPP Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Provinsi Bali
      - (11) Kantor OPP Pelabuhan Penyeberangan Lembar di Provinsi Nusa Tenggara Barat
      - (12) Kantor OPP Pelabuhan Penyeberangan Pagimana di Provinsi Sulawesi Tengah
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan
- 1) ITJEN
 

Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2013 sebanyak 88 temuan dengan indikasi kerugian negara sebesar **Rp. 1.119.385.735,-** dengan perincian sebagai berikut:

- a) Status tuntas sebanyak 21 temuan dan telah disetorkan ke Kas Negara sebesar **Rp. 53.640.000,-**
- b) Status Proses sebanyak 35 temuan dari 9 Satker, terdiri dari:
- |  |          |
|--|----------|
| (1) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Timur                                    | 1 temuan |
| (2) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah                               | 5 temuan |
| (3) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Tengah                             | 4 temuan |
| (4) Satker Pengembangan LLAJ Maluku Utara                                  | 4 temuan |
| (5) Satker Pengembangan LLASDP Papua                                       | 4 temuan |
| (6) Satker Pengembangan LLASDP Jambi                                       | 1 temuan |
| (7) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Tengah                           | 1 temuan |
| (8) Satker Pengembangan Sarana LLASDP Maluku                               | 8 temuan |
| (9) Satker UPT Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Kariangau Kalimantan Timur | 7 temuan |
- c) Status sisa sebanyak 32 temuan hal ini disebabkan belum adanya tanggapan dari satker yang bersangkutan dan indikasi Kerugian Negara sebesar **Rp.1.065.745.735,-** terdiri dari:
- |  |           |
|--|-----------|
| (1) Satker Direktorat Keselamatan Transportasi Darat | 6 temuan  |
| (2) Satker Pengembangan Transportasi SDP             | 6 temuan  |
| (3) Satker Direktorat LLAJ                           | 11 temuan |
| (4) Satker Balai LLAJSDP Jambi                       | 4 temuan  |
| (5) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tenggara       | 5 temuan  |

## C. BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA

### 1. Bidang Peraturan Perundang-undangan.

Pada Tahun 2013 untuk Peraturan Perundang-Undangan di Sub Sektor Perhubungan Darat yang telah ditetapkan, meliputi :

#### a. Peraturan Pemerintah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ.

#### b. Peraturan Menteri Perhubungan :

##### 1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan :

- a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal Pada Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)

- b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

2) **Bidang LLASDP :**

- a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi.

**c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat :**

1) **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :**

- a) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 1493/AJ.108/DRJD/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
- b) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 3360/AJ.401/DRJD/2013 tentang Pengaturan Lalu Lintas Yang Bersifat Perintah, Larangan, Peringatan Dan Petunjuk Di Jalan Tol Tangerang – Merak
- c) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 4409/PR.301/DRJD/2013 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Pada Trayek Antar Kota Antar Provinsi
- d) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 5632/AJ.401/DRJD/2013 tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah, Larangan, Peringatan dan Petunjuk di Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa
- e) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 5897/AJ.402/DRJD/2013 tentang Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang dan Uji Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru
- f) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 6100/PL.201/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Status Penggunaan dan Hibah Barang Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- g) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 6172/PL.201/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Serah Terima Hasil Kegiatan Barang Milik Negara (BMN) Untuk Dipergunakan Dalam Tugas Operasional Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- h) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 6140/PL.201/DRJD/2013 tentang Petunjuk Pelaksana Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) Pada BUMN di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- i) Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 6790/KP.801/DRJD/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- 2) **Bidang Lalu Lintas Angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan :**
  - a) Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK. 5234/KP.108/DRJD/2012 tentang Kompetensi Inspektur Sungai dan Danau

**d. Kegiatan yang dilaksanakan (berkelanjutan) :**

- 1) **Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan**
  - a) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
    - (1) RPP tentang Angkutan Jalan;
    - (2) RPP tentang Dampak Lingkungan LLAJ
    - (3) RPP tentang Keamanan dan Keselamatan LLAJ;
    - (4) RPP tentang Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ;
    - (5) RPP tentang Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ.
  - b) Rancangan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :
    - (1) RPM tentang Analisis Dampak Lingkungan
    - (2) RPM tentang Marka Jalan
    - (3) RPM tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan
    - (4) RPM tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
    - (5) RPM tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
    - (6) RPM tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
    - (7) RPM tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
    - (8) RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
    - (9) RPM tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    - (10) RPM tentang Manajemen Batas Kecepatan
    - (11) RPM tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
    - (12) RPM tentang Angkutan Taxi

- (13)RPM tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Perkotaan
  - (14)RPM tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - (15)Rpm tentang persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikasi analisis dampak lalu lintas.
  - (16)RPM tentang tata cara pelaksanaan pembatasan ruang parkir.
  - (17)RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum;
  - (18)RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - (19)RPM tentang Tarif Penumpang;
- c) Rancangan Peraturan Dirjen sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri yang berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :
- (1) RPD tentang Zona Selamat Sekolah
  - (2) RPD tentang pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, peringatan, dan petunjuk pada jalan tol jorr w2 utara seksi kebon jeruk – ciledug
  - (3) RPD tentang pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, peringatan, dan petunjuk pada jalan tol Palimanan – Kanci
  - (4) RPD tentang pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, peringatan, dan petunjuk pada jalan nasional ruas Cikampek - Subang
  - (5) RPD tentang Angkutan Barang Berbahaya
  - (6) RPD tentang Kendaraan Listrik di Jalan;
  - (7) RPD tentang Wahana Tata Nugraha
- d) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagai pelaksana UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sedangkan untuk penyusunan Peraturan pemerintah sudah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah maka perlu disusun Peraturan Menteri dan peraturan Dirjen antara lain :
- (1) Rancangan Peraturan Menteri :
    - (a) RPM Tentang Pelabuhan yang di gunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
    - (b) RPM tentang standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan.
    - (c) RPM tentang subsidi angkutan di perairan.

(2) Rancangan Peraturan Dirjen :

- (a) RPD tentang Alur Pelayaran dan Lalu Lintas Sungai dan Danau;
- (b) RPD tentang Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan;

Dengan telah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Sedangkan Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang LLAJ direncanakan akan disusun 12 Rancangan Peraturan Pemerintah menjadi 8 Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut diatas untuk posisi masing-masing RPP antara lain :

**Tabel II.2. Posisi Rancangan Peraturan Pemerintah  
Sebagai Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ**

No.	JUDUL RPP	POSISI SAAT INI	KETERANGAN
1.	RPP Dampak Lingkungan LLAJ	Kelompok Kerja (Perhubungan, PU, Polri, Ristek, dan Perindustrian)	Masih dalam pembahasan secara rutin yang dilakukan di Kementerian Perhubungan.
2.	RPP Keamanan dan Keselamatan LLAJ	idem	idem
3.	RPP Angkutan	idem	idem
4.	RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ	idem	idem
5.	RPP Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ	Kementerian Perindustrian dan Kementerian riset dan teknologi.	Menunggu Draft dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian riset dan teknologi

Sumber : *Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen Hubdat – 2013.*

Untuk penelaahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Transportasi Darat, Bagian Hukum juga melaksanakan kegiatan Asistensi PERDA dan Raperda yang berkaitan dengan Ditjen Perhubungan Darat dari seluruh Indonesia dimana kegiatannya berkelanjutan.

**2. Pelaksanaan dokumentasi dan bantuan hukum.**

Bagian Hukum juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum serta pertimbangan hukum, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut :

**a. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain :**

- 1) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dibidang LLAJ dan LLASDP dilaksanakan di 2 (dua) kota yaitu Kota Batam (Kepulauan Riau) dan Bogor (Jawa Barat), yang dihadiri oleh Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi

Terkait lainnya. Adapun penyuluhan peraturan perundang-undangan yang dilakukan antara lain :

- a) Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b) Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan;
  - c) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan;
  - e) Peraturan Menteri Nomor PM. 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.
  - f) Peraturan Menteri Nomor PM. 52 Tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau.
- 2) Pemberian Bantuan dan Pertimbangan Hukum Dalam Perkara
- Pertimbangan hukum diberikan dalam rangka permasalahan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas surat-surat sanggahan, pengaduan masyarakat, ataupun permasalahan teknis lainnya yang memerlukan tanggapan dan jawaban yang memerlukan dukungan pertimbangan dan kajian dari sisi legal atau peraturan perundangan yang berlaku. Berikut pemberian bantuan dan pertimbangan hukum dalam perkara :
- a) Penanganan Kasus Perkara Perdata No. No.131/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM yang diajukan Agus Lasmono Dkk (eks pegawai Perum Damri Kantor Cabang Surabaya) .
  - b) Penanganan Kasus Gugatan Perkara Perdata eks pegawai Perum Damri Kantor cabang Semarang;
  - c) Penanganan Kontrak pengadaan 100 unit bus tempel BBG antara Pemimpin Bagian Proyek Pengadaan Bus, Ditjen Perhubungan Darat dengan Presiden Direktur PT. Insan Gaya Wira.
  - d) Penanganan Permasalahan Bantuan Bus PKPS Tahun 2002-2003 di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT;
  - e) Bantuan hukum terhadap saksi dalam kecelakaan Kereta Api dengan truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Senin tanggal 09 Desember 2013 di Perlintasan Rel Kereta Api di Jl. Bintaro Permai Raya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan pesanggrahan, Jakarta Selatan.

3) Kegiatan yang sedang dilaksanakan (berkelanjutan)

Pemberian bantuan hukum :

- a) Penanganan Kasus Perkara Perdata No. No.131/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM yang diajukan Agus Lasmono Dkk (eks pegawai Perum Damri Kantor Cabang Surabaya) .
- b) Penanganan Kasus Gugatan Perkara Perdata eks pegawai Perum Damri Kantor cabang Semarang;
- c) Penanganan Kontrak pengadaan 100 unit bus tempel BBG antara Pemimpin Bagian Proyek Pengadaan Bus, Ditjen Perhubungan Darat dengan Presiden Direktur PT. Insan Gaya Wira.
- d) Penanganan Permasalahan Bantuan Bus PKPS Tahun 2002-2003 di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT;
- e) Bantuan hukum terhadap saksi dalam kecelakaan Kereta Api dengan truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Senin tanggal 09 Desember 2013 di Perlintasan Rel Kereta Api di Jl. Bintaro Permai Raya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Hambatan yang dialami oleh bagian hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum maupun penyusunan peraturan masih perlu dukungan peningkatan kualitas SDM yang dapat melakukan penanganan kasus-kasus yang ada dilingkungan Ditjen Hubdat, serta dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan penelaahan peraturan perundangan di mana memerlukan kecermatan, ketelitian serta kemampuan dalam penguasaan penerapan peraturan perundangan dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut. Upaya yang dilakukan oleh bagian hukum yaitu perlunya peningkatan potensi SDM melalui Diklat/kursus di bidang bantuan hukum, bidang penyusunan maupun kursus-kursus lain yang berkaitan dengan bidang Hukum secara berkelanjutan.

**b. Data kesepakatan bersama di bidang transportasi darat :**

Data Perjanjian, MoU, antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait Tahun 2013 :

**Tabel II.3. MoU Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah**

Kesepakatan Bersama	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku
Pembayaran Biaya Operasional Kapal Penyeberangan PT. Indonesia Ferry (Persero) Pada Lintas Tenggarong Kota – Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jakarta, 5 April 2013	5 Tahun

Sumber : *Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen Hubdat – 2013.*

### 3. Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri

Kegiatan Humas dan Kerjasama Luar Negeri merupakan bidang tugas Sub Bagian Humas dan Kerjasama Luar Negeri. Beberapa kegiatan Humas dan Kerjasama Luar Negeri yang telah dilaksanakan tahun 2013 yang berhubungan dengan kegiatan Peliputan dan Dokumentasi antara lain kegiatan Dokumentasi, jumpa pers/siaran pers, pameran/visualisasi, langganan koran untuk keperluan kliping dan penerbitan *newsletter* infoHUBDAT.

#### a. Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan Publikasi

##### 1) Dokumentasi (127 kegiatan)

###### Januari ( 3 kegiatan )

- a) Silaturahmi Staf dan Menteri Perhubungan, Jakarta, 2 Januari 2013;
- b) Peninjauan Lokasi Pengerukan Tanah BPLJSKB , Bekasi, 26 Januari 2013;
- c) Pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Jakarta, 8 Januari 2013;

###### Februari ( 8 kegiatan)

- a) Peninjauan Galangan Kapal PT. Sarana Segara Indonesia oleh Wamenhub dan Dirjen Perhubungan Darat, Bangkalan, 1 Februari 2013;
- b) Badminton bersama di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Jakarta, 15 Februari 2013;
- c) Peresmian pool baru Taxi Borobudur, Jakarta, 16 Februari 2013;
- d) Diskusi Nasional Perihal Kemacetan di Kota Manado, 19 Februari 2013;
- e) Kunjungan Kerja Wamenhub dan Dirjen Perhubungan Darat ke Surabaya dan Lamongan, 19 Februari 2013;
- f) Pressbackground Angkutan Perkotaan, Jakarta, 20 Februari 2013;
- g) Family Gathering Direktorat LLAJ, Bogor, 23-24 Februari 2013;
- h) Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat se-Kalimantan, Banjarmasin, 25-27 Februari 2013.

###### Maret (3 kegiatan)

- a) Penyerahan Hadiah Perjalanan Umroh bagi Pegawai yang akan memasuki masa purnabhakti, Jakarta, 4 Maret 2013;
- b) Presentasi Master Plan Transportasi Jabodetabek, 4 Maret 2013;
- c) Pembekalan Satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat , Jakarta, 14 Maret 2013;

###### April (12 kegiatan)

- a) Rapat Persiapan Angkutan Lebaran 2013, Jakarta, 1 April 2013;

- b) Pressbackground WTN, Jakarta, 2 April 2013;
- c) Rapat Jabodetabek dengan PU, 2 April 2013
- d) Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembayaran Operasional Penyeberangan Lintas Tenggarong Kota-Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 3 april 2013;
- e) Pembukaan Diklat Barjas, 9 April 2013;
- f) Semiloka MRL di Bali, 9 April 2013;
- g) Acara Sosialisasi Keselamatan di medan, 10 April 2013;
- h) Press Background Paciran\_Millenium, 10 April 2013;
- i) Pelepasan JATRA 3 Paciran, Jawa Timur, 19 April 2013;
- j) Peringatan Hari Kartini di kementerian perhubungan, 26 April 2013;
- k) Rapat Persiapan Angkutan Lebaran, 26 April 2013;
- l) Peresmian Pelabuhan Paciran, Lamongan, 29 April 2013.

**Mei (11 kegiatan)**

- a) acara akap di puncak KTD, 1 Mei 2013;
- b) Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang LLASDP, Batam, 2 Mei 2013;
- c) Sosialisasi Kenaikan BBM, 6 Mei 2013;
- d) Penyerahan Penghargaan WTN 2013, 6 Mei 2013;
- e) Sosialisasi DAK, 14 Mei 2013;
- f) Acara Workshop BSTP, Batam, 15 Mei 2013;
- g) acara KTD menghadiri harley davidson, 19 Mei 2013;
- h) BIMP-EAGA, Solo, 21 Mei 2013;
- i) Sosialisasi Jembatan Timbang, 24 Mei 2013;
- j) Tinjauan Pantura Wamen, 27 Mei 2013;
- k) Rakernis PPNS Batam, 30 Mei 2013.

**Juni (15 kegiatan)**

- a) Kontijensi P4GN Banjarmasin, 4-5 Juni 2013;
- b) Peresmian Kapal PortLink Merak, 10 Juni 2013;
- c) Lokakarya Wartawan Phbngn 2013, solo jogja, 13-15Juni 2013
- d) Pembukaan Lokakarya Wartawan Perhubungan, 13Juni 2013
- e) Penegakan Hukum LLAJ di Jawa Tengah, 17-21 Juni 2013
- f) Rakor Angleb se-JABAR, Karawang, 17Juni2013
- g) Acara Persiapan Angkutan Lebaran Jawa Tengah, 19 Juni 2013

- h) Pertemuan PKB Pekanbaru, 19 Juni 2013
- i) Acara Pembinaan Kepala Terminal di Semarang, 20 Juni 2013
- j) Pekan Penegakan Hukum, di Rembang, 20 Juni 2013
- k) Pelantikan Pejabat Eselon 3&4, 21 Juni 2013
- l) Acara Penempelan Stiker Pemantul Cahaya BLLAJSDP Denpasar, 24 Juni 2013
- m) Sosialisasi LLAJ Bogor Hotel Royal, 25 Juni 2013,
- n) Rapat Angkutan Lebaran, 26 Juni 2013
- o) Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran, 26 Juni 2013

**Juli (14 kegiatan)**

- a) Rakor Angleb Sumsel & Survey Jalintim Sumatera, 1 Juli 2013;
- b) Penegakkan hukum dalop, 3 Juli 2013;
- c) Halal bi Halal LLAJ, 8 Juli 2013;
- d) Pembukaan pendaftaran mudik gratis darat, 16 Juli 2013;
- e) Tinjauan Pantura Menhub, 17 Juli 2013;
- f) Peninjauan Jalur Pantura, Cikampek, Jawa Barat, 26 Juli 2013;
- g) Tinjauan Jalur Selatan\_Nagrek\_Gentong, 26 Juli 2013;
- h) Dirjen Tinjau Tempat Pendaftaran Mudik Gratis Motor 2013\_Kemenhub, 27 Juli 2013;
- i) Gelar Pasukan Kesiapan Angkutan Lebaran 2013, Jawa Barat, 27 Juli 2013;
- j) Wamen dan Direktur LLAJ Uji Coba Jalur Sepeda Motor, Karawang, 28 Juli 2013;
- k) Pembagian Peta Jalur Mudik, 30 Juli 2013;
- l) Pressbackground Angkutan Lebaran, 30 Juli 2013;
- m) Pelepasan Tim Mudik tvOne, 31 Juli 2013;
- n) Buka Bersama dan Silaturahmi dengan Mitra Kerja Subdit Lalin, 31 Juli 2013.

**Agustus (21 kegiatan)**

- a) Apel Siaga Posko Angleb, 1 Agustus 2013;
- b) Loading Motor ke Truk\_Mudik Gratis Kemenhub, 1 Agustus 2013;
- c) Pelepasan Mudik BRI, 1 Agustus 2013;
- d) Pelepasan Mudik Jasaraharja, 1 Agustus 2013;
- e) Syuting Bukan 4 Mata\_Tukul\_Trans 7, 1 Agustus 2013;
- f) Pelepasan Mudik BNI, 2 Agustus 2013;
- g) Pelepasan Mudik Gratis\_Motor diangkut Truk, 2 Agustus 2013;
- h) Pelepasan Mudik Sido Muncul, 2 Agustus 2013;
- i) Pelepasan Mudik Gratis Perhubungan ASDP, 3 Agustus 2013;

- j) Pelepasan Mudik Gratis Perhubungan Darat oleh Wamen, Dirjen dan Direktur LLAJ, 3 Agustus 2013;
- k) Kunjungan Presiden dan Wapres ke Posko Angkutan Lebaran Terpadu, Ruang Nanggala, 4 Agustus 2013;
- l) Pelepasan Mudik Gratis Astra Honda Sunter oleh Dirjen Perhubungan Darat, 4 Agustus 2013;
- m) Peninjauan Arus Balik di Jawa Tengah, 10 Agustus 2013;
- n) Kunjungan Menhub ke Posko Angkutan Lebaran, 12 Agustus 2013;
- o) Tempat pendaftaran Mudik Gratis diliput Live Kompas TV, 16 Agustus 2013;
- p) Penutupan Posko Angleb 2013 dan Halal Bi Halal Menhub, 20 Agustus 2013;
- q) Peninjauan Lokasi Kecelakaan Bus Giri Indah, 21 Agustus 2013;
- r) Peresmian Angkutan Pemandu Moda Bandara Sam Ratulangi, Manado, 26 Agustus 2013;
- s) Peletakan Batu Pertama Pembangunan Terminal Liwas- Manado, 27 Agustus 2013;
- t) Workshop SMK\_Keselamatan Transportasi Darat, 27 Agustus 2013;
- u) Talkshow di televisi, narasumber Dir. BSTP, 29 Agustus 2013;

**September (12 kegiatan)**

- a) Silaturahmi Puskom, 2 September 2013;
- b) latihan senam flash mob, 4 September 2013;
- c) RPP Angkutan, 5 September 2013;
- d) Siraturahmi dirjen dgn pensiunan, 8 September 2013;
- e) Semiloka Ilaj po.angkutan dan perusahaan angkutan barang, 9 September 2013;
- f) pengujian, 11 September 2013;
- g) Pembukaan AKUT, 12 September 2013;
- h) Pembukaan PPKBT, 13 September 2013;
- i) Harhubnas, 17 September 2013;
- j) Rakernis Angkutan Jalan 2013, 24 September 2013;
- k) Seminar ITS Hotel Borobudur\_BSTP, 25 September 2013;
- l) Rakornis Pengujian Kendaraan Bermotor, Palu, 26 September 2013;

**Oktober (10 kegiatan)**

- a) Rakornis Phb Darat\_Surabaya, 3 Oktober 2013;
- b) Forum Transit ke\_7\_Solo, 10 Oktober 2013;
- c) Peresmian Kapal DLU, Dermaga Indah Kiat, 18 Oktober 2013;

- d) Pembukaan Pelajar Pelopor Keselamatan, 21 Oktober 2013;
- e) Kunjungan Bantaeng\_Sulsel, 24 Oktober 2013;
- f) Pertemuan Satker LLAJ ASDP Se Sumatera, 24 Oktober 2013;
- g) Manajemen SMK\_Surabaya, 28 Oktober 2013;
- h) RPP Angkutan\_RedTop hotel, 29 Oktober 2013;
- i) Sosialisasi Pengadaan Tanah\_Singosari, 29 Oktober 2013;
- j) Silaturahmi Dirjen dgn Pensiunan\_Nanggala, 30 Oktober 2013.

**November (8 kegiatan)**

- a) Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ, 7 November 2013;
- b) Rakornis Angkutan Penyeberangan, 7 November 2013;
- c) Bimtek Trans Perkotaan\_Medan, 14 November 2013;
- d) FGD\_Angkt\_Sungai\_Danau, 19 November 2013;
- e) FGD\_GrandDesign\_PerhubunganDarat, 20 November 2013;
- f) Rapat BSTP dengan Dishub, 20 November 2013;
- g) Diskusi Penyeberangan Perintis, 26 November 2013;
- h) Peresmian Kapal Timika, 28 November 2013.

**Desember (10 kegiatan)**

- a) Sosialisasi Kampanye Anti Narkoba, Jakarta, 3 Desember 2013;
- b) Pembentukan Paguyuban Pensiunan Hubdat, Jakarta, 8 Desember 2013;
- c) HUT Dharma Wanita Persatuan Kementerian Perhubungan, 10 Desember 2013;
- d) Rapat Kerja Kemenhub, 10 Desember 2013;
- e) Jumpa Pers Akhir Tahun, 11 Desember 2013;
- f) Peresmian Tanjung Api-Api, 11 Desember 2013;
- g) Pressbackgorund Angkutan Natal, 16 Desember 2013;
- h) Penghargaan POTerbaik, 20 Desember 2013;
- i) Peresmian Pengoprasi Kapal Perintis KM.SABUK NUSANTARA 38 serta Penyerahan Bus Perintis ke Sulawesi Utara oleh Menhub , 23 Desember 2013;
- j) Menhub Kunjungi PoskoNatal, 24 Desember 2013.

**2) Jumpa Pers/Siaran Pers**

Pada tahun 2013 telah dilakukan Jumpa Pers sebanyak 5 kali, dengan keterangan sebagai berikut :

- a) Jumpa Pers terkait Penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan Pemberian Bus Bantuan, Jakarta, 6 Mei 2013;

- b) Jumpa Pers tentang Antisipasi Sektor Transportasi Terhadap Kenaikan BBM, Jakarta, 13 Juni 2013;
- c) Jumpa Pers Mudik Gratis, Jakarta, 18 Juli 2013;
- d) Jumpa Pers Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2013 Antar Stakeholder, Jakarta, 26 Juni 2013;
- e) Jumpa Pers Sosialisasi Peta Jalur Mudik di Bundaran HI, Jakarta, 30 Juli 2013.

### 3) Liputan Pers

Pada tahun 2013 telah dilakukan Liputan Pers sebanyak 4 kali, dengan keterangan sebagai berikut :

- a) Liputan Pers ke Balai LLAJSDP Palangkaraya,
- b) Liputan Pers ke Balai LLAJSDP Denpasar,
- c) Liputan Pers ke Balai LLAJSDP Palu,
- d) Liputan Pers ke Balai LLAJSDP Jambi,

### 4) Langgan Koran

Humas Ditjen Hubdat berlangganan 16 media cetak harian nasional maupun lokal sebagai bahan kliping berita harian dengan daftar sebagai berikut :

- a) Kompas
- b) Seputar Indonesia (Sindo)
- c) Pos Kota
- d) Rakyat Merdeka
- e) Pelita
- f) Terbit
- g) Warta Kota
- h) Media Indonesia
- i) Suara Karya
- j) Koran Tempo
- k) Suara Pembaruan
- l) Indopos
- m) Republika
- n) Bisnis Indonesia
- o) Pikiran Rakyat
- p) Sinar Harapan

## 5) Penerbitan News Letter

*Newsletter* infoHuBDAT terbit berkala setiap triwulan, di tahun 2013 telah terbit 4 edisi sebagai berikut :

- a) InfoHUBDAT Edisi Maret 2013 (tema cover : Balai LLAJSDP Jembatan Koordinasi Pusat dan Daerah);
- b) InfoHUBDAT Edisi Juni 2013 (tema cover : Wahana Tata Nugraha, Stimulan Pelayanan Transportasi Perkotaan);
- c) InfoHUBDAT Edisi September 2013 (tema cover : Evaluasi Angkutan Lebaran 2013, Menhub : Sudah Lebih Baik, Namun Tetap Butuh Perbaikan);
- d) InfoHUBDAT Edisi Desember 2013 (tema cover : Dukungan Nyata Pemerintah Terhadap Pelayanan Angkutan Umum).



**Gambar II.1. Pelantikan Pejabat Eselon 3 & 4 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat pada tanggal 8 Januari 2013**



**Gambar II.2. Press Background Angkutan Perkotaan**



**Gambar II.3. Pembekalan Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat**



**Gambar II.4. Peresmian Pelabuhan Penyeberangan Paciran, Lamongan**



**Gambar II.5. Penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha**



**Gambar II.6. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu 2013**



**Gambar II.7. Peninjauan Jalur Nagrek**



**Gambar II.8. Kunjungan Presiden SBY ke Posko Angkutan Lebaran Terpadu**



**Gambar II.9. Peringatan Hari Perhubungan Nasional**



Gambar II.10. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2013

6) Daftar Rekapitulasi Kegiatan KSLN Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2013

Tabel II.4. Kegiatan KSLN Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2013

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Wakil Hubdat
1	Strategic Planning Meeting and SOM 2013 BIMP-EAGA	Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia	Ahmadi ZB
2	ASEAN-Korea Capacity Building Program	Korea Selatan 17 s/d 26 Februari 2013	Felix Iryantomo, ATD (BSTP)
3	The 17 <sup>th</sup> Meeting of the ACCSQ APWG and 10 <sup>th</sup> TF on Automotive MRA Meeting	Luangprabang, Lao PDR 26-28 Februari 2013	1. M. Malawat (LLAJ) 2. Riza Faisal (Setditjen) 3. Yoga Sari Saputra (BPLJSKB)
4	The Second Working Group Meeting on the Implementation of Strategic Plan for China ASEAN Transport Cooperation	Guilin, China 18 s.d 22 Maret 2013	1. I Made Suartika (LLAJ) 2. Farida Makhmudah (Setditjen) 3. Lukman Al Amin (LLASDP)
5	Global Road Safety Partnership (GRSP) Economic and Social Commission Assessment Program Workshop	Manila, Filipina 2-4 April 2013	1. Sari Catur Lestari (KTD) 2. Zaenal Arifin (Setditjen) 3. Azlian Rekayeni (BSTP)
6	1st Expert Group Meetig on Finalization of ASEAN Cross Border Transport of Passenger & the 25th ASEAN TFWG	Langkawi, Malaysia 21-26 April 2013	1. Ahmad Wahyudi (LLAJ) 2. Yusuf Nugroho (LLAJ) 3. Rio Susatyo (setditjen)
7	Indonesia Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum dan the 7th Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum	Bali, Indonesia 21-26 April 2013	1. Djoko Sasono (BSTP) 2. Karlo Manik (BSTP) 3. Tri Yuli Andaru ( KTD) 4. Farida Makhmudah (Setditjen) 5. Koesbiyantoro (Setditjen) 6. Aria Tribrata (Setditjen) 7. Desi Waluyanti (LLAJ)
8	Senior Officials Meeting United Nations Asia Road Safety Seminar for Asia and Pacific (UNESCAP)	Bangkok, Thailand 25 s.d 28 April 2013	1. Sugianto (Setditjen) 2. Suhendro Wagiono (LLAJ)
9	Eleventh Meeting of the Conference of the Parties (COP 11) Konvensi Basel	Jenewa, Swiss 28 April s.d 10 Mei 2013	Ahmadi ZB (LLAJ)

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Wakil Hubdat
10	<i>Australia-Indonesia Transport Safety and Security Forum dan ITSAP Project Review Group (PRG)</i>	Canberra, Australia 1-2 Mei 2013	1. Hotma Simanjuntak (KTD) 2. Eddy Gunawan (KTD) 3. Koesbiyantoro (Setditjen) 4. Y. Prihantoko (KTD)
11	<i>Expert Group Meeting on Progress in Road Safety Improvement in Asia and the Pacific</i>	Seoul, Korea Selatan 8 s.d 11 Mei 2013	Jonter Sitohang (KTD)
12	<i>the 4<sup>th</sup> MRSSWG Meeting, 12<sup>th</sup> AHSWG Meeting and 22<sup>nd</sup> LTWG Meeting</i>	Vientiane, Lao PDR 14 s.d 17 Mei 2013	1. Besty Emami (KTD) 2. Desi Waluyanti (KTD) 3. Yustinus Danang (Setditjen) 4. Kimhua Evaryanti
13	<i>BIMP-EAGA Land Transportation Working Group</i>	Solo, Indonesia 20 s.d 23 Mei 2013	1. Ahmadi, ZB (LLAJ) 2. Farida Makhmudah (Setditjen) 3. Sugianto (Setditjen) 4. Rio Susatyo (Setditjen) 5. Pitra Setiawan (Setditjen) 6. Riza Faisal (Setditjen) 7. C. Ardian Sukmaji (Setditjen) 8. Rusdinal (Setditjen) 9. Dirthasia G. Putri (Setditjen) 10. Sri Sumarsih (Setditjen)
14	<i>35<sup>th</sup> ASEAN STOM</i>	Luang Prabang, Lao PDR 28 s.d 30 Mei 2013	I Made Suartika (LLAJ)
15	<i>Pertemuan Nasional Kerjasama Sub Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)</i>	Batam, Indonesia 3-4 Juni 2013	1. I Made Suartika (LLAJ) 2. Riza Faisal (Setditjen) 3. Aria Tribirata K (Setditjen)
16	<i>Friends of the Decade of Action for Road Safety 2011-2020</i>	Stockholm, Swedia 3 s.d 5 Juni 2013	1. Hotma Simanjuntak (KTD) 2. Tri Yuli Andaru (KTD)
17	<i>the 4<sup>th</sup> ASEAN-ROK</i>	Busan, Korea Selatan 19-20 Juni 2013	Rudi Irawan (BSTP)
18	<i>The International Whole Vehicle Type Approval (IWVTA) Meeting dan 160<sup>th</sup> Session of the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulation (WP.29)</i>	Paris, Perancis 19-21 Juni 2013 Geneva, Switzerland 25-28 Juni 2013	1. Toto Noerwitjaksono (LLAJ) 2. Dewanto Purnacandra (BPLJSKB)
19	<i>the 38<sup>th</sup> APEC TPTWG</i>	Bali, Indonesia 1-5 Juli 2013	1. Djoko Sasono (BSTP) 2. J.E. Wahyuningrum (BSTP) 3. Tony Agus Setiono (BSTP) 4. I Made Suartika (LLAJ) 5. Desi Waluyanti (LLAJ) 6. Farida Makhmudah (Setditjen) 7. Sari Hayu Utami (Setditjen)
20	<i>ASEAN Marine Transport Working Group (AMTWG) ke 26</i>	Yangon, Myanmar 20-22 Agustus 2013	Elrina (LLASDP)
21	<i>Tailor Made Seminar on Inland Water Transport, Ro-Ro and Ferry</i>	Antwerp, Belgia 25-31 Agustus 2013	1. Suroyo Alimoeso (Dirjen Hubdat) 2. Sudirman Lambali (LLASDP) 3. Nurhadi Unggul W (setditjen)
22	<i>Sustainable Urban Transport in Asia and the Pacific Region: A Joint Workshop and Eco Mobility Congress 2013</i>	Seoul, Korea Selatan 31 Agustus-6 Sept 2013	1. Sumastini Hadi (Setditjen) 2. Ety Hariyanti (BSTP) 3. Betsy Halah Surti (BSTP)
23	<i>Capacity Development Mission in Germany</i>	Jerman 7-16 September 2013	Koesbiyantoro (Setditjen)
24	<i>Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS) Conference</i>	Taipei, China Taipei 9-12 September 2013	1. Tri Adi Bagus W (Setditjen) 2. Yudo Hartadi E (BSTP) 3. Hikmat Hidayat Putu (BSTP)
25	<i>1<sup>st</sup> BIMP-EAGA Transport Cluster Meeting 2013</i>	Miri, Malaysia 22-26 September 2013	1. Ahmad ZB (LLAJ) 2. Ellis Simbolon (LLAJ) 3. Dharmawanto (LLASDP)
26	<i>Regional Capacity Building Workshop on</i>	Bangkok, Thailand	1. Riza Faizal (Setditjen)

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Wakil Hubdat
	<i>Measurement of Inland Transport CO2 Emission and Mitigation Policies</i>	26-27 September 2013	2. M.N.A. Perdana (BSTP)
27	<i>the 30th Joint Border Committee Meeting between RI and the Independent State of Papua New Guenia (PNG)</i>	Bogor, Indonesia 26-27 September 2013	1. I Made Suartika (LLAJ) 2. Farida Makhmudah (Setditjen) 3. Desi Waluyanti (LLAJ)
28	<i>2nd Expert Group Meeting on the Finalization of the ASEAN Framework Agreement on Cross Border Transport of Passenger (ASEAN CBTP)</i>	Asean Secretariat, Jakarta Indonesia 2-3 Oktober 2013	1. Farida Makhmudah (Setditjen) 2. Riza Faisal (Setditjen)
29	<i>The 5th Meeting of the Working Group on the Asian Highway</i>	Bangkok, Thailand 7-9 Oktober 2013	1. Pandu Yunianto (LLAJ) 2. Desi Waluyanti (LLAJ) 3. Ardian Sukmaji (Setditjen)
30	<i>The 4th Vice Ministerial Level RI-Jepang</i>	Sapporo, Jepang 10-11 Oktober 2013	1. Toto Nuewitjaksone (LLAJ) 2. Gede Pasek Suardika (KTD) 3. Dewanto Purnacandra (BPLJSKB) 4. Farida Makhmudah (Setditjen) 5. Harno Trimadi (BSTP)
31	<i>Kunjungan Kerja Kemenko Perekonomian ke Transport Department dan Mass Transit Railway (MTR) dan Fasilitas Interchange Antar Moda di Hongkong</i>	Hongkong 8-12 Oktober 2013	1. Esron Sinaga (Setditjen) 2. Iman Sukandar (BSTP)
32	<i>The 26th ASEAN Transport Facilitation Working Group (ASEAN TFWG) the 5th ASEAN Transit Transport Coordination Board Meeting (Asean TTCB)</i>	Kuala Lumpur, Malaysia 21-24 Oktober 2013	1. Ahmadi ZB (LLAJ) 2. Farida Makhmudah (Setditjen) 3. Ellis Simbolon (LLAJ)
33	<i>The 18th Meeting of the ACCSQ APWG &amp; ASEAN-Japan Cooperation Forum</i>	Malacca, Malaysia 21-25 Oktober 2013	1. Dewanto Purnacandra (BPLJSKB) 2. Iman Alamsyah (BPLJSKB) 3. Awaluddin Yoga S (BPLJSKB) 4. Rio Susatyo (Setditjen) 5. Irwan Arfianto (LLAJ)
34	<i>The 8th BIMPEAGA Transport Minister Meeting</i>	Banjarmasin, Indonesia 20-22 Oktober 2013	1. Arham Safti (LLAJ) 2. Elrina (LLASDP) 3. Dody Arfianto (LLAJ)
35	<i>APEC Seminar on Port Engineering</i>	Antwerp, Belgia 4-15 November 2013	Elrina (LLASDP)
36	<i>ITSAP Project Review (PRG) Meeting ke 13 ITSAP Pre PRG Meeting</i>	Jakarta, Indonesia 19-20 November 2013	1. Eddy Gunawan (KTD) 2. Jonter Sitohang (KTD) 3. Koesbiyantoro (Setditjen) 4. Riza Faisal (Setditjen)
37	<i>Kunjungan Kerja ke Departemen of Transport, instansi/operator transportasi perkotaan dan interchange antar moda di Melbourne</i>	Melbourne, Australia 19-23 November 2013	1. Dr. Ir. Djoko Sasono (BSTP) 2. Djamal Subastian (BSTP)
38	<i>Europe-Asia Road Safety Forum the 67th Session of the Working Party 1 of the UN ECE</i>	New Delhi, India 4-6 Desember 2013	1. Sari Catur Lestari (KTD) 2. Jonter Sitohang (KTD) 3. Dini Kusumahati D (LLAJ) 4. Endy Irawan (Setditjen)
39	<i>the 36th STOM Meeting dan the 19th ATM</i>	Pakse City, Lao PDR 16-20 Desember 2013	1. I Made Suartika (LLAJ) 2. Farida Makhmudah (Setditjen) 3. Lukman Al Amin (LLASDP) 4. Desi Waluyanti (LLAJ)

Sumber : *Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen Hubdat – 2013.*

7) **Proyek kegiatan yang dihasilkan berdasarkan program kerjasama luar negeri :**

Data Perjanjian, MoU, Arrangement, Declaration yang terkait dengan sub sektor transportasi darat secara bilateral, regional maupun multilateral sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2013 :

**Tabel II.5. Perjanjian, MoU, Arrangement dan Declaration Ditjen Perhubungan Darat**

No	Agreement / MoU	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku	Keterangan
1	Agreement on the Recognition of Domestic Driving Licenses Issued by ASEAN Countries	Negara Anggota ASEAN	Kuala Lumpur, Malaysia 9 Juli 1985	-	Ratifikasi
2	Agreement on the Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles and Public Service Vehicle Issued by ASEAN Member Countries	Negara Anggota ASEAN	Singapura, 10 September 1998	-	Ratifikasi
3	ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT)	Negara Anggota ASEAN	Hanoi, Vietnam 16 Desember 1998	-	Ratifikasi
4	Protocol 3 AFAFGIT, Types and Quantity of Road Vehicle	Negara Anggota ASEAN	Hanoi, Vietnam 15 September 1999	-	Ratifikasi
5	Protocol 4 AFAFGIT, Types and Quantity of Road Vehicle	Negara Anggota ASEAN	Hanoi, Vietnam 15 September 1999	-	Ratifikasi
6	Protocol 5 AFAFGIT, ASEAN Scheme On Compulsory Motor Vehicle Insurance	Negara Anggota ASEAN	Kuala Lumpur Malaysia 8 April 2001	-	Ratifikasi
7	Protocol 9 AFAFGIT, Dangerous Goods	Negara Anggota ASEAN	Jakarta, Indonesia 20 September 2002	-	Ratifikasi
8	ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport	Negara Anggota ASEAN	Vientien, Lao PDR 7 November 2005	-	Proses Ratifikasi
9	ASEAN Tourism Agreement	Negara Anggota ASEAN	Phnompenh, Cambodia 4 November 2002	-	Ratifikasi
10	MoU Between The Government of The Member of Association of South –East Asian Nations and The Government of China on Transport Cooperation	Negara Anggota ASEAN dan China	Vientien, Lao PDR, 27 November 2004	-	-
11	ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response	Negara Anggota ASEAN	Vientien, Lao PDR 26 Juli 2005	-	Ratifikasi
12	Intergovernmental Agreement on Asian Highway Network ( UN-ESCAP)	Negara Anggota ESCAP	Shanghai, China 4 Juli 2005	-	Proses Ratifikasi
13	Busan Declaration on Transport Development in Asia and the Pacific	Negara Anggota ESCAP	Busan, Korea, 11 November 2006	-	-
14	Protocol 1 AFAFGIT, Designation of Transit Transport Roads and Facilities	Negara Anggota ASEAN	Bangkok, Thailand 8 February 2007	-	Ratifikasi
15	Memorandum of Understanding Between the Governments of Brunei Darussalam, Malaysia,	Negara Anggota BIMP-EAGA	Singapore, 2 November 2007	-	-

No	Agreement / MoU	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku	Keterangan
	Indonesia and Philippines on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches				
16	ASEAN Framework Agreement on Interstate Transit Transport	Negara Anggota ASEAN	2008	-	-
17	Memorandum of Understanding Between The Government of Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia and Philipines on Transit and Inter-state Transport of Goods	Negara Anggota BIMP-EAGA	Manado, Indonesia, 25 Juni 2009	-	-
18	Arrangement Between The Minister of Finance of The Government of Indonesia and The Minister of Economy, Industry and Employment of The Government of France Relating To The Bandung Integrated Transport Network Planning Study	Indonesia-Perancis	Jakarta, 15 Juli 2009	31 Desember 2011	
19	Implementation Arrangement (on Integrated Public Transportation Masterplan for Bandung Metropolitan Area)	Ditjen Perhubungan Darat dan SNCF Perancis	Jakarta, Nopember 2009	-	-
20	Moscow Delaration (on Global Road Safety)	UN	Moscow, Rep. Federasi Rusia 20 November 2009	-	-
21	Bangkok Declaration on Transport Development in Asia	Negara Anggota ESCAP	Bangkok, Thailand 18 Desember 2009	-	-
22	Memorandum Of Cooperation Between The Ministry of Transportasi of The Ministry of Land, Infrastructure and Tourism of Japan in The Transport Sector	Indonesia - Jepang	Bali, 3 Desember 2010		
23	Arrangement Between The Ministry Of Transportation of The Republic Of Indonesia and The Departement of Infratructure and Transport Of Australia on The Indonesia Transport Safety Assistance Package,  ANNEX On Transport Security	Indonesia – Australia  Australia – Indonesia	Bali, 11 Desember 2012  Australia, 7 Februari 2012		
24	ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport	Indonesia – ASEAN	-	-	Proses Ratifikasi
25	ASEAN Cross Border Transport of Passenger By Road Vehicles	Indonesia – ASEAN	-	-	Proses Negosiasi

Sumber : *Bagian Hukum dan Kerjasama, Setditjen Hubdat – 2013.*

#### D. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dalam pelaksanaan program kerja di bidang Kepegawaian dan Umum telah dilakukan langkah-langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui keikutsertaan pegawai pada diklat-diklat teknis.

Pengembangan SDM melalui diklat-diklat teknis guna meningkatkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan unit kerja dimana pegawai ditempatkan tersebut diatas, tidak hanya yang diselenggarakan oleh unit kerja dilingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, tetapi juga yang dilaksanakan oleh institusi lainnya baik lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah maupun swasta yang terkait dengan substansi perhubungan darat.

##### 1. Data Pegawai Ditjen Perhubungan Darat

Pegawai Ditjen Perhubungan Darat posisi tahun 2013 diklasifikasikan menurut unit kerja, golongan, pendidikan umum, jenis kelamin masing-masing sebanyak 649 pegawai, dimana yang sudah mengikuti diklat penjenjangan structural sebanyak 20 pegawai dan yang menduduki jabatan structural sebanyak 122 pegawai. Untuk perinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.6. Pegawai Berdasarkan Unit Kerja**

No.	Unit Kerja	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Setditjen	137	140	140	139	130	128
2.	Direktorat LLAJ	98	105	129	141	128	127
3.	Direktorat LLASDP	78	78	95	95	71	70
4.	Direktorat BSTP	63	66	83	89	78	73
5.	Direktorat KTD	57	59	57	64	62	59
6.	UPT. BPLJSKB Bekasi	43	44	56	63	55	53
7.	UPT. PelabuhanPenyeberangan	57	63	56	69	59	42
8.	DAMRI	15	14	11	9	7	-
9.	Dishub/TugasPerbantuan Daerah (D-III ALL/LLASDP)	29	6	1	0	0	-
10.	OPP Merak	-	-	-	-	11	13
11.	OPP Gilimanuk	-	-	-	-	6	8
12.	OPP Lembar	-	-	-	-	7	11
13.	OPP Pagimana	-	-	-	-	5	26
14.	BLLAJSDP Jambi	-	-	-	-	4	6
15.	BLLAJSDP Denpasar	-	-	-	-	11	13
16.	BLLAJSDP Palangkaraya	-	-	-	-	6	8
17.	BLLAJSDP Palu	-	-	-	-	4	12
<b>Jumlah</b>		<b>577</b>	<b>575</b>	<b>628</b>	<b>669</b>	<b>644</b>	<b>649</b>

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ditjen Hubdat – 2013.

**Tabel II.7. Pegawai Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Golongan IV	53	49	50	50	55	56
2.	Golongan III	404	399	419	441	436	447
3.	Golongan II	119	126	158	177	152	142
4.	Golongan I	1	1	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>577</b>	<b>575</b>	<b>628</b>	<b>669</b>	<b>644</b>	<b>649</b>

Sumber : *Bagian Kepegawaian, Ditjen Hubdat – 2013.*

**Tabel II.8. Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan Terakhir	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Doktoral/S3	1	1	1	1	1	2
2.	Pasca Sarjana/S2	83	85	95	112	135	141
3.	Spesialis	3	4	4	3	3	3
4.	Sarjana/S1	154	175	197	215	214	228
5.	Diploma IV	33	21	28	37	42	45
6.	Diploma III/Sarjana Muda	66	70	105	121	100	92
7.	Diploma I/II	8	8	17	21	20	20
8.	SMU	214	196	175	152	124	114
9.	SLTP	9	9	4	5	4	3
10.	SD	6	6	2	2	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>577</b>	<b>575</b>	<b>628</b>	<b>669</b>	<b>644</b>	<b>649</b>

Sumber : *Bagian Kepegawaian, Ditjen Hubdat – 2013.*

**Tabel II.9. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Perempuan	125	122	156	177	167	160
2.	Pria	452	453	472	492	477	489
<b>Jumlah</b>		<b>577</b>	<b>575</b>	<b>628</b>	<b>669</b>	<b>644</b>	<b>649</b>

Sumber : *Bagian Kepegawaian, Ditjen Hubdat – 2013.*

**Tabel II.10. Pegawai Berdasarkan Golongan**

No.	Dikat Penjurusan Struktural	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lemhanas	1	1	-	0	0	1
2.	Sepati/Dikpim I	2	2	1	1	2	2
3.	Sespa/Spamen/Dikpim II	17	19	16	14	14	15
4.	Sepadya/Spama/Dikpim III	48	52	49	44	45	45
5.	Sepala/Adum/Dikpim IV	62	65	60	63	76	87
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>	<b>139</b>	<b>126</b>	<b>122</b>	<b>137</b>	<b>150</b>

Sumber : *Bagian Kepegawaian, Ditjen Hubdat – 2013.*

**Tabel II.11. Pegawai Berdasarkan Eselonering**

No.	Eselonering	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Eselon I	1	1	1	1	1	1
2.	Eselon II	5	5	5	5	5	5
3.	Eselon III	24	24	24	24	31	32
4.	Eselon IV	60	60	60	60	83	80
5.	Eselon V	4	4	4	4	4	4
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>124</b>	<b>122</b>

Sumber : *Bagian Kepegawaian, Ditjen Hubdat – 2013.*

Dari data diatas, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir perubahan komposisi formasi pegawai relatif tidak banyak perubahan, terutama dari segi jumlah pegawai. Hal ini dikarenakan mulai berimbangnya jumlah mutasi pegawai (pensiun, pindah unit kerja, termasuk

tugas perbantuan daerah) dengan pengadaan pegawai baru di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## 2. Posisi Pelaksanaan Tugas

### a. Bidang Kepegawaian dan Organisasi

#### 1) Realisasi Kepangkatan PNS

Dalam periode April sampai dengan Oktober 2013 terdapat formasi kenaikan pangkat (KP) sebanyak 114 pegawai, dengan rincian:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) Kenaikan Pangkat Reguler             | : 72 pegawai |
| b) Kenaikan Pangkat Pilihan             | : 11 pegawai |
| c) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah  | : 17 pegawai |
| d) Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu | : 14 pegawai |

#### 2) Pensiun Pegawai

Dalam tahun anggaran 2013, jumlah pensiun pegawai sebanyak 22 orang, dengan rincian :

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| a) Golongan IV  | : 2 pegawai  |
| b) Golongan III | : 11 pegawai |
| c) Golongan II  | : 9 pegawai  |

\* : Sedangkan pegawai yang meninggal dunia tidak ada pada tahun 2013.

#### 3) Pemberian Tanda Penghargaan

Dalam upaya pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat, pada tahun anggaran 2013, telah diberikan tanda penghargaan Satyalancana Mira Karya dan Satyalancana Karya Satya kepada 34 pegawai dengan rincian :

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| a) Satyalancana Mira Karya           | : - pegawai  |
| b) Satyalancana Karya Satya 30 tahun | : 12 pegawai |
| c) Satyalancana Karya Satya 20 tahun | : 9 pegawai  |
| d) Satyalancana Karya Satya 10 tahun | : 13 pegawai |

Tanda penghargaan dimaksud merupakan wujud penghargaan Pemerintah atas pengabdian PNS dalam melaksanakan tugasnya.

#### 4) Diklat Teknis Fungsional

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat, pada tahun 2013 dilakukan penyiapan daftar pegawai yang harus mengikuti diklat teknis fungsional dan realisasinya telah dikirim 149 pegawai untuk mengikuti diklat teknis fungsional yang diselenggarakan oleh unit pelaksana diklat baik

dilingkungan Badan Diklat Perhubungan maupun instansi/kementerian lainnya, dengan rincian :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| a) Diklat Kepemimpinan | : 20 pegawai  |
| b) Diklat Luar Negeri  | : 10 pegawai  |
| c) Diklat Dalam Negeri | : 119 pegawai |

Selain hal tersebut diatas, sepanjang tahun 2013 juga terdapat kegiatan yang diselenggarakan sebagai upaya dalam pembinaan kepegawaian dan tata kelola organisasi yang baik, yang meliputi :

- 1) Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Terpadu.
- 2) Penyusunan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013
- 3) Penyertaan Diklat Struktural, Diklat Teknis Fungsional dan Short Courses baik di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun diluar Kementerian Perhubungan.
- 4) Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- 5) Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
- 6) Workshop manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
- 7) Pemetaan Profile Potensi Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perhubungan Darat.
- 8) Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perhubungan Darat.
- 9) Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian.
- 10) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Teknis di Bidang Perhubungan Darat yaitu Inspektur Sungai Danau.
- 11) Penataan Nomenklatur Jabatan Teknis dan Penyempurnaan Uraian Jabatan/Pekerjaan Direktorat Jenderal.
- 12) Penyusunan dan Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan KM 60 Tahun 2010.
- 13) Penyusunan sistem penilaian kinerja individu Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perhubungan Darat.
- 14) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan usulan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat.
- 15) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor.
- 16) terselesainya masalah monostatus pegawai yang ditugaskan di Kantor Pusat Damri, PT. ASDP Ferry Cabang Kolaka, PT. ASDP Ferry Cabang Sape dan PT. ASDP Ferry Cabang Mamuju sebanyak 20 pegawai.
- 17) Terbentuknya struktur organisasi dan terpilihnya anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP).



**Gambar II.11. Kegiatan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Gabungan D III Kebawah**



**Gambar II.12. Kegiatan Pengembangan Karakter Pegawai**



**Gambar II.13. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor**

**b. Bidang Ketatausahaan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2013 di bidang ketatausahaan meliputi :

- 1) Pencatatan surat masuk dan surat keluar baik secara manual maupun dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Tata Persuratan (SITU);
- 2) Penyiapan dan penyusunan Daftar Gaji dan Tunjangan (Uang Makan dan Lembur) pegawai;
- 3) Penyusunan Rapel Kenaikan Gaji Pegawai;
- 4) Penyusunan Gaji ke 13 Pegawai;
- 5) Penyempurnaan dan updating data kepegawaian;
- 6) Melakukan Proses Pendigitalisasian Arsip;



**Gambar II.14. Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Ditjen Hubdat**

- 7) Pemrosesan Penegakan Disiplin Pegawai dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai;
- 8) Penataan dan pemeliharaan arsip;
- 9) Pengiriman berkas arsip ke depo arsip di Bandung;
- 10) Penyusutan Berkas Arsip;
- 11) Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Lingkungan Ditjen Hubdat;
- 12) Penggandaan, pencetakan, pengiriman/ekspedisi surat-surat dinas di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Darat;
- 13) Memproses Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS yang diwajibkan sesuai peraturan perpajakan;
- 14) Pemrosesan Sistem Absensi Elektronik Pegawai;
- 15) Sosialisasi Ketatausahaan Kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi keadministrasian tata persuratan, kearsipan serta disiplin pegawai;

### c. Bidang Rumah Tangga

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2013 di bidang kerumah tanggaan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal, meliputi :

- 1) Penataan administrasi barang milik negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, meliputi : pendataan barang inventaris kantor, pendistribusian barang-barang inventaris kantor, alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan membuat laporan barang milik negara tiap semester;
- 2) Pengadaan keperluan operasional kantor seperti : alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang keperluan rumah tangga;
- 3) Pengadaan pakaian dinas harian sesuai jumlah pegawai;
- 4) Pengadaan pakaian kerja satpam;
- 5) Pengadaan pakaian kerja pramubakti;
- 6) Pengadaan obat-obatan dan honorarium dokter dan perawat pada poliklinik;
- 7) Pengelolaan Limbah pada poliklinik;
- 8) Pengadaan barang inventaris kantor seperti : Komputer, Notebook, Scanner, Printer, CCTV, Software Anti Virus, Baterai Kamera, Camera DSLR, Lensa Kamera, Lampu Blitz Kamera, Tripod Video Camera, Camera, Wirelles Portable, Sound System Ruang Rapat, Eksternal Hard disc, Lemari Arsip, LCD Projector, Mesin Faximile/ telepon, Meubelair Kantor, AC Split dan Alat Absensi Pegawai;
- 9) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4;
- 10) Perbaikan Barang Inventaris Kantor;
- 11) Pemeliharaan dan Pengaturan pemakaian ruang rapat;
- 12) Perawatan Kamar Mandi Lantai 8;



**Gambar II.15. Perawatan Kamar Mandi**

- 13) Perawatan Kamar Mandi Lantai 9;
- 14) Perawatan Kamar Mandi Lantai 10;
- 15) Perawatan Vinyl Lantai;
- 16) Renovasi Ruang Direktur LLASDP;
- 17) Renovasi Ruang Direktur BSTP;
- 18) Renovasi Ruang Direktur KTD;
- 19) Renovasi Ruang Pimpinan;
- 20) Perawatan Gedung Karsa Lantai 3;
- 21) Perawatan Kamar Mandi Lantai 3;
- 22) Operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional Roda 2, Roda 4 dan Roda 6;
- 23) Penyediaan Jasa Outsourcing tenaga keamanan;
- 24) Penyediaan Jasa Outsourcing tenaga pramubakti;
- 25) Sosialisasi Kampanye Anti Narkoba Bagi Pegawai Ditjen Hubdat;
- 26) Pelayanan urusan dalam lainnya.

**BAB III****PELAKSANAAN  
KEGIATAN TAHUN 2013****A. BIDANG PEMERINTAHAN**

Pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan berorientasi pada tugas-tugas pokok dibidang pemerintahan yang meliputi pekerjaan non fisik (baik pekerjaan rutin maupun yang bersifat peraturan perundang-undangan/kebijakan), baik yang didanai oleh DIPA. Program kerja pada bidang pemerintahan disusun sesuai dengan bagian dan sub direktorat masing-masing yang ada di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

**1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL****a. Bagian Perencanaan**

Bagian Perencanaan berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyiapan, penelaahan dan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja, penyusunan sistem informasi serta pemaduan sistem transportasi darat serta penyusunan anggaran dan Laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 2) penyiapan bahan pemaduan jaringan transportasi darat;
- 3) penyiapan bahan pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5) penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Program kegiatan pada Bagian Perencanaan dirinci sesuai dengan pembagian Sub bagian yang ada, antara lain :

### 1) Sub Bagian Rencana dan Program

Pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Ditjen Hubdat serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat, antara lain :

- a) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Perhubungan Darat.
- b) Pembinaan Program dan Rencana Kerja Perhubungan Darat.
- c) Penyusunan standar, petunjuk/kebijakan teknis, pedoman dan kajian teknis di bidang Perhubungan Darat.
- d) Penyusunan RKA-KL, DIPA, PO dan LK yang ada di lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat.
- e) Penyusunan Revisi RPJM dan RPJP.
- f) Penyusunan Penetapan Kinerja Ditjen Perhubungan Darat.
- g) Penyusunan Petunjuk Teknis Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013.

### 2) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program kerja, meliputi :

- a) Integritas perencanaan, pelaksanaan rencana dan evaluasi.
- b) Memantau, mengevaluasi, menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja.
- c) Pemantauan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Rupiah Mumi dan Pinjaman Luar Negeri.
- d) Penyusunan LAKIP Ditjen Perhubungan Darat.

### 3) Sub Bagian Sistem Informasi dan Pelaporan

Pada Sub bagian ini dijadwalkan kegiatan yang bertitik tolak pada penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan Ditjen Hubdat, meliputi :

- a) Pengembangan dan konsolidasi Sistem Informasi melalui pengembangan dan pembangunan sistem.
- b) Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2012.
- c) Penyusunan Perhubungan Darat Dalam Angka Tahun 2012.
- d) Penyusunan Pengembangan Profil Perhubungan Darat Tahun 2013.
- e) Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan LAN dan Website Ditjen Perhubungan Darat.

- f) Penyiapan bahan *Draft* RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ.
- g) Penyusunan *Master Plan* Teknologi Informasi Perhubungan Darat.
- h) Memantau dan melaporkan pelaksanaan beberapa Rencana Aksi Tahun 2013 yang dimonitoring oleh Tim UKP4.

Disamping kegiatan yang telah dijadwalkan pada masing-masing sub bagian, terdapat juga kegiatan yang melibatkan ketiga sub bagian tersebut dalam pelaksanaannya, yaitu penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (Rakomis) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2013.

#### **b. Bagian Hukum dan Kerjasama**

Pada Bagian Hukum dan Kerjasama, pelaksanaan kegiatan Tahun 2013 tidak terlepas dari program kerja tahun sebelumnya yang telah ditetapkan, belum terlaksana maupun sedang dalam proses penyelesaian serta kegiatan yang berkelanjutan dan terjadwal setiap tahun. Program kerja pada Bagian Hukum dan Kerjasama dirinci sesuai dengan pembagian Sub bagian yang ada, antara lain yaitu :

##### **1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan**

Untuk kegiatan 2013 telah dijadwalkan 15 kegiatan dalam rangka *Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Dirjen sebagai tindak lanjut dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang antara lain banyak menitik beratkan pada perlunya suatu pengaturan baru ataupun perlunya pembaharuan pengaturan, yang meliputi :*

- a) Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan Revisi Peraturan Pemerintah bidang LLAJ sebagai tindak lanjut dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b) Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri bidang LLAJ, LLASDP, KTD, dan BSTP;
- c) Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan Rancangan Peraturan Dirjen bidang LLAJ, LLASDP, KTD, dan BSTP;
- d) Penyusunan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Direktorat Jendral Perhubungan Darat;
- e) Asistensi Perda dan Raperda di Bidang Perhubungan Darat;
- f) Pembuatan buku peraturan pelaksanaannya.

## 2) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum

Kegiatan yang dilaksanakan bertitik tolak pada pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan penyiapan dan pengandaan dokumentasi hukum untuk keperluan informasi dan referensi antara lain :

- a) Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum atas perkara-perkara yang timbul dalam rangka penyelenggaraan transportasi darat termasuk mengikuti persidangan di Peradilan;
- b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyempurnaan aplikasi terhadap system Dokumentasi Hukum;
- c) Penyebarluasan produk hukum Ditjen Hubdat kepada masyarakat dan instansi Pemerintah baik melalui distribusi secara langsung maupun melalui penyuluhan;
- d) Melakukan penyiapan bahan penyuluhan peraturan perundangan yang terkait dengan bidang transportasi darat;
- e) Melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang transportasi darat;

## 3) Sub Bagian Humas dan KSLN

Kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada hubungan dengan masyarakat secara langsung (internal dan eksternal), hubungan dengan masyarakat melalui media, hubungan antar lembaga dan kerjasama luar negeri antara lain:

- a) Penyiapan bahan, perencanaan dan pelaksanaan komunikasi dan evaluasi dalam bentuk pertemuan (formal/informal), Penerangan, Penyuluhan, Konferensi Pers, Jumpa pers, Liputan Pers, Analisis maupun pelurusan berita/tulisan dan pembinaan hubungan baik dengan wartawan/media, serta melaksanakan clipping /

guntingan berita sebagai bahan informasi dan pertimbangan pimpinan Eselon I dan Eselon II;

- b) Menyiapkan bahan, mengkoordinir dan mengikuti pameran yang berkaitan dengan bidang transportasi telah diikuti pameran sebanyak 3 kegiatan;
- c) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi dan Lembaga / Institusi baik Pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan antar lembaga, termasuk mengikuti rapat dengar pendapat di DPR;
- d) Melaksanakan dokumentasi audio dan visual tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat maupun yang terkait;
- e) Memberikan informasi kebijakan dan informasi lain di lingkungan Ditjen Hubdat dengan menerbitkan info Hubdat setiap 3 bulan sekali yang disebarakan kepada Stakeholder baik di lingkungan Departemen Perhubungan maupun di luar Dephub serta Dinas Perhubungan propinsi dan Dinas perhubungan Kab/Kota;
- f) Penyiapan dan analisis bahan untuk rapat konsultasi, rapat koordinasi, serta rapat persiapan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan pertemuan KSLN baik di dalam maupun di luar negeri;
- g) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan delegasi untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dalam rangka kegiatan KSLN, termasuk proses administrasinya baik di dalam maupun di luar negeri;
- h) Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pertemuan dan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama luar negeri, termasuk agreements / perjanjian-perjanjian dan MOU yang bersifat regional, bilateral atau internasional.

### c. Bagian Kepegawaian Dan Umum

Berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tatalaksana serta tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang transportasi darat;
- 2) Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pada Bagian Kepegawaian dan Umum, untuk tahun 2013 telah dijadwalkan beberapa kegiatan yang secara garis besar meliputi penataan, pemeliharaan dan pengembangan serta pelayanan administratif kepegawaian, sarana dan prasarana kerja serta sumberdaya manusia. Kegiatan tersebut dapat dirinci sesuai dengan pembagian sub bagian yang ada, antara lain :

**1) Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi**

Selain menyiapkan tenaga-tenaga sesuai dengan kebutuhan, penyempurnaan organisasi, meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai, juga kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian dengan rincian :

- a) Melakukan monitoring mengenai Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- b) Melakukan monitoring UPT dan Eks UPT Ditjen Hubdat;
- c) Menyiapkan dan mengirimkan peserta Diklat Struktural, Fungsional maupun Diklat Teknis Dalam dan Luar Negeri serta program beasiswa S2 transportasi;
- d) Memproses Pengangkatan Jabatan fungsional, Mutasi, Promosi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penghargaan, Pengangkatan PNS, dan Pensiun Pegawai;
- e) Melakukan Penataan nomenklatur jabatan teknis dan penyempurnaan uraian jabatan/pekerjaan Ditjen Hubdat;
- f) Penyusunan standar kompetensi jabatan aparatur perhubungan bidang lalu lintas;
- g) Memproses penerbitan Surat Keputusan Kompetensi bagi Penguji Kendaraan Bermotor;
- h) Pengadaan CPNS Ditjen Perhubungan Darat formasi tahun 2013;
- i) Melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kinerja SDM Hubdat bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- j) Melakukan kegiatan peningkatan disiplin dan jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- k) Menyiapkan bahan usulan, fasilitasi dan koordinasi rencana pembentukan UPT Ditjen Perhubungan Darat di daerah, termasuk yang belum sanggup untuk dikelola dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah;

- l) Memfasilitasi pengurusan Kartu Taspen, Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU);
- m) Melakukan pembekalan kepada para pegawai yang akan memasuki masa purna bhakti (pensiun);
- n) Melakukan pembekalan keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilanjutkan dengan ujian sertifikasi bagi para pegawai.
- o) Terbentuknya struktur organisasi dan terpilihnya anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP).

## 2) Sub Bagian Tata Usaha

Untuk Sub Bagian Tata Usaha dengan harapan terwujudnya pelayanan dan akurasi data kepegawaian yang optimal maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, antara lain :

- a) Pencatatan surat masuk dan surat keluar baik secara manual maupun dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Tata Persuratan (SITU);
- b) Penyiapan dan penyusunan Daftar Gaji dan Tunjangan (Uang Makan dan Lembur) pegawai;
- c) Penyusunan Rapel Kenaikan Gaji Pegawai;
- d) Penyusunan Gaji ke 13 Pegawai;
- e) Penyempurnaan dan updating data kepegawaian;
- f) Pemrosesan Penegakan Disiplin Pegawai dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai;
- g) Penataan dan pemeliharaan arsip;
- h) Pengiriman berkas arsip ke depo arsip di Bandung;
- i) Penyusutan Berkas Arsip
- j) Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Lingkungan Ditjen Hubdat
- k) Melakukan Proses Pendigitalisasian Arsip;
- l) Penggandaan, pencetakan, pengiriman/ekspedisi surat-surat dinas di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Darat;
- m) Memproses Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS yang diwajibkan sesuai peraturan perpajakan;
- n) Pemrosesan Sistem Absensi Elektronik Pegawai;
- o) Sosialisasi Ketatausahaan Kepegawain di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi Keadministrasian tata persuratan, Kearsipan serta Disiplin Pegawai;

### 3) Sub Bagian Rumah Tangga

Kegiatan yang dilaksanakan bertitik tolak pada terwujudnya sarana dan prasarana kerja yang kondusif bagi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, demikian pula dengan optimalisasi penyediaan kebutuhan medis bagi pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, antara lain:

- a) Penataan administrasi barang milik negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, meliputi : pendataan barang inventaris kantor, pendistribusian barang-barang inventaris kantor, alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan membuat laporan barang milik negara tiap semester;
- b) Pengadaan keperluan operasional kantor seperti : alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang keperluan rumah tangga;
- c) Pengadaan pakaian dinas harian sesuai jumlah pegawai;
- d) Pengadaan pakaian kerja satpam;
- e) Pengadaan pakaian kerja pramubakti;
- f) Pengadaan obat-obatan dan honorarium dokter dan perawat pada poliklinik;
- g) Pengelolaan Limbah pada poliklinik;
- h) Pengadaan barang inventaris kantor seperti : Komputer, Notebook, Scanner, Printer, CCTV, Software Anti Virus, Baterai Kamera, Camera DSLR, Lensa Kamera, Lampu Blitz Kamera, Tripod Video Camera, Camera, Wrelles Portable, Sound System Ruang Rapat, Eksternal Hard disc, Lemari Arsip, LCD Projector, Mesin Faximile/ telepon, Meubelair Kantor, AC Split dan Alat Absensi Pegawai;
- i) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4;
- j) Perbaikan Barang Inventaris Kantor;
- k) Pemeliharaan dan Pengaturan pemakaian ruang rapat;
- l) Perawatan Kamar Mandi Lantai 8;
- m) Perawatan Kamar Mandi Lantai 9;
- n) Perawatan Kamar Mandi Lantai 10;
- o) Perawatan Vinyl Lantai;
- p) Renovasi Ruang Direktur LLASDP;
- q) Renovasi Ruang Direktur BSTP;
- r) Renovasi Ruang Direktur KTD;
- s) Renovasi Ruang Pimpinan;
- t) Perawatan Gedung Karsa Lantai 3;

- u) Perawatan Kamar Mandi Lantai 3;
- v) Pemeliharaan kendaraan operasional Roda 2, Roda 4 dan Roda 6;
- w) Penyediaan Jasa Outsourcing tenaga keamanan;
- x) Penyediaan Jasa Outsourcing tenaga pramubakti;
- y) Sosialisasi Kampanye Anti Narkoba Bagi Pegawai Ditjen Hubdat;
- z) Pelayanan urusan dalam lainnya.

## 2. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- e. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penguji kendaraan bermotor serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- h. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

#### a. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Jalan

Sub Direktorat Jaringan Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan jaringan transportasi jalan, penyusunan jaringan transportasi jalan primer, penetapan kelas jalan di jaringan jalan primer, penyusunan jaringan trayek antar kota antar propinsi, jaringan trayek lintas batas negara dan jaringan lintas di jaringan jalan primer, penetapan lokasi terminal tipe A dan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penentuan lokasi terminal, sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan Jalan Propinsi, Kota dan Kabupaten, jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan untuk penumpang dan barang, penentuan lokasi terminal penumpang tipe B dan tipe C, penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang, sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan nasional, jaringan trayek antar propinsi, lintas batas negara, angkutan perintis, jaringan lintas angkutan barang di jalan nasional, lokasi terminal penumpang tipe A, lokasi terminal penumpang tipe utama dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 4) Penyiapan bahan perumusan pengembangan sistim informasi dan komunikasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi jalan.

### 1) Seksi Jaringan Prasarana Dan Pelayanan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Memberikan bimbingan arahan teknis pada Perencanaan Teknis dan Penyusunan Kompetensi Petugas Terminal;
- b) Memberikan bimbingan arahan teknis pada Perencanaan Teknis dan Interkoneksi Manajemen Operasional Terminal Tipe A;
- c) Perumusan dan Penetapan Standart Rancang Bangun Terminal Penumpang Tipe A;
- d) DED Terminal Terpadu Bandara Kuala Namu Sumut;
- e) Perencanaan Teknis Pola Transportasi Jalan di Wilayah Perbatasan dengan Negara Timor Leste;
- f) Pembangunan Terminal Pnp di Kab. Wonogiri Tahap IV (beserta supervisinya);
- g) Pembangunan Terminal Penumpang di Kab. Pacitan Tahap IV (beserta supervisinya);
- h) Pembangunan Terminal Tipe A Depok Tahap III (beserta supervisinya);
- i) Pembangunan Terminal Kota Sukabumi (beserta supervisinya);
- j) Rehabilitasi Terminal Solo Tahap V (beserta Supervisi);
- k) Rehabilitasi Terminal Purabaya Tahap V (beserta Supervisi);
- l) Pembangunan Gedung Arsip Tahap III (beserta supervisi);
- m) Rehabilitasi Terminal Bawen Tahap III (beserta Supervisi);
- n) Pembangunan Shelter dan Fasilitas Pendukung untuk Pelayanan Angkutan Massal di Wilayah Jabodetabek (beserta Supervisi);
- o) Perumusan Penetapan Jaringan Pelayanan Angkutan Barang di Pulau Jawa;
- p) Perumusan dan Penetapan Rencana Induk LLAJ Nasional Tahap II;
- q) Perumusan dan Penetapan Rencana Umum LLAJ;
- r) Perumusan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Bidang LLAJ tahap I (*In House Consultan*);
- s) Perencanaan teknis pola transportasi terpadu di wilayah perbatasan dengan Negara Timor Leste;
- t) Penyelenggaraan Workshop Sosialisasi Undang-Undang dan penyusunan peraturan pemerintah terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;
- u) Penyusunan Konsep RPP Jaringan LLAJ;
- v) Pembekalan Teknis Kepala Terminal (peserta 160 orang);

- w) Monitoring Pembangunan Terminal; dan
- x) Penyelenggaraan mudik gratis bagi pengguna sepeda motor.

## 2) Seksi Pengembangan Transportasi Jalan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Pengembangan Transportasi Jalan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Sewa Jaringan CCTV Di 25 Lokasi (Terminal Merak, Pintu Tol Merak, ASDP Merak, Cikampek, Simpang Jomin, JT Balonggandu, Patrol, Losarang, Pasar Tegal Gubuk, Cirebon, Losari JT Tanjung (Brebes), Padalarang, Cileunyi, Nagrek, JT Gentong, Sadang, Kadipten, Sumpiuh, Ciamis, Comal, Karanganyar, JT. Kulwaru, Pejagan, Simpang Mutiara dan Pamanukan);
- b) Sewa Bandwidth RTTMC;
- c) Pengembangan RTTMC;
- d) Pengadaan dan pemasangan LPJU Solar Cell pada lokasi CCTV;
- e) Pengadaan dan Pemasangan CCTV di 10 Lokasi;
- f) Pengadaan dan Pemasangan Solar Cell pada lokasi CCTV;
- g) Revitalisasi Pengoperasian VMS;
- h) Revitalisasi dan Pengoperasian CCTV;
- i) Penyusunan Penentuan kinerja (PK) Tahun 2013;
- j) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013;
- k) Penyusun Perhubungan Darat Dalam Angka (PDDA) Tahun 2013;
- l) Penyusun Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2013;
- m) Monitoring CCTV Angkutan Lebaran Tahun 2013, Angkutan Natal Tahun 2013 dan Angkutan Tahun Baru 2013;
- n) Penyusunan RKAKL bidang LLAJ tahun 2013;
- o) Melaporkan hasil evaluasi Satker daerah Provinsi untuk triwulan III tahun 2013;
- p) Penyusunan Konsep RPP Sistem Informasi LLAJ;
- q) Melaksanakan Penilaian Wahana Tata Laksana Kebersihan Terminal Penumpang; dan
- r) Analisis dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran 2013/1434 H.

### b. Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan

Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma,

pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta pengujian kendaraan bermotor dan penyiapan pengesahan hasil uji tipe, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, serta pengujian kendaraan bermotor;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor; serta harmonisasi dan standarisasi regulasi;
- 3) Penyiapan bahan pengesahan hasil uji tipe dan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor, serta pelaksanaan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengujian tipe dan berkala kendaraan bermotor;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, serta pengujian kendaraan bermotor; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan.

#### **1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a) Sosialisasi/Lokakarya mengenai Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2013;
- b) Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan Tingkat Nasional Tahun 2013;
- c) Harmonisasi bidang Otomotif dan Penyelenggaraan *Indonesian Automotive Standard Internationalization Forum* (IASIF) Tahun 2013;

Forum ini merupakan wahana bagi stake holders bidang otomotif di Indonesia yang terdiri dari unsur pemerintah (Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan BPPT), industri (ATPM, importir, karoseri, dan bengkel rekondisi), serta akademisi untuk membahas masalah regulasi otomotif, harmonisasi peraturan sektor otomotif Indonesia dan dunia (regional maupun internasional);

- d) Pemeliharaan (*Surveillance*) Pelayanan Sertifikat Uji Type dan Registrasi Uji Type sesuai Standar ISO 9001 : 2008 Tahun 2013;
- e) Pembangunan *multipurpose test track* untuk pengujian rem dan pengujian kebisingan kendaraan bermotor sesuai *UN ECE R41 & UN ECE R51* di Balai Pengujian laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor hingga akhir tahun 2013;
- f) Penerbitan sertifikat uji tipe (SUT) kendaraan bermotor;

Selama tahun 2013 telah diterbitkan sebanyak 679 sertifikat uji tipe kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.1. Penerbitan SUT**

No	Jenis	Jumlah
1.	Sepeda motor	165
2.	Kendaraan bermotor roda 3	8
3.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	410
4.	Landasan kendaraan bermotor	58
5.	Kendaraan impor CBU Bukan Baru	38
<b>TOTAL</b>		<b>679</b>

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat – 2013.

- g) Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT);
- Untuk tahun 2013 telah diterbitkan sebanyak 12.611 lembar SRUT meliputi kebutuhan untuk ATPM, Importir, dan Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana rincian berikut :

Tabel III.2. Penerbitan SRUT

No	Bulan	Blangko Kosong	CBU Bekas	Uji Tipe Baru	Rusak	Total
1.	Januari	15.800	31	997	39	16.867
2.	Februari	29.600	58	790	38	30.486
3.	Maret	26.050	8	1.279	35	27.372
4.	April	25.000	39	1.784	12	26.835
5.	Mei	30.000	18	1.541	33	31.592
6.	Juni	15.500	31	1.261	20	16.812
7.	Juli	36.000	54	885	4	36.943
8.	Agustus	24.500	59	884	2	25.445
9.	September	18.500	9	813	6	19.328
10.	Oktober	33.100	7	848	53	34.008
11.	November	40.000	33	564	20	40.167
12.	Desember	25.000	28	590	127	25.745
<b>TOTAL</b>		<b>319.050</b>	<b>375</b>	<b>12.236</b>	<b>389</b>	<b>332.050</b>

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat – 2013.

- h) Penerbitan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor; Selama tahun 2013 telah diterbitkan sebanyak 210 sertifikat dan tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.3. Penguji Kendaraan Bermotor

No	Jenjang Kompetensi	Jumlah
1.	Pelaksana Pemula	498
2.	Pelaksana	668
3.	Pelaksana Lanjutan	782
4.	Penyelia	359
<b>TOTAL</b>		<b>2307</b>

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat – 2013.

- i) Data Unit Pengujian Kendaraan Bermotor;  
Untuk tahun 2013 dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi data unit pengujian kendaraan bermotor adalah :
- Alat uji non mekanik : 285 unit
  - Alat uji mekanik : 347 unit
  - Alat uji keliling : 38 unit
- j) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang pencetakan buku uji;
- k) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang rekomendasi distribusi buku uji;
- l) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang pencetak stiker tanda samping; dan
- m) Melakukan *witness* uji emisi kendaraan bermotor di Jepang, Thailand, Vietnam, China dan India.

## 2) Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pelaksanaan Pembinaan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor serta Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Tahun 2013.

Kegiatan ini ditujukan kepada Dinas Perhubungan Provinsi terkait SRUT yang diterbitkan atas kendaraan bermotor hasil rancang bangun dan rekayasa. Dilaksanakan di Pekanbaru dihadiri 300 peserta dari Dinas Perhubungan se - Indonesia ;

- b) Pembinaan Pelaksanaan Produksi Kendaraan Bermotor Dalam Penerapan (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) SRUT.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kunjungan ke beberapa industri karoseri dan pemodifikasi kendaraan bermotor. Tujuannya adalah memonitor apakah produk kendaraan bermotor yang ada di industri – industri karoseri yang dikunjungi telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk tahun 2013, kunjungan dalam rangka pembinaan dan penyuluhan dilakukan terhadap beberapa perusahaan karoseri di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat.



**Gambar III.1. Penyuluhan kepada Perusahaan Karoseri**

- c) Pelaksanaan Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor;

Total surat keterangan kegiatan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor yang dikeluarkan selama tahun 2013 berjumlah 70 surat keterangan.

- d) Pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;  
Selama tahun 2013 telah dihasilkan sebanyak 1.067 Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.4. Surat Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor**

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Rancang bangun kereta tempelan	50
2.	Rancang bangun kereta gandengan	2
3.	Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	1.015
	<b>TOTAL</b>	<b>1.067</b>

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat – 2013.

- e) Sertifikasi bengkel instalasi BBG pada kendaraan bermotor.  
Terkait fungsi pemerintah dalam menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, salah satunya berupa sertifikasi bengkel instalasi bahan bakar gas pada kendaraan bermotor. Tujuan sertifikasi bengkel BBG ini adalah untuk memastikan terpenuhinya semua persyaratan menyangkut fasilitas peralatan yang dimiliki dan teknisi pelaksana instalasi sistem BBG. Hingga tahun 2013 tercatat sebanyak 17 bengkel instalasi BBG yang telah mendapat sertifikasi.

**Tabel III.5. Sertifikasi Bengkel BBG**

No	Nama Bengkel BBG
1.	PT. PUTRAJAYA DAMAI SEJAHTERA
2.	PT. BINA TERA JASINDO
3.	PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
4.	PT. AUTO GAS INDONESIA
5.	PT. TRIENERGIE WAHANA
6.	PT. AEDICO DHARMA NUSANTARA
7.	PT. APTO GAZ INDONESIA
8.	PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA
9.	PT. PETROSS GAS
10.	PT. CNG GLOBAL
11.	PT. MERINDO INDAH LESTARI
12.	PT. ABDI RAHARJA, BAJAJ
13.	PT. ITOCHU
14.	PT. IKEMADA BERKAT ABADI
15.	PT. TUNAS RIDEAN
16.	PT. RAJA RAFFA SAMUDERA
17.	PT. MEGA DAYA SURVEI INDONESIA

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat – 2013.

- f) Penilaian fisik kendaraan dalam rangka penghapusan kendaraan dinas milik instansi pemerintah.

Selama tahun 2013 terdapat 34 unit dari 13 pemohon kendaraan dinas milik kementerian dan BUMN telah dinilai kondisi teknisnya dalam rangka penghapusan dari daftar inventaris negara. Penilaian kondisi teknis merupakan salah satu syarat penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah.

**c. Sub Direktorat Lalu Lintas Jalan**

Subdirektorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor, serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan di jalan nasional dan pengoperasian alat penimbangan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan, dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyusunan sistem informasi manajemen rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional;

- 6) Penyiapan bahan penyusunan analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta analisa dampak lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan;
- 7) Penyiapan bahan perumusan pemberian kualifikasi teknis petugas alat penimbangan; dan
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

#### **1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas
- b) Bimbingan Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c) Penetapan rambu petunjuk peringatan, perintah dan atau larangan pada ruas jalan nasional tahap III;
- d) Penetapan rambu petunjuk, peringatan, perintah dan atau larangan pada ruas jalan tol tahap IV;
- e) Pengadaan dan pemasangan VMS portal dan CCTV(Kecepatan) tahap I;
- f) Revitalisasi pengoperasian VMS;
- g) Pengembangan Sistem Informasi Lalu lintas di Jalan Nasional tahap VI;
- h) Penetapan tingkat pelayanan jalan nasional di Pulau Jawa;
- i) Review DED Test Track dan Master Plan Balau Uji Tipe Kendaraan Bermotor;

#### **2) Seksi Perlengkapan Jalan**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Perlengkapan Jalan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Semiloka Perlengkapan Jalan;
- b) Pembinaan dan Sosialisasi Jembatan Timbang;
- c) Pembangunan laboratorium fasilitas perlengkapan jalan tahap IV;
- d) Pembangunan LPJU Solar Cell di Jalur Pantura;
- e) Pembangunan LPJU Solar Cell di Jalur Pansela;
- f) Pembangunan LPJU Solar Cell di Jalur Lintas Timur Pulau Sumatera;
- g) Pembangunan fasilitas perlengkapan jalan ASIA DAN ASEAN Highway;
- h) Pengadaan pengukur marka (LTL-XL Retroreflector);
- i) Pengadaan pengukur rambu-rambu lalu lintas (retrising FR3 retrroreflector);
- j) Rehabilitasi APILL di jalan nasional di Pulau Jawa berbasis Solar cell tahap V;

- k) Pemeliharaan lampu penerangan jalan solar cell di jalur pantura tahap IV;
- l) Pemeliharaan lampu penerangan jalan solar cell di jalur Pansela tahap I;
- m) Pengembangan sistem informasi E-Enforcement penanganan angkutan barang di JT dan PKB pulau Jawa tahap II;
- n) Perumusan penetapan nomor rute jalan nasional di Pulau NTB dan NTT;
- o) Penetapan operasional jembatan timbang tahap III (Kalimantan);
- p) Kajian teknis efektifitas penggunaan tenaga surya atau tenaga listrik bagi APILL dan LPJU;
- q) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas LLAJ di Daerah;
- r) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Operasional Jembatan Timbang di Pulau Jawa;
- s) Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi E-Enforcement Penanganan Angkutan Barang di PKB dan JT di P. Jawa.
- t) Inventarisasi Kebutuhan Perlengkapan Jalan untuk Asia dan ASEAN Highway di pulau sumatera-jawa-bali tahap III;
- u) Survey TC Angkutan Lebaran Tahun 2013;
- v) Survey Sarana dan Prasarana kegiatan Angkutan Lebaran 2013.

#### **d. Sub Direktorat Angkutan Jalan**

Sub Direktorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya dan Alat Berat, pemberian Izin Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya dan Alat Berat serta perhitungan tarif angkutan umum sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya dalam :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya dan Alat Berat serta tarif angkutan penumpang dan/ atau barang di jalan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang angkutan penumpang dan angkutan barang serta tarif angkutan penumpang dan/ atau barang di jalan;

- 3) Penyiapan bahan perumusan pemberian izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara dan trayek antar kota antar propinsi, izin operasi angkutan pariwisata, taksi tertentu dan angkutan sewa, penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi, serta pengendalian angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya dan alat berat di jalan;
- 4) Penyiapan bahan penilaian kinerja perusahaan angkutan umum, pemberian penghargaan perusahaan angkutan umum dan pemberian subsidi angkutan umum;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi di bidang angkutan jalan; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, Sub Direktorat Angkutan Jalan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

**a) Rakernis Bidang Angkutan Jalan**

Kegiatan Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Jalan dilaksanakan di Yogyakarta pada bulan September 2013. Maksud dilaksanaannya Kegiatan Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Jalan Tahun 2013 di Kota Yogyakarta adalah untuk Mengevaluasi dan Mensosialisasikan kebijakan – kebijakan dan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menyangkut upaya membantu Pemerintah Pusat dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan Angkutan umum di jalan, yaitu Pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah terkait dengan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis, Perusahaan Angkutan Umum AKAP, AJAP, Pariwisata dan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya dan Alat Berat.

**b) Heregistrasi, Klasifikasi dan Pembinaan Perusahaan Angkutan Jalan**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan melaksanakan amanat Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penyelenggaraan pemberian perizinan angkutan umum dalam trayek, dilakukan kegiatan pendataan ulang atau Her-Registrasi kepada perusahaan angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek perihal kondisi manajemen perusahaan yang meliputi data administrasi perusahaan, armada serta operasional di lapangan.

Kegiatan Her-Registrasi kepada sebagian Perusahaan Angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek di Pulau Bali, yang dilaksanakan pada bulan Maret dan Oktober Tahun 2013, dengan hasil :

- (1) Tersusunnya data perizinan angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang terbaru tentang operasional dan pelayanan dari masing – masing Perusahaan angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek;
- (2) Tersusunnya data tentang ketersediaan sarana angkutan AKAP di lapangan sebagai dasar dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek;
- (3) Terciptanya pelayanan angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang lebih mengutamakan keselamatan/kualitas pelayanan kepada pengguna jasa;



**Gambar III.2. Herregistrasi, Klasifikasi dan Pembinaan Angkutan Perusahaan Jalan Tahun 2013**

**c) Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan**

Kegiatan Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan dilaksanakan di Kota Malang pada bulan September 2013. Maksud dilaksanaannya kegiatan Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2013 di Kota Malang ini adalah untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah menyangkut upaya pemerintah untuk membantu usaha angkutan dan memberikan motivasi usaha serta peningkatan performance usaha dibidang angkutan.

**d) Pelaksanaan Pemilihan Perusahaan Angkutan Jalan dengan Pelayanan Terbaik pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2013 (1433 H)**

Kegiatan ini sebagai upaya Pemerintah mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan antar kota antar provinsi melalui pemberian

Reward bagi Perusahaan Angkutan Umum yaitu dengan melakukan Pemilihan Pengusaha Angkutan Antar Kota Antar Provinsi dan Angkutan Pariwisata yang diharapkan tidak hanya dilakukan pada periode Angkutan Lebaran saja tapi merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sekali pada semua perusahaan angkutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dari hasil kegiatan yang dilakukan, diperoleh penganugrahan kepada Perusahaan yang terbaik dengan berbagai kategori, yaitu :

- (1) Kategori AKAP Ekonomi Terbaik
  - (a) PO. Bhineka Sangkuriang Transport di Kota Bandung;
  - (b) PO. Aneka Jaya di Kabupaten Pacitan;
  - (c) PT. Sinarjaya Megahlanggeng di Jakarta;
- (2) Kategori AKAP Non Ekonomi Terbaik
  - (a) PT. Malino Putra Kencana di Jakarta;
  - (b) PO. Samarinda Lestari di Kota Balikpapan;
  - (c) PO. Sentosa Transport di Kota Medan;
  - (d) PO. Puspa Jaya di Kota Bandar Lampung;
  - (e) PO. Eka di Kabupaten Mojokerto;
  - (f) PT. HS. Budiman di Kota Tasikmalaya.
- (3) Kategori Pariwisata Terbaik
  - (a) PO. Sindoro Satriamas di Kota Semarang;
  - (b) PO. Surya Putra di Kota Bandung;
  - (c) PT. Big Bird di Jakarta.

Selain penganugrahan PO. Terbaik, terdapat penganugrahan perusahaan penerima Lifetime Achievement, antara lain :

- (1) Angga Vircanza Chairul, Pimpinan PO. N.P.M di Kota Padang Panjang;
- (2) Hadi Wiyana, Pimpinan PO. Sahabat di Kota Cirebon;
- (3) Wawan Irawan, Pimpinan PO. Sami Jayadi Kota Bandung;
- (4) H. Soewito, Pimpinan PO. Antar Jaya di Kab Karanganyar;
- (5) Krisjanto Anggarjito, Pimpinan PO. Rajawali di Kota Surakarta;
- (6) M. Basri Zain, Pimpinan PO Taspi Trading Coy di Kota Makasar;
- (7) Nata Laksana, Pimpinan PO Raya di Kab. Wonogiri;
- (8) Ir. J. Budiarto, Pimpinan PO. Menara Jaya di Kota Tegal;
- (9) Peter Lumampauw Pimpinan PO. Jawa Indah di Kota Surabaya;
- (10) Sulistio Santoso, Pimpinan PO. Gelora Lintas Maharitas di Kota Balikpapan.



**Gambar III.3. Ceremonial Penghargaan PO. Terbaik Tahun 2013  
oleh Menteri Perhubungan**



**Gambar III.4. Survei ke Perusahaan Otobis sebagai Nominasi Pemilihan  
Perusahaan Terbaik Tahun 2013**

**e) Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan Angkutan Jalan**

Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan Angkutan Jalan dilaksanakan di Kota Semarang pada bulan November 2013. Maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk :

- (1) Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha terkait dengan keahlian dalam manajemen pengelolaan perusahaan angkutan yang baik, efektif dan efisien dari segi Sumber Daya Manusia, Teknologi Administrasi dan Keuangan Perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan jalan yang tepat, cepat, aman, nyaman dan selamat.

- (2) Memberikan sosialisasi kepada perusahaan angkutan umum tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan kepada pengguna jasa maupun pihak ketiga berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.
- (3) Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pengusaha angkutan dalam bidang manajemen pengelolaan sumber daya manusia, Teknologi Administrasi dan Keuangan Perusahaan untuk menciptakan perusahaan angkutan AKAP, AJAP, Pariwisata dan Angkutan Barang Khusus yang berdaya saing sehat dan profesional dalam rangka mempersiapkan dan membentuk perusahaan angkutan jalan yang kuat menghadapi era perdagangan bebas sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan angkutan asing terutama dibidang angkutan barang.



**Gambar III.5. Acara Pengembangan Keahlian Manajemen Perusahaan Angkutan Jalan Tahun 2013 di Semarang**

**f) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bertahap dari bulan Maret sampai bulan Desember 2013.

Dasar pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi angkutan perintis tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- (1) DIPA Tahun Anggaran 2013 Satuan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 022-03.1.466570/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.318/AJ.204/DRJD/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2013;



**Gambar III.6. Pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan**

**g) Evaluasi Jaringan Trayek dan Tarif Angkutan Umum**

**(1) Evaluasi Jaringan Trayek**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan disebutkan bahwa " Menteri melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan bermotor pada tiap-tiap trayek dan wajib mengumumkannya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Berkaitan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap jaringan trayek yang sudah ada maupun yang perlu dikembangkan serta evaluasi kebutuhan angkutan AKAP sebagai pedoman dalam penetapan jaringan trayek dan kebutuhan angkutan. Untuk Tahun 2013, dilaksanakan Evaluasi Jaringan Trayek AKAP di Pulau Jawa dan Sumatera.



**Gambar III.7. Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum AKAP**

## (2) Monitoring Tarif Angkutan Umum

Monitoring Tarif Angkutan Umum Tahun 2013 dilaksanakan di Kota Surabaya, Banda Aceh, Medan, Semarang, Balikpapan, Palu, Bandung, Tangerang, Yogyakarta, Pacitan dan Solo.

Maksud dilakukannya kegiatan evaluasi biaya pokok angkutan antar kota kelas ekonomi adalah untuk menjamin kelangsungan usaha angkutan penumpang umum antar kota kelas ekonomi.

Sedangkan tujuan dilakukannya kegiatan evaluasi biaya pokok angkutan antar kota kelas ekonomi, adalah : Untuk mendapatkan data dan informasi terkini terkait dengan harga-harga komponen biaya pokok angkutan ; Untuk mengetahui apakah pemberlakuan tarif angkutan antar kota di lapangan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. ; Agar dapat ditemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemberlakuan tarif angkutan di lapangan sehingga dapat diambil langkah-langkah solusi dan antisipasi kebijakan tarif angkutan ke depan ; dan Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan tarif angkutan antar kota kelas ekonomi.



**Gambar III.8. Monitoring Tarif Angkutan Umum Tahun 2013**

## (3) Evaluasi Kinerja angkutan umum di Bandara Internasional Sokarno – Hatta

Kegiatan Evaluasi Kinerja angkutan umum di Bandara Internasional Sokarno – Hatta dilaksanakan pada bulan Januari 2013.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya evaluasi terhadap pelayanan Angkutan Pemadu Moda Perumahan Batununggal Indah Bandung – Bandara Soekarno Hatta adalah : Melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan Angkutan Pemadu Moda Perumahan Batununggal Indah Bandung – Bandara Soekarno Hatta

(BSH);Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberlakuan Tarif Angkutan Pemadu Moda yang berlaku pada saat ini;Mendapatkan preferensi penumpang Angkutan Pemadu Moda untuk dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan; dan untuk Mengumpulkan bahan-bahan pendukung untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan Angkutan Pemadu Moda Perumahan Batununggal Indah Bandung– Bandara Soekarno Hatta.



**Gambar III.9. Fasilitas Kedatangan/Keberangkatan Angkutan Pemadu Moda**

**h) Evaluasi Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Persaingan Usaha Perusahaan Angkutan Jalan.**

Maksud dilakukannya Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Persaingan Usaha Perusahaan Angkutan Jalan pada Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Jalan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada saat ini;
- (2) Menemukenali permasalahan yang mendasar terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sarana dan prasarana angkutan jalan yang dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Jalan;
- (3) Menemukan dan mengenali permasalahan mendasar pada manajemen perusahaan angkutan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM), Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan.

Adapun tujuan dilakukannya Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Dan Persaingan Usaha Perusahaan Angkutan Jalan pada Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk mengetahui pemenuhan fasilitas Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan pada masing-masing kendaraan yang dioperasikan sebagai angkutan jalan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - (2) Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menerapkan prosedur perawatan, pemeliharaan dan operasional kendaraan dalam rangka mencegah dan meminimalisasi kecelakaan di jalan;
  - (3) Untuk mengetahui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing perusahaan angkutan sebagai dasar evaluasi pelayanan di saat ini dan masa mendatang;
  - (4) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan angkutan ajalan dalam rangka penyelenggaraan angkutan yang aman dan selamat;
  - (5) Untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan kajian dalam perencanaan kebijakan Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan, terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Perusahaan Angkutan Jalan pada sarana dan prasarana perusahaan Angkutan Jalan.
- i) **Pelaksanaan Pelatihan Tata cara Pelayanan Pemberian Izin Angkutan Pariwisata dan Angkutan Barang sesuai Standar ISO.**

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tata cara Pelayanan Pemberian Izin Angkutan Pariwisata dan Angkutan Barang sesuai Standar ISO dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2013 di Kota Batam.

Adapun manfaat dari dilaksanakan kegiatan Pelatihan Tata cara Pelayanan Pemberian Izin Angkutan Pariwisata dan Angkutan Barang sesuai Standar ISO di Batam adalah : memudahkan para pelaksana dalam melakukan tugas dan fungsinya secara berkesinambungan, sehingga mutu Proses, Produk dan Sumber Daya dapat terkendali dan konsisten; Dengan adanya Sasaran Mutu yang telah ditetapkan di semua unit yang merupakan target secara yang harus dicapai, maka akan mendorong seluruh komponen yang ada di Pusat Pelayanan Pemberian Izin Trayek, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dijen Perhubungan Darat; Dapat memberi peningkatan dalam banyak hal, termasuk kepuasan pelanggan: dan dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan sering memicu peningkatan produktivitas



**Gambar III.10 Pelaksanaan Acara Pelatihan Mutu Pelayanan Perizinan Angkutan Jalan Tahun 2013 di Batam**

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2013, Subdit Angkutan Jalan melakukan study, sebagai berikut :

**a) Survey Load Faktor Angkutan Penumpang Umum AKAP di Pulau Sumatera Tahap II**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal (145) ayat (1) telah diamanatkan bahwa Menteri melakukan evaluasi kebutuhan angkutan tiap-tiap trayek sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan evaluasi tersebut perlu data pendukung baik data primer maupun data sekunder yang akurat serta pengamatan langsung di lapangan mengingat dengan berkembangnya teknologi informasi dan semakin tingginya biaya transportasi sebagai pendukung kegiatan pergerakan masyarakat, telah mempengaruhi pola pergerakan masyarakat saat ini.

Sangat penting bagi Pemerintah selaku regulator untuk mengetahui perkembangan perubahan paradigma yang terjadi pada masyarakat terkait kebutuhan transportasi sebagai dasar dalam pembuatan regulasi di bidang transportasi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan Survei Load Faktor Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Pulau Sumatera Tahap II dengan maksud kegiatan mendapatkan data primer terkait kendala dan kinerja kondisi eksisting jaringan trayek dan jaringan pelayanan angkutan AKAP dan tentunya sebagai pedoman dalam penetapan jaringan trayek AKAP, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa AKAP di wilayah Sumatera.

**b) Kajian Blueprint Angkutan Jalan Perintis.**

Kewajiban penyelenggaraan angkutan umum yang telah tercantum dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selaku pemerintah pusat.

Konektivitas antar satu tempat ke tempat lain antar daerah di Indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah kepulauan harus ditunjang dengan adanya pelayanan jasa transportasi berupa angkutan perintis. Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan perintis kepada masyarakat agar konektivitas kegiatan masyarakat terlaksana dengan optimal diperlukan adanya suatu pedoman yang berupa Blueprint Angkutan Jalan Perintis.

**c) Kajian Teknis Pengembangan Prinsip – Prinsip Ketatalaksanaan Bidang Angkutan Jalan.**

Ketatalaksanaan merupakan salah satu elem pendayagunaan aparatur dalam menggerakkan jalannya organisasi pemerintah disamping bidang sumber daya manusia, pengawasan dan akuntabilitas , serta pelayanan ruang lingkup ketatalaksanaan meliputi penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja, sehingga ketatalaksanaan terkait pula dengan perilaku hemat, kesederhanaan hidup, keteladanan serta disiplin dan budaya kerja aparatur sendiri.

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan pokok –pokok pikiran yang terkait dengan ketatalaksanaan bidang angkutan jalan seperti pembagian tanggungjawab, pembinaan dan penyelenggaraan oleh pusat dan daerah, kewajiban penyelenggaraan angkutan umum, kewajiban untuk membentuk forum lalu lintas, dan tanggung jawab lain terkait tugas pemerintah dalam bidang angkutan jalan.

Dengan adanya kajian teknis pengembangan prinsip-prinsip ketatalaksanaan bidang angkutan jalan, output yang diharapkan adalah adanya pembagian tugas pokok yang jelas di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**e. Sub Direktorat Pengendalian Operasional**

Subdirektorat Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Penyiapan bahan perumusan pengusulan pengangkatan/ pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### 1) Seksi Monitoring Operasional

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Monitoring Operasional melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pengadaan peralatan penunjang pengendalian operasional;
- b) Kontingensi penanganan bencana alam;
- c) Pengawasan Operasional Angkutan Orang dan barang.
- d) Pengawasan Pelaksanaan Produksi Karoseri.
- e) Pengembangan jaringan alat komunikasi.
- f) Pemeliharaan dan Pengoperasian alat Komunikasi.

- g) Monitoring pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor.
- h) Penegakan hukum perijinan angkutan secara nasional.
- i) Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor
- j) Pengawasan Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- k) Pengawasan operasional angkutan lintas batas negara;
- l) Evaluasi kinerja angkutan umum di Bandara Soekarno Hatta.
- m) Posko Koordinasi Lapangan Angkutan
- n) Pengawasan dan pengendalian operasional angkutan penumpang di Bandara Soekarno Hatta

## 2) Seksi Bimbingan Teknis PPNS

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Bimbingan Teknis PPNS melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Rakernis PPNS bidang LLAJ;
- b) Pengadaan peralatan penyidikan tindak pidana pelanggaran bidang LLAJ;
- c) Pengadaan buku tilang pada kantor pusat kementerian perhubungan
- d) Pemutakhiran data PPNS bidang LLAJ Seluruh Indonesia;
- e) Kajian teknis kinerja penyidik pegawai negeri bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f) Kajian teknis manajemen organisasi direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- g) Perencanaan teknis penyusunan pedoman pemeriksaan bidang pengawasan operasional LLAJ;
- h) Pengawasan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran bidang LLAJ oleh PPNS bidang LLAJ
- i) Pengawasan persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor;
- j) Kegiatan Dalops (Penyuluhan Penegakan Hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di Ambon Prov Maluku dan Medan Prov Sumatera Utara.
- k) Pengadaan Buku Pedoman PPNS.
- l) Pemberian kualifikasi teknis bidang LLAJ;
- m) Pelaksanaan Penyidikan bidang LLAJ
- n) Pemeliharaan dan Pengoperasian Kendaraan Operasional.
- o) Monitoring Komprehensif Pimpinan Ditjen Hubdat
- p) Pengadaan peralatan kontingensi Penanganan bencana Alam.
- q) Peningkatan Kualitas PPNS Pola 400 Jam.
- r) Peningkatan Ketrampilan (*refreshing*) PPNS LLAJ.

### 3. DIREKTORAT LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan berdasarkan KM No. 60 Tahun 2010 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- e. pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

#### a. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten / kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten / kota;
- 3) penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- 4) penyiapan bahan penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

#### **1) Seksi Anev Jaringan**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Anev Jaringan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Evaluasi Kinerja Lintas Penyeberangan.
- b) Penyusunan data jaringan transportasi sungai danau.
- c) Mengelola kegiatan penyusunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
- d) Mengelola kegiatan penyusunan bahan analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
- e) Mengelola kegiatan analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
- f) Menyusun informasi jaringan transportasi SDP untuk bahan pembinaan.
- g) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP Provinsi.

- h) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan studi-studi bidang perencanaan, pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP.
- i) Menyusun Penetapan Kinerja 2013, LAKIP 2013, dan Laptah 2013.

## 2) Seksi Pengembangan Jaringan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013 Seksi Pengembangan Jaringan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

- a) Pengawasan pengembangan terhadap penetapan lintas penyeberangan antar propinsi maupun antar negara;
- b) Mengelola kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- c) Memberi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten/kota;
- d) Mengelola kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- e) Mengelola kegiatan penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f) Melaksanakan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- g) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP di beberapa provinsi;
- h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) Menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu yang ditentukan.

### b. Sub Direktorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Sub direktorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma,

pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan, pemeliharaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;
- 2) pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun sarana sungai, danau dan penyeberangan serta perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta registrasi sarana angkutan sungai dan danau;
- 4) pemberian kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai dan danau;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

#### **1) Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Evaluasi Kinerja Sarana Angkutan Penyeberangan Tahun 2013.
- b) Pemantauan dan bimbingan teknis pelaksanaan pembangunan sarana sungai danau dan penyeberangan;
- c) Peningkatan kemampuan SDM di bidang pembangunan kapal baru dan manajemen keselamatan sarana penyeberangan.

#### **2) Seksi Bimbingan Perawatan Sarana**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Bimbingan Perawatan Sarana melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Monitoring Registrasi Sarana Angkutan Sungai dan Danau
- b) Monitoring Pelaksanaan Docking Sarana Angkutan Penyeberangan Tahun 2013

- c) Peningkatan kemampuan SDM di bidang perawatan dan mempertahankan klas kapal penyeberangan.

**c. Sub Direktorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- 2) pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- 3) penyiapan bahan pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional;
- 4) pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

### 1) Seksi Rancang Bangun Pelabuhan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Rancang Bangun Pelabuhan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- b) Menyusun bahan laporan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- c) Memberikan bimbingan teknis terkait dengan desain dermaga kepada satker daerah;
- d) Melakukan monitoring pembangunan pelabuhan penyeberangan yang didanai oleh APBN;
- e) Melakukan inventarisasi data pelabuhan SDP di Indonesia yang sudah terbangun;
- f) Melakukan pemantauan terhadap progres-progres kegiatan pembangunan dermaga di daerah yang didanai dari APBN;
- g) Memberikan bimbingan teknis di lapangan pada waktu pelaksanaan pekerjaan.
- h) Penyelenggaraan Pelatihan Sistem Informasi Geografis Tahun 2013

### 2) Seksi Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Bimbingan Perawatan Pelabuhan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- i) Penyiapan bahan perumusan rencana pembentukan OPLAP/OPP;
- j) Memantau kinerja pelabuhan SDP di Indonesia;
- k) Pemantauan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan yang diusahakan;
- l) Sosialisasi pedoman teknis yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan oleh Menteri maupun Dirjen Perhubungan Darat;
- m) Peningkatan SDM dengan pendidikan dan pelatihan sistem informasi berbasis spasial (GIS).

#### d. Sub Direktorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang

manajemen lalu lintas, dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau;
- 2) pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau serta pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan.

#### 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Manajemen Lalu Lintas melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

- a) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Sertifikasi Kelaikan ASD;
- b) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pengukuran dan Penerbitan Surat Ukur ASD;
- c) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pengukuran dan Pengerukan Alur Pelayaran SDP dan Kolam Pelabuhan serta Reklamasi;
- d) Penyusunan Data Base Rambu SDP;
- e) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Keberangkatan ASD.
- f) Penyuluhan Keselamatan dan Kelaikan Sarana Kapal Sungai Dan Danau di adakan di 6 Provinsi yaitu, Provinsi Sulawesi Barat (Kab. Polewali Mandar), Provinsi Sumatera Selatan (Kab. Banyuasin), Provinsi Jawa Timur (Waduk

Sidorejo), Provinsi Sumatera Barat (Kab. Agam), Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas), Provinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda)

- g) Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Sungai dan Danau
- h) Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan



**Gambar III.11. Penyuluhan Keselamatan dan Kelaikan Sarana Kapal Sungai Dan Danau di Kabupaten Agam**



**Gambar III.12. Penyuluhan Keselamatan dan Kelaikan Sarana Kapal Sungai dan Danau di Kabupaten Polewali Mandar**

## 2) Seksi Alur dan Perambuan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Alur dan Perambuan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Sertifikasi Kelaikan ASD
- b) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pengukuran dan Penerbitan Surat Ukur ASD

- c) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Pengukuran dan Pengerukan Alur Pelayaran SDP dan Kolam Pelabuhan serta Reklamasi
- d) Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Keberangkatan ASD
- e) Melaksanakan bimbingan teknis kepada UPT dan instansi di daerah mengenai studi desain pengerukan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), dan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.
- f) Sosialisasi Pedoman Teknis Bidang LLASDP
- g) Pemantauan dan Evaluasi Fasilitas Alur Pelayaran Sungai dan Danau
- h) Pemantauan dan Evaluasi Alur Pelayaran Penyeberangan (SBNP).

**e. Sub Direktorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- 2) pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perhitungan tariff angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- 3) penyiapan bahan persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional;

- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

#### 1) Seksi Bimbingan Usaha Angkutan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Bimbingan Usaha Angkutan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan kesiapan perangkat operasi sarana dan prasarana, pemantauan dan pengawasan angkutan penyeberangan pada angkutan lebaran tahun 2013.
- b) Penyusunan evaluasi kinerja pelayanan angkutan penyeberangan pada lintas komersil.
- c) Pemeriksaan kapal angkutan penyeberangan setelah melakukan docking tahunan.
- d) Pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan persetujuan pengoperasian kapal.

#### 2) Seksi Tarif dan Keperintisan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Tarif dan Keperintisan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Monitoring penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis.
- b) Monitoring pelaksanaan docking kapal penyeberangan perintis.
- c) Pamantauan Tarif Angkutan Penyeberangan.
- d) Penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis (pemberian subsidi) tahun 2013.
- e) Pembahasan formulasi perhitungan tarif jasa pelabuhan (PP No. 6 tahun 2009).

### 4. DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka tugas pokok Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar,

norma, pedoman, kriteria, prosedur, penyelenggaraan teknis, bimbingan teknis dan bantuan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- b. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- c. Penyiapan perumusan dan penyelenggaraan teknis di bidang penyusunan rencana transportasi perkotaan, penyelenggaraan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan pemaduan moda transportasi yang wilayah pelayanannya melebihi 1 (satu) provinsi serta penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional perkotaan;
- d. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- e. Penyampaian perumusan dan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- f. Penyampaian pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- g. Penyampaian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan; dan
- h. Penyampaian pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

**a. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Perkotaan**

Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda

lainya, serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya;
- 2) Penyiapan bahan pelaksana bimbingan teknis dibidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan bantuan teknis di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan system informasi manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan dan pengkoordinasian SIM transportasi perkotaan;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan moda lainnya untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya, penyusunan system informasi manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

#### **1) Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang berbasis jalan yang terintegrasi dengan moda lainnya di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;
- b) Pemberian teknis penyusunan rencana induk jaringan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan moda lainnya untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu

wilayah administrasi provinsi di wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;

- c) Pengembangan dan Pemeliharaan Urban Transport Information Center (UTIC) wilayah I;
- d) Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan di Provinsi Sumatera Utara;



**Gambar III.13. Bimbingan Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2013**

- e) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan Di Wilayah Perkotaan;



**Gambar III.14. Kondisi Jalan di Kota Manado**

- f) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Perkotaan;
- g) Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan pada Kawasan Kota Batam dan Sekitarnya;
- h) Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Pada Kawasan Serang dan Sekitarnya (Ciseparang);

## 2) Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan wilayah II meliputi Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua;

- b) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan wilayah II;
- c) Pengembangan dan Pemeliharaan Urban Transport Information Center (UTIC) wilayah II;
- d) Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Barat;



**Gambar III.15. Bimbingan Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2013**

- e) Evaluasi Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan Di Wilayah Perkotaan Tahun 2013;



**Gambar III.16. Kondisi Jalan Pandanaran, Kab. Boyolali**

- f) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Perkotaan.
- i) Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan pada Kawasan Kota Batam dan Sekitarnya; dan
- g) Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Pada Kawasan Serang dan Sekitarnya (Ciseparang).

#### **b. Sub Direktorat Lalu Lintas Perkotaan**

Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan Mempunyai Tugas Melaksanakan Penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemantauan, penyelen

ggaraan, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor serta penyelenggaraan teknis manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian teknis pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan manajemen kebutuhan lalu lintas, perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan bantuan teknis di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan manajemen kebutuhan lalu lintas, perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi; dan
- 5) Penyiapan bahan penyusunan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen kebutuhan lalu lintas perparkiran, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi, bimbingan teknis dan bantuan teknis serta penyelenggaraan teknis pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

#### **1) Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pemberian Bimbingan Teknis Lalu Lintas di Perkotaan di wilayah I



**Gambar III.17 Bimbingan Teknis Sistem Lalu Lintas Tahun 2013**

- b) Pelaksana Kegiatan Workshop Forum ATCS Tahun 2013 di Wilayah I



**Gambar III.18. Kegiatan Workshop Forum ATCS Tahun 2013 di Wilayah I**

- c) Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Area Traffic Control System Di Wilayah Perkotaan Tahun 2013 di Wilayah I;
- d) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Arus Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional Tahun 2013 di Wilayah I;



**Gambar III.19. Kondisi Arus Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional di Kota Muara Bungo Tahun 2013**

- e) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2013;

- f) Perencanaan Database Kinerja Jaringan Lalu Lintas Perkotaan di Pulau Sumatera;
- g) Penyusunan Pedoman Tentang Tata Cara Penempatan, Pemasangan, Pemeliharaan dan Penghapusan Perlengkapan Jalan;
- h) Penyusunan Pedoman Teknis Tentang Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan (Gedung Parkir dan Taman Parkir);
- i) Penyusunan Pedoman Teknis Skema Manajemen Parkir di Perkotaan;
- j) Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Kepentingan Lalu Lintas.

## 2) Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di wilayah II;
- b) Pemberian bimbingan teknis Lalu Lintas di Perkotaan di wilayah II.



**Gambar III.20. Bimbingan Teknis Sistem Lalu Lintas Tahun 2013**

- c) Pelaksana Kegiatan Workshop Forum ATCS Tahun 2013 di Wilayah II.



**Gambar III.21. Kegiatan Workshop Forum ATCS Tahun 2013 di Wilayah II**

- d) Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Area Traffic Control System Di Wilayah Perkotaan Tahun 2013 di Wilayah II;

- e) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Arus Lalu Lintas Perkotaan Pada Jalan Nasional Tahun 2013 di Wilayah II;
- k) Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2013;
- l) Perencanaan Database Kinerja Jaringan Lalu Lintas Perkotaan di Pulau Sumatera;
- m) Penyusunan Pedoman Tentang Tata Cara Penempatan, Pemasangan, Pemeliharaan dan Penghapusan Perlengkapan Jalan;
- n) Penyusunan Pedoman Teknis Tentang Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan (Gedung Parkir dan Taman Parkir);
- o) Penyusunan Pedoman Teknis Skema Manajemen Parkir di Perkotaan;
- p) Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Kepentingan Lalu Lintas.

**c. Sub Direktorat Angkutan Perkotaan**

Subdirektorat Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemantauan, bimbingan teknis, bantuan Teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek, serta penyelenggaraan teknis penyusunan rencana umum jaringan trayek serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Angkutan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
- 2) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
- 3) Penyiapan bahan perumusan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek berupa saran angkutan umum perkotaan dan/atau fasilitas pendukungnya;

- 5) Penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan, pemantauan, bimbingan dan bantuan teknis, dan manajemen di bidang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi.

#### 1) Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Peraturan di Bidang Angkutan Perkotaan;
- b) Pengembangan sistem Transit di Wilayah Perkotaan;
- c) Pengadaan Bus Pelajar/Mahasiswa/angkutan umum Perkotaan sebanyak 60 unit;
- d) Pengadaan Bus BRT sebanyak 30 Unit;
- e) Evaluasi dan Pengembangan Alokasi Bus Bantuan;.
- f) Workshop Forum Sistem Transit;
- g) Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Kota Tentang Pedoman Teknis Angkutan Massal; dan
- h) Penyusunan Standarisasi Prasarana dan Fasilitas Pendukung.

#### 2) Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Peraturan di Bidang Angkutan Perkotaan.
- b) Pengembangan sistem Transit di Wilayah Perkotaan.
- c) Pengadaan Bus Pelajar/Mahasiswa/angkutan umum Perkotaan sebanyak 60 unit.
- d) Pengadaan Bus BRT sebanyak 30 Unit.
- e) Evaluasi dan Pengembangan Alokasi Bus Bantuan.
- f) Workshop Forum Sistem Transit.
- g) Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Kota Tentang Pedoman Teknis Angkutan Massal.
- h) Penyusunan Standarisasi Prasarana dan Fasilitas Pendukung.

#### d. Sub Direktorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan

Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek, serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan/atau barang;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda perkotaan angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul transportasi (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan;
- 4) Penyiapan bahan perumusan penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang serta pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan, angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan sistem informasi dan manajemen di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek angkutan penumpang umum dan barang;
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan teknis pemaduan moda transportasi perkotaan yang strategis dan/atau bersekala nasional; dan
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antara simpul transportasi, penyusunan sistem informasi dan manajemen, penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan

perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang serta pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda, serta penyelenggaraan teknis pemaduan moda transportasi perkotaan yang strategis dan/atau berskala nasional.

### 1) Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

- a) Analisis Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan
- b) Identifikasi dan Inventarisasi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan
- c) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemadu Moda
- d) Pengadaan Bus Pemadu Moda 10 unit
- e) Pengadaan Fasilitas Integrasi Moda di Palembang dan Bogor
- f) Perencanaan Teknis Wilayah Pelayanan dan Kebutuhan Angkutan Taksi Di Wilayah Perkotaan Joglo (Jogjakarta-Solo)
- g) Perencanaan Teknis Pola Distribusi Angkutan Barang Di Wilayah Perkotaan Jabodetabek (Tahap II)
- h) Penyusunan Petunjuk Teknis Fasilitas Integrasi Antar Moda Di Kota Kota Besar dan Metropolitan;
- i) Penyusunan Petunjuk Teknis Fasilitas Integrasi;
- j) Perencanaan Teknis Pola Distribusi Angkutan Barang di Wilayah Perkotaan di Jabodetabek Tahap II; dan
- k) Perencanaan Teknis Wilayah Pelayanan dan Kebutuhan Angkutan Angkutan Taksi di Wilayah Perkotaan Joglo (Jogjakarta – Solo).

### 2) Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan :

- a) Analisis Kinerja Pelayanan Angkutan Barang, Angkutan Pemadu Moda dan Angkutan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Perkotaan
- b) Identifikasi dan Inventarisasi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan
- c) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemadu Moda
- d) Pengadaan Bus Pemadu Moda 10 unit
- e) Pengadaan Fasilitas Integrasi Moda
- f) Pengadaan Software Transportasi Perkotaan termasuk Hardware

- g) Perencanaan Teknis Wilayah Pelayanan dan Kebutuhan Angkutan Taksi Di Wilayah Perkotaan Joglo (Jogjakarta-Solo)
- h) Perencanaan Teknis Pola Distribusi Angkutan Barang Di Wilayah Perkotaan Jabodetabek (Tahap II)
- i) Penyusunan Petunjuk Teknis Fasilitas Integrasi Antar Moda Di Kota Kota Besar dan Metropolitan
- j) Penyusunan Petunjuk Teknis Fasilitas Integrasi;
- k) Perencanaan Teknis Pola Distribusi Angkutan Barang di Wilayah Perkotaan di Jabodetabek Tahap II; dan
- l) Perencanaan Teknis Wilayah Pelayanan dan Kebutuhan Angkutan Angkutan Taksi di Wilayah Perkotaan Joglo (Jogjakarta – Solo).

**e. Sub Direktorat Dampak Transportasi Perkotaan**

Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan, penanganan dampak transportasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional pada kawasan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma , pedoman, riteria dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan, penanganan dampak transporasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis damapak lalu lintas di jalan nasional di kawasan perkotaan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan dan penanganan dampak transportasi, sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas serta penyelenggaraan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional pada kawasan perkotaan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan teknis penangan dampak transportasi berupa peralatan pendukung penggunaan bahan bakar alternatif, pemanfaatan teknologi kendaraan hybrid serta peralatan pemantau emisi gas buang dan tingkat kebisingan kendaraan bermotor;

- 4) Penyiapan bahan penyusunan sistem informasi dan manajemen dibidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan masterplan transportasi perkotaan ramah lingkungan;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan teknis analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi kompetensi penilaian analisis dampak lalu lintas; dan
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis, pemberian bantuan teknis, penyusunan sistem informasi dan manajemen, penyusunan masterplan transportasi perkotaan ramah lingkungan pelaksanaan sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan ramah lingkungan penyelenggaraan teknis pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

#### 1) Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I meliputi daerah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang Dampak transportasi perkotaan berwawasan lingkungan;
- b) Penyusunan masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan;
- c) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- d) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas;
- f) Kegiatan Peningkatan Efisiensi dan kualitas Emisi Kendaraan Bermotor Melalui Metode Berkendaraan *Smart Driving* serta Implementasinya;

- g) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan BBG untuk Transportasi Perkotaan;



**Gambar III.22. Tampak Kendaraan Mother Station Parkir di SPBG Sukanto Tahun 2013**

- h) Evaluasi Dampak Lalu Lintas pada Kawasan Jalan Nasional Perkotaan;  
 i) Penyusunan Pedoman dan Aplikasi Pelaksanaan dan Evaluasi RAND – GRK;  
 j) Penyusunan Pedoman Kompetensi Penyusunan Andalalin.

## **2) Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II meliputi daerah Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang Dampak transportasi perkotaan berwawasan lingkungan;  
 b) Penyusunan Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan;  
 c) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;  
 d) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;



**Gambar III.23. Aktivitas Komersil di Jalan Gatot Subroto Tahun 2013**



**Gambar III.24. Bundaran/Simpang Ubung**

- e) Penyiapan bahan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas;
- f) Kegiatan Peningkatan Efisiensi dan kualitas Emisi Kendaraan Bermotor Melalui Metode Berkendaraan *Smart Driving* serta Implementasinya;
- g) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan BBG untuk Transportasi Perkotaan;
- h) Evaluasi Dampak Lalu Lintas pada Kawasan Jalan Nasional Perkotaan;
- i) Penyusunan Pedoman dan Aplikasi Pelaksanaan dan Evaluasi RAND – GRK;
- j) Penyusunan Pedoman Kompetensi Penyusunan Andalalin.

## 5. DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka Direktorat Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi, audit keselamatan transportasi darat.
- b. Pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi serta audit keselamatan transportasi darat;
- c. Penyusunan kualifikasi dan pemberian teknis sumber daya manusia di bidang keselamatan transportasi darat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

**a. Sub Direktorat Manajemen Keselamatan**

Subdirektorat Manajemen Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, penetapan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pengkajian keselamatan, penyusunan rencana, program, monitoring dan evaluasi pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta sistem informasi manajemen keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Manajemen Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem informasi manajemen keselamatan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan Propinsi, Kota dan Kabupaten, dan system informasi manajemen keselamatan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan rencana umum dan rencana induk keselamatan nasional dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- 4) penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan system informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi anggota Unit Pengkajian Keselamatan; dan

- 6) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pengkajian keselamatan.

### 1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keselamatan

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi data kecelakaan, kualifikasi unit pengkajian keselamatan dan penyiapan bahan pengembangan system informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Monitoring dan Evaluasi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Program Kerja Keselamatan Transportasi Darat;
- b) Monitoring Evaluasi Manajemen Keselamatan;
- c) Pemantauan Keselamatan Transportasi Melalui Media Cetak;
- d) Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Darat Pada Masa Angkutan Lebaran;
- e) Peningkatan Kapasitas dalam Pengkajian Keselamatan;
- f) Pemilihan Pelajar Pelopor;
- g) Penyusunan Potret Kinerja Keselamatan Transportasi Darat;
- h) Peningkatan Kapasitas Pelajar Pelopor Keselamatan;
- i) Pemberdayaan Masyarakat Peduli Keselamatan;

### 2) Seksi Pengembangan Keselamatan.

Seksi Pengembangan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan keselamatan, dan penyiapan bahan harmonisasi kebijakan dan penyusunan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Pengembangan Keselamatan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pembinaan Teknis Pembentukan Forum LLAJ;
- b) Workshop Manajemen Keselamatan;
- c) Penyusunan Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ (Sumut, Sulawesi Selatan, Kaltim dan Jateng);

- d) Manajemen Kecepatan untuk Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas;
- e) Kajian Teknis Penilaian Resiko Rute Angkutan Umum AKAP;

#### **b. Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan**

Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan, serta pelaksanaan promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan, publikasi dan deseminasi, serta kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; dan
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan.

##### **1) Seksi Promosi**

Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi keselamatan dan penyiapan bahan penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Promosi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Studi Penyusunan Bahan Sosialisasi Keselamatan Jalan Usia Remaja;
- b) Penyusunan Pembangunan Taman Edukatif Keselamatan Transportasi Darat;
- c) Sosialisasi Keselamatan Melalui Buletin;

- d) Workshop Sosialisasi Modul Keselamatan Usia 3-12 Tahun;
- e) Pemantauan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat di Sekolah;
- f) Sosialisasi Keselamatan Melalui Radio;
- g) Penayangan di Media Televisi;
- h) Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan jalan 2013;
- i) Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Cetak;
- j) Pelaksanaan Peringatan Hari Korban Kecelakaan;
- k) Penyelenggaraan Rest Area Mudik Sepeda Motor.

## 2) Seksi Kemitraan

Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan keselamatan dan penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Kemitraan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Monitoring dan Evaluasi Pekan Keselamatan
- b) Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan
- c) Pembentukan Komunitas Keselamatan Jalan
- d) Rencana Penyusunan Pedoman Teknis Zona Selamat Sekolah
- e) Pembuatan Desain Sosialisasi Keselamatan
- f) Pengadaan Bahan Sosialisasi
- g) Pengadaan Helm
- h) Pembuatan dan Penayangan Reality Show
- i) Pengadaan Peralatan Sosialisasi
- j) Pembuatan Film Animasi Keselamatan Serial Zeta

### c. Sub Direktorat Bina Keselamatan Angkutan Umum

Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perusahaan angkutan umum dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keselamatan perusahaan angkutan umum dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dan pengembangan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan pemberian akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum; dan
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perusahaan angkutan umum dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.

#### **1) Seksi Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum**

Seksi Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perusahaan angkutan umum.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Pedoman Teknis Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Perusahaan Angkutan Barang;
- b) Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (AKUT dan Program Aksi);
- c) Workshop Sistem Manajemen Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum.

#### **2) Seksi Sertifikasi Pengemudi**

Seksi Keselamatan Awak Angkutan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Sertifikasi Pengemudi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Konsep Penilaian Unjuk Kerja Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum;

- b) Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan Umum Perkotaan/Pedesaan;
- c) Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi AKAP;
- d) Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Taksi;
- e) Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan B3;
- f) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional.

**d. Sub Direktorat Audit dan Inspeksi Keselamatan**

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan serta investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam Melaksanakan tugas, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang audit keselamatan, investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan laik fungsi jalan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang audit keselamatan, investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan laik fungsi jalan;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan inspeksi keselamatan sarana dan prasarana transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan serta investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan, alur sungai dan danau;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang audit, inspeksi keselamatan sarana dan prasarana, investigasi/identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan.

## 1) Seksi Audit Keselamatan

Seksi Audit Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan dan penyiapan bahan pelaksanaan audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Audit Keselamatan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Pedoman Teknis Identifikasi dan Penanganan Lokasi Potensi/Rawan Kecelakaan;
- b) Kajian Persyaratan Auditor Independen Keselamatan jalan;
- c) Monitoring Bidang Audit Keselamatan Jalan;
- d) Monitoring Bidang Audit Keselamatan ASD;
- e) Pelaksanaan Audit Prasarana Jalan;
- f) Pelaksanaan Audit Prasarana Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
- g) Bimbingan Teknis di Bidang Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan;
- h) Rencana Penyusunan Pedoman Teknis di Bidang Audit Keselamatan Jalan;
- i) Rencana Penyusunan Pedoman Teknis di Bidang Audit Keselamatan SDP;
- j) Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan;
- k) Pemberdayaan Audit Keselamatan ASDP;

## 2) Seksi Inspeksi Keselamatan

Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan serta pelaksanaan investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013, Seksi Inspeksi Keselamatan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pedoman Teknis Inspeksi Keselamatan ASD
- b) Pelaksanaan Inspeksi Prasarana Keselamatan ASD
- c) Bimbingan Teknis di Bidang Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan

- d) Rencana Penyusunan Pedoman Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan
- e) Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Prasarana Jalan
- f) Inspeksi Keselamatan Transportasi Darat
- g) SID dan DED DRK Provinsi Bali dan NTB
- h) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Berkeselamatan di Kab. Tulungagung

## BAB IV

## PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2013

### A. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### 1. Umum

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luasan mencapai 9,8 juta km<sup>2</sup> (termasuk perairan) dan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 251.858 juta jiwa (tahun 2012).

Dengan jumlah penduduk demikian besarnya, maka sangat wajar apabila perjalanan penumpang dan barang yang dibangkitkan sangat besar jumlahnya yang sangat berpengaruh pada pembangunan masing – masing daerah.

Dengan melihat kondisi saat ini, dimana pergerakan lalu lintas jalan yang sangat dominan, fenomena aktual yang terjadi di masyarakat, permasalahan dan tantangan yang ada serta kondisi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diharapkan secara prospektif dapat mewujudkan suatu arah, visi, misi strategi kebijaksanaan yang lebih baik dan konsisten sehingga eksistensi Direktorat LLAJ benar-benar nyata mampu mendorong tercapainya sasaran pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan secara optimal yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi jalan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Telah banyak upaya dan peranan yang dilaksanakan oleh Direktorat LLAJ dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang saat ini telah berjalan. Namun dengan merespon setiap perubahan, perkembangan dan tantangan yang ada perlu terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan di berbagai aspek dengan disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia/aparatur Direktorat LLAJ pada semua lini yang lebih profesional dan berwibawa.

Dengan adanya perubahan dan perkembangan di berbagai segi seperti sosial ekonomi masyarakat, politik/pemerintahan, teknologi, globalisasi otonomi daerah akan membawa konsekuensi logis perlunya penyesuaian, perubahan, perbaikan dan penyempurnaan 'warna' organisasi Direktorat LLAJ agar dapat secara nyata lebih responsif/proaktif melaksanakan peranannya baik di dalam pembinaan, pengaturan pengawasan dan *advisory* di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga dengan demikian secara institusional Direktorat LLAJ dari waktu ke waktu dapat terus meningkatkan kinerjanya.

## 2. Perkembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### a. Jaringan Jalan

Peningkatan panjang jalan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, terjadi pada status jalan Kabupaten/Kota di Indonesia. Berikut ini merupakan tabel panjang jalan menurut status jalan.

**Tabel IV.1. Panjang Jalan Nasional**

No.	Status Jalan	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Jalan Nasional	38,570	38,570	38,570
2	Jalan Propinsi	53,291	53,642	53 642
3	Jalan Kabupaten / Kota	395,453	404,395	409,757
<b>Total Panjang Jalan</b>		<b>487,314</b>	<b>496,607</b>	<b>501,969</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

### b. Jaringan Trayek

#### 1) Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Pariwisata

Sebagai titik tolak pelayanan angkutan umum antar kota antar Propinsi, Ditjen Hubdat dengan SK. No. 1200/AJ.205/DRJD/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) di seluruh Indonesia. Posisi bus AKAP pada tahun 2012 menjadi 21.720 unit bus dengan 907 perusahaan otobus, dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 22.186 unit bus dengan 921 perusahaan otobus . Sedangkan posisi bus pariwisata pada tahun 2012 sebanyak 14.984 unit bus dengan 1.220 perusahaan otobus, mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 18.304 unit bus dengan 1.332 perusahaan otobus.

**Tabel IV.2. Jumlah Bus AKAP dan Pariwisata Tahun 2013**

NO	PROPINSI	AKAP		PARIWISATA	
		PO	BUS	PO	BUS
1	Nanggroe Aceh D.	22	684	3	40
2	Sumatera Utara	45	1.292	26	213
3	Sumatera Barat	67	897	16	121
4	Riau	26	417	15	124
5	Jambi	37	517	4	30
6	Sumatera Selatan	32	588	11	73
7	Bengkulu	21	327	6	61

NO	PROPINSI	AKAP		PARIMSATA	
		PO	BUS	PO	BUS
8	Lampung	28	580	20	237
9	Bangka Belitung	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	8	130
11	DKI Jakarta	68	3.882	121	5.490
12	Jawa Barat	119	3.903	251	2.822
13	Jawa Tengah	148	4.119	308	3.241
14	DI. Yogyakarta	29	538	54	856
15	Jawa Timur	72	2.007	240	1.792
16	Banten	47	1.150	61	1056
17	Bali	14	212	162	1.802
18	NTB	10	121	4	85
19	NTT	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	3	30	13	33
21	Kalimantan Tengah	24	158	0	0
22	Kalimantan Selatan	25	167	2	6
23	Kalimantan Timur	5	74	1	4
24	Sulawesi Utara	7	106	1	2
25	Sulawesi Tengah	24	132	5	86
26	Sulawesi Selatan	37	295	0	0
27	Sulawesi Tenggara	1	8	0	0
28	Gorontalo	62	673	0	0
29	Sulawesi Barat	1	5	0	0
30	Maluku	0	0	0	0
31	Maluku Utara	0	0	0	0
32	Papua	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>921</b>	<b>22.186</b>	<b>1.332</b>	<b>18.304</b>

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2013

Jumlah Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan, yang disebabkan diantaranya karena usaha pemerintah dalam melakukan pengalihan-pengalihan izin trayek dari perusahaan yang sudah tidak operasional kepada perusahaan lain, hal tersebut dalam rangka banyaknya perusahaan autobus yang mengembangkan usaha angkutannya.

Sedangkan untuk angkutan pariwisata sampai tahun 2013 terus mengalami peningkatan hal ini dikarenakan permintaan yang terus meningkat dan jumlah pengajuan permohonan perizinan angkutan pariwisata juga bertambah.

## 2) Trayek Pengangkutan Alat Berat dan B3

Pada tahun 2013 jumlah perusahaan Pengangkutan Alat Berat yang telah disetujui sebanyak 157 perusahaan dengan jumlah kendaraan 979 unit kendaraan. Sedangkan untuk jumlah perusahaan angkutan B3 sebanyak 503 perusahaan dengan jumlah kendaraan sebanyak 5862 unit kendaraan.

Tabel IV.3. Jumlah Pengangkutan Alat Berat dan B3 Tahun 2013

BULAN	Alat Berat		B3	
	PERUS	KEND	PERUS	KEND
Januari	43	23	16	110
Februari	56	228	85	576
Maret	44	65	77	867
April	2	102	67	730
Mei	4	211	74	1126
Juni	0	148	46	701
Juli	1	64	39	468
Agustus	2	69	15	235
September	5	43	30	376
Oktober	0	17	27	255
Nopember	0	7	9	277
Desember	0	2	18	141
<b>JUMLAH</b>	<b>157</b>	<b>979</b>	<b>503</b>	<b>5.862</b>

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2013

## 3) Trayek Lintas Batas Negara

Trayek lintas batas negara antara Indonesia dengan negara tetangga diantaranya beberapa telah ditetapkan dan dilayani dengan moda transportasi jalan dan beberapa masih dalam proses perundingan kesepakatan.

Lintas Batas Negara yang telah dilayani :

## a). Pontianak-Kuching

Berdasarkan hasil kesepakatan Kelompok Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), sejak tanggal 2 Januari 1993 dioperasikan perusahaan dan jumlah kendaraan umum untuk trayek Pontianak-Kuching sebagai berikut:

**Tabel IV.4. Perusahaan kendaraan umum yang berdomisili Kuching untuk melayani trayek Kuching- Pontianak**

No.	Nama Perusahaan	Mobil Bus	RIT	SEAT
1	Sri Tebekang	3 eksekutif	3	36
2	Kirata	3 eksekutif	3	36
3	Saphire Pacific	3 eksekutif	3	36
4	Eva Transport	5 eksekutif	5	36
5	Sri Merah	3 eksekutif	3	36
6	Bintang Jaya Ekspres	3 eksekutif	3	40
<b>Jumlah</b>		<b>20 eksekutif</b>	<b>20</b>	<b>220</b>

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2013

**Tabel IV.5. Perusahaan kendaraan umum yang berdomisili di Pontianak untuk melayani trayek Pontianak-Kuching**

No.	Nama Perusahaan	Mobil Bus	RIT	SEAT
1	Perum DAMRI Pontianak	7 eksekutif	7	30
2	PT. Andau Kapuas	2 eksekutif	3	36
3	PO Setia Jiwana Sakti	10 eksekutif	10	36
<b>Jumlah</b>		<b>19 eksekutif</b>	<b>20</b>	<b>102</b>

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2013

b). Pontianak-Bandar Sri Begawan Via Kuching

Uji coba Angkutan Lintas Batas Negara Pontianak-Bandar Sri Begawan Via Kuching dilakukan sejak tanggal 16 November 2008 dan Launcing pada tanggal 15 Januari 2009. Trayek tersebut dilayani sebanyak 16 (enam belas) unit bus ditambah 2 (dua) unit bus cadangan dengan data sebagai berikut :

- (1) Perusahaan ALBN dari Indonesia, terdapat 2 (dua) perusahaan yaitu Perum DAMRI (4 unit bus) + 1 unit kendaraan cadangan dan PO. Setia Jiwana Sakti (4 unit bus) + 1 unit kendaraan cadangan.
- (2) Perusahaan ALBN dari Bandar Seri Begawan, dengan perusahaan ADBH Sdn.Bdn (4 unit bus) dan Syakirah Mumi Hajisaban TS (1 unit bus)
- (3) Perusahaan ALBN dari Kuching (Malaysia), terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu Syarikah Eva Ekspres (1 unit bus), Syarikah Bintang Jaya Ekspres (1 unit bus) dan Syarikah Biaramas Ekspres (1 unit bus).

c). Indonesia - Papua New Guinea (Jayapura-Vanimu) masih dalam tahap pembahasan draft kesepakatan Indonesia – Timor Leste masih dalam tahap pembahasan draft kesepakatan

4) Angkutan Tidak Dalam Trayek

Sesuai KM 84 Tahun 1999, disamping adanya angkutan dalam trayek terdapat pula angkutan tidak dalam trayek, meliputi: taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan khusus.

Untuk angkutan taksi dan angkutan khusus pengaturan izin operasinya oleh Walikota untuk dalam kota dan oleh Gubernur untuk angkutan lebih dari satu kota. Disamping mempunyai kewenangan untuk memberikan izin trayek bis AKAP, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini Direktur LLAJ mempunyai kewenangan pula kewenangan untuk memberikan izin angkutan tidak dalam trayek meliputi: taxi bandara, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan khusus

**3. Perkembangan Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**a. Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu tugas Direktorat LLAJ. Dengan terbitnya PP No. 38 Tahun 2007, maka pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2013, pada 542 kabupaten/kota terdapat peralatan uji kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 347 unit uji statis
- 2) 38 unit uji keliling
- 3) 285 unit uji non mekanik

**b. Pengesahan dan Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor.**

Selama tahun 2013 telah diterbitkan sebanyak 675 sertifikat uji tipe kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel IV.6. Pengesahan dan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor**

NO	JENS	JUMLAH
1.	Sepeda motor	165
2.	Kendaraan bermotor roda 3	8
3.	Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	406
4.	Landasan kendaraan bermotor	58
5.	Kendaraan impor CBU Bukan Baru	38
	<b>TOTAL</b>	<b>675</b>

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2013

Untuk tahun 2013 telah diterbitkan sebanyak 12.611 lembar SRUT meliputi kebutuhan untuk ATPM, Importir, dan Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana rincian berikut :

Tabel IV.7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Tahun 2013

No	Bulan	Blangko Kosong	CBU Bekas	Uji Tipe Baru	Rusak	Total
1.	Januari	15.800	31	997	39	16.867
2.	Februari	29.600	58	790	38	30.486
3.	Maret	26.050	8	1.279	35	27.372
4.	April	25.000	39	1.784	12	26.835
5.	Mei	30.000	18	1.541	33	31.592
6.	Juni	15.500	31	1.261	20	16.812
7.	Juli	36.000	54	885	4	36.943
8.	Agustus	24.500	59	884	2	25.445
9.	September	18.500	9	813	6	19.328
10.	Oktober	33.100	7	848	53	34.008
11.	November	40.000	33	564	20	40.167
12.	Desember	25.000	28	590	127	25.745
<b>TOTAL</b>		<b>319.050</b>	<b>375</b>	<b>12.236</b>	<b>389</b>	<b>332.050</b>

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2013

#### 4. Penegakan Hukum Bidang LLAJ dan Penyidik Negeri Sipil Bidang LaLu Lintas dan Angkutan (PPNS LLAJ)

##### a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang LLAJ

Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2013 adalah 2.418 orang. Untuk data PPNS daerah dapat dihimpun dari 33 Propinsi.

Tabel IV.8. Daftar PPNS Bidang LLAJ Tahun 2008 - 2013

No.	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pusat (Kementerian Perhubungan)	54	57	57	57	59	57
2	Nangroe Aceh Arussalam	28	43	43	52	61	53
3	Sumatera Utara	146	152	152	167	179	113
4	Kepulauan Riau	5	6	6	8	9	9
5	Riau	54	69	69	79	85	85
6	Jambi	21	27	27	36	36	33
7	Bengkulu	11	15	19	17	20	19
8	Bangka Belitung	14	18	18	19	21	20
9	Sumatera Barat	123	128	128	131	132	130
10	Sumatera Selatan	108	124	124	132	140	112
11	Lampung	68	68	68	70	80	102
12	Banten	70	72	72	84	91	98
13	Dki Jakarta	128	117	117	117	117	115
14	Jawa Barat	165	183	183	196	208	219
15	Jawa Tengah	220	243	243	255	286	272
16	DIY	108	109	109	110	113	121
17	Jawa Timur	417	432	432	435	458	411
18	Kalimantan Timur	9	12	12	16	18	18

No.	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	2013
19	Kalimantan Tengah	38	42	42	47	50	50
20	Kalimantan Selatan	10	15	15	19	22	22
21	Kalimantan Barat	0	12	12	18	19	19
22	Sulawesi Selatan	37	43	43	54	65	65
23	Sulawesi Utara	19	22	22	33	33	33
24	Sulawesi Tengah	33	37	37	42	45	40
25	Sulawesi Barat	8	13	13	16	19	19
26	Sulawesi Tenggara	4	10	10	11	18	17
27	Gorontalo	16	17	17	19	19	17
28	Bali	10	11	11	12	15	17
29	NTB	17	19	19	20	22	20
30	NTT	51	54	54	57	59	51
31	Maluku	10	11	11	11	12	12
32	Maluku Utara	1	3	3	4	4	4
33	Papua Barat	4	5	5	6	7	5
34	Papua	37	40	40	41	44	40
	<b>TOTAL</b>	<b>2044</b>	<b>2229</b>	<b>2233</b>	<b>2391</b>	<b>2566</b>	<b>2418</b>

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2013

#### b. Penjatuhan Sanksi Administratif

Adapun untuk Jumlah Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran pada tahun 2013 (1432 H) sebanyak 24 perusahaan otobus.

**Tabel IV.9. Rekap Penjatuhan Sanksi Angkutan Lebaran Tahun 2013**

**Berdasarkan Domisili Perusahaan Angkutan AKAP**

No.	Propinsi	Jumlah PO Penerima Sanksi
1	Sumatera Selatan	4
2	Jambi	1
3	Lampung	2
4	DKI Jakarta	1
5	Jawa Barat	9
6	Jawa Tengah	4
7	Jawa Timur	3
	<b>Total</b>	<b>24</b>

Sumber : Dit. LLAJ - Ditjen Hubdat, 2013

#### 5. Kegiatan-kegiatan Strategis

##### a. Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident, terdiri dari kegiatan :

- 1) Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ;
- 2) Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 3) Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi /Tipe;
- 4) Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan;

- 5) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - 6) Prasarana LLAJ Daerah/Kawasan Perbatasan.
- b. Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan, terdiri dari kegiatan :**
- 1) Pembangunan Terminal Transportasi Jalan;
  - 2) Pembangunan Jembatan Timbang;
- c. Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan, terdiri dari kegiatan :**
- 1) Rehabilitasi Simpul LLAJ;
  - 2) Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ;
  - 3) Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ;
  - 4) Kontingensi Bencana Alam;
  - 5) Alat Kinerja Angkutan Jalan.
- d. Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan, terdiri dari kegiatan :**
- 1) Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani;
  - 2) Pengadaan Bus Perintis;
  - 3) Paket Penunjang Operasional Keperintisan.
- 6. Permasalahan Yang Dihadapi**
- a. Kendala Transportasi Wilayah Perbatasan hal ini antara lain disebabkan karena minim infrastruktur, tingginya ketidakpastian atau ketidak teraturan jadwal, Mahalnya biaya perjalanan terutama pada wilayah perbatasan, Rawan Kecelakaan, Tidak bersinerginya kebijakan dan Implementasi.
  - b. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan.
  - c. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :
    - 1) Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal karena keterbatasan fisik/peralatan, SDM dan sistem manajemen;
    - 2) Terdapat pergeseran fungsi jembatan timbang yang cenderung untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah) bukan sebagai alat pengawasan muatan lebih;
    - 3) Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan ijin trayek angkutan umum (ijin trayek angkutan bus antarkota antarprovinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah;

- 4) Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
- 5) Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
  - a) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
  - b) Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;
  - c) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
  - d) Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal;
  - e) Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal.
- 6) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;
- 7) Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
  - a) Belum mantapnya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
  - b) Belum tuntasnya Penyusunan Peraturan Pelaksanaan di bidang lalu lintas angkutan jalan (PP sebagai peraturan pelaksana UU No. 22 Th 2009);
  - c) Belum jelasnya peran dan fungsi kewenangan antarlembaga pemerintah di bidang LLAJ baik di pusat dan daerah;
  - d) Masalah pendidikan dan *law enforcement* peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;
  - e) Belum optimalnya peran swasta dan BUMN dalam investasi/penyelenggaraan LLAJ. Sebagian besar pelayanan angkutan umum memang sudah menjadi domain swasta, peran BUMN belum diperjelas apakah hanya untuk penugasan pelayanan di lintas yang kurang komersial (angkutan perintis dan perbatasan untuk Perum Damri); sedangkan peran Perum PPD dalam sistem transportasi umum di Jakarta

semakin kecil, karena semenjak desentralisasi, transportasi perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;

- f) Kebijakan tarif dan subsidi melalui berbagai pungutan dan “*road pricing*” yang belum tepat sasaran.
- g) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- h) Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.

## 7. Upaya Pemecahan

- a. Mewujudkan *Road Map to Zero Overloading* dengan melakukan :
  - 1) Penanganan muatan lebih melalui modernisasi pengelolaan, rehabilitasi dan aplikasi teknologi informasi jembatan timbang;
  - 2) Menertibkan dimensi kendaraan bermuatan di jalan sesuai kebutuhan;
  - 3) Memberdayakan aparat penegak hukum yaitu PPNS baik di terminal, jembatan timbang maupun fasilitas pengawasan yang ada;
  - 4) Meningkatkan koordinasi dengan jasa penegak hukum lainnya.
- b. Penerapan sistem Quality Licencing (metode ini telah di ujicobakan dalam pemilihan operator angkutan yang memberikan pelayanan angkutan pemuat moda Bandara Soekarno-Hatta serta pemilihan operator Busway).
- c. Pembangunan transportasi jalan dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (*cost recovery*), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

- d. Pembangunan transportasi jalan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya dan pertahanan, sehingga hasil pembangunan perhubungan memiliki dayaguna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- e. Pembangunan transportasi jalan difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah.
- f. Pembangunan transportasi jalan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*).
- g. Pembangunan transportasi jalan dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (*market failure*).
- h. Pembangunan transportasi jalan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistis dan rasional.
- i. Pembangunan transportasi jalan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar.

## **B. LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

### **1. Umum**

Indonesia yang merupakan negara kepulauan (*archipelago*) terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, yang dipisahkan oleh selat – selat serta juga memiliki banyak sungai dan danau yang berpotensi untuk dilayari, tentunya Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakatnya. Angkutan SDP memungkinkan terjadinya kegiatan interaksi sosial budaya antar daerah dan wilayah, mendukung kegiatan ekonomi (*industri, perdagangan, pemasaran, pertanian, dsb*), serta secara politis dapat mendukung sistem keamanan dan ketahanan nasional serta mendukung terwujudnya kesatuan ekonomi dan politik wilayah nasional Indonesia.

ASDP sebagai penyelenggara jasa angkutan umum mempunyai fungsi dan peran menyediakan jasa angkutan kendaraan (*barang*) dan penumpang, baik secara inter moda maupun intra moda transportasi. Khusus jasa angkutan penyeberangan, mempunyai fungsi menghubungkan jalur transportasi jalan raya ataupun kereta api yang terputus oleh adanya

perairan danau, sungai, dan selat, sehingga sering disebut jembatan penyeberangan. Di era sekarang fungsi penyeberangan menjadi moda transportasi perairan dengan jarak tertentu, yang bersifat *point to point services*.

Angkutan Sungai dan Danau diperlukan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum disentuh oleh moda angkutan lainnya. Disamping itu angkutan sungai dan danau juga dapat dimanfaatkan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang relatif besar.

Peranan angkutan sungai dan danau telah nyata dirasakan oleh masyarakat di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Namun potensi angkutan sungai dan danau yang sesungguhnya jauh lebih besar, belum termanfaatkan pada saat ini. Oleh karena itu, kebijakan umum bidang angkutan sungai dan danau diarahkan untuk mengembangkan potensi angkutan sungai dan danau sebagai salah satu moda transportasi darat yang dapat menghubungkan pelosok daratan, dengan mewujudkan keselamatan, dan menciptakan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang tertib lalu lintas dan administrasi.

## 2. Perkembangan Prasarana LLASDP

### a. Perkembangan Jumlah Lintas Penyeberangan

Sejak pertama kali ditetapkannya lintas penyeberangan pada tahun 1989, melalui Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 64 Tahun 1989, sebanyak 44 lintas penyeberangan, sampai saat ini telah menjadi sebanyak 193 lintas penyeberangan, ditambah dengan 50 lintas penyeberangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) setelah era otonomi daerah. Sehingga jumlah total lintas penyeberangan yang telah ditetapkan adalah sebanyak 243 lintas penyeberangan. Sedangkan lintasan yang beroperasi pada tahun 2013 sebanyak 216 lintasan dan yang belum/tidak beroperasi sebanyak 29 lintasan. Dari sisi pengoperasiannya, sebanyak 48 lintas adalah berupa lintas penyeberangan dengan angkutan komersil dan sisanya sebanyak 169 lintasan berupa lintas penyeberangan angkutan perintis.

**Tabel IV.10. Kondisi Perkembangan Lintas Penyeberangan**

No.	Status Operasional Lintas	Jumlah
1.	<b>Jumlah lintas yang ditetapkan</b>	
	a. Melalui Keputusan Menteri Perhubungan	193
	b. Melalui Keputusan Pemerintah Daerah	50
2.	<b>Status pengoperasian</b>	
	a. Lintasan yang beroperasi	216
	b. Lintasan yang belum dan tidak beroperasi	29
3.	<b>Jenis Pengoperasian angkutan</b>	
	a. Lintas penyeberangan dengan angkutan komersil	48
	b. Lintas penyeberangan dengan angkutan perintis	169

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

Tabel IV.11. Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan

No.	No. KM	Tahun	Jumlah Lintas
1	KM No. 64	1989	44
2	KM No. 25	1991	21
3	KM No. 49	1994	23
4	KM No. 33	1995	10
5	KM No. 1	1997	8
6	KM No. 13	1997	26
7	KM No. 30	1998	18
8	KM No. 43	1998	1
9	KM No. 82	1998	12
10	KM No. 66	2000	5
11	KM No. 1	2001	4
12	KM No. 58	2002	1
13	KM No. 16	2003	1
14	KM No. 71	2004	3
15	KM No. 76	2004	1
16	KM No. 38	2005	4
17	KM No. 48	2005	1
18	KM No. 69	2005	1
19	KM No. 44	2009	1
20	KP. No. 325	2009	1
21	KP. No. 436	2009	1
22	KM No. 160	2010	1
23	KP No. 17.265	2010	1
	KM No. 213	2010	2
24	KM No. 5.370	2010	1
25	KP No. 3.202232	2011	1
<b>Jumlah</b>			<b>193</b>

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

Tabel IV.12. Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota

No.	Nama Lintas	Propinsi
1.	Singkil - P. Banyak	NAD
2.	Singkil – Sinabang	NAD
3.	Balohan – Ulheu Lheu	NAD
4.	Tebas Kuala - Tebas Seberang	Kalimantan Barat
5.	Parit Sarem – S. Nipah	Kalimantan Barat
6.	Pamatata – Patumbukan – Labuhan Bajo	Sulsel – NTT
7.	Bira – Sikeli	Sulawesi Selatan
8.	Sikeli – Tondasi	Sulawesi Selatan
9.	Wakai – Ampara	Sulawesi Tengah
10.	Bitung-Siau	Sulawesi Utara
11.	Dongkala – Bau Bau	Sulawesi Tenggara
12.	Bau Bau – Mawasangka	Sulawesi Tenggara
13.	Aimere – Waingapu	NTT
14.	Waingapu – Sabu	NTT

No.	Nama Lintas	Propinsi
15.	Kalabahi – Lewoleba	NTT
16.	Saumlaki – Tapa	Maluku
17.	Dobo – Benjina	Maluku
18.	Tulehu – Pelauw	Maluku
19.	Umiputih – Waley	Maluku
20.	Tulehu – Saparua	Maluku
21.	Saparua – Nalahia	Maluku
22.	Nalahia – Amahai	Maluku
23.	Hunimua – Masohi	Maluku
24.	Namlea – Ambalau	Maluku
25.	Ambalau – Wamsisi	Maluku
26.	Wamsisi – Namrole	Maluku
27.	Namrole – Leksula	Maluku
28.	Ternate – Bacan	Maluku Utara
29.	Ternate - Batang Dua	Maluku Utara
30.	Sorong – Seget	Irian Jaya Barat
31.	Seget – Seremuk	Irian Jaya Barat
32.	Seremuk – Konda	Irian Jaya Barat
33.	Konda – Teminabuan	Irian Jaya Barat
34.	Mogim – Kais	Irian Jaya Barat
35.	Kais – Inawatan	Irian Jaya Barat
36.	Inawatan – Kokoda	Irian Jaya Barat
37.	Bade - Mur – Kepi	Irian Jaya Barat
38.	Waren – Nabire	Papua
39.	Merauke – Atsy	Papua
40.	Atsy – Asgon	Papua
41.	Atsy – Senggo	Papua
42.	Atsy – Agat	Papua
43.	Biak – Numfor	Papua
44.	Pananaru – Siau	Sulawesi Utara
45.	Bitung – Lirung	Sulawesi Utara
46.	Bitung – Tahuna	Sulawesi Utara
47.	Bitung – Pananaru	Sulawesi Utara
48.	Bitung – Melonguane	Sulawesi Utara
49.	Bitung – Tagulandang	Sulawesi Utara
50.	Pananaru – Melonguane	Sulawesi Utara

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

Berdasarkan jenis pengoperasian, lintas penyeberangan yang sudah beroperasi dapat dibedakan dalam 2 lintas, yaitu : lintasan komersil dan perintis yang disubsidi pemerintah. Untuk jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi sebanyak 217 lintasan yang terdiri dari lintasan komersil sebanyak 48 lintas dan lintasan perintis sebanyak 169 lintas.

Tabel IV.13. Jenis Pengoperasian Angkutan Penyeberangan

No.	Jenis Pengoperasian	Jumlah
1.	Lintasan komersil	48
2.	Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah	169
3.	Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah	0
<b>Jumlah yang beroperasi</b>		<b>217</b>

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

#### 1) Lintasan Komersil

Pada tahun 2013, lintas komersil sebanyak 48 lintas penyeberangan dengan rincian status yaitu : Antar Propinsi (AP) sebanyak 10 lintas dan Dalam Propinsi (DP) sebanyak 38 lintas.

Tabel IV.14. Lintas Penyeberangan Komersil

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Jarak Lintas (mil)	Klas. Lintas	SK Penetapan Lintas
1	Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	17	DP	-
2	Labuhan Haji (NAD) - Sinabang (P. Semeulue,NAD)	80	DP	KM 82 Thn 1998
3	Ajibata (Parapat, Sumut) - Tomok (D. Toba, Sumut)	1	DP	KM 64 Thn 1989
4	Sibolga (Sumut) – Gng. Sitoli (P. Nias, Sumut)	86	DP	KM 64 Thn 1989
5	Sungai Selari (Riau) – Bengkalis (P. Bengkalis, Riau)	8	DP	KM 25 Thn 1991
6	T. Pungkur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)	10	DP	KM 64 Thn 1989
7	Palembang (Sumsel) – Muntok (P. Bangka, Babel)	90	AP	KM 43 Thn 1998
8	Merak (Jabar) – Bakauheni (Lampung)	15	AP	KM 64 Thn 1989
9	Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim)	2.5	DP	KM 64 Thn 1989
10	Ketapang (Jatim) – Gilimanuk (P. Bali, Bali)	6	DP	KM 64 Thn 1989
11	Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar)	80	DP	KM 64 Thn 1989
12	Pontianak Kota (Kalbar) - Siantan (Kalbar)	0.8	DP	KM 49 Thn 1994
13	Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel)	6	DP	KM 49 Thn 1994
14	Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim)	6	DP	KM 64 Thn 1989
15	Kariangau (Balikpapan, Kaltim) - Mamuju (Sulbar)	184	AP	KM 49 Thn 1994
16	Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Maluku)	148	AP	KM 25 Thn 1991
17	Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)	95	AP	KM 25 Thn 1991
18	Bira (Sulsel) – Pamatata (P. Selayar, Sulsel)	16	DP	KM 64 Thn 1989
19	Bejoe (Sulsel) – Kolaka (Sultra)	85	AP	KM 64 Thn 1989
20	Siwa (Sulsel) - Lasusua (Sultra)	52	AP	KM 13 Thn 1997
21	Bira (Sulsel) – Tondasi (Sultra)	-	AP	KM 71 Thn 2004
22	Torobulu (Sultra) – Tampo (P. Muna, Sultra)	16	DP	KM 64 Thn 1989
23	Wara (P. Muna, Sultra) – Bau –Bau (P. Buton, Sultra)	2	DP	KM 64 Thn 1989
24	Padang Bai (P. Bali, Bali) – Lembar (P. Lombok, NTB)	38	AP	KM 64 Thn 1989
25	Kayangan (P. Lombok, NTB) – Pototano (P. Sumbawa, NTB)	12	DP	KM 64 Thn 1989
26	Sape (P. Sumbawa, NTB) – Lab. Bajo (P. Flores, NTT)	75	AP	KM 64 Thn 1989
27	Kupang (P.Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT)	40	DP	KM 64 Thn 1989
28	Kupang (P.Timor, NTT) – Seba (P. Sabu, NTT)	-	DP	KM 64 Thn 1989
29	Kupang (P.Timor, NTT) – Larantuka (P. Flores, NTT)	120	DP	KM 64 Thn 1989
30	Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT)	137	DP	KM 64 Thn 1989
31	Kupang (P. Timor, NTT) - Aimere (P. Flores, NTT)	150	DP	KM 82 Thn 1998
32	Bastiong (Malut) - Sidangole (Malut)	12	DP	KM 64 Thn 1989
33	Bastiong (P. Ternate, Maluku) - Rum (Tidore, Maluku)	16	DP	KM 82 Thn 1998
34	Pokka (P. Ambon, Maluku) – Galala (P. Ambon, Maluku)	0.5	DP	KM 64 Thn 1989
35	Hunimua (P. Ambon, Maluku) – Waipirit (P. Seram, Maluku)	13	DP	KM 64 Thn 1989
36	Tual (P. Kei Kecil, Maluku) – Elat (P. Kei Besar, Maluku)	26	DP	KM 25 Thn 1991

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Jarak Lintas (mil)	Klas. Lintas	SK Penetapan Lintas
37	Bastiong – Sofifi	14	DP	-
38	Galala – Namlea	85	DP	KM 49 Thn 1994
39	Sibolga – Teluk Dalam	99	DP	-
40	Gresik – Bawean	80	DP	-
41	Kalianget – Kangean	96	DP	-
42	Gunaksa – Nusa Penida	-	DP	-
43	Bira _ Sikeli	-	DP	Dikelola Pemda
44	Tanjung Balai Karimun - Telaga Punggur	68	DP	Dikelola Pemda
45	Paciran - Garongkong	530	DP	Dikelola Pemda
46	Sinabang - Singkil	101	DP	Dikelola Pemda
47	Padang Bai - Nusa Penida	16	DP	Dikelola Pemda
48	Teluk Dalam - Sibolga	99	DP	Dikelola Pemda

Keterangan : AP : Antar Propinsi, DP : Dalam Propinsi

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

## 2) Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah

Lintas penyeberangan perintis pada tahun 2013 sejumlah 169 lintas penyeberangan. Lintas penyeberangan perintis ini merupakan lintas Antar Propinsi (AP) dan Dalam Propinsi (DP). Pada tahun 2013 terdapat 29 lintas penyeberangan perintis antar Propinsi dan 140 lintas perintis Dalam Propinsi.

**Tabel IV.15. Lintas Penyeberangan Bersubsidi**

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klas. Lintas	Keterangan
1	Singkil - P. Banyak	DP	Subsidi Pemerintah
2	Singkil - Gunung Sitoli	DP	Subsidi Pemerintah
3	Ulee Lheu - Lamteng	DP	Subsidi Pemerintah
4	Teluk dalam - Pulau Tello	AP	Subsidi Pemerintah
5	Padang - Sikakap	DP	Subsidi Pemerintah
6	Padang - Siberut	DP	Subsidi Pemerintah
7	Siberut - Sikabalu	DP	Subsidi Pemerintah
8	Tanjung Pinang (Domba) - Karimun	DP	Subsidi Pemerintah
9	Dabo - Telaga Punggur	DP	Subsidi Pemerintah
10	Dabo - Tanjung Pinang	DP	Subsidi Pemerintah
11	Karimun - Mengkapan	AP	Subsidi Pemerintah
12	Mengkapan - Kampung Balak	AP	Subsidi Pemerintah
13	Bengkulu - Enggano	DP	Subsidi Pemerintah
14	Sadai - Tanjung Ru	DP	Subsidi Pemerintah
15	Manggar - Ketapang	AP	Subsidi Pemerintah
16	Jepara - Karimunjawa	DP	Subsidi Pemerintah
17	Kalianget - Jangkar	DP	Subsidi Pemerintah
18	Jangkar - Raas	DP	Subsidi Pemerintah
19	Raas - P. Sapudi	DP	Subsidi Pemerintah
20	P. Sapudi - Kalianget	DP	Subsidi Pemerintah
21	Paciran - Bawean	DP	Subsidi Pemerintah
22	Bawean - Gersik	DP	-
23	Rasau Jaya - Pinang Luar	DP	Subsidi Pemerintah
24	Parit Sarem - Sungai Nipah	DP	Subsidi Pemerintah
25	Tarakan - Nunukan	DP	Subsidi Pemerintah

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klas. Lintas	Keterangan
26	Tarakan - Ancam	DP	Subsidi Pemerintah
27	Balikpapan - Taipa	AP	Subsidi Pemerintah
28	Tarakan- Toli Toli	AP	Subsidi Pemerintah
29	Toli Toli - Amurang	AP	Subsidi Pemerintah
30	Batulicin - Garongkong	AP	Subsidi Pemerintah
31	Kupang - Ende	DP	Subsidi Daerah
32	Ende - Waingapu	DP	Subsidi Daerah
33	Kupang - Lewoleba	DP	Subsidi Daerah
34	Lewoleba - Waiwerang	DP	Subsidi Pemerintah
35	Waiwerang - Solor	DP	Subsidi Pemerintah
36	Solor - Larantuka	DP	Subsidi Pemerintah
37	Lewoleba - Baranusa	DP	Subsidi Pemerintah
38	Baranusa - Kalabahi	DP	Subsidi Pemerintah
39	Waingapu - Sabu	DP	-
40	Waingapu - Aimere	DP	-
41	Kalabahi - Teluk Gurita	AP	Subsidi Pemerintah
42	Teluk Gurita - P. Wetar (Ilwaki)	AP	Subsidi Pemerintah
43	P. Wetar (Ilwaki) - P. Kisar (Wonreli)	AP	Subsidi Pemerintah
44	Bira - Patumbukan	AP	Subsidi Pemerintah
45	Patumbukan - Jampea	AP	Subsidi Pemerintah
46	Jampea - Marapokot	AP	Subsidi Pemerintah
47	Jampea - Labuhan Bajo	AP	Subsidi Pemerintah
48	Patumbukan - Kayuadi	AP	Subsidi Pemerintah
49	Kayuadi - Jampea	AP	Subsidi Pemerintah
50	Jampea - Bonerate	AP	Subsidi Pemerintah
51	Bonerate - Kalaotoa	AP	Subsidi Pemerintah
52	Luwuk - Banggai	DP	Subsidi Pemerintah
53	Banggai - Boniton	DP	Subsidi Pemerintah
54	Kolonedale - Baturube	DP	Subsidi Pemerintah
55	Gorontalo - Wakai	AP	Subsidi Pemerintah
56	Wakai - Ampana	AP	Subsidi Pemerintah
57	Marisa - Dolong	AP	Subsidi Pemerintah
58	Dolong - Ampana	AP	Subsidi Pemerintah
59	Marisa - Parigi	AP	Subsidi Pemerintah
60	Kendari - Langara	DP	Subsidi Pemerintah
61	Bau Bau - Pulau Siorpu	DP	-
62	Bau Bau - Dongkala	DP	Subsidi Pemerintah
63	Dongkala - Mawasangka	DP	Subsidi Pemerintah
64	Kasipute - Dongkala	DP	-
65	Kamaru - Wanci	DP	Subsidi Pemerintah
66	Banggai - Bobong	AP	Subsidi Pemerintah
67	Bitung - Melonguane	DP	Subsidi Pemerintah
68	Melonguane - Musi	DP	Subsidi Daerah
69	Musi - Mangaran	DP	Subsidi Daerah
70	Melonguane - Likupang	DP	Subsidi Daerah
71	Likupang - Pananaru	DP	Subsidi Pemerintah
72	Pananaru - Marore	DP	Subsidi Pemerintah
73	Amurang - Pananaru	DP	Subsidi Pemerintah
74	Bitung - Siau	DP	Subsidi Daerah
75	Siau - Tahuna	DP	Subsidi Daerah
76	Likupang - Biaro	DP	Subsidi Daerah
77	Biaro - Tagulandang	DP	Subsidi Daerah
78	Tagulandang - Siau	DP	Subsidi Daerah
79	Bitung - Lembeh	DP	Subsidi Daerah
80	Tahuna - Melonguane	DP	Subsidi Daerah

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klas. Lintas	Keterangan
81	Melonguane - Marampit	DP	Subsidi Daerah
82	Marampit - Miangas	DP	Subsidi Daerah
83	Tobelo - Daruba	DP	Subsidi Pemerintah
84	Tobelo - Subaim	DP	Subsidi Pemerintah
85	Bastiong - Batang Dua	DP	Subsidi Pemerintah
86	Bastiong - Makian	DP	Subsidi Pemerintah
87	Makian - Babang	DP	Subsidi Pemerintah
88	Doworo - Sofifi	DP	Subsidi Pemerintah
89	Babang - Obi	DP	-
90	Obi - Sanana	DP	-
91	Sanana - Mangole	DP	-
92	Mangole - Bobong	DP	-
93	Namlea - Sanana	AP	Subsidi Pemerintah
94	Tulehu - Kailolo	AP	Subsidi Pemerintah
95	Kailolo - Umeputih	AP	Subsidi Daerah
96	Umeputih - Wailey	DP	Subsidi Pemerintah
97	Tulehu - Umeputih	DP	Subsidi Pemerintah
98	Umeputih - Nalahia	DP	Subsidi Pemerintah
99	Nalahia - Amahai	DP	Subsidi Pemerintah
100	Sanana - Mangole	DP	Subsidi Pemerintah
101	Galala - Ambalau	DP	Subsidi Pemerintah
102	Ambalau - Wamsisi	DP	Subsidi Pemerintah
103	Wamsisi - Namrole	DP	Subsidi Daerah
104	Namrole - Leksula	DP	Subsidi Daerah
105	Ambon - Airmanang	DP	Subsidi Daerah
106	Air Nananang - Geser	DP	Subsidi Daerah
107	Geser - Gorom	DP	Subsidi Daerah
108	Gorom - Kesui	DP	Subsidi Daerah
109	Kesui - Kur	DP	Subsidi Daerah
110	Namlea - Kayeli	DP	-
111	Tual - Larat	DP	Subsidi Daerah
112	Tual - Tayando	DP	Subsidi Daerah
113	Tayando - Kur	DP	Subsidi Pemerintah
114	Tayando - Tam	DP	Subsidi Pemerintah
115	Tual - Kur	DP	Subsidi Pemerintah
116	Kur - Kaihear	DP	Subsidi Pemerintah
117	Tual - Dobo	DP	Subsidi Pemerintah
118	Dobo - Benjina	DP	Subsidi Pemerintah
119	Dobo - Tabarfane	DP	Subsidi Pemerintah
120	Saumlaki - Dobo	DP	-
121	Saumlaki - Adaut	DP	Subsidi Pemerintah
122	Adaut - Letuwurung	DP	Subsidi Pemerintah
123	Saumlaki - Seira	DP	Subsidi Daerah
124	Seira - Wunlah	DP	Subsidi Daerah
125	Wunlah - Larat	DP	Subsidi Daerah
126	Larat - Yaru	DP	Subsidi Daerah
127	Yaru - Momar	DP	Subsidi Daerah
128	Langgur - Elat	DP	Subsidi Daerah
129	Langgur - Holat	DP	Subsidi Daerah
130	Langgur - Weduar	DP	Subsidi Daerah

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klas. Lintas	Keterangan
131	Tepa - Lakor	DP	Subsidi Daerah
132	Lakor - Moa	DP	Subsidi Daerah
133	Moa - Leti	DP	Subsidi Daerah
134	Leti - Kisar	DP	Subsidi Daerah
135	Dobo - Pomako (Timika)	AP	Subsidi Pemerintah
136	Sorong - Kabarai	DP	Subsidi Pemerintah
137	Sorong - Linmalas	DP	Subsidi Pemerintah
138	Linmalas - Waigama	DP	Subsidi Pemerintah
139	Sorong - Folley	DP	Subsidi Pemerintah
140	Folley - Harapan Jaya	DP	Subsidi Pemerintah
141	Sorong - Teminabuan	DP	Subsidi Pemerintah
142	Sorong - Saosofor	DP	Subsidi Pemerintah
143	Sorong - Wejim	DP	Subsidi Pemerintah
144	Wejim - Kofiau	DP	Subsidi Pemerintah
145	Sorong - P. Gebe	DP	Subsidi Pemerintah
146	Patani - P. Gebe	DP	Subsidi Pemerintah
147	Patani - Weda	DP	Subsidi Pemerintah
148	Sorong - Waisai	DP	Subsidi Pemerintah
149	Sorong - Kalobo	DP	Subsidi Pemerintah
150	Sorong - Waigama	DP	Subsidi Pemerintah
151	Waigama - Wahai	DP	Subsidi Pemerintah
152	Wahai - Fak Fak	DP	Subsidi Pemerintah
153	Biak - Serui	DP	Subsidi Pemerintah
154	Serui - Waren	DP	Subsidi Pemerintah
155	Waren - Nabire	DP	Subsidi Pemerintah
156	Biak - Manokwari	DP	Subsidi Pemerintah
157	Manokwari - Numfor	DP	Subsidi Pemerintah
158	Manokwari - Wasior	DP	Subsidi Pemerintah
159	Wasior - Nabire	DP	Subsidi Pemerintah
160	Merauke - Kimam	DP	Subsidi Pemerintah
161	Kimam - Bade	DP	Subsidi Pemerintah
162	Bade - Getentiri	DP	Subsidi Pemerintah
163	Genetiriri - Tanah Merah	DP	Subsidi Pemerintah
164	Bade - Moor	DP	Subsidi Pemerintah
165	Moor - Kepi	DP	Subsidi Pemerintah
166	Merauke - Atsy	DP	Subsidi Pemerintah
167	Atsy - Agats	DP	Subsidi Pemerintah
168	Agats - Pomako	DP	-
169	Agats - Sawaerma	DP	Subsidi Pemerintah

Keterangan : AP: Antar Propinsi, DP: Dalam Propinsi,  
Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

#### b. Pelabuhan Penyeberangan

Sampai tahun 2013, jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah beroperasi sebanyak 144 pelabuhan. Pelabuhan tersebut diselenggarakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebanyak 34 pelabuhan, Dinas Perhubungan sebanyak 106 pelabuhan, UPT Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 4 pelabuhan (pada tahun 2012 dioperasikan

pelabuhan Marisa yang dikelola UPT Gorontalo) dan sisanya sebanyak 66 pelabuhan belum ditetapkan karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

**Tabel IV.16. Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan**

No.	Penyelenggara	Jumlah
1.	PT. ASDP Persero	34
2.	Dinas Perhubungan	106
3.	UPT Ditjen Perhubungan Darat	4
4.	Dalam Proses Pembangunan	66
<b>Jumlah</b>		<b>210</b>

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013.

**Tabel IV.17. Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan oleh PT. ASDP**

No.	Pelabuhan	Lintas yang dilayani	No.	Pelabuhan	Lintas yang dilayani
1.	Bakauheni	Merak-Bakauheni	18.	Batu Licin	Batulicin-Tj. Serdang
2.	Merak	Merak-Bakauheni	19.	Tj. Serdang	Batulicin-Tj. Serdang
3.	Ujung	Ujung-Kamal	20.	Penajam	Penajam-Kariangau
4.	Kamal	Ujung-Kamal	21.	Bitung	Bitung-Temate
5.	Ketapang	Ketapang-Gilimanuk	22.	Pagimana	Pagimana-Gorontalo
6.	Gilimanuk	Ketapang-Gilimanuk	23.	Mamuju	Mamuju-Balikpapan
7.	Padangbai	Padangbai-Lembar	24.	Bajoe	BajoE-Kolaka
8.	Lembar	Padangbai-Lembar	25.	Kolaka	BajoE-Kolaka
9.	Khayangan	Kahayangan-Pototano	26.	Bastiong	Bastiong-Sidangole
10.	Pototano	Kahayangan-Pototano	27.	Sidangole	Bastiong-Sidangole
11.	Sape	Sape – Labuhan Bajo	28.	Bastiong	Bastiong-Rum
12.	Labuhan Bajo	Sape – Labuhan Bajo	29.	Pokka	Pokka-Galala
13.	Larantuka	Larantuka-Kalabahi	30.	Galala	Pokka-Galala
14.	Rote	Kupang-Rote	31.	Hunimua	Hunimua-Waipirit
15.	Bolok	Kupang-Rote Dsn	32.	Waipirit	Hunimua-Waipirit
16.	Telaga Pungkur	Telaga Pungkur-Tj. Uban	33.	Namelea	Namelea-Galala
17.	Tj. Uban	Telaga Pungkur-Tj. Uban	34.	Muntok	Palembang-Muntok

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

### c. Jaringan Pelayanan

Jaringan pelayanan transportasi sungai dan danau meliputi jaringan pelayanan angkutan orang dan pelayanan angkutan barang. Kedua jaringan tersebut dapat dilakukan dalam trayek tetap, trayek tidak tetap dan tidak dalam trayek.

**Tabel IV.18. Jumlah Alur Pelayaran Sungai dan Danau**

No.	Propinsi	Sungai			Danau	
		Jml	Pjg (km)	Navigable	Jml	Luas (km <sup>2</sup> )
1	NAD	10	1.749	660	1	490
2	Sumatera Utara	20	1.796	1.269	1	1.250
3	Sumatera Barat	-	-	-	4	391
4	Riau	21	2.747	2.082	-	-
5	Jambi	19	3.858	2.578	1	50
6	Sumatera Selatan	35	4.856	3.771	1	122
7	Lampung	8	695	530	-	-
8	Jawa Barat	1	122	22	3	205
9	Jawa Tengah	-	-	-	-	600
10	Jawa Timur	1	500	39	-	-

No.	Propinsi	Sungai			Danau	
		Jml	Pjg (km)	Navigable	Jml	Luas (km <sup>2</sup> )
1	NAD	10	1.749	660	1	490
11	Bali	-	-	-	2	190
12	Kalimantan Barat	11	1.227	760	-	-
13	Kalimantan Selatan	15	1.737	1.223	1	40
14	Kalimantan Timur	17	4.089	2.786	3	390
15	Kalimantan Tengah	21	3.108	2.285	-	-
16	Sulawesi Selatan	9	548	222	4	120
17	Sulawesi Tengah	-	-	-	1	34
18	Sulawesi Tenggara	2	175	87	-	-
19	Sulawesi Utara	-	-	-	2	33
20	Irian Jaya	24	734	4.940	3	372
	<b>Jumlah</b>	<b>214</b>	<b>34.342</b>	<b>23.255</b>	<b>27</b>	<b>3.737</b>

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

#### d. Dermaga Sungai dan Danau.

Jumlah dermaga sungai dan danau lebih kurang 82 buah, yang terdiri dari beberapa jenis; seperti dermaga kayu, dermaga beton, dermaga ponton dan kombinasi dari kayu dan ponton, kombinasi beton dan ponton. Disamping itu masih banyak terdapat dermaga kecil sebagai tempat singgah.

### 3. Perkembangan Sarana LLASDP

Sampai dengan tahun 2013 terdapat 273 unit kapal SDP yang beroperasi dengan jenis kapal yaitu Ro-Ro, LCT, dan kapal cepat penumpang.

**Tabel IV.19. Jumlah Kapal SDP yang beroperasi**

No.	Jenis Kapal	Jumlah
1.	Kapal Ro-Ro	258
2.	Kapal LCT	15
3.	Kapal cepat penumpang	-
4.	Kapal penumpang/bus air	-
	<b>Jumlah</b>	<b>273</b>

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

Sedangkan untuk jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi berdasarkan kepemilikan sebanyak 306 unit, pemilik/operatornya adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), swasta dan Pemda.

**Tabel IV.20. Jumlah Kapal Penyeberangan yang beroperasi berdasarkan Kepemilikan**

No.	Pemilik/operator	Jumlah
1.	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	118
2.	Kerja Sama Operasi (KSO)	0
3.	Swasta	170
4.	Pemda	18
	<b>Jumlah</b>	<b>306</b>

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

Subsidi kapal perintis pada tahun 2013 sebesar Rp. 263.283.400.000,- dengan jumlah lintas penyeberangan sebanyak 169 (yang dikelola Satker Keperintisan Pusat) lintas dan total frekuensi penyeberangan 25.440 trip.

**Tabel IV.21. Subsidi Kapal Perintis Tahun 2008-2013**

Tahun	Jumlah Lintas Penyeberangan Perintis	Total Frekuensi Penyeberangan	Nilai Subsidi (Juta Rupiah)
2008	72	24.869	85.303
2009	82	28.779	139.874
2010	99	19.523	101.550
2011	117	26.858	157.852
2012	134	27.936	170.000
2013	169	25.440	297.700

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

**Tabel IV.22. Jenis dan Karakteristik Kapal Sungai**

No.	Jenis	Isi Kotor (m <sup>3</sup> )	Kapasitas Angkut		Draft (m)	Tenaga (hp)	Kec. (km/j)
			Brg(ton)	Penump.			
1	Speed Boat	1-5	-	<14	0,35-0,60	<200	<40
2	Long Boat	5-10	-	<60	0,40-0,60	<85	20-30
3	Bis Air	<200	<10	<200	0,80-1,50	75-100	12-15
4	Klotok	<15	<5	-	0,50-0,65	5-15	7-12
5	Truk Air	15-200	20-70	-	1,00-1,60	22-33	7-8
6	Barge Steel Hull	50-190	50-150	-	1,00-1,60	-	-
7	Barge (tiung)	20-50	15-35	-	1,00-1,60	-	-
8	Tug Boat	20-50	-	-	0,80-1,40	<100	30-60

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

**Tabel IV.23. Jenis dan Karakteristik Kapal Penyeberangan**

No.	Kapal RO-RO	Kapasitas Angkut		Draft (m)	Tenaga (hp)	Kec. (knot)
		Kndrn	Penump.			
1	75 GT	4	50	1,9	350	10
2	200 GT	5	50	1,9	700	10
3	300 GT	15	80	2,0	1200	7
4	500 GT	19	202	2,15	1600	11
5	600 GT	21	214	2,15	1650	10
6	1500 GT	32	390	2,8	3200	15

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

#### 4. Perkembangan Kinerja Angkutan Penyeberangan

Tabel IV.24. Produksi Angkutan Penyeberangan Tahun 2008 – 2013

Tahun	Penumpang (orang)	Kend R-4 (unit)	Kend R-2 (unit)	Barang (ton)
2008	46.926.166	6.850.114	7.374.333	41.079.174
2009	54.585.603	6.224.249	6.799.229	41.802.355
2010	54.858.531	6.255.370	6.833.225	211.453
2011	53.853.016	7.261.611	5.677.922	96.997
2012	58.673.855	5.605.699	7.264.604	48.599
2013	62.036.587	7.553.459	7.713.925	-

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013

#### 5. Kegiatan-kegiatan Strategis

Kegiatan - kegiatan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2013 di bidang LLASDP antara lain :

- a. Studi Master Plan Pengembangan Potensi LLASDP di Propinsi DIY
- b. Kajian Jaringan Pelayanan Transportasi Penyeberangan di Wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara
- c. Pra Kelayakan Jaringan Transportasi Penyeberangan di Larantuka Kab.Flores Timur- Kab.Wakatobi-Lembata
- d. Studi Potensi Transportasi SD di Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur
- e. Studi Pengembangan Data Base Jaringan Transportasi Wilayah Sungai di Papua
- f. Prastudi Kelayakan Lintas Penyeberangan Jawa Barat - Ketapang (Kalbar)
- g. Prastudi Kelayakan Lintas Penyeberangan Sulawesi Tengah – Bontang
- h. Studi Desain Kapal :
  - 1) Optimalisasi Pengoperasian Kapal Sungai Danau untuk Wilayah Sumatera
  - 2) Desain Kapal Perairan Pedalaman (Inland Waterways)
  - 3) Review Desain Prototype Kapal Penyeberangan Penumpang Type 1500 GT
  - 4) Desain Prototype Kapal Penyeberangan Penumpang Multy Hull (Katamaran) 1000 GT
- i. Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang RO-RO baik yang disatker pusat dan daerah :
  - 1) Satker Pusat
    - a) Pembangunan Kapal 750 GT Lts Cadangan Kapal Perintis KTI di Maluku & Papua;
    - b) Pembangunan kapal Penyeber. 300 GT Lintas Merauke - Asmat (Termasuk Supervisi) Tahap I;
    - c) Pembangunan kapal Sungai. LCT 200 GT untuk Kab. Asmat dan Kab. Nduga (Termasuk Supervisi) Tahap I;

- d) Pembangunan Kapal Tunda/Tug Boat untuk Lintas Bakauheni - Merak Tahap II (Termasuk Supervisi) selesai;
  - e) Pembangunan kapal 5000 GT lintas Merak - Bakauheni (Termasuk Supervisi) Tahap II;
  - f) Pembangunan kapal 750 GT lintas Wahai - Fak-fak (Termasuk Supervisi) Tahap II selesai;
  - g) Pembangunan kapal 750 GT lintas Amurang - Toli-toli (Termasuk Supervisi) Tahap II selesai.
- 2) Satker Daerah
- a) Pemb. Kapal Penyeberangan Lintas Kupang - Hansisi 750 GT Thp I (Termasuk supervisi);
  - b) Pemb. kapal Penyeb. 750 GT Lintas Kaimana - Tual (Termasuk Supervisi) Tahap I;
  - c) Pemb. Kapal Penyeb. 750 GT Lintas Sorong - Waigeo (Termasuk Supervisi) Tahap I;
  - d) Pemb. kapal Sungai. LCT 200 GT untuk Kab. Memberamo (Termasuk Supervisi) Tahap I;
  - e) Pemb. Kapal Penyeberangan Lintas Aimere - Waingapu 750 GT Thp II (Termasuk supervisi);
  - f) Pembangunan kapal 750 GT lintas Paciran/Lamongan - Bawean (Termasuk Supervisi) Tahap II selesai.

**Tabel 4.25. Kapal Yang Selesai Dibangun di Tahun 2013**

No.	Kapal Penyeberangan	GT	Satker	Lintasan
1	KMP. INERIE II	750	LLASDP NTT	Aimere – Waingapu
2	KMP. GILI IYANG	750	LLASDP Jatim	Paciran/Lamongan – Bawean
3	KMP. KALABIA	750	Dit.LLASDP	Wahai - Fak-fak
4	KMP. MOINIT	750	Dit.LLASDP	Amurang - Toli-toli

Sumber : Dit. LLASDP - Ditjen Hubdat, 2013



**Gambar IV.1. KMP. GILI IYANG**



**Gambar IV.2. KMP. KALABIA**

- g) Pembangunan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan :
- 1) Pembangunan dermaga penyeberangan baru di 10 lokasi;
  - 2) Pembangunan dermaga penyeberangan lanjutan di 57 lokasi;
  - 3) Pembangunan dermaga sungai baru di 7 lokasi;
  - 4) Pembangunan dermaga sungai lanjutan di 16 lokasi;
  - 5) Pembangunan dermaga danau di 3 lokasi;
  - 6) Rehabilitasi dermaga penyeberangan di 21 lokasi;
  - 7) Rehabilitasi dermaga sungai di 4 lokasi;
  - 8) Rehabilitasi dermaga danau di 7 lokasi.
  - 9) Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Der. Penyeber. Kahyapu P Enggano
  - 10) Kajian Lingkungan Pengerukan Kolam Pelabuhan Gorontalo
  - 11) Lanjutan Pemb. Break Water Sisi Timur Pelabuhan Penyeber. Kendal Tahap IV (Termasuk supervise)

- 12) Pembangunan Perpanjangan Break Water Sisi Barat 19,5 m' di Der. Penyeb. Paciran Kab. Lamongan (Termasuk supervisi) selesai
- h) Perencanaan Umum, Pradesain dan Detail Desain Prasarana SDP :
  - 1) Penyusunan Pedoman Detail Desain Rambu Sungai Danau serta SBNP Penyeberangan
  - 2) Penyusunan DED Dermaga Penyeberangan Muko Muko
  - 3) Pradesain Pelabuhan Penyeberangan Lombok Barat lintas Lombok Barat - Nusa Penida
  - 4) Pradesain Pelab Penyeb di Nias Selatan Lintas Pulau Tanah Bala-Pulau Tana Masa-Mandailing Natal
  - 5) Pradesain Pelabuhan Penyeberangan di Pulau Kaladupa, Tomea dan Binongko
  - 6) Pradesain Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan di Merauke Lintas Merauke –Kimaam
  - 7) Review Desain Pelabuhan Penyeberangan Natuna
  - 8) Kajian Pelebaran Alur-Pelayaran di Pelabuhan Penyeberangan Merak
  - 9) Pradesain Pengerukan Jalur Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai Barat
  - 10) SID Pengerukan Alur-Pelayaran Sungai Batanghari Kabupaten Solok Selatan (Sumatera Barat)
  - 11) Survey Kebutuhan Fasilitas Alur-Pelayaran Sungai Barito Provinsi Kalimantan Selatan
  - 12) DED Gangway & ESR di Dermaga VI Pelabuhan Penyeberangan Merak & Bakauheni
  - 13) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan di Wilayah Kerja OPP Merak Thp I
  - 14) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan di Wilayah Kerja OPP Gilimanuk Thp I
  - 15) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan di Lingkungan Kerja OPP Lembar Thp I
  - 16) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan di Lingkungan Kerja OPP Pagimana Thp I
  - 17) Penyusunan DED Penggantian Plengsengan ke MB Pelabuhan Bajoe dan Kolaka

- i) Studi Kebijakan di Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan :
  - 1) Studi Revitalisasi Angkutan Sungai Perkotaan Wilayah Kota Palembang
  - 2) Kajian Kemampuan dan Kemauan Daya Beli Masyarakat Dalam Penggunaan Angkutan Penyeberangan
  - 3) Pembangunan Sistem Informasi Produksi Penumpang Angkutan Penyeberangan
  - 4) Kajian Kinerja Angkutan Penyeberangan di Lintas Merak-Bakau Terkait Umur Ekonomis Kapal dan Tarif Angkutan
  - 5) Tata Cara Teknis Pelayanan Pemberian Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Sesuai Standar ISO 9001
  - 6) Evaluasi Hasil Manfaat (Pasca Konstruksi) Pemb Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi SulUt
  - 7) Studi Penetapan Kelas AP di S. Mahakam Dari Kota Samarinda s/d Kab. Kukar (KalTim)

## 6. Permasalahan yang Dihadapi

- a. Belum adanya data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau.
- b. Masih belum tersusunnya data mengenai sarana prasarana transportasi penyeberangan.
- c. Ketersediaan data trayek transportasi SDP di beberapa daerah belum tersimpan dengan baik.
- d. Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal.
- e. Belum dilaksanakannya penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota.
- f. Belum adanya buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
- g. Belum tersedianya standar operasional dan prosedur (SOP) untuk kegiatan rutin di Direktorat LLASDP.

## 7. Upaya Pemecahan

- a. Menyusun data base transportasi sungai di Indonesia.
- b. Menyusun sistem informasi monitoring dan pengawasan pelabuhan penyeberangan.
- c. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pengembangan transportasi SDP.
- d. Melakukan koordinasi dengan Sesditjen Perhubungan Darat dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensi.

- e. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam perumusan peraturan pelaksana tentang penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota.
- f. Merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur pembuatan peta alur-pelayaran sungai dan danau serta buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
- g. Perlu dilakukan penyusunan buku petunjuk pelayaran di alur pelayaran sungai
- h. Menyusun SOP di masing-masing subdit guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

## C. BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

### 1. Umum

Transportasi merupakan sektor yang sangat penting dalam kehidupan baik pada tataran nasional, wilayah Propinsi/regional maupun pada kawasan perkotaan. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa dan tingkat mobilitas yang tinggi, maka sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat penting khususnya di daerah perkotaan. Sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan, sejalan dengan itu juga menimbulkan permasalahan transportasi. Pertumbuhan kebutuhan transportasi sering tidak sejalan dengan penyediaan prasarana yang akan memperbesar masalah seperti dapat kita lihat dari kecepatan perjalanan di daerah perkotaan semakin lama semakin turun.

Pertumbuhan penduduk rata-rata tahunan di wilayah perkotaan antara tahun 1990-2013 diperkirakan dapat mencapai 3%-6%, angka tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional per tahun yang dibawah 2%. Keadaan ini harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan mempunyai dampak langsung terhadap kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.

Ditinjau dari besarnya jumlah penduduk kota-kota di Indonesia, maka terdapat 11 (sebelas) kota yang masuk kriteria kota raya dan 9 (sembilan) kota besar yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 500.000 orang. Dari kesembilan kota raya tersebut yang memiliki penduduk lebih dari 1 (satu) juta orang penduduk yaitu : Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Tangerang, dan Makassar, Depok, Bekasi dan Bogor.

Dari sekian banyak kota besar tersebut ternyata transportasi melalui jalan merupakan moda transportasi yang paling dominan dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Oleh

karena itu masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota besar di Indonesia adalah kemacetan, kesemrawutan dan kecelakaan lalu lintas, serta pencemaran udara. Penanganan masalah transportasi perkotaan yang kurang hati-hati dan kurang terpadu, tidak akan dapat memecahkan masalah tersebut secara tepat dan baik. Hal ini justru cenderung menimbulkan permasalahan baru yang dapat menambah kompleks serta rumitnya permasalahan transportasi yang telah ada.

Akumulasi dari kondisi yang ada terhadap sektor transportasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, mengakibatkan kemacetan pada hampir semua ruas jalan dalam kota. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Dit. BSTP pada tahun 2011, terhadap kinerja ruas jalan nasional di kawasan Jabodetabek dapat digambarkan bahwa rata-rata kecepatan kendaraan berkisar antara 22 km/jam - 29 km/jam dengan rasio antara jumlah kendaraan terhadap kapasitas jalan berkisar antara 0,62- 0,69 dengan tingkat pelayanan rata-rata adalah C dan E pada jam puncak pagi dan sore. Kondisi ini berada jauh di bawah standar pelayanan jalan yang diinginkan untuk jalan nasional yang seharusnya Tingkat Pelayanan A atau B.

**Tabel IV.26. Kinerja Ruas Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek**

	V/C		KECEPATAN	
	PAGI	SORE	PAGI	SORE
MAX	0.97	0.95	46.7	52.7
MIN	0.35	0.46	6.4	4.7
RERATA	0.69	0.62	28.5	22.7

Sumber : Dit. BSTP - Ditjen Hubdat, 2013

**Tabel V.27. Tingkat Pelayanan Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek**

Tingkat Pelayanan	PAGI	SORE
A	0%	0%
B	16%	5%
C	32%	18%
D	18%	15%
E	24%	33%
F	11%	28%

Sumber : Dit. BSTP - Ditjen Hubdat, 2013

Dari aspek penyediaan angkutan umum, kondisi angkutan umum yang ada secara kualitas cenderung menurun. Hal ini diperparah oleh semakin maraknya ojek sepeda motor sebagai pilihan yang mudah dan cepat bagi pengguna jalan yang berdampak pada turunnya jumlah penumpang angkutan umum dan pada akhirnya mempengaruhi produktifitas angkutan umum yang ada.

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah dalam

penyelenggaraan angkutan umum, Dit. BSTP secara bertahap melakukan bimbingan dan bantuan teknis dalam penyelenggaraan angkutan umum, khususnya di daerah-daerah perkotaan.

Dalam upaya pembinaan angkutan umum tidak dalam trayek di kawasan perkotaan (taksi), secara bertahap Dit. BSTP melakukan inventarisasi dan penyusunan standar pelayanan minimal untuk angkutan taksi. Hal yang sama juga dilakukan terhadap keberadaan angkutan pemadu moda yang berada pada bandara-bandara internasional yang ada saat ini.

**Tabel IV.28. Data Pelayanan Taksi Di Kawasan Perkotaan**

No	Propinsi	Jumlah Perusahaan	Jumlah Armada Beroperasi
1	Aceh	3	54
2	Sumatera Utara	11	860
3	Sumatera Barat	16	530
4	Sumatera Selatan	3	114
5	Riau	7	472
6	Kepulauan Riau	26	2,938
7	Jambi	2	30
8	Bengkulu	0	0
9	Lampung	2	15
10	Bangka Belitung	1	14
11	DKI Jakarta	47	26,667
12	Jawa Barat	63	9,743
13	Banten	35	7,197
14	Jawa Tengah	15	1,664
15	Di. Yogyakarta	17	768
16	Jawa Timur	44	4,972
17	Bali	9	2,705
18	Nusa Tenggara Barat	4	401
19	Nusa Tenggara Timur	1	50
20	Kalimantan Barat	1	121
21	Kalimantan Tengah	1	43
22	Kalimantan Selatan	3	199
23	Kalimantan Timur	7	443
24	Sulawesi Utara	5	210
25	Sulawesi Tengah	2	55
26	Sulawesi Selatan	13	1,434
27	Sulawesi Tenggara	3	219
28	Sulawesi Barat	0	0
29	Gorontalo	0	0
30	Maluku	1	49
31	Maluku Utara	N/A	50
32	Papua Barat	N/A	0
33	Papua Timur	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>342</b>	<b>62,017</b>

Sumber : Dit. BSTP, Ditjen Hubdat, 2013

**Tabel IV.29. Rekapitulasi Data Angkutan Pemadu Moda, Angkutan Jalan dengan Angkutan Udara (Per 31 Desember 2013)**

No	Lokasi / Propinsi	Trayek		Waktu Operasi		Jarak	Waktu Tempuh	Jumlah Bus	Tarif (Rupiah)	Operator
		No	Asal - Tujuan (PP)	Awal	Akhir					
1	Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, NAD	1	Bandara Sultan Iskandar Muda - Jl.Merdeka - SP.Surabaya-Jl.T.Hasan Dek-Jl.Daud Bereuh-SP.Lima-Jl.Safiatudin	08.00	13.00	17 Km	30-45 Menit	3	10.000	Damri
<b>Jumlah</b>								<b>3</b>		
2	Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, DKI Jakarta	1	Bandara Soekarno Hatta - Blok M	04.00	23.00	38 Km	60 Menit	15	30,000	Damri
		2	Bandara Soekarno Hatta - Gambir	04.00	23.00	37 Km	45 Menit	20	30,000	Damri
		3	Bandara Soekarno Hatta -Rawamangun	03.00	23.00	46 Km	60 Menit	15	30,000	Damri
		4	Bandara Soekarno Hatta -Pasar Minggu	04.00	23.00	40 Km	75 Menit	14	30,000	Damri
		5	Bandara Soekarno Hatta -Cikarang	04.00	20.00	80 Km	120 Menit	6	40,000	Damri
		6	Bandara Soekarno Hatta -Bogor	02.00	22.00	87 Km	120 Menit	17	45,000	Damri
		7	Bandara Soekarno Hatta -Bekasi	02.00	23.00	57 Km	90 Menit	22	35,000	Damri
		8	Bandara Soekarno Hatta - Priok	04.00	23.00	43 Km	45 Menit	4	30,000	Damri
		9	Bandara Soekarno Hatta - Lebak Bulus	04.00	23.00	40 Km	85 Menit	8	30,000	Damri
		10	Bandara Soekarno Hatta - Kp. Rambutan	04.00	23.00	60 Km	90 Menit	16	30,000	Damri
		11	Bandara Soekarno Hatta - Serang	05.00	18.00	43 Km	90 Menit	3	45,000	Damri
		12	Bandara Soekarno Hatta -Kemayoran	05.00	23.00	37 Km	45 Menit	4	30,000	Damri
<b>Jumlah</b>								<b>188</b>		
3	Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Bandung Super Mall	1	Bandara Soekarno Hatta, Jakarta - Bandung Super Mall	02.00	24.00	197 Km	240 Menit	40	90,000	Prima Jasa
<b>Jumlah</b>								<b>44</b>		
4	Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur	1	Bandara Juanda - Terminal Purabaya	05.00	21.00	12 Km	40 Menit	8	17,000	Damri
		2	Terminal Purabaya - Tanjung Perak	05.00	21.00	18 Km	60 Menit	9	6,000	Damri
<b>Jumlah</b>								<b>17</b>		
5	Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat	1	Bandara Int. Minangkabau- Lap. Imam Bonjol	06.00	21.00	28 Km	40 Menit	3	20,000	Damri
		2	Bandara Int. Minangkabau- Simpang Lubuk Begalung	07.00	22.00	33 Km	60 Menit	4	20,000	Tranex
<b>Jumlah</b>								<b>7</b>		
6	Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau	1	Bandara Hang Nadim - Jodoh	07.00	21.00	29 Km	30-45 Menit	2	17,000	Damri
		2	Bandara Hang Nadim - Batu Aji (Pasar Fanindo)	07.00	21.00	32 Km	30-45 Menit	2	17,000	Damri
<b>Jumlah</b>								<b>4</b>		

7	Bandara Sultan Hasanudin, Makasar, Sulawesi Selatan	1	Bandara Sultan Hasanudin- Lap.Karebosi	08.00	21.30	23 Km	90 Menit	3	17.000	Damri
								<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	
8	Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, DIY	1	Bandara Adi Sucipto - Kebumen	03.00	21.00	110 Km	180 Menit	4	57,000	Damri
		2	Bandara Adi Sucipto - Magelang	04.00	21.00	55 Km	90 Menit	6	37,000	Damri
								<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	
9	Bandara Sultan Thaha Jambi, Provinsi Jambi	1	Bandara Sultan Thaha - Sudirman					2	20.000	Damri
		2	Bandara Sultan Thaha – Simpang Tempino					2	20.000	Damri
		3	Bandara Sultan Thaha – Simpang Mendalo					2	25.000	Damri
		4	Bandara Sultan Thaha – Perumahan Auduri					2	30.000	Damri
								<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	
10	Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Riau	1	Bandara Depati Amir - Muntok					3	60.000	Damri
		2	Bandara Depati Amir – Jebus					2	55.000	Damri
		3	Bandara Depati Amir – Toboali					1	50.000	Damri
		4	Bandara Depati Amir - Belinyu					1	55.000	Damri
								<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	

Sumber : Dit. BSTP, Ditjen Hubdat, 2013

Selain permasalahan lalu lintas dan angkutan, permasalahan lingkungan juga menjadi fokus kegiatan Dit. BSTP. Direktorat BSTP mendukung Program gasifikasi angkutan umum secara terencana dan berkelanjutan terus dilakukan dalam rangkai mendukung program langit biru dan transportasi ramah lingkungan.

Memperhatikan kondisi yang ada di lapangan, pembinaan transportasi perkotaan terus dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis dibidang penyusunan rencana induk pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan di perkotaan (*master plan transportasi/grand design transportasi*), penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan program gasifikasi, pengembangan *bus rapid transit*, bantuan bus sekolah/pelajar/mahasiswa, penataan fasilitas pemadu moda dan program-program lain yang bersifat insidental.

## 2. Perkembangan Prasarana Angkutan Perkotaan

Prasarana angkutan umum yang dikembangkan saat ini belum menunjukkan hal yang signifikan. Dari DKI Jakarta, Batam, Bogor, Bandung, Pekanbaru, Manado, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Gorontalo, Sarbagita dan Palembang; hanya DKI Jakarta saja yang telah mempunyai jalur khusus untuk bus (*busway*) sedangkan yang lainnya masih menggunakan jalur bersama (*mixuser*).

Untuk mengantisipasi hal ini, mengacu pada Undang-Undang No: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas dinyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota harus dilengkapi dengan rencana pengembangan jaringan angkutan umum. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan kota-kota besar dan metropolitan untuk menyediakan angkutan umum massal.

Untuk data prasarana lalu lintas dan angkutan jalan perkotaan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel IV.30

**Tabel IV.30. Data Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perkotaan Tahun 2013**

No	Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Kota (km <sup>2</sup> )	Luas Jalan (km <sup>2</sup> )	Road Ratio (%)	Panjang Jalan (km <sup>2</sup> )	Panjang Jalan dilengkapi Trotoar (km)	Panjang Jalan dilengkapi Marka (km)	Jumlah Rambu Terpasang (unit)	Jumlah LPJ Terpasang (unit)	Jml SRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>KOTA METROPOLITAN</b>											
1	SURABAYA	2,987,456	374.78	15,187	0.23	3,546	2,124	2,837	17,73	37,233	35
2	BANDUNG	2,296,848	167.67	11,66	0.21	2,453	1,471	1,962	12,265	25,756	38
3	MEDAN	2,067,288	265.10	16,185	0.18	2,981	1,352	2,385	14,905	31,3	30
4	PALEMBANG	1.708.413	358.55	17,987	0,13	747.9	83.63	15.85	5,35	10.504	24
5	MAKASAR	1,334,090	175.77	16,655	0.11	1,765	865	1,412	8,825	18,532	37
6	SEMARANG	2,067,254	373.70	18,309	0.21	3,769	1,341	3,015	18,845	39,574	38
7	BOGOR	950,334	118.50	10,725	0,13	1,356	632	1,085	6.780	14,238	14
<b>KOTA BESAR</b>											
8	PADANG	933,544	695.00	11,557	0,09	1,086	533	869	5,43	11,403	11
9	PEKANBARU	666,902	632.26	12,466	0,19	2,342	1,621	1,874	11,71	24,591	23
10	SAMARINDA	726.223	718.00	7,654	0,7	535,5	35.086	70.00	1043	1815	21
11	TASIKMALAYA	635,424	184.38	8,656	0,11	985	234	788	4,925	10,342	10
12	SURAKARTA	520,061	44.030	11,567	0.4	675.8	124.41	41	849	16,169	13
13	BALIKPAPAN	639,031	503.30	7,132	0,6	257	27,78	153,775	650	4.854	15
14	YOGYAKARTA	388,088	32.500	6,874	0,16	1,098	412	878	5,49	11,529	11
15	SIDOARJO	211.881	634.89	13,567	0,11	1,453	422	1,162	7,265	15,256	15
16	BUKIT TINGGI	485,324	25.240	6,134	0,16	980	522	784	4,9	10,29	10
<b>KOTA SEDANG</b>											
17	CIMAHI	566.200	40.25	3,178	0,25	780	210	624	3,9	8,19	8
18	JAMBI	529,118	50,058	2,978	0,22	653	125	522	3,265	6,856	7

**Tabel IV.30. Data Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perkotaan Tahun 2013**

No	Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Kota (km <sup>2</sup> )	Luas Jalan (km <sup>2</sup> )	Road Ratio (%)	Panjang Jalan (km <sup>2</sup> )	Panjang Jalan dilengkapi Trotoar (km)	Panjang Jalan dilengkapi Marka (km)	Jumlah Rambu Terpasang (unit)	Jumlah LPJ Terpasang (unit)	Jml SRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	SENGKANG	384,694	2,056	1,601	0,08	124	61	99	620	1,302	1
20	SUKABUMI	298,681	48.15	9,408	0,01	603	369	482	3,015	6,331	8
21	BANYUWANGI	274.542	5,782	3,981	0,09	378	121	302	1,89	3,969	6
22	PANGKAJENE	305,758	1,236	2,684	0,09	237	117	190	1,185	2,488	7
23	DUMAI	293,355	2,039	5,375	0,03	136	51	109	680	1,428	10
24	BANGLI	254.053	1,654	1,587	0,06	98	44	78	490	1,029	11
25	MADIUN	249.643	23.05	1,753	0,12	212	102	170	1,06	2,226	6
26	T. AGUNG	239.201	1,055	1,175	0,14	159	62	127	759	1,669	7
27	TANJUNG BALAI	236.943	58.00	1,241	0,07	89	69	71	445	934	8
28	BADUNG	221.055	17.52	1,559	0,15	230	124	184	1,15	2,415	9
29	LUMAJANG	206.288	10,021	2,574	0,14	359	153	287	1,759	3,769	18
30	PAREPARE	121.161	99,33	2488.8	0,22	311.1	199.6	212,465	237	1612	9
31	CIAMIS	186.623	2.556	2,312	0,2	459	223	367	2,295	4,819	11
32	WATAMPONE	183,251	1387	1,534	0,21	320	164	256	1,6	3,36	6
33	MOJOKERTO	181.999	16,465	1,356	0,2	270	121	216	1,35	2,835	7
<b>KOTA KECIL</b>											
34	SNG.MINASA	79,643	9,316	1,125	0,12	130	64	104	650	1,365	13
35	SRAGEN	98,461	7,475	1,213	0,21	260	127	208	1,3	2,73	15
36	SINGARAJA	84,613	27.98	1,435	0,12	178	134	142	890	1,869	8
37	STABAT	83.223	90.64	1,512	0,08	117	52	93	585	1,228	9
38	PARIAMAN	97.901	73.36	1,344	0,06	81	35	64	405	850	7

**Tabel IV.30. Data Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perkotaan Tahun 2013**

No	Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Kota (km <sup>2</sup> )	Luas Jalan (km <sup>2</sup> )	Road Ratio (%)	Panjang Jalan (km <sup>2</sup> )	Panjang Jalan dilengkapi Trotoar (km)	Panjang Jalan dilengkapi Marka (km)	Jumlah Rambu Terpasang (unit)	Jumlah LPJ Terpasang (unit)	Jml SRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	AMLAPURA	76,312	7,448	1,234	0,13	158	78	126	790	1,659	6
40	KY.AGUNG	64,584	12,145	946	0,06	54	26	43	270	567	5
41	MAGETAN	47.682	688,85	1,157	0,11	129	63	103	645	1,354	12
42	TABANAN	76,431	839,33	1,778	0,13	233	154	186	1,165	2,446	22
43	SEMARAPURA	84,615	7,546	1,434	0,23	328	211	262	715	3,444	11
44	GNG KIDUL	64,315	1.485	1,453	0,1	143	134	114	475	1,501	9
45	POLEWALI	46,312	2,022	1,586	0,06	95	59	76	660	997	10
46	M. BUNGO	84,516	7.160	2,453	0,05	132	63	105	425	1,386	19
47	AMUNTAI	64,312	13,673	1,232	0,07	85	41	68	1,055	892	12
48	LUBUK PAKAM	64,315	12,901	1,397	0,15	211	106	168	956	2,215	13
49	PD.PANJANG	52,018	23.000	1,536	0,1776	60.4	34	14	491	1,953	14
50	PINRANG	51,324	1.961	2,132	0,04	76	39	60	380	798	8
51	MUARA ENIM	63,142	7.300	4,768	0,02	85	41	68	425	892	10
52	PELAIHARI	54,312	378,95	3,434	0,02	66	37	52	330	693	9
53	KEPANJEN	91,324	12,625	4,987	0,05	241	125	192	1,205	2,53	19
54	TANJUNG	61,542	323,34	1,546	0,06	89	42	71	445	934	8
55	GIANYAR	85,134	368	3354	0,09	287	143	229	653	3,013	8
56	BATU SANGKAR	76,132	1.336	1467	0,07	109	62	87	341	1,144	10

Sumber : Direktorat BSTP 2014

Tabel IV.31. Fasilitas Pendukung LLAJ dan Persimpangan dengan APILL

No	Kota	Jumlah Halte	Jumlah Fasilitas Penyebrangan	Jumlah Simpang	Jumlah APILL
<b>KOTA METROPOLITAN</b>					
1	SURABAYA	53	192	133	124
2	BANDUNG	35	165	352	182
3	MEDAN	36	312	239	43
4	PALEMBANG	34	46	57	42
5	MAKASSAR	70	324	80	46
6	SEMARANG	57	77	94	105
<b>KOTA BESAR</b>					
7	BOGOR	35	126	271	37
8	PADANG	65	127	269	38
9	PEKANBARU	45	138	212	27
10	SAMARINDA	24	154	316	33
11	TASIKMALAYA	13	85	304	25
12	SURAKARTA	42	71	134	68
13	BALIKPAPAN	39	121	344	24
<b>KOTA SEDANG</b>					
14	CIMAHI	15	49	411	17
15	JAMBI	28	148	63	26
16	YOGYAKARTA	3	195	280	76
17	SENGKANG	3	9	50	22
18	SUKABUMI	8	185	167	84
19	BANYUWANGI	8	80	113	9
20	PANGKAJENE	3	6	203	14
21	BINJAI	11	56	55	35
22	DUMAI	37	32	13	6
23	BANGLI	3	31	22	2
24	MADIUN	10	183	74	42
25	TULLUNG AGUNG	11	74	70	23
26	TANJUNG BALAI	7	13	26	4
27	BADUNG	13	112	53	16
28	LUMAJANG	9	29	20	11
29	SIDOARJO	7	39	25	15
30	PAREPARE	7	47	93	14
31	CIAMS	6	20	59	10
32	WATAMPONE	5	7	49	7
33	MOJOKERTO	2	20	21	18
34	BUKIT TINGGI	21	85	99	15
35	SUNGGUMINASA	3	15	97	7
36	SRAGEN	12	20	32	23
37	SINGARAJA	10	49	21	21
38	STABAT	10	16	63	3
39	PARIAMAN	1	75	58	8
40	AMLAPURA	12	80	98	4
41	KAYU AGUNG	4	9	78	4
42	MAGETAN	2	43	64	5
43	TABANAN	16	66	70	9
44	SAMARAPURA	5	54	108	7
45	GUNUNG KIDUL	20	54	71	11

46	POLEWALI	16	25	113	113
47	MUARA BUNGO	3	14	175	113
48	AMUNTAI	0	14	68	1
49	LUBUK PAKAM	7	44	41	15
50	PADANGPANJANG	11	41	19	62
51	PINRANG	1	4	55	2
52	MUARA ENIM	0	13	71	3
53	PELAIHARI	1	33	15	1
54	KEPANJEN	6	22	35	10
55	TANJUNG	7	20	37	8
56	GIANYAR	2	26	62	8

Sumber : Dit. BSTP. Ditjen Hubdat, 2013

Tabel IV.32 Data Lalu Lintas Tahun 2013

No	Kota	V/C Ratio Rata - Rata	Kecepatan Rata-rata (km/jam)
<b>KOTA METROPOLITAN (10 RUAS JALAN)</b>			
1	SURABAYA	0.88	21
2	BANDUNG	0.87	21
3	MEDAN	0.88	21
4	PALEMBANG	0.59	45
5	MAKASSAR	0.85	22
6	SEMARANG	0.89	20
7	BOGOR	0.82	23
<b>KOTA BESAR (8 RUAS JALAN)</b>			
1	PADANG	0.73	31
2	PEKANBARU	0.74	30
3	SAMARINDA	0,74	30
4	TASIKMALAYA	0.71	31
5	SURAKARTA	0.79	29
6	BALIKPAPAN	0.78	29
7	CIMAHI	0.75	30
8	JAMBI	0.79	29
9	YOGYAKARTA	0.87	21
<b>KOTA SEDANG (6 RUAS JALAN)</b>			
1	SENGKANG	0.61	33
2	SUKABUMI	0.77	29
3	BANYUWANGI	0.63	33
4	PANGKAJENE	0.70	31
5	BINJAI	0.80	28
6	DUMAI	0.70	31
7	BANGLI	0.88	21
8	MADIUN	0.61	34
9	TANJUNG BALAI	0.64	56
10	BADUNG	0.99	11
11	LUMAJANG	0.57	39
12	SIDOARJO	0.78	29
13	PAREPARE	0.72	30
14	MOJOKERTO	0.61	42
15	BUKIT TINGGI	0.73	30
<b>KOTA KECIL (4 RUAS JALAN)</b>			
1	SUNGGUMINASA	0.71	31

2	TULUNG AGUNG	0.61	33
3	CIAMIS	0.73	30
4	WATAMPONE	0.88	21
5	SRAGEN	0.22	60
6	SINGARAJA	0.73	30
7	STABAT	0.88	29
8	PARIAMAN	0.22	31
9	AMLAPURA	0.73	30
10	KAYU AGUNG	0.79	30
11	MAGETAN	0.68	29
12	TABANAN	0.72	11
13	SAMARAPURA	0.72	41
14	GUNUNG KIDUL	0.75	54
15	POLEWALI	0.99	52
16	MUARA BUNGO	0.49	43
17	AMUNTAI	0.31	41
18	LUBUK PAKAM	0.39	33
19	PADANGPANJANG	0.50	34
20	PINRANG	0.48	41
21	MUARA ENIM	0.60	33
22	PELAHARI	0.44	34
23	KEPANJEN	0.57	39
24	TANJUNG	0.57	39
25	GIANYAR	0.78	29

Sumber : Dit. BSTP. Ditjen Hubdat, 2013

### 3. Perkembangan Sarana Angkutan Perkotaan

Pada tahun 2013 jumlah angkutan umum perkotaan dan taksi masih sama seperti pada tahun 2012. Untuk angkutan kota, jumlah yang paling tinggi yaitu pada mobil penumpang umum (MPU) sebesar 203.828 unit untuk mobil penumpang umum tersebut mengalami penurunan di bandingkan tahun 2012 karena kelayakan kendaraan tersebut sedangkan untuk taksi hanya sebesar 62.017 unit.

Tabel IV.33. Jumlah Angkutan Umum

No.	Pelayanan	Jenis Kendaraan				Total
		BB	BS	BK	MPU	
1	Angkutan Kota	26.402	37.868	89.224	203.828	357.322
2	Taksi	-	-	-	62.017	62.017
<b>Total</b>		<b>26.402</b>	<b>37.868</b>	<b>89.224</b>	<b>265.845</b>	<b>419.339</b>

Sumber : Dit. BSTP. Ditjen Hubdat, 2013

Kondisi saat ini menunjukkan jumlah angkutan umum di Indonesia semakin menurun akibat penurunan tersebut dikarenakan kendaraan yang sudah semakin tua atau umur kendaraan yang sudah tidak layak, dan pelayanannya dirasakan masih kurang memuaskan. Hal ini disebabkan karena penataan dan perencanaan angkutan umum diperkotaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan prasarana yang ada.

Dalam peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan dan untuk mengatasi permasalahan diatas telah diterapkan kebijakan dengan orientasi pada pengembangan angkutan umum dengan strategi :

- a. Mengembangkan angkutan umum yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat yang cepat, tepat, aman, nyaman, murah (CTANM) dan berkelanjutan.
- b. Menjamin kepastian dan keberlangsungan untuk pelayanan angkutan umum perkotaan dimasa yang akan datang.

Program yang dilakukan oleh Dit. BSTP yang berkaitan dengan pengembangan sarana angkutan perkotaan antara lain :

- a. Pengadaan Bus (Bus Bantuan Pelajar/Mahasiswa/Perkotaan) 60 unit;
- b. Pengadaan Bus (Bantuan untuk Pengembangan Angkutan Umum Masal/BRT) 30 unit;

#### 4. Kinerja Angkutan Perkotaan

Unjuk kerja pelayanan angkutan perkotaan dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya:

- a. Ketepatan waktu pelayanan
- b. Kepastian akan pelayanan
- c. Tarif yang ditetapkan terjangkau oleh pengguna jasa angkutan umum;
- d. Tingkat keamanan dan kenyamanan dalam angkutan terjaga;

Saat ini sedang disusun draft Peretauran Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan.

#### 5. Kegiatan-kegiatan Strategis

- a. Fasilitas Pendukung Transportasi Massal Perkotaan (Fasilitas Pendukung BRT di koridor Mebidangro, Bandung Raya, Surabaya Metropolitan Area, Sarbagita, Maminasata, Jakarta Tangerang, Jakarta Bekasi, Jakarta Depok);
- b. Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Aglomerasi (Jabodetabek, Mebidangro, Surabaya Metropolitan Area, Bandung Raya, Sarbagita, Maminasata)
- c. Kegiatan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan ini dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan angkutan umum wilayah perkotaan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama/MOU yang masing-masing instansi telah menyepakati kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- d. Program bantuan Angkutan sekolah/pelajar dan mahasiswa;
- e. Pengadaan Fasilitas Integrasi Moda (Kota Bogor, Kota Palembang);

## 6. Permasalahan yang dihadapi

- a. Masih kurangnya pedoman/panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
- b. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
- c. Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
- d. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi.
- e. Kemacetan lalu lintas;
- f. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
- g. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

## 7. Upaya yang dilakukan

Dari hambatan-hambatan di atas maka untuk menanggulangnya dilakukan berbagai upaya yaitu :

- a. Penyelenggaraan kegiatan konsolidasi kepada Pemerintah Daerah tingkat Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna mengetahui perkembangan serta permasalahan transportasi yang terjadi pada masing-masing Kota/Kabupaten lebih mendalam dan mensosialisasikan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam pengembangan transportasi yang lebih baik,
- b. Bimbingan teknis dan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah baik pada bidang penyusunan master plan, lalu lintas, angkutan maupun lingkungan;
- c. Pembinaan transportasi perkotaan melalui Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
- d. Penyusunan Grand Desain/ Master Plan/ Rencana Induk Transportasi Perkotaan, dengan beberapa kota sebagai Kota Percontohan.
- e. Penyempurnaan peraturan perundangan-undangan dibidang transportasi perkotaan.

## D. KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

### 1. Umum

Permasalahan yang dihadapi di dalam transportasi jalan di Indonesia ada dua hal, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan biasanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta. Sedangkan keselamatan terjadi hampir merata di semua wilayah di Indonesia. Hal ini terlihat dari data laporan kecelakaan yang bersumber dari Kepolisian. Pada tahun 2012 jumlah kejadian kecelakaan di Indonesia sebesar 117.949 kejadian dengan korban meninggal dunia 25.131 orang.

Fenomena tingginya tingkat kecelakaan bukan hanya terjadi di Indonesia. Berdasar penelitian yang dilakukan oleh TRL, bahwa untuk Negara-negara dengan jumlah populasi

kendaraan bermotor yang tinggi kerugian material mencapai 2% dari PNB. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh UGM dan UI perkiraan kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas tahun 2002 sekurang-kurangnya sebesar 30.82 triliun rupiah (atau sekitar 3.5 milyar US Dollar) atau sekitar 2.17% dari GDP. Ini merupakan sebuah angka yang besar dan ini terjadi setiap tahun bahkan angkanya makin meningkat.

Badan dunia, PBB, sangat prihatin dengan kondisi ini. Karena fenomena ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi hampir di semua Negara berkembang. Sehingga PBB mengeluarkan resolusi dengan Nomor A/64/L.44/Rev.1\* tanggal 24 Februari 2010. Yang dikenal dengan *Decade of Action for Road Safety*. Pemerintah Indonesia harus tanggap dengan kondisi ini, sehingga pada bulan Mei 2011 dicanangkan Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang di dalamnya akan menetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (2011 s/d 2020).

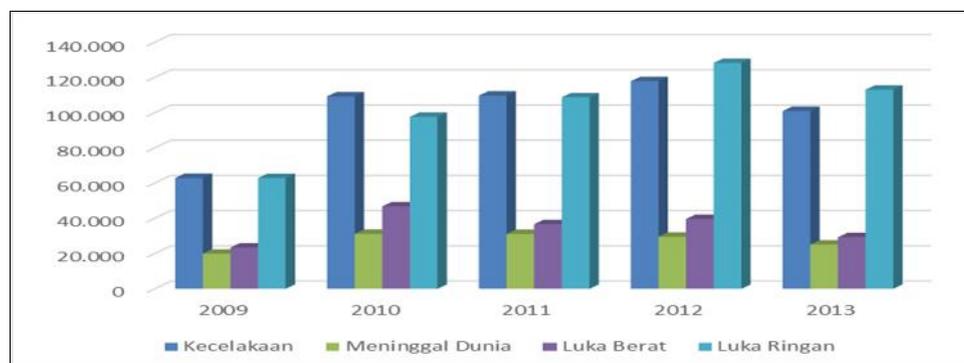
Penanganan keselamatan jalan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, baik secara operasional maupun manajerial dalam hal ini mencakup tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat.

## 2. Perkembangan Kecelakaan Transportasi Jalan

Tabel. IV.34. Jumlah Kecelakaan dan Korban Kendaraan Bermotor Berdasar Tingkat Kecelakaan Tahun 2009-2013

No	Jenis	Satuan	Tahun					Pertumbuhan Rata - Rata
			2009	2010	2011	2012	2013	%
1	Kecelakaan	Kecelakaan	62.960	109.319	109.776	117.949	100.106	16,59
2	Meninggal Dunia	Orang	19.979	31.234	31.185	29.544	26.416	10,08
3	Luka Berat	Orang	23.469	46.851	36.767	39.704	28.438	14,43
4	Luka Ringan	Orang	62.936	97.702	108.811	128.312	110.448	17,65
5	Total Korban	Orang	106.384	175.787	176.763	197.560	165.302	15,31
6	Kerugian	Milyar Rp.	136	143	286	299	256	23,74

Sumber : POLRI, 2013



Gambar. IV.3 Grafik Perkembangan Kecelakaan Lalu Lintas

### 3. Kegiatan-Kegiatan Strategis

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat pada tahun 2013 tetap mengacu pada kinerja tahun 2012 yang belum terlaksana dan yang dalam proses penyelesaian dengan beberapa penyempurnaan terhadap program-program yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah maupun pusat terhadap program pembangunan di daerah, dalam kaitan dengan peningkatan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat baik di daerah padat penduduk maupun daerah terpencil/terisolir yang tersebar di beberapa wilayah.

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat tahun 2013 disusun dengan mempertimbangkan :

- a. Kebijakan Menteri Perhubungan;
- b. Kelanjutan dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan sebelumnya;
- c. Kegiatan yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Sub Sektor Perhubungan Darat;
- d. Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan;
- e. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013.

#### a. Penilaian Inventarisasi Kinerja Manajemen Keselamatan Transportasi Darat

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang langka, acak dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh suatu situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Sedangkan salah satu penyebab kecelakaan adalah manusia (90%) dari penyebab yang lain. Ada beberapa perubahan cara pandang tentang keselamatan yang bersifat lebih baik, diantaranya adalah :

1. Kecelakaan Lalu lintas adalah buah dari kelalaian dan ketidaksiapan.
2. Penurunan peluang kecelakaan adalah peluang bisnis.
3. Upaya perwujudan keselamatan transportasi darat adalah investasi

Di dunia setiap tahun sekitar 1 juta orang meninggal dan lebih 50 juta orang luka karena kecelakaan lalu lintas jalan, 75% diantaranya terjadi di negara-negara berkembang. Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi berkisar US\$ 500 milyar untuk negara-negara berkembang dan transisi atau diperkirakan sekitar 2% - 4% dari GDP.

Pada tahun 2020 WHO memperkirakan jumlah kematian di seluruh dunia akibat kecelakaan lalu lintas naik menjadi 2,3 juta setiap tahun memempati urutan ketiga setelah *Ischemic heart disease* dan *Unipolar major depression* (Krug, 2000).

Dengan adanya fenomena seperti itu maka PBB mengeluarkan suatu resolusi No. A/58/289 tanggal 14 April 2004 yang berisi agar setiap Negara anggota meningkatkan perhatian dalam upaya meningkatkan keselamatan jalan, sehingga mampu mengurangi tingkat kecelakaan.

Kemudian juga Resolusi Sekjen PBB A/Res/60/5 tanggal 1 Desember 2005 lebih menekankan kembali agar setiap negara mengambil langkah-langkah spesifik seperti: Peningkatan penggunaan helm dan sabuk keselamatan, *Drink and Drive* dan setiap negara wajib membentuk "a National Lead Agency on Road Safety". Untuk menindak lanjutinya maka diadakan 4<sup>th</sup> *United Nations Road Safety Collaboration Meeting* pada hari ketiga membahas *The First United Nation Global Road Safety Week* yang dilaksanakan bulan April 2007.

Pada tanggal 2 Maret tahun 2010, PBB mengeluarkan resolusi A/64/255 tentang *Decade of Road Safety 2011-2020*, dimana dalam resolusi itu diharapkan tiap Negara anggota PBB memberikan atau membuat Rencana aksi keselamatan transportasi Darat. Pendekatan yang digunakan dalam penanganan itu adalah lima pilar yang terdiri atas:

1. Manajemen Keselamatan (*Road safety Management*);
2. Jalan yang Berkeselamatan (*Safer Road*);
3. Kendaraan yang Berkeselamatan (*Safer Vehicle*);
4. Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (*Safer People*);
5. Penanganan Korban Paska Kecelakaan (*Post Crash*).

Proses pengambilan data kinerja keselamatan transportasi darat dengan menggunakan kuesioner yang dikirim oleh Direktorat Keselamatan Transportasi Darat ke Dinas Perhubungan Provinsi yang akan dilakukan penilaian. Dalam data kinerja sistem keselamatan jalan dapat diperoleh dari pihak-pihak yang terkait, misal Dinas perhubungan Daerah, BPS Daerah, Kepolisian dan pihak-pihak lain yang terkait. Ada langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan.

Untuk mendapatkan data ini diperlukan koordinasi antar instansi, karena keberadaan data tidak hanya berasal dari satu instansi.

#### 1. Sumber Data

Data berasal dari instansi terkait sesuai dengan jenis data yang diperlukan. Sebaiknya dalam pengisian data dari instansi terkait di ketahui oleh pejabat yang berwenang.

## 2. Jenis Pertanyaan

Dalam formulir untuk mendapatkan data ada 5 jenis pertanyaan, yaitu:

### a. Pilihan ganda bertingkat

Adalah pertanyaan yang jawabannya berupa pilihan ganda tapi mempunyai skor yang bertingkat. Untuk pertanyaan bentuk ini maka surveyor cukup menulis pilihannya saja pada kolom jawaban (kolom kedua).

### b. Pilihan Ganda rangkap

Adalah pertanyaan yang jawabannya berupa pilihan ganda tapi responden boleh memilih lebih dari satu.

## 3. Jenis Data

Data-data yang dibutuhkan merupakan data yang mempunyai satuan bervariasi dimana tiap jenis data diperlakukan berbeda agar menghasilkan satu jenis data. Untuk mengatasi hal ini akan dilakukan standarisasi atau dapat dilakukan pengkatagorian untuk data yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif.

Setelah proses pengumpulan data dari lapangan dan telah dimasukkan ke dalam komputer. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data. Ada beberapa tahap dalam analisis data dari mulai standarisasi sampai dengan ranking kinerja atau penggolongan kinerja.

## 4. Variabel yang Digunakan

Data yang didapat dari lapangan ataupun dari instansi tertentu sangat bervariasi bentuk dan satuannya. Jika akan dilakukan penggabungan terhadap data-data tersebut maka harus dilakukan standarisasi nilai dari data. Variabel-variabel yang akan dijadikan parameter adalah sebagai berikut :

### a. Pilar 1: Manajemen Keselamatan (*Road safety Management*)

Pilar ini terdiri atas beberapa sektor, yang terdiri atas:

#### 1) Koordinasi dan Manajemen Keselamatan jalan, meliputi :

- a) Kebijakan pemerintah daerah (berbagai kebijakan yang berkenaan dengan keselamatan jalan)
- b) Kelembagaan (keberadaan lembaga yang bertugas menangani masalah keselamatan jalan)
- c) Sumber daya Manusia (tingkat kualitas SDM bidang keselamatan, usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM)

#### 2) Sistem Pendataan Kecelakaan Jalan, meliputi :

- a) Metode Pengumpulan data (media yang digunakan dalam pengumpulan data, koordinasi antar instansi)
  - b) Metode Penyimpanan data (peralatan yang digunakan dan kemudahan akses data)
  - c) Analisis data kecelakaan (keberadaan kegiatan analisis terhadap data yang tersedia)
- 3) Sistem Pendanaan Keselamatan, meliputi :
- a) Dukungan Pemerintah Daerah (persentase dana keselamatan terhadap APBD, persentase dana keselamatan terhadap pendapatan sektor transportasi, dukungan dalam peraturan-peraturan Daerah)
  - b) Sumber-sumber dana (sumber-sumber dana dalam penanganan keselamatan jalan)
  - c) Keterlibatan sektor swasta (peran serta swasta dalam ikut menangani keselamatan jalan)
- 4) Penetapan Hukum LLAJ (*Traffic Legislation*) meliputi :
- a) Keberadaan peraturan LLAJ (Perda dan peraturan gubernur)
- 5) Riset Keselamatan meliputi :
- a) Keberadaan riset bidang Keselamatan jalan
  - b) Dana riset Keselamatan jalan (persentase terhadap APBN)
- b. Pilar 2: Jalan yang Berkeselamatan (*Safer Road*)
- Pilar ini terdiri atas beberapa sektor, yaitu:
- 1) Perencanaan Desain Jalan dan Prasarana Jalan, meliputi :
    - a) Perencanaan (koordinasi antar instansi, keberadaan proses penelitian dalam desain jalan)
    - b) Auditor (keberadaan auditor, upaya peningkatan kualitas auditor, pedoman yang digunakan auditor dalam mengaudit jalan)
  - 2) Prasarana jalan (ketersediaan tempat menyeberang bagi pejalan kaki, ketersediaan lampu jalan, marka jalan, ketersediaan rambu yang terpasang, ketersediaan tempat pemberhentian kendaraan umum (halte/stop bus))
  - 3) Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) dan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK), meliputi :
    - a) Identifikasi LRK/DRK (identifikasi keberadaan LRK/DRK)
    - b) Penanganan LRK/DRK (keberadaan tim yang menangani LRK/DRK, tingkat penanganan LRK/DRK)

- c) Keterlibatan sektor swasta (peran serta swasta dalam menangani LRK/DRK)
- c. Pilar 3: Kendaraan yang Berkeselamatan (*Safer Vehicle*)  
Pilar ini terdiri atas sektor, yaitu:  
Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor meliputi :
- 1) Pengujian (waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian untuk setiap kendaraan bermotor)
  - 2) Proporsi kendaraan yang lulus uji;
  - 3) Perlengkapan uji mekanik yang dimiliki;
  - 4) Penegakan hukum terhadap kelaikan jalan kendaraan.
- d. Pilar 4: Pengguna Jalan yang berkeselamatan (*Safer People*)  
Pilar ini terdiri atas beberapa sektor, yaitu:
- 1) Pendidikan Keselamatan Jalan Untuk Anak dan remaja meliputi:
    - a) Peningkatan pengetahuan keselamatan melalui jalur pendidikan (ketersediaan kurikulum pendidikan untuk keselamatan jalan)
    - b) Kerjasama (kerjasama dalam meningkatkan pengetahuan masalah keselamatan jalan)
    - c) Peningkatan kualitas pengetahuan pengajar (pelatihan terhadap guru dan orang tua dalam peningkatan pengetahuan masalah keselamatan jalan)
    - d) Peningkatan pengetahuan keselamatan di luar jalur pendidikan (penerbitan buku-buku keselamatan, seminar-seminar keselamatan dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keselamatan jalan)
  - 2) Pelatihan dan Pembinaan Pengemudi meliputi :
    - a) Pendataan dan pengawasan Pemerintah (keberadaan sekolah mengemudi, pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap sekolah mengemudi)
    - b) Peningkatan kualitas pengemudi (pelatihan-pelatihan pengemudi, peran serta swasta dalam peningkatan kualitas pengemudi)
    - c) Kebijakan terhadap sekolah mengemudi (pembinaan terhadap sekolah-sekolah mengemudi, standarisasi pengajar di sekolah mengemudi, standarisasi materi bagi sekolah mengemudi)

- d) Sistem Informasi Pengemudi (keberadaan database atau sistem Informasi pengemudi, proses sosialisasi kebijakan kepada pengemudi angkutan umum)
- 3) Kampanye Keselamatan Jalan meliputi :
  - a) Dana Kampanye (persentase dana kampanye terhadap APBD, sumber-sumber dana kampanye)
  - b) Metode dan sasaran kampanye (media yang digunakan dalam kampanye, sasaran dalam berkampanye, ketersediaan pedoman kampanye, penelitian-penelitian dalam berkampanye dan evaluasi terhadap penggunaan metode kampanye)
  - c) Keterlibatan sektor swasta (peran serta swasta dalam kampanye keselamatan jalan)
- 4) Polisi Lalu Lintas dan Penegakan hukum meliputi :
  - a) Penegakan hukum (tingkat inspeksi petugas kel lapangan)
  - b) Dukungan program keselamatan (keberadaan program-program yang bertujuan meningkatkan keselamatan jalan)
  - c) Dukungan sosialisasi keselamatan (dukungan kepolisian dalam ikut mensosialisasikan masalah keselamatan jalan)
  - d) Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum (penggunaan peralatan dalam penegakan hukum)
- e. Pilar 5: Penanganan Paska Kecelakaan (*Post Crash*)  
 Pilar ini terdiri atas beberapa sektor, yaitu:  
 Penanganan terhadap Korban Kecelakaan meliputi :
  - 1) Ketersediaan tempat penanganan korban (jumlah klinik yang tersedia, persentase rumah sakit yang memiliki UGD terhadap jumlah rumah sakit)
  - 2) Ketersediaan peralatan kegawat darurat (jumlah ambulan yang tersedia)
  - 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (ketersediaan pedoman dalam penanganan kegawat darurat, kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kualitas SDM petugas)

#### **b. Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat**

Berbicara mengenai transportasi jalan dan kesadaran untuk tertib berlalu lintas berarti berkaitan erat dengan budaya masyarakat secara menyeluruh. Untuk membina budaya masyarakat yang sadar akan pentingnya ketertiban demi keselamatan, bukanlah waktu yang singkat dan tidak dapat di bangun seketika. Sejak kecil setiap orang harus sudah

ditanamkan nilai-nilai ketertiban khususnya tertib berlalu lintas karena erat kaitannya dengan keselamatan. Suatu cara terbaik untuk membentuk budaya adalah melalui jalur pendidikan. Mendidik bukan hanya mengajarkan namun dalam proses pendidikan termasuk juga didalamnya adalah pemberlakuan *system reward dan punishment* yaitu memberikan hukuman sebagai konsekuensi kesalahan dan memberikan pujian atau penghargaan sebagai kompensasi suatu prestasi.

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat adalah salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka proses penanaman budaya tertib berlalu lintas. Direktorat Keselamatan Transportasi Darat juga mengajak peran aktif pihak swasta untuk ikut menyelamatkan generasi muda negeri ini melalui kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat.

Dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan jelas menyatakan:
 

“ Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat;
3. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 208 ayat (1) Pembina lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan antara lain dengan pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan LLAJ.
4. Telah terbentuk *The World Youth Assembly for Road Safety* pertama kali dideklarasikan di Genewa tanggal 23-24 April 2007 yang diikuti oleh 400 pemuda sebagai duta keselamatan dari 100 negara. *The World Youth Assembly for Road Safety* merupakan persatuan pemuda sedunia untuk keselamatan jalan dalam rangka peningkatan kesadaran akan keselamatan dikalangan pemuda.

Calon peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat adalah seluruh pelajar dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pelajar SMU/ sederajat
2. Pelajar SMU / sederajat yang telah mengikuti proses seleksi Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tingkat Provinsi dan menjadi juara I.

Penilaian terhadap para pelajar atau peserta meliputi penilaian karya tulis dan penampilan saat mempresentasikan karyanya tersebut. Kriteria pemilihan berdasarkan 4 (empat) kategori yang terbagi atas Leadership, Public Speaking, Norma / Etika dan Materi Karya Tulis.

Pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor dilakukan oleh tim penilai independen yang terdiri dari Akademisi, Jurnalis dan Psikolog.

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat telah melaksanakan Pemilihan Pelajar Pelopor Transportasi Darat dari tahun 2009-2013.

**Tabel. IV.35. Data Jumlah Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tahun 2009-2013**

No.	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi
1	2009	10	5
2	2010	13	5
3	2011	30	12
4	2012	16	14
5	2013	22	17

Sumber : Direktorat KTD, Ditjen Hubdat – 2013.

Pemenang Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2013 adalah :

a. Juara I

Nama : Aprian Farhan Firdaus  
 Asal Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta  
 Provinsi : DKI. Jakarta  
 Total Nilai : 83,49

b. Juara II

Nama : Annisa Humaira  
 Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Balikpapan  
 Provinsi : Kalimantan Timur  
 Total Nilai : 82,62

c. Juara III

Nama : Licia Audina  
 Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Pariaman  
 Provinsi : Sumatera Barat  
 Total Nilai : 81,83

### c. Pemberdayaan Masyarakat Peduli Keselamatan

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktorat Keselamatan Transportasi Darat berusaha meningkatkan keselamatan berlalu lintas untuk mewujudkan terjaminnya perjalanan yang aman, nyaman, tertib dan lancar sehingga pengguna jalan dapat sampai ke tujuan dengan selamat, aman dan tepat waktu. Sementara itu Korban kecelakaan semakin tahun semakin meningkat. Maka dari itu peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk peningkatan keselamatan jalan untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya dengan melakukan kegiatan. Pemberdayaan Masyarakat Peduli Keselamatan sehingga tingkat kecelakaan dapat ditekan.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai saat ini. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Peduli Keselamatan dilaksanakan dalam bentuk lomba karya tulis tentang keselamatan jalan. Pendaftaran lomba karya tulis ini dilakukan dengan cara mengirimkan biodata dan karya tulisnya melalui website [www.roscaindo-hubdat.web.id](http://www.roscaindo-hubdat.web.id). Penjurian online dilakukan melalui 2 tahap yaitu seleksi administrasi dan penilaian oleh 3 orang juri yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, M.Sc, Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc, Achmad Suhendra, S.Sos untuk mendapatkan 10 peserta terbaik dimana kesepuluh orang tersebut dipanggil ke Jakarta untuk memaparkan hasil karya tulisnya.

### d. Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat

Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi nomor 58/289 Tanggal 23 April 2004, A/ 60/5 tanggal 26 October 2005 on "*improving global road safety*" dan telah diperbaharui dengan resolusi nomor 62/244 tanggal 25 april tahun 2008. Kemudian Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa – Bangsa, pada laporannya tahun 2009 dalam sidang umum mendorong Negara – Negara anggota untuk mendukung upaya – upaya untuk mendirikan aksi satu dekade. Satu dekade akan memberikan kesempatan untuk jangka panjang dan kegiatan terkoordinasi untuk mendukung keselamatan jalan raya nasional dan lokal.

Selain itu dengan telah disahkannya Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang LLAJ sebagai pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang LLAJ, maka perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-undang No.22 tahun 2009 di maksud. Pembahasan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 telah melibatkan banyak instansi terkait dan telah dihasilkan beberapa masukan dalam penyusunan undang-undang LLAJ ini. Paradigma dari Undang-undang No. 22 tahun 2009 ini adalah pembinaan bidang LLAJ dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait dengan kata lain bahwa instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan LLAJ tidak lagi

menjadi tanggung jawab sepenuhnya Menteri Perhubungan namun bersifat kolektif pada beberapa instansi seperti :

- 1) Urusan Pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan
- 2) Urusan Pemerintahan dibidang sarana dan prasarana LLAJ oleh kementerian yang bertanggung jawab bidang sarana dan prasarana LLAJ
- 3) Urusan Pemerintahan dibidang pengembangan industri LLAJ oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri
- 4) Urusan Pemerintahan di bidang Pengembangan teknologi LLAJ oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang teknologi
- 5) Urusan Pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, undang-undang ini juga didasari pada semangat bahwa penyelenggaraan LLAJ bersifat lintas sektoral yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta pemangku kepentingan dengan pembentukan Forum LLAJ. Salah satu kegiatan yang diupayakan untuk memberikan kesamaan pemahaman akan keselamatan lalu lintas yang tertuang didalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan maka dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat ini dilakukan di 3 Kota antara lain Jakarta, Bandung dan DI. Yogyakarta.

Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat di Bandung dilaksanakan pada tanggal 18-19 April 2013 bertempat di Hotel Banana Inn dengan jumlah peserta 20 orang. Kegiatan diskusi ini di pimpin oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat dan dihadiri oleh Drs. Suripno MSTR, Prof. Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, M.Sc, Kasubdit di lingkungan Ditjen Hubdat dan Dinas Perhubungan setempat.

Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 28-29 Mei 2013 bertempat di Hotel Neo Cideng dengan jumlah peserta 20 orang. Kegiatan diskusi ini di pimpin oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat dan dihadiri oleh Drs. Suripno MSTR, MSc, Prof. Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, Bapak Lilik Wachid Budi Susilo, Kasubdit di lingkungan Ditjen Hubdat dan instansi terkait.

Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat di DI. Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 27-28 Juni 2013 bertempat di Hotel New Shafir

dengan jumlah peserta 20 orang. Kegiatan diskusi ini di pimpin oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat dan dihadiri oleh Drs. Suripno MsTR, Prof. Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, Bapak Lilik Wachid Budi Susilo, Kasubdit di lingkungan Ditjen Hubdat dan instansi terkait.

**e. Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2013**

- 1) Jakarta
  - Tanggal Pelaksanaan : 20 - 22 September 2013
  - Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Perempatan Senen dan Sarinah, Silang Monas Barat Daya
  - Kegiatan : Tarian Theatrical jalan dan Flashmob Keselamatan
  - Peserta : 2000 Orang (Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Pegawai dan Undangan Kementerian Perhubungan dan Masyarakat Umum)
- 2) Pekan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang)
  - Tanggal Pelaksanaan : 26 - 28 April 2013
  - Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Kantor Gubernur
  - Kegiatan : Pembukaan oleh Gubernur, Fun Ride dan Donor Darah
  - Peserta : 200 Orang (Instansi Pemerintah, Club Motor dan Masyarakat Umum)
- 3) Provinsi Bangka Belitung (Pangkal Pinang)
  - Tanggal Pelaksanaan : 16 - 17 Juni 2013
  - Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Lapangan Kantor Gubernur
  - Kegiatan : Penganjangan Pekan Keselamatan, Gerak jalan, Fun Ride, Marching band, Sosialisasi
  - Peserta : 1500 Orang (Instansi Pemerintah, Club Motor, SMU dan Masyarakat Umum)
- 4) Provinsi Bali (Denpasar)
  - Tanggal Pelaksanaan : 24 - 26 Agustus 2013
  - Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Halaman Kantor Gubernur
  - Kegiatan : Penganjangan Pekan Keselamatan, Gerak Jalan, Marching Band, Flyering, Hiburan (doorprize)
  - Peserta : 700 Orang (Balai LLAJSDP Denpasar, Dishub Prop. Bali, Pemda Provinsi, SMU se-Kota Denpasar, Taruna Perhubungan dan Masyarakat Umum)
- 5) Provinsi Nusa Tenggara Barat
  - Tanggal Pelaksanaan : 7 - 9 September 2013

- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Kantor Gubernur dan Jalan Protokol
  - Kegiatan : Penganjangan Pekan Keselamatan, Senam, Sepeda Santai dan Safety Riding
  - Peserta : 5000 Orang (Instansi Pemerintah, Club Motor dan Masyarakat Umum)
- 6) Provinsi Sulawesi Tengah (Palu)
- Tanggal Pelaksanaan : 10 - 15 September 2013
  - Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Palu
  - Kegiatan : Penganjangan Pekan Keselamatan, Marching Band, Outbound, Lomba Paduan Suara "lagu keselamatan"
  - Peserta : 700 Orang (Instansi Pemerintah, Club Motor dan Masyarakat Umum)
- 7) Pekan Provinsi Gorontalo
- Tanggal Pelaksanaan : 12 - 13 September 2013
  - Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Lapangan Talimuta, Kabupaten Boalemo
  - Kegiatan : Deklarasi, Jambore Keselamatan Jalan, Marching Band dan Donor Darah
  - Peserta : 400 Orang (Gubernur, Balai LLAJSDP Palu, Bupati Goalemo, SD, SMU, dan Masyarakat Umum)
- 8) Pekan Provinsi Sumatera Barat (Padang)
- Tanggal Pelaksanaan : 14 - 15 September 2013
  - Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Kantor Gubernur
  - Kegiatan : Sepeda Santai, Senam Massal dan Sosialisasi Ke Sekolah
  - Peserta : 2700 Orang (MUSPIDA, Balai LLAJSDP Jambi, SLTP, SMU, Organda, Jasa Raharja dan Masyarakat Umum)
- 9) Pekan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Jogja)
- Tanggal Pelaksanaan : 31 Agustus - 2 Sept 2013
  - Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Kepatihan dan JEC (Jogja Expo Centre)
  - Kegiatan : Penganjangan oleh Wakil Gubernur dan Fun Ride (sepeda motor dan mobil)
  - Peserta : 1200 Orang (MUSPIDA, Wamenhub dan Wamen Diknas, Club Motor dan Club Mobil dan Masyarakat Umum)
- 10) Pekan Provinsi Maluku Utara (Sofifi)
- Tanggal Pelaksanaan : 14 dan 17 Sept 2013
  - Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Halaman Kantor Gubernur Maluku Utara

- Kegiatan : Penganjangan Pekan Keselamatan, Upacara,
- Peserta : 1000 Orang (MUSPIDA, TNI, POLRI, SMU, Dishub dan Masyarakat Umum)

**f. Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan**

1) Provinsi Sumatera Utara (Medan)

- Tanggal Pelaksanaan : 10 – 12 April 2013
- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Hotel Garuda Plaza, Medan, Sumatera Utara
- Kegiatan : Hari I Pembukaan, H II Paparan dari pengajar, praktek, H III Evaluasi dan Penutupan
- Peserta : Jumlah 27 peserta (19 Kabupaten dan 8 dari dishub kota)

2) Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar)

- Tanggal Pelaksanaan : 17 – 19 April 2013
- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Hotel Grand Celino, Makassar Sulawesi Selatan
- Kegiatan : Hari I Pembukaan, H II Paparan dari pengajar, praktek, H III Evaluasi dan Penutupan
- Peserta : 42 peserta (36 dari Dishub Kabupaten dan 6 dari Dishub kota)

3) Provinsi Maluku ( Ambon )

- Tanggal Pelaksanaan : 23 – 25 April 2013
- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Hotel Swiss Bell, Ambon, Maluku
- Kegiatan : Hari I Pembukaan, H II Paparan dari pengajar, praktek, H III Evaluasi dan Penutupan
- Peserta : 25 Peserta (9 dari Dishub Provinsi, 12 dari Dishub Kabupaten, 4 dari Dishub Kota)

**g. Workshop Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)**

1) Provinsi D.I Yogyakarta ( Yogyakarta )

- Tanggal Pelaksanaan : 18 – 19 Juni 2013
- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Hotel Jambuluwuk
- Kegiatan : H I : Pembukaan, H II Pembentukan dan proses belajar langsung praktek
- H III Paparan dari peserta dan evaluasi
- Peserta : 25 peserta

2) Provinsi Bali ( Denpasar )

- Tanggal Pelaksanaan : 28 – 29 Agustus 2013

- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : 100 Sunset @ Hotel
- Kegiatan : H I : Pembukaan, H II Pembentukan dan proses belajar langsung praktek
- H III Paparan dari peserta dan evaluasi
- Peserta : 25 peserta

#### **h. Workshop Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)**

##### **1) Provinsi Jawa Barat ( Kota Bandung )**

- Tanggal Pelaksanaan : 16-18 Oktober 2013
- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Hotel Fave Hotel
- Kegiatan : H I : persiapan pelaksanaan sosialisasi, H II : pelaksanaan sosialisasi (dilakukan oleh KMSK yang sudah terbentuk ke anak SD, H III : evaluasi
- Peserta : Untuk 2 KMSK 200 peserta (@100 tiap SD)

##### **2) Provinsi Jawa Tengah ( Kota Surakarta )**

- Tanggal Pelaksanaan : 30 Oktober - 1 November 2013
- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Hotel Agas International
- Kegiatan : H I : persiapan pelaksanaan sosialisasi, H II : pelaksanaan sosialisasi (dilakukan oleh KMSK yang sudah terbentuk, KMSK Solo : Sosialisasi ke Masyarakat dengan cara dipadukan dengan Pengajian Akbar , KMSK Sragen (Madu Lantas) Sosialisasi ke anak TK dan SD dengan cara melukis dan mewarnai, H III : evaluasi
- Peserta : Untuk 2 KMSK 800 peserta (@400 tiap SD)

#### **i. Sosialisasi Secara Langsung**

##### **1) Kabupaten Sigi**

- Tanggal Pelaksanaan : 11-13 Oktober 2013
- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Aula Kantor Bupati Sigi
- Kegiatan : penyuluhan tentang materi "Keselamatan" kepada para guru-guru SD, SMP, dan SMA Bekerjasama dengan Dishub Kab. Sigi
- Peserta : 100 Orang

##### **2) Jakarta Pusat**

- Tanggal Pelaksanaan : 7 November 2013
- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Ruang Mataram Kemenhub
- Acara : Bekerjasama dengan Global Road Safety Partnership (GRSPI) Menteri Perhubungan melaksanakan Sosialisasi keselamatan kepada anak-anak SD Bakti

Mulya 400, dan tanya jawab, memberikan nasihat-nasihat agak para siswa berperilaku selamat di jalan

- Jumlah peserta : 90 anak, 20 orang tua pendamping dan 10 guru.

3) Kabupaten Kapuas

- Tanggal Pelaksanaan : 20 – 24 Mei 2013
- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Ruang Rapat Dishub Kab. Kapuas
- Acara : Bekerjasama dengan Dishub Prov. Kalimantan Tengah melakukan Pembentukan 2 (dua) Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)
- Peserta : 100 orang (masyarakat, guru, Polri, dll)

4) Kota Denpasar

Bekerjasama dengan Dishub Prov. Bali + Balai LLAJSDP + T3M melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat

5) Provinsi Jawa Tengah

- Tanggal Pelaksanaan : 9-11 Juni 2013
- Tempat Pelaksanaan Kegiatan : Aula Kantor Bupati Semarang
- Kegiatan : Bekerjasama dengan Dishub Kab. Semarang melakukan Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)
- Peserta : 100 Orang (Masyarakat, Guru, Polri, dll)

**j. Pelaksanaan Kampanye Keselamatan**

- 1) Melakukan sosialisasi keselamatan melalui media cetak, televisi dan radio.
- 2) Pembuatan Reality Show Keselamatan  
Membuat reality show tentang korban-korban kecelakaan sebanyak 26 episode yang ditayangkan di TV swasta.
- 3) Pembuatan Film Kartun Keselamatan  
Membuat film kartun “Zeta” untuk sosialisasi keselamatan transportasi darat.
- 4) Pembuatan dan Penayangan Sosialisasi Keselamatan  
Membuat dan menayangkan iklan layanan masyarakat untuk media radio dan televisi.
- 5) Membuat dan mendistribusikan peralatan sosialisasi keselamatan kepada Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota berupa booklet, stiker, leaflet, gantungan kunci, pin keselamatan, miniatur Zeta, kostum boneka Zeta, maket miniatur kota, jaket, baliho.
- 6) Pembagian helm SNI untuk anak dan dewasa ke seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2013 tercatat 25 ribu lebih, sebagai contoh bagi orang tua dan anak agar mereka

selalu menggunakan helm SNI dengan baik dan benar pada saat berkendara dengan sepeda motor.

**k. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental Dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum AKAP**

Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi AKAP merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pengemudi angkutan AKAP dan pelaksanaan PILAR IV RUNK dalam mewujudkan Perilaku Pengguna Jalan yang berkeselamatan. Maksud dari pelaksanaan program aksi peningkatan kualitas mental dan disiplin pengemudi AKAP adalah memberikan penyegaran kepada para pengemudi taksi dalam aspek teknis, hukum, perilaku dan pengetahuan lain guna memberikan tambahan wawasan dan peningkatan disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat berperan aktif dalam upaya menekan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyegaran kepada para pengemudi adalah :

1. Meningkatkan kesadaran pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi resiko akibat kesalahan manusia (pengemudi) serta teknis/kendaraan dengan cara meningkatkan sikap prilakunya (attitude) dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi teknis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.
  2. Menumbuhkan kesadaran bahwa profesi pengemudi angkutan umum merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan barang ke berbagai tempat melalui jasa angkutan AKAP dengan aman, selamat, nyaman, cepat dan tertib.
  3. Menyiapkan pengemudi AKAP yang handal sehingga bermanfaat bagi Pengusaha Perusahaan dan meningkatkan citra pelayanan jasa transportasi jalan yang lebih baik.
- Dasar Hukum kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi B3 yaitu Undang – Undang No. 22 tahun 2009, pasal 254, ayat (1), yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi.

Kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi AKAP pada tahun 2013 sudah mencapai 28 angkatan dengan jumlah pengemudi yang mengikuti sebanyak 1120 orang.

### **I. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental Dan Disiplin Pengemudi Taksi**

Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Taksi merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pengemudi taksi dan pelaksanaan PILAR IV RUNK dalam mewujudkan Perilaku Pengguna Jalan yang berkeselamatan. Maksud dari pelaksanaan program aksi peningkatan kualitas mental dan disiplin pengemudi taksi adalah memberikan penyegaran kepada para pengemudi taksi dalam aspek teknis, hukum, perilaku dan pengetahuan lain guna memberikan tambahan wawasan dan peningkatan disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat berperan aktif dalam upaya menekan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyegaran kepada para pengemudi adalah :

1. Meningkatkan kesadaran pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi resiko akibat kesalahan manusia (pengemudi) serta teknis/kendaraan dengan cara meningkatkan sikap prilakunya (attitude) dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi teknis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.
2. Menumbuhkan kesadaran bahwa profesi pengemudi angkutan umum merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan barang ke berbagai tempat melalui jasa angkutan taksi dengan aman, selamat, nyaman, cepat dan tertib.
3. Menyiapkan pengemudi taksi yang handal sehingga bermanfaat bagi Pengusaha Perusahaan dan meningkatkan citra pelayanan jasa transportasi jalan yang lebih baik.
4. Dasar Hukum kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Taksi yaitu Undang – Undang No. 22 tahun 2009, pasal 254, ayat (1), yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi.

Kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Taksi pada tahun 2013 sudah mencapai 8 angkatan dengan jumlah pengemudi yang mengikuti sebanyak 320 orang.

### **m. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental Dan Disiplin Pengemudi Angkutan Bahan Berbahaya Dan Beracun**

Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pengemudi angkutan B3 dan pelaksanaan PILAR IV RUNK

dalam mewujudkan Perilaku Pengguna Jalan yang berkeselamatan. Maksud dari pelaksanaan program aksi peningkatan kualitas mental dan disiplin pengemudi B3 adalah memberikan penyegaran kepada para pengemudi taksi dalam aspek teknis, hukum, perilaku dan pengetahuan lain guna memberikan tambahan wawasan dan peningkatan disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat berperan aktif dalam upaya menekan kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyegaran kepada para pengemudi adalah :

1. Meningkatkan kesadaran pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, mengurangi resiko akibat kesalahan manusia (pengemudi) serta teknis/kendaraan dengan cara meningkatkan sikap prilakunya (attitude) dan pemahaman terhadap fungsi-fungsi teknis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.
2. Menumbuhkan kesadaran bahwa profesi pengemudi angkutan umum merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan barang ke berbagai tempat melalui jasa angkutan B3 dengan aman, selamat, nyaman, cepat dan tertib.
3. Menyiapkan pengemudi B3 yang handal sehingga bermanfaat bagi Pengusaha Perusahaan dan meningkatkan citra pelayanan jasa transportasi jalan yang lebih baik.
4. Dasar Hukum kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi B3 yaitu Undang – Undang No. 22 tahun 2009, pasal 254, ayat (1), yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi.

Kegiatan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi B3 pada tahun 2013 sudah mencapai 8 angkatan dengan jumlah pengemudi yang mengikuti sebanyak 320 orang.

#### **n. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional**

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan tingkat Nasional merupakan kegiatan dalam rangka pengembangan keselamatan bagi awak kendaraan angkutan umum. Pemilihan AKUT ini sejalan dengan Dekade Aksi Keselamatan Jalan dan pelaksanaan PILAR IV RUNK dalam mewujudkan Perilaku Pengguna Jalan yang berkeselamatan.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pemilihan AKUT Tingkat Nasional Tahun 2011 ini yaitu Undang – Undang No.22 Tahun 2009, pasal 208, ayat 2 huruf c, yang berbunyi “*upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan*

*angkutan jalan dilakukan melalui pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan*'.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendudukkan awak kendaraan umum sejajar dengan insan pembangunan lainnya dengan cara memberikan motivasi serta penghargaan terhadap profesinya. Kegiatan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dimulai dari daerah Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia kemudian dilanjutkan ke Tingkat Propinsi dan seterusnya diadakan pemilihan secara nasional bertepatan dengan perayaan Hari Perhubungan Nasional Republik Indonesia.

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan bertujuan untuk mendudukkan insan Awak Kendaraan umum sejajar dengan insan pembangunan lainnya dengan cara memberikan motivasi serta penghargaan terhadap profesinya. Pemilihan AKUT Tingkat Nasional juga dimaksudkan sebagai sosialisasi peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Jalan yang berskala nasional melalui pembinaan kepada para pengemudi angkutan umum AKAP, AKDP, Taksi/Sewa, Perkotaan, dan Pariwisata.

Kegiatan AKUT diperuntukkan bagi seluruh provinsi di Indonesia, keikutsertaan propinsi dalam kegiatan AKUT selama 9 (sembilan) tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel IV.36. Keikutsertaan Provinsi Dalam Kegiatan AKUT Selama 9 Tahun Terakhir  
Tahun 2005 - Tahun 2013**

NO	PROVINSI	KEIKUTSERTAAN								
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Sumatera Utara	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Sumatera Barat	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Sumatera Selatan	-	V	V	V	V	V	V	V	V
5	Bangka Belitung	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6	Riau	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7	Kepulauan Riau	-	V	V	V	V	V	V	V	V
8	Jambi	V	V	V	V	V	V	V	V	V
9	Bengkulu	-	V	V	V	V	V	V	-	-
10	Lampung	V	V	V	V	V	V	V	V	V
11	Banten	-	-	V	V	V	V	V	V	V
12	DKI Jakarta	V	V	V	V	V	V	V	V	V
13	Jawa Barat	V	V		V	V	V	V	V	V
14	Jawa Tengah	V	V	V	V	V	V	V	V	V
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	V	V	V	-	V	V
16	Jawa Timur	V	V	V	V	V	V	V	V	V
17	Bali	V	V	V	V	V	V	V	V	V

NO	PROVINSI	KEIKUTSERTAAN								
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
18	Kalimantan Selatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
19	Kalimantan Barat	V	V	V	V	V	V	V	V	V
20	Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	V	V	V	V
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	V	V	V	V	V
22	Sulawesi Utara	V	V	V	V	V	V	V	V	V
23	Sulawesi Selatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
24	Sulawesi Tengah	-	-	-	V	V	V	V	V	-
25	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Barat	-	V	-	V	V	V	V	V	V
27	Maluku	V	V	V	V	V	V	V	V	V
28	Maluku Utara	V	V	-	-	-	-	V	V	V
29	Gorontalo	V	V	V	V	V	V	V	V	V
30	Nusa Tenggara Barat	V	V	V	V	V	V	V	V	V
31	Nusa Tenggara Timur	-	-	V	V	V	V	V	V	V
32	Papua	-	V	-	-	-	-	-	-	V
33	Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Propinsi</b>		<b>20</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Jumlah Peserta</b>		<b>47</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>58</b>

#### o. Sistem Manajemen Keselamatan pada Perusahaan Angkutan Umum

Sistem Manajemen Keselamatan bagi perusahaan angkutan umum sebagaimana diamanahkan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu hal yang baru dalam pengaturan Sistem Manajemen Keselamatan bagi perusahaan angkutan umum baik penumpang maupun barang. Dasar penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan yaitu Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab XI, pasal 204 yang mengatur tentang Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

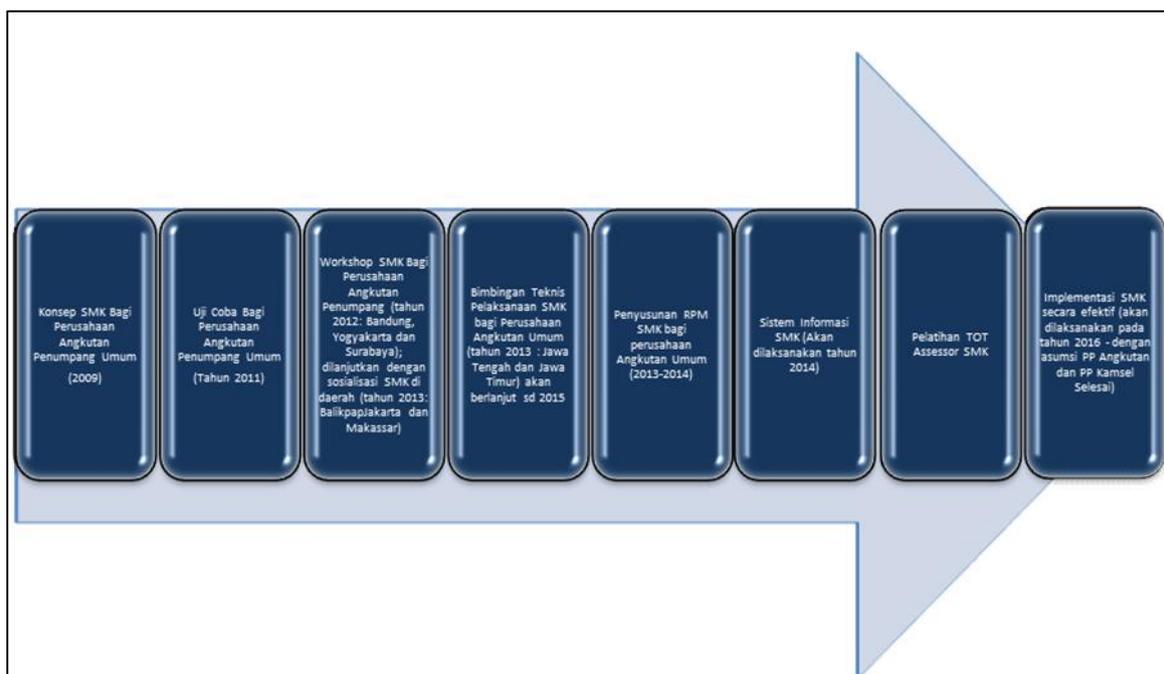
Pada saat ini Sistem Manajemen Keselamatan telah mempunyai konsep yang dapat diimplementasikan serta sudah dilaksanakan uji coba kepada perusahaan angkutan umum. Untuk mendapat masukan dari berbagai pihak telah dilakukan workshop yang menghadirkan pihak terkait Sistem Manajemen Keselamatan tersebut dan Bimbingan teknis yang dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengetahui kondisi perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan serta untuk mendapat masukan bagi pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan.

Bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan bagi perusahaan angkutan umum ini juga dapat dijadikan instrumen bagi pemerintah di dalam melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap jaminan keselamatan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum. Disamping itu melalui bimbingan teknis ini dapat memberikan dorongan kepada perusahaan angkutan umum untuk memiliki daya saing dalam penyelenggaraan angkutan umum bagi masyarakat.

Maksud diadakannya kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum adalah untuk mengawasi, mengevaluasi, mensosialisasikan, menilai serta meningkatkan kemampuan perusahaan terhadap hal-hal yang terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana diamanahkan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah :

1. Melakukan pengkajian sejauh mana Sistem Manajemen Keselamatan dapat diimplementasikan pada perusahaan angkutan umum
2. Mengetahui kelemahan serta kekurangan perusahaan angkutan umum dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan
3. Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada perusahaan angkutan umum
4. Meningkatkan daya saing perusahaan angkutan umum dalam pelayanan kepada pengguna jasa angkutan umum terutama di bidang keselamatan.



**Gambar IV.4. Tahapan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan**

**p. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan**

Metode pelaksanaan yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan melakukan perbaikan daerah potensi kecelakaan lalu lintas pada ruas terpilih sebagai tindak lanjut dalam studi SID DED Daerah Rawan Kecelakaan yang dimaksud pada tahun sebelumnya.

Lingkup pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan perbaikan daerah potensi kecelakaan lalu lintas pada ruas terpilih sesuai dengan peringkat prioritas dari hasil kajian teknis yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

**Tabel IV.37. Lokasi Pelaksanaan Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan**

No	Tahun	Provinsi	Jumlah Perbaikan	Keterangan
1	2010	Bali	1	- Kubutambahan (Singaraja – Kubutambahan KM. 12)
2	2010	NTB	1	- Jembatan Meninting (Mataram – Senggijih KM. 9)
3	2011	Kalimantan Selatan	1	- Alur Pelayaran Sungai Barito (+/- 30 Km) dari Jembatan Barito menuju hulu
4	2011	Jawa Tengah	1	- Perempatan Paldaplan, Jl. Sragen – Ngawi Km 5, Sragen
5	2012	- Jawa Tengah - Jawa Timur	2	- Sragen : Jl. Ringroad Utara (Pertigaan Ngeblak, Tikungan SMP 6, Simpang SMP 6 - Tulungagung : Jl. Sukarno Hatta – Jl. Kapt. Pattimura
6	2013	- Jawa Tengah  - Bali		- Temanggung : Jl. Raya Ambarawa – Magelang Km. 13, Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah - Bali : • Jl. Meliling – Tabanan KM. 0,24 • Ruas jalan Singaraja Denpasar, KM. 17, 36 • Jl. Raya Padangbai, KM. 3,1

**q. Bimbingan Teknis Di Bidang Audit Keselamatan Jalan**

Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas petugas dalam rangka peningkatan keselamatan jalan dan pelaksanaan audit keselamatan jalan dengan memberikan bimbingan teknis yang berkoordinasi dengan instansi yang aware terhadap peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang memiliki pengenalan terhadap prinsip dasar dan kaidah akademik tentang audit keselamatan jalan.

Ruang lingkup materi Bimbingan Teknis Audit Keselamatan Jalan antara lain meliputi :

1. Pengenalan ruang lingkup audit keselamatan jalan;
2. Penggunaan teori-teori yang relevan dalam pelaksanaan audit keselamatan jalan;
3. Melakukan simulasi kegiatan audit keselamatan jalan;
4. Analisis data yang diperoleh dari hasil audit keselamatan jalan;
5. Memberikan usulan perbaikan;
6. Memberikan pemahaman tata cara dan teknis pelaksanaan audit keselamatan jalan.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam pertemuan di dalam kelas adalah sebagai berikut Perundang-undangan LLAJ, Geometri Jalan, Perilaku Penggunaan Jalan, Pengantar Form Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan, Audit Keselamatan Jalan, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Roas Safety Harzardous, Studi Kasus/ Simulasi Audit Keselamatan Jalan, Penanganan dan Rekomendasi.

Pengajar/narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Audit Keselamatan Jalan adalah dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Dit. KTD), Direktorat LLAJ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dari akademisi (UGM dan Badan Litbang Perhubungan Darat)

**Tabel IV.38. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Di Bidang Audit Keselamatan Jalan**

No	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi	Keterangan
1	2007	150	5	Provinsi NAD, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Selatan
2	2008	90	3	Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara
3	2009	150	5	Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali dan Nusa Tenggara Barat
4	2010	120	4	Provinsi DIY, Kendari, Bengkulu dan Bangka Belitung
5	2011	60	2	Provinsi Maluku dan Sumatera Barat
6	2012	-	-	-
7	2013	60	2	Provinsi Ternate dan Lampung

**r. Bimbingan Teknis Di Bidang Penelitian Dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas petugas dalam melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan

lalu lintas jalan dengan memberikan bimbingan teknis yang berkoordinasi dengan instansi yang aware terhadap peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang memiliki pengenalan terhadap prinsip dasar dan kaidah akademik serta kemampuan untuk dapat melaksanakan tentang penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan

Ruang lingkup materi Bimbingan Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan antara lain meliputi :

1. Pengenalan ruang lingkup metode metode keselamatan jalan seperti audit dan inspeksi keselamatan jalan;
2. Penggunaan teori-teori yang relevan dalam pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan;
3. Melakukan simulasi kegiatan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan
4. Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kecelakaan lalu lintas jalan;
5. Memberikan usulan rekomendasi perbaikan;
6. Memberikan pemahaman tata cara dan teknis pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam pertemuan di dalam kelas adalah sebagai berikut Perundang-undangan LLAJ, Geometri Jalan, Perilaku Penggunaan Jalan, Pengantar Tata Cara Pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan, Audit dan inspeksi Keselamatan Jalan, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Roas Safety Harzardous, Studi Kasus/ Simulasi penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan, Penanganan Dan Rekomendasi

Pengajar/nara sumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan adalah dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Dit. KTD), Direktorat LLAJ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dari akademisi (UGM dan Badan Litbang Perhubungan Darat)

**Tabel IV.39. Jumlah Peserta Pelatihan Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

No	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi	Keterangan
1	2007	150	5	Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Banten dan Jawa Tengah
2	2008	90	3	Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan
3	2009	150	5	Provinsi DIY, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Jawa Barat

#### s. Bimbingan Teknis Di Bidang Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan

Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas petugas dalam rangka peningkatan keselamatan jalan dan pelaksanaan identifikasi DRK dengan memberikan bimbingan teknis yang berkoordinasi dengan instansi yang aware terhadap peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang memiliki pengenalan terhadap prinsip dasar dan kaidah akademik tentang identifikasi DRK.

Ruang lingkup materi Bimbingan Teknis di bidang Identifikasi DRK antara lain meliputi Pengenalan ruang lingkup identifikasi DRK, Penggunaan teori-teori yang relevan dalam pelaksanaan identifikasi DRK, Melakukan simulasi kegiatan identifikasi DRK Analisis data yang diperoleh dari hasil identifikasi DRK Memberikan usulan perbaikan, Memberikan pemahaman tata cara dan teknis pelaksanaan identifikasi DRK.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam pertemuan di dalam kelas adalah Perundang-undangan LLAJ, Geometri Jalan, Perilaku Penggunaan Jalan, Pengantar Form Dan Tata Cara Pelaksanaan Identifikasi DRK, Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Roas Safety Harzardous, Studi Kasus/ Simulasi identifikasi DRK, Penanganan Dan Rekomendasi.

**Tabel IV.40. Data Jumlah Peserta Pelatihan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan**

No	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi	Keterangan
1	2013	30	1	Provinsi DIY

#### t. Bimbingan Teknis Di Bidang Inspeksi Keselamatan Jalan

Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas petugas dalam rangka peningkatan keselamatan jalan dan pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan dengan memberikan bimbingan teknis yang berkoordinasi dengan instansi yang aware terhadap peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang memiliki pengenalan terhadap prinsip dasar dan kaidah akademik tentang inspeksi keselamatan jalan.

Ruang lingkup materi Bimbingan Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan antara lain meliputi pengenalan ruang lingkup inspeksi keselamatan jalan, penggunaan teori-teori yang relevan dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan, melakukan simulasi kegiatan

inspeksi keselamatan jalan, analisis data yang diperoleh dari hasil inspeksi keselamatan jalan, memberikan usulan perbaikan, memberikan pemahaman tata cara dan teknis pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam pertemuan di dalam kelas adalah Perundang-undangan LLAJ, Geometri Jalan, Perilaku Penggunaan Jalan, Pengantar Form Dan Tata Cara Pelaksanaan inspeksi Keselamatan Jalan, inspeksi Keselamatan Jalan, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Road Safety Harzardous, Studi Kasus/ Simulasi Audit Keselamatan Jalan, Penanganan Dan Rekomendasi.

Pengajar/narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan adalah dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Dit. KTD), Direktorat LLAJ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dari akademisi (UGM dan Badan Litbang Perhubungan Darat)

**Tabel IV.41. Jumlah Peserta Pelatihan Inspeksi Keselamatan Jalan**

No	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi	Keterangan
1	2011	180	6	Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Bali
2	2012	60	2	Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau
3	2013	60	2	Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa Barat

**u. Bimbingan Teknis Investigasi Kecelakaan Asdp, Audit Dan Inspeksi Keselamatan Alur Pelayaran Sungai**

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pengenalan tentang ruang lingkup Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP, tata cara pelaksanaan serta teori pendukung yang relevan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyegaran Pelatihan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP adalah :

1. Memberikan pemahaman dan pelatihan pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP sehingga peserta diharapkan memiliki kompetensi yang memadai untuk diarahkan sebagai investigator perairan daratan.
2. Mendorong petugas investigator perairan daratan dapat melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan serupa dikemudian hari.
3. Meminimalkan dan melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas ASDP.
4. Sebagai salah satu usaha dalam mendukung program keselamatan lalu lintas ASDP

Ruang lingkup materi Pelatihan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP antara lain meliputi:

1. Penggunaan teori-teori yang relevan dalam pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP,
2. Melakukan kegiatan simulasi Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP,
3. Analisis data yang diperoleh dari hasil simulasi serta tata cara hasil laporan penelitian Kecelakaan Lalu Lintas ASDP di lapangan,
4. Memberikan usulan perbaikan,
5. Pemahaman tentang tata cara dan teknis pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas ASDP.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam pertemuan di dalam kelas adalah Perundangan Pelayaran ASDP, Alur Perairan Daratan, Tata Cara Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Kapal Perairan Daratan, Sarana ASDP, Kelaiklautan Kapal, Faktor-faktor Manusia, Kecelakaan Pelayaran Perairan Daratan, Pengenalan formulir dan Contoh Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Perairan Daratan, Latihan Studi Kasus Penelitian Kecelakaan Kapal, Presentasi / ANEV.

Pengajar/narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan adalah dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Dit. KTD), Direktorat ASDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) serta dosen BP2TD Palembang.

**Tabel IV.42. Jumlah Peserta Pelatihan Investigasi Kecelakaan ASDP, Audit Dan Inspeksi Keselamatan Alur Pelayaran Sungai Tahun 2007 – 2013**

No	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi	Keterangan
1	2009	150	5	- Pelatihan Investigasi Kecelakaan ASDP di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat
2	2010	60	3	- Pelatihan Audit Keselamatan Alur Pelayaran Sungai ASDP di Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat - Pelatihan Investigasi Kecelakaan ASDP di Provinsi Jambi
3	2011	150	5	- Pelatihan Audit Keselamatan ASDP di Provinsi Maluku dan Sumatera Barat - Pelatihan Investigasi Kecelakaan ASDP di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah
4	2012	-	-	-

No	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi	Keterangan
5	2013	50	2	Pelatihan Audit dan Inspeksi Keselamatan ASDP di Provinsi Kalimantan Barat dan Jambi

#### v. Pemberdayaan Audit Dan Inspeksi Keselamatan Jalan Dan ASDP

Maksud dari kegiatan Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan dan ASDP ini adalah melakukan penilaian terhadap hasil paparan survey audit keselamatan jalan dan alur pelayaran perairan daratan yang dilakukan oleh aparaturnya daerah untuk menentukan predikat peserta/tim terbaik.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja para personil di tingkat Provinsi yang telah mengikuti bimbingan teknis audit dan inspeksi keselamatan jalan dan ASDP, maka perlu dilakukan langkah-langkah pemberdayaan di bidang audit dan inspeksi keselamatan jalan dan asdp di tingkat provinsi dengan cara memotivasi provinsi-provinsi untuk melaksanakan kegiatan audit dan inspeksi keselamatan jalan dan asdp di wilayahnya

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah untuk memberi motivasi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan jalan dan ASDP.

Batasan kegiatan ini adalah :

1. Penyiapan persyaratan pemberdayaan
2. Koordinasi dan sosialisasi pemberdayaan audit dan inspeksi keselamatan jalan dan asdp dengan Pemerintah Provinsi
3. Pelaksanaan survey terhadap ruas alur pelayaran perairan daratan terpilih oleh aparaturnya daerah.
4. Evaluasi dan penentuan provinsi penerima bantuan pemberdayaan
5. Pemberian bantuan pemberdayaan dan asistensi
6. Pemaparan laporan dan hasil pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan jalan dan ASDP
7. Evaluasi program pemberdayaan.

Pengajar/narasumber pada kegiatan pemberdayaan audit dan inspeksi keselamatan jalan dan asdp adalah dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Dit. KTD), Direktorat LLAJ, Direktorat BSTP, Direktorat ASDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dari akademisi (UGM, Badan Litbang Perhubungan Darat, dan BP2TD Palembang)

**Tabel IV.43. Jumlah Peserta Pemberdayaan Audit Dan Inspeksi Keselamatan Jalan Dan ASDP**

No	Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Provinsi	Keterangan
1	2009	50	5	Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan di Provinsi NAD, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Selatan
2	2010	50	5	- Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali dan Nusa Tenggara Barat
		30	3	- Pemberdayaan Audit Keselamatan ASDP di Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jambi
3	2011	50	5	- Pemberdayaan Audit Keselamatan Jalan di Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung
		18	3	- Pemberdayaan Audit Keselamatan ASDP di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah

#### 4. Permasalahan Yang Dihadapi

- a) Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia. Dari data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2011-2012 menunjukkan bahwa jumlah meninggal akibat kecelakaan pada tahun 2011 sebanyak 31.185 orang dan pada tahun 2012 mencapai 25.131 orang.
- b) Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan.
- c) Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan.
- d) Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program – program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

#### 5. Upaya Pemecahan

Upaya yang telah dilakukan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat antara lain sebagai berikut :

- a) Program-program revitalisasi batas kecepatan (speed limits) berikut pemantauan dan penindakan pelanggarannya, upaya penjinakan arus lalu lintas (traffic calming), penggunaan helm pengaman dan sabuk keselamatan, alat-alat penegas keberadaan

sepeda motor dan pengendaranya (*conspicuity*), serta pembuatan/penempatan lajur-lajur khusus sepeda motor disarankan untuk diimplementasikan secara lebih intensif dalam 5 tahun ke depan.

- b) Telah ditetapkan Rencana Umum Keselamatan Nasional Keselamatan Angkutan Jalan.
- c) Direktorat KTD melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian, Kem. Pekerjaan Umum, Kem. Kesehatan, Kem. Pendidikan Nasional).

## BAB V

## KINERJA BALAI, K-OPP DAN UPT PENYEBERANGAN

### A. BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKB) BEKASI

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan uji prestasi, bagian kendaraan bermotor, peralatan keselamatan, dan uji lapangan serta pemeriksaan konstruksi;
2. Penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang akan diuji;
4. Pelaksanaan pemeliharaan, pengadaan dan penilaian kinerja fasilitas dan peralatan pengujian serta sarana penunjang teknis lainnya;
5. Pengembangan teknologi pengujian tipe kendaraan bermotor dan penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor;
6. Pelaksanaan administrasi dan kerumah tanggaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

#### 1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor berdasarkan KM No.59 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Gambar V.1. Struktur Organisasi Balai Bekasi



## 2. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) adalah sebanyak 54 Orang dengan kualifikasi dan komposisi sebagai berikut :

a. Menurut pangkat / golongan :

Tabel.V.1. Komposisi Pegawai Balai Bekasi menurut Pangkat / Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	IV/b	-
2	IV/a	2
3	III/d	5
4	III/c	8
5	III/b	7
6	III/a	16
7	II/d	-
8	II/c	10
9	II/b	6
10	II/a	-
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>

## 3. Asset

Total Asset Balai Pengujian Laik Jalan Dan Kendaraan Bermotor sampai dengan tahun 2013 berjumlah Rp. 443.719.506.836,- ( Empat Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah )

yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Asset tetap serta Aset Tak Berwujud lainnya.

Sedangkan pada tahun 2013 Balai PLJSKB pengadaan barang modal berupa Peralatan Mesin berjumlah Rp. 41.926.470.045,- ( Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribuan Empat Puluh Lima Rupiah ) serta Asset tetap lainnya dengan jumlah Rp. 36.560.000,- ( Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribuan Rupiah ) dan Asset tak berwujud lainnya dengan jumlah Rp. 1.755.665.000,- ( Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribuan Rupiah ).

#### 4. Urusan Keuangan

##### 1) PNB

Realisasi PNB pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.759.776.000,- ( Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribuan Rupiah ) atau turun sebesar 29.01 % dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 6.065.115.514,- ( Enam Milyar Enam Puluh Lima Juta Seratus Lima Belas Ribuan Lima Ratus Empat Belas Rupiah ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel.V.2. Realisasi PNPB Tahun 2012 - 2013**

Tahun Anggaran	Target PNB	Realisasi	%	Keterangan
2012	Rp 4.500.000.000,-	Rp 6.065.115.514,-	134,78	Target Tercapai Realisasi Melebihi Target
2013	Rp 4.500.000.000,-	Rp 4.759.776.000,-	105,77	Target Tercapai Realisasi Melebihi Target

##### 2) ANGGARAN RUTIN

Jumlah anggaran pada Balai PLJSKB pada tahun 2013 adalah Rp. 21.136.447.000,- ( Dua Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribuan Rupiah ). Sedangkan realisasi anggaran yang terserap adalah 78.88 % atau Rp. 16.672.626.105,- ( Enam Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribuan Seratus Lima Rupiah ).

#### 5. Data Hasil Uji

Rekapitulasi jumlah resume pengujian kendaraan bermotor tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel V.3. Rekapitulasi Resume Pengujian Kendaraan Tahun 2013

Jenis Kend.	BULAN												Jumlah	Uji Ulang
	Jan	Peb	Mar	Ap	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok	Nop	Des		
1. Sepeda motor (SM)	12	33	8	30	31	26	27	10	10	11	15	18	231	24
2. Mobil Penumpang (MP)	31	24	20	43	32	43	36	16	41	23	38	25	372	3
3. Bus	1	0	1	0	2	2	2	0	1	0	3	2	14	0
4. Mobil Barang (MB)	8	7	10	19	11	7	10	1	10	8	9	8	108	6
5. Kendaraan khusus	1	2	3	0	1	0	1	0	3	0	0	0	11	0
6. Traktor head (TH)	0	1	1	2	5	1	2	2	1	1	2	1	19	2
7. Landasan (LDS)	9	5	8	2	5	5	3	6	4	6	5	4	62	8
8. Roda tiga (R3)	1	4	2	2	2	3	1	0	3	1	0	0	19	8
<b>Jumlah Total (Unit)</b>	<b>63</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>98</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>35</b>	<b>73</b>	<b>51</b>	<b>72</b>	<b>58</b>	<b>836</b>	<b>51</b>

Tabel V.4. Rekapitulasi Resume Pengujian Kendaraan Berdasarkan Tipe Kendaraan Tahun 2013

No.	Bulan	Jumlah Uji Tipe	Jumlah Uji Ulang	Jumlah Kendaraan Uji							Total
				Mobil Pnp	Mobil Barang	Bus	Mobil Landasan	Mobil Khusus	Kend. Roda - 3	Sepeda Motor	
1	Januari	64	2	34	9	1	10	1	1	10	66
2	Pebruari	77	1	25	7	0	7	2	7	30	78
3	Maret	52	4	26	12	0	10	3	2	3	56
4	April	98	1	41	21	1	3	1	2	30	99
5	Mei	91	1	32	18	2	5	2	4	29	92
6	Juni	87	1	41	7	4	6	1	4	25	88
7	Juli	82	0	36	12	2	4	0	1	27	82
8	Agustus	35	0	16	2	0	7	0	0	10	35
9	September	75	2	40	13	1	5	5	3	10	77
10	Oktober	49	2	23	10	0	6	0	1	11	51
11	November	72	3	38	12	3	7	0	0	15	75
12	Desember	59	4	25	10	2	7	0	1	18	63
	<b>Total</b>	<b>841</b>	<b>21</b>	<b>377</b>	<b>133</b>	<b>16</b>	<b>77</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>218</b>	<b>862</b>

## 6. Kegiatan Strategis

Kegiatan penunjang lainnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

### a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi:

- 1) Pemeliharaan Alat Pengujian Passenger Car :
  - a) Side Slip (Banzai)
  - b) Brake Tester (Banzai)
  - c) Speed Tester (Anzen)
  - d) Axle Load Meter (Banzai)
  - e) Smoke Tester (VIS)
  - f) Gasoline Gas Analyzer
  - g) Head Light Tester Type HL3033SM-1
  - h) Sideslip Tester (Saxon)
  - i) Speed Tester (Saxon)

- j) Sound level meter (Saxon)
  - k) Infralyt Smart & Opaclyt 1030 (Saxon)
  - l) Chassis Tester (Saxon)
  - m) Roller Brake Tester (Saxon)
  - n) Q-Lift 700 (Saxon)
  - o) LVC 1050 FM Fully Automatic Head Light Tester (Saxon)
  - p) Weighing System (Saxon)
- 2) Pemeliharaan Alat Pengujian Sepeda Motor :
- a) Brake Tester (Saxon) tipe 1 & 2
  - b) Speed Tester (Saxon)
  - c) Head Light Tester (L.E.T Automotive)
  - d) Sound Level Meter (Saxon)
  - e) Measuring Arm (Faro Dimension)
  - f) Weighing system
  - g) Laptop Faro
  - h) Exhaust Blower
- 3) Pemeliharaan Alat Pengujian Bus dan Truck :
- a) Side Slip (Banzai)
  - b) Brake Tester (Banzai)
  - c) Speed Tester (Anzen)
  - d) Axle Load Meter (Banzai)
- 4) Pemeliharaan Elektrik Generating Set (EGS) :
- a) Genset Merk Deutz
  - b) Pengadaan Solar
- 5) Pemeliharaan Trafo :
- a) Trafo 1 Merk Union
  - b) Trafo 2 Merk Centrado
- b. Perawatan alat uji Emisi Euro 2 Sepeda Motor (kategori L)
- c. Mengikuti pembahasan penyusunan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan Bermotor dan Pengujian Kendaraan Bermotor berkaitan dengan telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembahasan RPP tersebut dilaksanakan bersama dengan pihak terkait seperti:
- 1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
  - 2) Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)

- 3) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)
  - 4) Pihak – pihak lain yang terkait
- d. Mengadakan kerjasama berupa pelatihan-pelatihan meliputi :
- 1) Ketidakpastian pengukuran.
  - 2) Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
  - 3) Pengujian Noise
  - 4) Otomotive Kendaraan Bermotor.
- e. Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pengembangan Sistem Uji Type Kendaraan Bermotor tahap I di Jerman.

Tema:

- 1) Pengujian sistem kemudi ( ECE R 79 )
  - 2) Pengujian sistem pengereman ( ECE R 13, ECE R)
- f. Mengikuti pelatihan tentang type approval of automotive lighting devices according to EU directies / ECE regulations and check up of measurement systems di optronik Educations and training center di Jerman
- g. Guna mengikuti perkembangan teknologi dan pengujian kendaraan bermotor selalu melakukan improvemant untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan pengujian kendaraan bermotor yang berlaku baik didalam maupun luar negeri, meliputi:
- 1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 04 tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
  - 2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 07 tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
  - 3) SNI berlaku wajib SNI 06–0101–2002 : Ban Sepeda Motor.
  - 4) SNI berlaku wajib SNI 06–0099–2002 : Ban Truk dan Bus.
  - 5) SNI 09–7118.2–2005 : Emisi gas buang – Sumber bergerak – Bagian 2 : Cara uji kendaraan bermotor kategori M, N, dan O berpengerak penyalaan kompresi pada kondisi akselerasi bebas.
  - 6) SNI berlaku wajib SNI 1811–2007 : Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua.
  - 7) Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.852/AJ.302/DRJD/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor.

- 8) Mengundang PT. Nissan Motor Indonesia untuk melakukan presentasi mengenai teknologi transmisi CVT (Countinuos Variabel Transmission) kendaraan bermotor merek Nissan.
- h. Guna mengikuti perkembangan teknologi automotive dan pengaturan pengujian, Harmonisasi dan Globalisasi kendaraan bermotor dan mendukung globalisasi BPLJSKB berperan dalam kegiatan sebagai berikut :
  - 1) JASIC ASIA gevorment Industrial meeting.
  - 2) APWG-ACCSQ (Automotive Product Working Group).
  - 3) APEC Automotive Dialogue.
  - 4) Expert meeting di ASEAN.
  - 5) IJ-EPA (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement).
  - 6) ASIA forum.
  - 7) Observer pada meeting UNECE (United Nation – Economic Community for Euro) di Geneva.
  - 8) APEC – RTHP.
  - 9) ASEAN Transport Meeting.
- i. Witness Test Pengujian Kendaraan Bermotor
  - 1) BTMP/BPPT Serpong.
  - 2) Laboratorium ATPM maupun principal kendaraan bermotor baik didalam maupun luar negeri.

## **7. Permasalahan Dan Tantangan Kedepan**

BPLJSKB Bekasi mempunyai gambaran tentang hal – hal yang akan dihadapi dimasa mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Diperlukan pegawai dengan skill / kemampuan sesuai dengan kebutuhan Balai (sesuai dengan usulan formasi pegawai ke Ditjen Perhubungan Darat) yaitu:
  - 1) S1 Teknik Mesin
  - 2) S1 Teknik Elektro
  - 3) D3 Arsiparis
  - 4) D3 Komputer
  - 5) D3 Teknik Elektro
  - 6) D3 Otomotif
  - 7) D2 PKB
  - 8) S1 Instrumentasi
  - 9) D3 Teknik Listrik

- b. Untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi sertifikasi perlu ditingkatkan :
  - 1) Sistem komputerisasi yang telah dihubungkan secara paralel dan ter-link perlu penambahan komputer yang memiliki kapasitas memory / RAM yang lebih besar.
  - 2) Diperlukan penambahan fasilitas penyimpanan arsip resume hasil uji sehingga lebih rapi dan mempermudah dalam pencarian arsip.
- c. Persiapan pemberlakuan e-resume pengujian tipe terus dimatangkan dan diujicobakan sehingga pelayanan pengujian tipe online dapat segera diwujudkan demi mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- d. Selama tahun 2013, masih ditemukan kendaraan yang dibawa ke BPLJSKB untuk dilakukan pengujian tipe tidak sesuai dengan ciri-ciri yang tertulis dalam surat pengantar (baik dari Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Industri) yang diajukan seperti:
  - 1) perbedaan no. rangka kendaraan uji
  - 2) perbedaan no. mesin
- e. Beberapa kali juga ditemukan dalam berkas permohonan uji tipe, pemohon tidak melampirkan/tidak mengisi, tidak memberikan informasi yang jelas mengenai data teknis kendaraan (seperti ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 9 Tahun 2004) seperti:
  - 1) data dimensi kendaraan uji
  - 2) data distribusi berat (berat kosong dan GVM) kendaraan uji pada masing-masing sumbu
  - 3) data berbeda antara yang ada pada KM No. 9 Tahun 2004, spesifikasi teknis pabrik, TPT (Tanda Pendaftaran Tipe) kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, dan data yang terdapat pada kendaraan uji.
- f. Perlunya koordinasi dan penjadwalan perbaikan dan perawatan alat uji yang baik, agar pelaksanaan uji tipe dapat berjalan lebih baik.
- g. Perlunya peningkatan komitmen seluruh staf dalam pelaksanaan uji tipe kendaraan, seperti alat uji harus akurat, pelayanan publik harus optimal serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- h. Perlu disediakannya gedung yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- i. Perlu penambahan tenaga penguji mengingat banyaknya penguji yang memasuki masa pensiun dan jumlah kendaraan uji yang selalu meningkat setiap tahunnya.
- j. Peralatan Pengujian terutama Alat Uji Brake Tester dan Axle Load Meter yang ada saat ini mempunyai kapasitas maksimum = 10 ton, sehingga untuk menguji kendaraan dengan

- kapasitas lebih besar dari 10 ton per sumbunya (Kendaraan angkutan berat), termasuk juga untuk menguji Rem dan Berat dengan jumlah sumbu 2(dua) atau 3(tiga ) secara serentak belum dapat dilakukan.
- k. Peralatan pengujian Emisi UN Regulation untuk :
- 1) Jenis sepeda motor saat ini belum dilengkapi penunjang teknis seperti :
    - a) Penjepit roda untuk ukuran sepeda motor besar sehingga untuk melakukan pengujian Emisi untuk sepeda motor besar belum dapat dilaksanakan.
    - b) Ventury pada CVS alat uji emisi UN R40 belum dapat digunakan untuk kapasitas mesin diatas 1300 cc sehingga perlu diadakan backup alat uji emisi sepeda motor untuk kapasitas diatas 1300 cc
  - 2) Jenis Passenger Car (M1) :
    - a) Sampai saat ini pengujian masih dilakukan di BTMP dengan melakukan witness, karena beberapa peralatan uji masih belum comply ke dalam regulasi UN.
    - b) Untuk tahun 2015 akan diberlakukan ASEAN MRA dan akan dilakukan pengujian untuk standard UN R83 dengan limit standar EURO4
- l. Peralatan Speedometer Passenger Car maupun Speedometer Truck yang ada saat ini belum dilengkapi dengan Bogie Roller dimana hal ini sangat diperlukan sekali terutama pada saat menguji speedometer kendaraan yang menggunakan penggerak 4 x 4 maupun penggerak 6 x 4.
- m. Perlunya modernisasi dari peralatan lama agar tetap bisa digunakan secara optimal sambil menunggu peremajaan alat baru yang sesuai dengan teknologi terkini.
- n. Dengan bertambahnya peralatan pengujian maka diperlukan restrukturisasi dan penggantian kabel/ panel listrik yang sudah usang di tiap-tiap gedung uji sehingga keamanan kelistrikan terjamin
- o. Perlunya koordinasi yang lebih intensif dengan Direktorat LLAJ tentang penetapan spesifikasi alat uji tipe yang akan diadakan. Sehingga Diharapkan alat yang akan diadakan dapat dioperasionalkan secara maksimal yang sesuai dengan regulasi yang ada, khususnya regulasi untuk MRA ASEAN.
- p. Dalam rangka memenuhi standard tata letak laboratorium dan Peralatan Pengujian maka perlu kiranya ditata kembali Laboratorium serta Peralatan Pengujian sesuai peruntukannya misalnya Laboratorium Pengujian khusus Sepeda Motor, Laboratorium Pengujian Khusus Passenger Car dan Laboratorium pengujian khusus Truck/bus.
- q. Pada dasarnya Pengujian Tipe dilakukan dalam 2 (dua) kondisi kegiatan yaitu Pengujian di dalam Gedung (Indoor Test) dan Pengujian di luar gedung (Outdoor Test) dimana untuk

kedepan pengujian tipe lebih diarahkan dilakukan diluar gedung (outdoor test), dimana pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ciri-ciri dan karakteristik kendaraan bermotor pada medan tiruan. Sesuai perkembangan teknologi salah satunya saat ini banyak kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi dengan ABS dimana untuk melakukan pengujian Brake dilakukan diluar gedung, sehingga dengan demikian Balai PLJSKB sudah waktunya untuk berbenah diri yaitu dengan membangun fasilitas Outdoor test dengan fasilitas Proving ground.

- r. Fasilitas pengujian Emisi EURO yang ada saat ini seperti Motor Cycle emission test, Passenger car emission test dan juga heavy duty vehicle emission test belum dilengkapi dengan sistim pengujian SHED TEST walaupun saat ini belum dipersyaratkan didalam Kepmen LH no.04 tahun 2009, namun karena kita akan segera terikat dengan perjanjian sistim keselamatan kendaraan bermotor melalui agreement of WP 29 yang terdiri dari 1958 agreement, 1998 global agreement dan 1997 agreement on periodical technical inspections, dimana salah satu dari agreement ini yaitu 1958 agreement segera kita adopsi yang isinya antara lain menerapkan Economic Commission for Europe (ECE) Regulations dan Mutual Recognition of Approvals (MRA). Dengan demikian kita harus melengkapi sistim pengujian EURO dengan fasilitas Sealed Housing For Evaporate Determination (SHED TEST).
- s. Perlunya backup alat uji emisi standar UN R40 (limit standar EURO3 dan WMTC) untuk sepeda motor untuk kapasitas mesin lebih dari 1300cc. Karena alat yang ada sekarang hanya mampu untuk menguji sepeda motor dengan kapasitas maksimal 1300cc sehingga diatas 1300cc tidak dilakukan uji tipe emisi standar UN R40. Selain itu juga untuk persiapan uji sampling seperti amanat PP 55 tahun 2014 serta program Penaatan Baku Mutu Emisi dari Kementrian Lingkungan Hidup sesuai KepmenLH No.4 tahun 2009 yang diselenggarakan tiap tahun.
- t. Dengan berkembangnya teknologi dan peralatan pengujian tipe serta perlunya akreditasi untuk laboratorium yang merujuk ke regulasi Internasional, maka tidak mungkin untuk pengelolaan laboratorium uji hanya dibebankan pada seksi sarana. Kedepannya untuk tiap laboratorium harus dibentuk suatu tim fungsional khusus lab yang mampu untuk melakukan pengelolaan laboratorium secara profesional dan berkesinambungan. Dengan adanya tim yang khusus mengelola lab, diharapkan nantinya personel lebih fokus dan bekerja lebih profesional.

- u. Akreditasi Laboratorium pengujian (ISO/IEC 17025) untuk lingkup pengujian emisi kendaraan bermotor, masih dalam proses pembahasan di KAN (Komite Akreditasi Nasional).

## **B. BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN (BLLAJSDP) JAMBI**

Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan di Jambi merupakan salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mendukung tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di wilayah Sumatera. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 86 Tahun 2011 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan, Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana, Angkutan Jalan,
2. Melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan, Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana, Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
3. Melaksanakan Penyelenggaraan Fasilitas Bimbingan Dan Pengawasan Teknis, Sarana dan Prasarana, Angkutan Jalan,
4. Melaksanakan Penyelenggaraan Fasilitas Bimbingan Dan Pengawasan Teknis, Sarana dan Prasarana, Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
5. Melaksanakan Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Operasional Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
6. Melaksanakan Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Operasional Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.

Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) Jambi menyelenggarakan Fungsi sebagai sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan, Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan;
2. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak Lalu Lintas, Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Dan Perbaikan Lokasi Potensi Kecelakaan Dan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Nasional;
3. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

4. Pelaksanaan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Jalan Antar Kota Antar Provinsi (Akap), Angkutan Pariwisata, Angkutan Alat Berat, Angkutan Barang Beracun Dan Berbahaya (B3), Serta Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Antar Provinsi;
  5. Pelaksanaan Pengawasan Teknis Sarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Jalan Nasional, Sertasungai Dan Danau;
  6. Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Jalan Nasional, Serta Sungai Dan Danau;
  7. Pelaksanaan Pemantauan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Pengujian Berkala, Terminal Penumpang Tipe A, Industri Karoseri, Pelabuhan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan;
  8. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Perundangundangan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan;
  9. Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Hukum, Dan Hubungan Masyarakat.
1. **Struktur Organisasi**

**Gambar V.2. Struktur Organisasi Balai LLAJSDP JAMBI**



2. **Wilayah Kerja BLLAJSDP Jambi**

Wilayah Kerja Balai LLAJSDP Jambi, Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.86 Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Tahun 2011, mencakup 9 (sembilan) wilayah Provinsi di Pulau Sumatera sebagaimana dikemukakan dalam Tabel I berikut ini.

Jumlah Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) propinsi wilayah kerja BLLASDP Jambi ada sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota, data selengkapnya sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

**Tabel V.5. Wilayah Kerja Balai LLAJSDP Jambi**

NO	PROPINSI
1	Aceh
2	Sumatera Barat
3	Sumatera Utara
4	Jambi
5	Bengkulu
6	Kepulauan Riau
7	Riau
8	Kepulauan Bangka Belitung
9	Sumatera Selatan

Bila ditinjau dari Jalan Nasional wilayah kerja BLLAJSDP Jambi, total panjang jalan Nasional dari ke 9 (Sembilan) propinsi adalah 10.408,55 Km.

### 3. Kondisi Saat Ini

Pada Tahun 2013 Organisasi BLLAJSDP Jambi dilaksanakan, formasi organisasi, terdiri dari 1 (satu) Kepala Balai LLAJSDP Jambi (eselon III b), 1 (satu) Kasubag TU BLLAJSDP JAMBI (eselon IVa), dan 1 (satu) Kepala Seksi Angkutan dan Teknik Sarana BLLAJSDP (eselon IVa), 1 (satu) Kepala Seksi Jaringan Pelayanan dan Prasarana dan 3 Staf Balai LLAJSDP Jambi dan dibantu tenaga personil yang Job Training (Magang) dari lulusan STTD dan Lulusan LLASDP Palembang.

Untuk menghindari keterlambatan dan upaya peningkatan dan kelancaran proses pekerjaan pada Satuan Kerja Balai LLAJSDP Jambi, terutama dalam penyusunan laporan administrasi perkantoran, penyusunan sistim akutansi, laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan rutin dan proses pelaksanaan Monitoring Prasarana, sarana dan Keselamatan Transportasi Darat, Balai LLAJSDP Jambi mengajukan permohonan dan meminta bantuan personil dari Dinas Perhubungan Provinsi.

Secara umum, pelaksanaan pekerjaan rutin dan Monitoring Prasarana, sarana dan Keselamatan Transportasi Darat pada BLLAJSDP Jambi, dapat dilakukan dan dikerjakan dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal satuan organisasi di BLLAJSDP Jambi, dan lingkungan eksternal, dalam hal ini melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi, khususnya dukungan personil (sifat bantuan sementara) mengisi kekosongan staf pendukung dilingkungan Satuan Kerja

BLLAJSDP Jambi, ditambah dukungan Petugas Tenaga Sekuriti dan Tenaga Kebersihan. Adapun pemberian honorarium tenaga personil tersebut diatas berasal dari DIPA Satker BLLAJSDP Jambi No. DIPA s/d022.03.2.467701/2013 tanggal 5 DESEMBERember 2012.

#### a. Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang Administrasi di lingkungan BLLAJSDP Jambi, adalah kegiatan ketata usahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

##### 1) Urusan Umum

Ditinjau dari kegiatan administrasi perkantoran berupa surat yang dikeluarkan dan surat yang masuk selama periode Tahun Anggaran Anggaran 2013, terhitung mulai bulan Januari s/d akhir bulan Desember 2013, sebanyak 466 surat menyurat di lingkungan Kantor Balai LLAJSDP Jambi dengan rincian data sebagai berikut :

- Surat Masuk sebanyak : 353 kali
- Surat Keluar sebanyak : 113 kali

##### 2) Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga Kantor Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) di Jambi telah dilaksanakan dengan baik, sesuai kemampuan yang ada dioptimalkan, termasuk Pengawasan barang-barang Inventaris Kantor. Namun dalam pengelolaannya, secara jujur diakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan signifikan, sebagian besar dipengaruhi oleh kekurangan pegawai di lingkungan kantor BLLAJSDP Jambi. Dapat kami sampaikan para pegawai yang ditugaskan di Balai LLAJSDP Jambi, para petugas keamanan dan petugas kebersihan, dapat bekerjasama dengan baik, melakukan inventarisasi barang milik pemerintah dan aktif melakukan pengawasan barang-barang inventaris yang tersedia saat ini di kantor BLLAJSDP Jambi.

##### 3) Urusan Kepegawaian

Untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan rutin dan penyelenggaraan pembangunan (pengadaan barang perkantoran) di lingkungan internal Balai LLAJSDP Jambi, dan melaksanakan TUPOKSI, maka aspek ketersediaan dan peranan keberadaan personil (pegawai) cukup penting, termasuk kesiapan dan kemampuan baik kualitas dan kuantitas.

Pada tahun anggaran 2013, terhitung mulai Januari Tahun 2013 s/d Desember 2013, jumlah Pegawai PNS di lingkungan Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi (BLLAJSDP Jambi) sebanyak 4 (empat )

orang, dan pegawai honorer sebanyak 4 (empat) yang terdiri dari Petugas Keamanan Kantor (security) sebanyak 2 orang dan Petugas Kebersihan sebanyak 2 (dua) orang. Pada Tahun Anggaran 2013 jumlah pegawai PNS di Balai LLAJSDP Jambi bertambah menjadi 7 (tujuh) orang, sedangkan untuk pegawai honorer, petugas security dan petugas kebersihan jumlahnya tetap.

4) Tata Urusan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2013, Kantor BLLAJSDP Jambi memperoleh dana anggaran yang dituangkan dalam DIPA No. DIPA s/d022.03.2.467701/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 6.365.805.000, dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Modal	Rp. 3.765.805.000,-
Belanja Barang	Rp. 2.600.000.000,-
Jumlah	<b>Rp. 6.365.805.000,-</b>

a. Belanja Modal Yang Telah Direalisasikan, terdiri dari:

**Tabel.V.6. Realisasi Belanja Modal Tahun 2013**

NO	URAIAN	VOLUME	BIAYA (Rp)
1	SID Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Aceh	1 (satu) pkt	378.510.000
2	SID Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Sumut dan Sumbar	1 (satu) pkt	481.002.500
3	SID Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Riau dan Kepri	1 (satu) pkt	569.250.000
4	SID Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Jambi dan Bengkulu	1 (satu) pkt	569.855.000
5	SID Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Sumsel dan Babel	1 (satu) pkt	479.765.000
<b>JUMLAH</b>			<b>2.478.382.500</b>

b. Belanja Barang Yang Telah Direalisasikan, terdiri Dari:

**Tabel.V.7. Realisasi Belanja Barang Tahun 2013**

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI (Rp)
1	Honor Operasional Satuan Kerja	93.840.000
2	Belanja Barang Operasional Lainnya	87.946.800
3	Belanja ATK	50.479.750
4	Honor Output Kegiatan	18.900.000
5	Belanja langganan Listrik	18.740.181
6	Belanja Langganan Telepon	7.639.407
7	Belanja Langganan Air	2.274.800
8	Belanja Langganan Surat Kabar	6.000.000
9	Belanja Sewa (Gedung, Jaringan Internet, Mesin Fotocopy)	119.587.010
10	Belanja Jasa Profesi	57.600.000
11	Belanja Perawatan Gedung Kantor	12.455.000
12	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.399.396

13	Belanja Perjalanan Lainnya	608.500.180
14	Monitoring dan Pengawasan Bidang Prasarana LLAJ dan SDP	207.519.400
15	Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana LLAJ dan SDP	201.400.500
16	Monitoring dan Pengawasan Keselamatan Transportasi Darat	204.674.350
17	Penyusunan LAKIP, LAPTAH, Penetapan Kinerja	29.123.600
18	Koordinasi Kelembagaan BLLAJSDP	815.166.210
19	Rapat Teknis dan Konsolidasi BLLAJSDP	150.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>2.770.246.584.</b>

- c. Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2013 sebesar Rp. 5.248.629.084
- d. Daya Serap Tahun 2013 yang terealisasi sebesar 82,45%
- e. Pertanggung Jawaban keuangan atas realisasi penggunaan anggaran tersebut secara berkala dilaporkan dalam bentuk Laporan Bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan pengiriman serta tembusan – tembusannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Pemeriksaan Kas, dilakukan oleh Kepala Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan Jambi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan s/dketentuan yang berlaku yakni setiap Triwulan disamping itu pula pada waktu – waktu tertentu dilaksanakan pemeriksaan bila diperlukan.

#### 4. Program Kerja BLLAJSDP Tahun 2013

Kegiatan dan Rencana Kerja BLLAJSDP Jambi, sampai akhir Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Rapat Konsolidasi Internal di lingkungan BLLAJSDP Jambi;
- b. Melaksanakan Rapat Konsolidasi Internal di lingkungan Satuan Kerja BLLAJSDP Jambi
- c. Menyusun Program Kerja BLLAJSDP Jambi, baik Jangka Pendek, Jangka Menengah maupun Jangka Panjang.
- d. Melakukan Konsolidasi dan Koordinasi Program Kerja dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan, Ditjendat)
- e. Melakukan Kunjungan Kerja, Konsolidasi, Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pemantapan Program Kerja Kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk Pengenalan Wilayah Kerja, Penyampaian Keberadaan dan TUPOKSI BLLAJSDP Jambi,
- f. Menghadiri Rapat Koordinasi Kelembagaan dengan Jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Kabupaten/Kota se Pulau Sumatera (tidak termasuk Provinsi Lampung).
- g. Melaksanakan Monitoring Sarana di Wilayah Sumatera. Adapun Maksud dan Tujuannya adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

- Monitoring dilakukan untuk pengendalian kegiatan program agar mencapai sasaran yang diharapkan secara tepat waktu, tepat sasaran;
- Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
- Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
- Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Ruang lingkup Pekerjaan Tugas Perjalanan Dinas Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan, mencakup Bidang Sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagai berikut :

- Melakukan inventarisasi Jumlah Armada
- Melakukan Inventarisasi Jaringan Trayek
- Melihat Gambaran Muatan (load Factor)
- Melihat Perilaku pengemudi angkutan umum
- Kondisi Armada
- Melakukan Inventaris Jumlah Perusahaan dan Armada Di Terminal
- Melihat Produktivitas Jumlah Penumpang Yang Tiba dan Berangkat

h. Melaksanakan Monitoring Prasarana di Wilayah Sumatera. Adapun Maksud dan Tujuannya adalah sebagai berikut:

- Melakukan inventarisasi berupa pengumpulan database bidang Perhubungan Darat, khususnya Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Monitoring dan Pengawasan dilakukan untuk pengendalian kegiatan program agar mencapai sasaran yang diharapkan secara tepat waktu, tepat sasaran;
- Melakukan evaluasi kondisi aktual dilapangan
- Memberikan masukan tentang pemeliharaan dan peningkatan kinerja Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Memberikan Rekomendasi dan Saran Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Ruang lingkup Pekerjaan Tugas Perjalanan Dinas Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Bidang Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan

Penyeberangan, mencakup Bidang Sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagai berikut :

- Melakukan inventarisasi kondisi Jalan Nasional, Provinsi, Kota Dan Kabupaten
  - Melakukan Inventarisasi Fasilitas Perlengkapan Jalan SEPTEMBERerti Trotoar, Rambu, Fasilitas Penyeberangan, Lampu Penerangan, Marka,, Paku Jalan, Deliniator, Guadrail, APILL
  - Melakukan Pemantauan Kondisi Ruang Milik Jalan.
  - Melakukan Pemantauan Kondisi Permukaan Jalan
  - Melakukan Pemantauan Kondisi Marka
  - Melakukan Pemantauan Kondisi Rambu
  - Kondisi Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar)
  - Melakukan Pemantauan Kondisi Fasilitas Penyeberangan (Zebracross)
  - Melakukan Pemantauan Kondisi Shelter / Halte
  - Melakukan Pemantauan Kondisi Simpang Apill
  - Melakukan Pemantauan Kondisi Pagar Pengaman
  - Melakukan Pemantauan Kondisi Lampu Penerangan Jalan
  - Melakukan Pemantauan Kondisi Parkir
  - Melakukan Pemantauan Kondisi Terminal, dan Fasilitas Terminal
  - Melakukan Pemantauan Kondisi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - Melakukan Inventarisasi Ruang Fasilitas Pelabuhan Dari sisi Darat
- i. Melaksanakan Monitoring Keselamatan Transportasi Darat di Wilayah Sumatera. Adapun Maksud dan Tujuannya adalah sebagai berikut:
- Monitoring dilakukan untuk pengendalian kegiatan program agar mencapai sasaran yang diharapkan secara tepat waktu, tepat sasaran;
  - Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
  - Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
  - Memberikan informasi tentang metode yang tepat.

Ruang lingkup Pekerjaan Tugas Perjalanan Dinas Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Bidang Keselamatan Transportasi Darat Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan mencakup Bidang Keselamatan Transportasi Darat Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagai berikut :

- Melakukan inventarisasi kondisi eksisting ruas jalan nasional mengenai kebutuhan fasilitas keselamatan LLAJ.

- Melakukan kajian terhadap kebutuhan fasilitas keselamatan LLAJ
  - Pengumpulan data dan informasi Seperti data kecelakaan, data volume lalu lintas dan inventarisasi kondisi jalan, serta data jumlah rambu s/drambu dan marka jalan yang tersebar di beberapa ruas jalan.
  - Melakukan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan.
  - Menerapkan konsep pengembangan pencegahan kecelakaan lalu lintas jalan melalui penerapan formulir pemeriksaan keselamatan (checking list).
  - Menerapkan konsep dan rencana perancangan teknik jaringan jalan yang dilengkapi oleh marka dan rambu s/drambu lalu lintas yang layak guna.
  - Informasi daerah rawan kecelakaan para pengguna jalan
  - Penerapan rambu - rambu dan marka jalan yang layak guna
  - Penerapan formulir daftar pemeriksaan AKJ
  - Melakukan Inventaris Alat Keselamatan Di atas Kapal
  - Melakukan Identifikasi Alur Pelayaran Yang Dilalui
  - Penerapan Rambu – rambu perairan Daratan.
  - Tinjauan Muatan Yang Masuk Ke dalam Kapal
  - Penanganan Muatan Di kapal
  - Standar Pelayanan Minimal Pada Angkutan Penyeberangan
- j. Melaksanakan Konsolidasi, Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantapan Program Kerja dibidang Pembangunan, Pemeliharaan Peningkatan Sarana dan Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan, yang Sumber Dana berasal dari APBN, secara intensif dan berkesinambungan dengan KPA Satuan Kerja Pengembangan LLAJ dan Satuan Kerja Pengembangan LLASDP, yang saat ini berada di Pemerintah Provinsi, meliputi :

#### 1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Konsolidasi, Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantapan Program Kerja Pembangunan, khususnya di Jalan Nasional, terkait dengan :

- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail.
- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan Pemasangan Rambu Lalu. Lintas (Petunjuk /RPPJ, Perintah, Peringatan dan Larangan)
- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan APILL, Warning Light

- Pembangunan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Pemasangan Deliniator, Paku Jalan, Cermin Tikungan
- Pembangunan Pengadaan Zona Selamat Sekolah
- Sosialisasi Keselamatan Jalan.
- Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Jalan.
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan.
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan.
- Program Penanganan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di ruas Jalan Nasional
- Program Subsidi Bus Perintis.
- Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang.
- Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.

## 2) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan

Konsolidasi, Koordinasi, Fasilitas dan Pemantapan Program Kerja Pembangunan di Bidang LLAJSDP, antara lain terkait dengan :

- Pembangunan Dermaga Sungai, Danau, Penyeberangan
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Sungai, Danau, Penyeberangan
  - Pembangunan Bus Air
  - Pembangunan Rambu Penuntun di Alur Penyeberangan
  - Peningkatan Rambu Sungai dan Danau
  - Rehabilitasi Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan
- k. Melakukan Rapat Kerja Rutin, Konsolidasi, Sinkronisasi, Konsultasi, Fasilitas dan Koordinasi dalam Pemantapan Program Kerja Pembangunan di bidang LLAJSDP, dengan KPA Satuan Kerja Pengembangan LLAJ dan Pengembangan LLASDP di masing - masing Provinsi dalam wilayah kerja Balai LLAJSDP Jambi.
- l. Melakukan Inventarisasi dan Pengumpulan Data Base secara bertahap di wilayah kerja.

## 5. Realisasi Program Kerja Tahun 2013

Kegiatan yang telah dilakukan untuk memperkenalkan pembentukan keberadaan Organisasi BLLAJSDP Jambi, dimulai dari Pengenalan Organisasi, Penyusunan Program Kerja 2014 dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerja dengan melakukan koordinasi kelembagaan, kunjungan kerja ke masing - masing Dinas Perhubungan Provinsi.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan BLLAJSDP Jambi antara lain memperkenalkan dan memaparkan TUPOKSI BLLAJSDP serta melakukan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi berbagai tugas di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyeberangan, serta melakukan rapat teknis dengan Satuan Kerja Pengembangan LLAJ dan satuan Kerja Pengembangan LLASDP di wilayah kerja BLLAJSDP Jambi.

Disamping itu Balai LLAJSDP Jambi, turut aktif mengikuti berbagai kegiatan Rapat Koordinasi Teknis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, antara lain Rakornis Angkutan Perintis, Rakornis Perhubungan Darat, Rakornis Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat, Sosialisasi Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Sosialisasi dan Penyusunan SOP Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor, termasuk menghadiri undangan rapat pembahasan berbagai pekerjaan studi, Workshop yang dilaksanakan Direktorat LLAJ, Direktorat BSTP, Direktorat LLASDP, dan Direktorat KTD di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## **6. Permasalahan**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BLLAJSDP Jambi, antara lain :

### **a. Belum memiliki Kantor tetap**

Dalam melaksanakan kegiatan kerja Organisasi Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyeberangan (BLLAJSDP) Jambi, belum di dukung dengan ketersediaan atau belum memiliki Kantor menetap. Status Kepemilikan Kantor BLLAJSDP Jambi saat ini masih status Kontrak Sewa setiap tahun anggaran.

### **b. Fasilitas Pendukung Kantor Belum Memadai.**

Untuk kelancaran pelaksanaan TUPOKSI BLLAJSDP Jambi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.86 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan, dalam hal pelaksanaan tugas rutin dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan sungai danau dan penyeberangan, peningkatan kinerja dibutuhkan Fasilitas Kantor yang memadai. Untuk masa yang akan datang, guna dapat menciptakan suasana nyaman, tenang dan kondusif, melaksanakan berbagai tugas rutin maupun pembangunan, sangat membutuhkan kesiapan perangkat Fasilitas Pendukung Kantor yang memadai. Fasilitas Kantor BLLAJSDP saat ini hanya terdiri dari 11 Meja Kerja, 11 Kursi Kerja, 4(empat) Unit Fasilitas AC, dinilai belum memadai, untuk mendukung suasana nyaman, tenang, kondusif, (Safe Work). Sampai dengan saat ini, kelengkapan media informasi berupa Televisi, juga belum tersedia sebagai fasilitas informasi akan kebutuhan berbagai informasi dari wilayah Nusantara.

### c. Kendaraan Operasional Belum Memadai

Ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional, saat ini di UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, khusus pada Kantor Balai LLAJSDP Jambi, baru memiliki 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 4 (R4) sebanyak 2(dua) unit dan Kendaraan Roda 2 (R-2) sebanyak 2 unit, yang dipergunakan sebagai kendaraan dinas untuk keperluan dinas operasional.

Dalam rangka memobilisasi pencapaian kinerja BLLAJSDP Jambi, dimasa yang akan datang, peran Kendaraan Operasional, berupa penambahan kendaraan roda 4 (R-4), sangatlah dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, seperti pelaksanaan kegiatan inventarisasi, survai, monitoring /pemantuan pelayanan kinerja prasarana dan sarana bidang lalu lintas dan angkutan jalan sungai danau dan penyeberangan yang berada di 9 (sembilan) Provinsi di Pulau Sumatera sesuai wilayah kerja, yang memerlukan percepatan penyampaian informasi dan kordinasi. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan performansi dan pelaksanaan tugas dinas, penambahan kendaraan dinas untuk Pejabat Struktural dilingkungan BLLAJSDP Jambi, masih diperlukan.

### d. Sumber Daya Manusia

Salah satu motor penggerak roda keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di wilayah Kerja BLLAJSDP Jambi, Mutlak didukung adanya Ketersediaan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dedikasi, pengabdian, pekerja keras, perilaku yang baik, memiliki kemampuan handal, kompetensi profesional di bidang tugas melaksanakan pekerjaan di daerah.

Kondisi saat ini di Kantor BLLAJSDP Jambi, sudah memiliki 7 (tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari PNS dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan pindahan dari Dinas Perhubungan Propinsi/Kabupaten. Dalam melaksanakan berbagai tugas rutin, koordinasi kelembagaan internal maupun eksternal UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai LLAJSDP Jambi, Penyusunan Laporan Administrasi, penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Kegiatan Satker BLLAJSDP Jambi, mulai dari penyusunan konsep, pengetikan, pengiriman, untuk personil yang sedang on Job Training (Magang) sebanyak 4 (empat) orang dan bantuan staf dari lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

Kebutuhan tenaga Personil dilingkungan Kantor BLLAJSDP Jambi yang dibutuhkan dan sifatnya mendesak adalah sebagai berikut :

- 1) Tenaga Personil sebagai Pramu Surat.

- 2) Tenaga Personil sebagai Pengelola Kepegawaian
- 3) Tenaga Personil sebagai Petugas SAI
- 4) Tenaga Personil sebagai Petugas SIMAK BMN
- 5) Tenaga Personil sebagai Operator Komputer
- 6) Tenaga Personil sebagai Petugas Humas
- 7) Tenaga Personil sebagai Teknisi
- 8) Tenaga Personil sebagai Operator Radio Telekomunikasi
- 9) Tenaga Personil sebagai Bendahara Pengeluaran
- 10) Tenaga Personil sebagai Penyusun Bahan Pembangunan Prasarana LLAJ dan LLASDP
- 11) Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A
- 12) Tenaga Personil sebagai Penyusun Bahan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas (di jalan Nasional)
- 13) Tenaga Personil sebagai Pengevaluasi Analisis Dampak Lalu lintas
- 14) Tenaga Personil sebagai Pelaksanaan Kebutuhan Lalu Lintas, Penyiapan Bahan Pelaksanaan Perbaikan Lokasi Potensi Kecelakaan dan Kemacetan Lalu Lintas (di Jalan Nasional),
- 15) Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor
- 16) Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)
- 17) Tenaga Personil sebagai Pengkaji Integrasi Jaringan dan Pelayanan LLAJSDP
- 18) Tenaga Personil sebagai Penyusun Bahan Pembangunan Sarana LLAJSDP
- 19) Tenaga Personil sebagai Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
- 20) Tenaga Personil sebagai Penyiapan bahan Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang (AKAP, Pariwisata)
- 21) Tenaga Personil sebagai Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan B3
- 22) Tenaga Personil sebagai Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- 23) Tenaga Personil sebagai Pengawas Keselamatan Sarana Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)

- 24) Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- 25) Tenaga Personil sebagai Penyidik Pelanggaran Bidang LLAJ
- 26) Tenaga Personil sebagai Petugas Bimbingan Keselamatan LLAJ
- 27) Tenaga Personil sebagai Petugas Bimbingan Keselamatan LLASDP

**e. Administrasi Kepegawaian**

Kondisi saat ini mengenai urusan kepegawaian personil PNS yang ditugaskan di BLLAJSDP Jambi, sampai saat ini masih ditangani Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Seperti Pengambilan Gaji, Usulan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Usulan Mengikuti Diklat, usulan pengajuan penerima penghargaan.

Melihat kondisi saat ini, memang belum memungkinkan untuk dilakukan pengalihan urusan kepegawaian personil PNS yang semula bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di pusat, mengingat keterbatasan personil dan keperluan kelancaran penanganan administrasi kepegawaian,

**f. Anggaran Pembangunan**

Keberadaan Balai LLAJSDP sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam melaksanakan TUPOKSI nya, mutlak didukung dengan ketersediaan Anggaran Pembangunan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 86 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan Mempunyai Tugas antara lain Melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan, Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana, Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan di masing s/dmasing wilayah kerja, tentu sangat membutuhkan dukungan anggaran pembangunan dan pemeliharaan. Kondisi saat ini, tugas pokok tersebut belum dapat dilaksanakan, pendekatan yang dilakukan hanya terbatas ke bidang Koordinasi, Konsolidasi, Penyamaan Persepsi, Sinkronisasi Program Kerja di bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana, Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan di masing-masing wilayah kerja BLLAJSDP Jambi, terutama dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan para Satker Sementara bidang Pengembangan LLAJ dan Satker Sementara Pengembangan LLASDP di masing-masing wilayah kerja dalam hal sebagai berikut :

1. Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Jalan Nasional
2. Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail di Jalan Nasional

3. Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan Pemasangan Rambu Lalu Lintas (Petunjuk /RPPJ, Perintah, Peringatan dan Larangan) di Jalan Nasional
4. Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan APILL, Warning Light, Pengadaan Baliho Keselamatan di Jalan Nasional
5. Pembangunan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Pemasangan Deliniator, Paku Jalan, Cermin Tikungan
6. Pembangunan Pengadaan Zona Selamat Sekolah di Jalan Nasional
7. Sosialisasi Keselamatan Jalan di Jalan Nasional
8. Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalan Nasional
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan di Jalan Nasional
10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan di Jalan Nasional
11. Program Penanganan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di ruas Jalan Nasional
12. Studi Identifikasi dan Desain Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional
13. Studi, Identifikasi dan Desain Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional
14. Inventarisasi dan Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan Nasional
15. Program Subsidi Bus Perintis
16. Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang
17. Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
18. Pembangunan Dermaga Sungai, Danau, Penyeberangan
19. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sungai, Danau, Penyeberangan
20. Pembangunan Bus Air
21. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Penuntun di Alur Penyeberangan
22. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peningkatan Rambu Sungai dan Danau
23. Rehabilitasi Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan
24. Study Kelayakan dan DED Pembangunan Dermaga Pelabuhan SDP

#### **g. Pendidikan Dan Pelatihan**

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja organisasi BLLAJSDP Jambi, membutuhkan Pegawai yang memiliki Kompetensi Kemampuan dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Seiring dengan waktu berjalan dan kondisi saat ini, PNS dilingkungan BLLAJSDP masih terbatas dan pemenuhan personil belum lengkap sebagai staf pendukung maupun pejabat yang akan mengisi jabatan fungsional. Pendidikan dan Pelatihan untuk sementara waktu masih di usulkan dari bidang Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## 7. Upaya Yang Dilakukan

Untuk mengatasi permasalahan di lingkungan BLLAJSDP Jambi, upaya yang telah dilakukan antara lain :

### a. Peningkatan Performansi BLLAJSDP Jambi

Mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk hal berikut:

1. Pengadaan Pembangunan Kantor BLLAJSDP (jangka Panjang)
2. Sewa Gedung Kantor BLLAJSDP (jangka Pendek)
3. Pemeliharaan Kondisi Gedung /Kantor
4. Peningkatan Fasilitas Kantor :
  - Penambahan Meubleair (Meja, Kursi)
  - Penambahan AC Split
  - Pembelian Mesin Pompa Air
  - Penambahan Komputer
  - Pembelian Pesawat Televisi
  - Penambahan Daya Listrik
  - Pengadaan Alat Absensi Elektronik

### b. Bidang Sumber Daya Manusia

1. Mengusulkan Pengisian Kebutuhan Personil PNS dari Pusat

Balai LLAJSDP Jambi mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk dapat kiranya mengisi kekosongan jumlah personil yang dibutuhkan untuk mengisi formasi PNS.

Formasi Jumlah Personil PNS di lingkungan BLLAJSDP Jambi, yang dibutuhkan dalam jangka pendek sebanyak 28 Personil PNS, yang terdiri dari :

#### **Bidang Subbag Tata Usaha**

- Tenaga Personil sebagai Pramur Surat.
- Tenaga Personil sebagai Pengelola Keuangan (Bendahara)
- Tenaga Personil sebagai Pengelola Kepegawaian
- Tenaga Personil sebagai SPM
- Tenaga Personil sebagai Petugas SAI
- Tenaga Personil sebagai Petugas SIMAK BMN
- Tenaga Personil sebagai Operator Komputer

- Tenaga Personil sebagai Petugas Humas
- Tenaga Personil sebagai Teknisi
- Tenaga Personil sebagai Operator Radio Telekomunikasi
- Tenaga Personil sebagai Bendahara Pengeluaran

#### **Bidang Jaringan Pelayanan Dan Prasarana**

- Penyusun Bahan Pembangunan Prasarana LLAJSDP
- Petugas Monitoring Terminal Penumpang
- Penyusun Bahan Manajemen dan Rekayasa Lalin
- Pengevaluasi Analisis Dampak Lalin
- Petugas Monitoring Penimbangan Kendaraan Bermotor
- Petugas Monitoring Pelayanan Kinerja Penyelenggaraan Pelabuhan SDP
- Pengkaji Integrasi Jaringan dan Pelayanan LLAJSDP

#### **Bidang Angkutan Dan Teknis Sarana**

- Penyusun Bahan Pembangunan Sarana LLAJSDP
- Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Penyiapan bahan Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang (AKAP, Pariwisata)
- Pengawas Teknis Angkutan Alat Berat dan B3
- Pengawas Teknis Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- Pengawas Keselamatan Sarana Sungai Danau dan Penyeberangan
- Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- Penyidik Pelanggaran Bidang LLAJ
- Petugas Bimbingan Keselamatan LLAJ
- Petugas Bimbingan Keselamatan LLASDP

#### **Kebutuhan Personil dalam jangka pendek, yang memungkinkan disediakan adalah :**

- Personil yang ditugaskan sebagai Bendahara ,
- Personil yang ditugaskan sebagai SAI,
- Personil yang ditugaskan sebagai Petugas SIMAK BMN,
- Personil yang ditugaskan sebagai Pramur Surat,
- Personil yang ditugaskan sebagai Operator Komputer
- Personil Penyusun Bahan Pembangunan Sarana LLAJSDP

- Personil Penyiapan bahan Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang (AKAP, Pariwisata), Angkutan Alat Berat dan B3
- Personil Penyiapan bahan Pengawas Teknis Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Pengawas Keselamatan Sarana Sungai Danau dan Penyeberangan
- Personil Penyiapan bahan Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- Personil Penyiapan bahan Penyusun Bahan Pembangunan Prasarana LLAJSDP
- Personil Penyiapan dan Penyusun Bahan Manajemen dan Rekayasa Lalin, Pengevaluasi Analisis Dampak Lalin, Kebutuhan Lalu Lintas, Penyiapan Bahan Pelaksanaan Perbaikan Lokasi Potensi Kecelakaan dan Kemacetan Lalu Lintas (di Jalan Nasional),
- Personil penyiapan bahan Pengkaji Integrasi Jaringan dan Pelayanan LLAJSDP

## 2. Mengusulkan Bantuan Personil dari Dishub Provinsi Jambi

Sambil menunggu realisasi pengisian formasi PNS dilingkungan BLLAJSDP Jambi dan guna menunjang kelancaran pekerjaan pada Satuan Kerja Balai LLAJSDP Jambi khususnya pada tahun anggaran 2013, mengusulkan bantuan personil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sebagai berikut :

- Personil yang ditugaskan sebagai Panitia Lelang
- Personil yang ditugaskan sebagai Penerima Pemeriksa Barang
- Personil yang ditugaskan sebagai pramu surat (Staf Satker)
- Personil yang ditugaskan sebagai SAI sebanyak 4 (empat) orang,
- Personil yang ditugaskan sebagai Petugas SPM,
- Personil yang ditugaskan sebagai Petugas SIMAK BMN,
- Personil yang ditugaskan sebagai Pramu Surat,
- Personil yang ditugaskan sebagai Operator Komputer

## 3. Bidang Operasional

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas rutin maupun tugas pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan peningkatan parasarana dan sarana dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyeberangan (LLASDP), Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, Angkutan Penumpang, ASDP, Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor, mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk hal-hal berikut :

- Pengadaan Alat-alat Survai LLAJSDP
- Pengadaan Kendaraan Operasional Survai dan Monitoring
- Pengadaan Kendaraan Sosialisasi Keselamatan LLASDP
- Penambahan Kendaran Dinas untuk Pejabat Struktural

#### 4. Bidang Pembangunan

Guna merealisasikan pembentukan organisasi BLLAJSDP Jambi, sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) BLLAJSDP Jambi, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Darat No. 86 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan akan menyusun Program BLLAJSDP Jambi Tahun 2014 s/d 2019 sebagai berikut :

- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Jambi.
- (Marka Jalan, Rambu, (Petunjuk /RPPJ, Perintah, Peringatan dan Larangan) Guard Rail, Deliniator, Cermin Tikungan, Paku Jalan, Lampu Penerangan Solar Sel, APILL, Warning Light)
- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Sumatera Barat
- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Riau
- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Kepulauan Riau
- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Bengkulu
- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Sumatera Utara
- Pembangunan, Pemeliharaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Aceh

- Pengadaan dan Pemasangan Baliho, Spanduk, Keselamatan di Jalan Nasional
- Pengadaan dan Pembangunan Zona Selamat Sekolah di Jalan Nasional
- Melaksanakan Sosialisasi Keselamatan Jalan di Jalan Nasional
- Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalan Nasional
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan di Jalan Nasional
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan di Jalan Nasional
- Program Penanganan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di ruas Jalan Nasional
- Studi Identifikasi dan Desain Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional
- Studi, Identifikasi dan Desain Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi.
- Studi, Identifikasi dan Desain Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- Studi, Identifikasi dan Desain Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- Studi, Identifikasi dan Desain Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Lintas Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi Riau.
- Studi, Identifikasi dan Desain Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- Studi, Identifikasi dan Desain Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Studi, Identifikasi dan Desain Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
- Studi, Identifikasi dan Desain Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- Studi, Identifikasi dan Desain Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh
- Inventarisasi, Survei dan Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Lintas Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Selatan
- Inventarisasi, Survei dan Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Lintas Provinsi Jambi-Sumatera Barat
- Inventarisasi, Survei dan Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Lintas Provinsi Sumatera Selatan-Provinsi Lampung

- Inventarisasi, Survei dan Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Lintas Provinsi Aceh-Provinsi Sumatera Utara
- Inventarisasi, Survei dan Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Lintas Provinsi Kepulauan Riau dan Bangka Belitung
- Inventarisasi, Survei dan Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Lintas Provinsi Sumatera Utara-Provinsi Sumatera Barat
- Inventarisasi, Survei dan Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Lintas Provinsi Sumatera Barat-Provinsi Sumatera Selatan
- Inventarisasi, Survei dan Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Lintas Provinsi Sumatera Utara-Provinsi Riau
- Inventarisasi, Survei dan Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Lintas Provinsi Provinsi Riau – Provinsi Sumatera Selatan
- Inventarisasi, Survei dan Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan Nasional Lintas Provinsi Provinsi Bengkulu – Provinsi Lampung
- Program Subsidi dan Peningkatan Pelayanan Bus Perintis di wilayah Provinsi Jambi.
- Program Subsidi dan Peningkatan Pelayanan Bus Perintis di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
- Program Subsidi dan Peningkatan Pelayanan Bus Perintis di wilayah Provinsi Sumatera Barat
- Program Subsidi dan Peningkatan Pelayanan Bus Perintis di wilayah Provinsi Bengkulu
- Program Subsidi dan Peningkatan Pelayanan Bus Perintis di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- Program Subsidi dan Peningkatan Pelayanan Bus Perintis di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Program Subsidi dan Peningkatan Pelayanan Bus Perintis di wilayah Provinsi Sumatera Utara
- Program Subsidi dan Peningkatan Pelayanan Bus Perintis di wilayah Provinsi Aceh
- Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang) di wilayah Provinsi Jambi

- Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
- Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang) di wilayah Provinsi Riau
- Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang) di wilayah Provinsi Sumatera Barat
- Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang) di wilayah Provinsi Aceh
- Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang) di wilayah Provinsi Sumatera Utara
- Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang) di wilayah Provinsi Bengkulu
- Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
- Pembangunan Dermaga Sungai, Danau, Penyeberangan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Sungai, Danau, Penyeberangan
- Pembangunan dan Pengadaan Bus Air
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Penuntun di Alur Penyeberangan
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peningkatan Rambu Sungai dan Danau
- Rehabilitasi Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan
- Study Kelayakan dan DED Pembangunan Dermaga Pelabuhan SDP
- Survei, Identifikasi dan Desain Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Wilayah Aceh
- Survei, Identifikasi dan Desain Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Utara – Sumatera Barat
- Survei, Identifikasi dan Desain Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Wilayah Riau – Provinsi Kepulauan Riau

- Survai, Identifikasi dan Desain Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jambi – Provinsi Bengkulu
- Survai, Identifikasi dan Desain Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Selatan – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### 5. Bidang Kepegawaian

Pada masa yang akan datang, dengan terpenuhinya personil PNS dilingkungan BLLAJSDP Jambi, akan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, agar urusan Kepegawaian PNS, dapat dialihkan menjadi bagian organisasi BLLAJSDP Jambi.

Demikian Laporan Kinerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) Jambi pada Tahun Anggaran 2013 ini disusun, untuk dapat menjadi periksa, semoga bermanfaat dan menjadi masukan dalam peningkatan kinerja pelayanan di bidang penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan sungai danau dan penyeberangan di wilayah kerja pulau Sumatera, terimakasih.

### **C. BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN (BLLAJSDP) PALU**

#### **1. Kondisi Saat Ini**

Balai LLAJSDP Palu dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2011 yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana, fasilitas bimbingan dan pengawasan teknis serta koordinasi pelaksanaan operasional penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan. Balai LLAJSDP Palu meliputi wilayah kerja 10 Provinsi di Indonesia bagian timur yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Kantor BLLAJSDP Palu mulai aktif pada bulan Juli 2013 dengan alamat Jl. Nuri No. 3 Kota Palu menempati kantor dengan status sewa. Formasi organisasi, awalnya hanya diisi pejabat struktural 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) Kepala Balai (eselon IV a), 1 (satu) Kasubag TU (eselon IVa), dan 1 (satu) Kepala Seksi Angkutan dan Teknik Sarana (eselon IVa), dan baru pertengahan minggu II Desember 2013 diisi pejabat struktural tingkat eselon IVa, yakni Kepala Seksi Jaringan Pelayanan dan Prasarana. Hingga akhir Tahun 2013, Organisasi BLLAJSDP Palu, baru diisi dengan 11 (sebelas) orang yaitu 1 Pejabat Struktural Tingkat Eselon III a dan 3 Pejabat Struktural tingkat Eselon IVa, ditambah 7 (tujuh) orang tenaga staf pendukung. Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, kegiatan rutin dan pengadaan barang

inventaris kantor, maupun pelaksanaan koordinasi kelembagaan antar instansi terkait dibantu juga 3 ( Tiga ) personil yang Job Training (Magang) dari lulusan STTD Bekasi dan 1 (satu ) Orang Lulusan STMIK Bina Mulia Palu, ditambah dukungan Petugas Tenaga Sekuriti dan Tenaga Kebersihan. Adapun pemberian honorarium tenaga personil tersebut diatas berasal dari DIPA Satker BLLAJSDP Palu Tahun Anggaran 2013. Adapun pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, kegiatan rutin dan pengadaan barang inventaris kantor, maupun pelaksanaan koordinasi kelembagaan antar instansi terkait, sebagian besar masih dirangkap oleh pejabat struktural.

Untuk menghindari keterlambatan dan upaya peningkatan kelancaran proses pekerjaan pada Satuan Kerja Balai LLAJSDP Palu, terutama dalam penyusunan laporan administrasi perkantoran, penyusunan sistim akutansi, laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan rutin dan proses pelaksanaan pengadaan seperti Pengadaan Meubelair, (Meja, Kursi Kerja), Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dapat dilakukan dan dikerjakan dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal satuan organisasi di BLLAJSDP Palu, dan lingkungan eksternal, dalam hal ini melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi di Wlayah kerja BLLAJSDP Palu, khususnya dukungan personil (sifat bantuan sementara) mengisi kekosongan staf pendukung dilingkungan Satuan Kerja BLLAJSDP Palu.

#### 1. Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang Administrasi dilingkungan BLLAJSDP Palu, adalah kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

##### a. Urusan Umum

Ditinjau dari kegiatan administrasi perkantoran berupa surat yang dikeluarkan dan surat yang masuk selama periode Tahun Anggaran 2013, terhitung mulai bulan Januari s/d akhir bulan Desember 2013, sebanyak 207 lalu lintas surat menyurat di lingkungan Kantor Balai LLAJSDP Palu dengan rincian data sebagai berikut :

- Peraturan SK Yang Telah Diterbitkan Sebanyak 7 SK
- Jumlah Surat Masuk Tercatat Sebanyak 207 Surat
- Jumlah Surat Keluar Tercatat Sebanyak 290 Surat
- Rapat Koordinasi Yang Telah Dilakukan Sebanyak 4 Kali Pertemuan.
- Koordinasi langsung dengan beberapa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dilaksanakan pada saat melakukan kunjungan dinas sosialisasi.

##### b. Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga Kantor Balai telah dilaksanakan dengan baik, sesuai kemampuan yang ada dioptimalkan, termasuk pengawasan barang-barang Inventaris Kantor. Namun dalam pengelolaannya, masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sebagian besar dipengaruhi oleh kekurangan pegawai.

## 2. Bidang Kepegawaian

Pada tahun 2013, jumlah Pegawai dilingkungan Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu (BLLAJSDP Palu) sebanyak 14 orang terdiri dari 11 (sebelas) orang PNS, dan pegawai honorer sebanyak 7 (tujuh) orang yang meliputi 3 (tiga) Orang tenaga personil yang Job Training (Magang) dari lulusan STTD Bekasi dan 1 (satu) Orang Lulusan STMIK Bina Mulia Palu dan Petugas Keamanan Kantor (security) sebanyak 2 orang dan Petugas Kebersihan sebanyak 2 (dua) orang.

Untuk pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Kerja Anggaran Tahun 2013, Balai LLAJSDP Palu dibantu pegawai dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan pegawai tersebut untuk kegiatan dalam Satuan Kerja Balai, Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang, dan Tim Teknis yang melibatkan Pejabat dan staf serta masuk dalam Tim monitoring/sosialisasi wilayah kerja Balai.

## 3. Bidang Keuangan

Pada tahun anggaran 2013, Balai LLAJSDP Palu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 7.439.335.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) Rupiah dengan rincian belanja barang sebesar Rp 4.218.085.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan belanja modal sebesar Rp 3.221.250.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah. Realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 5.890.915.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu) Rupiah.

Rincian pagu dan realisasi masing-masing jenis belanja sebagaimana table berikut :

**Tabel V.8. Rincian Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja**

MAK	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI
521211	Belanja Bahan	74.661.000	49.879.500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	360.000.000	134.471.500
522141	Belanja Sewa	180.000.000	101.876.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	2.970.518.000	2.135.290.000
536111	Belanja Modal Lainnya	3.000.000.000	2.918.310.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	10.500.000	10.398.000
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	100.620.000	100.620.000
521213	Honor Output Kegiatan	29.600.000	21.960.000

521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	249.040.000	59.103.500
522111	Belanja Langganan Listrik	36.000.000	18.473.000
522112	Belanja Langganan Telepon	24.000.000	12.583.000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.000.000	6.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi	84.000.000	84.000.000
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000	14.250.000
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan peralatan dan Mesin	78.146.000	36.707.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.250.000	186.993.500
<b>JUMLAH</b>		<b>7.439.335.000</b>	<b>5.890.915.000</b>

Sumber : BLLAJSDP Palu, Tahun 2013.

- **Program Kerja BLLAJSDP Tahun 2013**

Kegiatan dan Rencana Kerja BLLAJSDP Palu, sampai akhir Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Konsolidasi Internal dilingkungan BLLAJSDP Palu;
- Melaksanakan Rapat Konsolidasi Internal dilingkungan Satuan Kerja di wilayah kerja BLLAJSDP Palu;
- Menyusun Program Kerja BLLAJSDP Palu, baik Jangka Pendek, Jangka Menengah maupun Jangka Panjang;
- Melakukan Konsolidasi dan Koordinasi Program Kerja dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat);
- Melakukan Kunjungan Kerja, Konsolidasi, Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pemantapan Program Kerja Kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk Pengenalan Wilayah Kerja, Penyampaian Keberadaan dan TUPOKSI BLLAJSDP Palu;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Kelembagaan dengan Jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Kabupaten/Kota se wilayah kerja;

#### 4. Bidang Pembangunan

Pada tahun 2013 kegiatan pembangunan di Balai LLAJSDP Palu belum bersifat pembangunan infrastruktur hanya bersifat pembangunan minor untuk perlengkapan Kantor Balai LLAJSDP yang meliputi :

- Pengadaan AC Split untuk menunjang kegiatan kantor;
- Pengadaan peralatan dan mesin penunjang kegiatan kantor;
- Pengadaan meubelair kantor.

Kegiatan pembangunan infrastruktur di wilayah kerja Balai LLAJSDP Palu masih dilaksanakan melalui satuan kerja pengembangan LLAJ dan LLASDP yang melekat pada Dinas Perhubungan Provinsi.

##### a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Balai LLAJSDP Palu, antara lain :

- Permasalahan Kantor

Kondisi kantor saat ini yang masih berstatus sewa dengan bentuk rumah tinggal dengan kondisi tegangan listrik yang tidak stabil (naik turun) sehingga memperlambat pelaksanaan pekerjaan karena komputer sering mati.

- Peralatan Kerja yang masih minim

Ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional, saat ini di UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, khusus pada Kantor Balai LLAJSDP Palu, baru memiliki 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 4 (R4) sebanyak 2 (dua) unit dan Kendaraan Roda 2 (R-2) sebanyak 2 unit, yang dipergunakan sebagai kendaraan dinas untuk keperluan dinas operasional. Kendaraan dinas operasional ini, kurang layak untuk dipergunakan pada lokasi yang berada di pelosok dengan kondisi jalan yang menanjak dan berlumpur. Dibutuhkan kendaraan roda 4 dengan penggerak roda 4x4. Selain itu belum adanya peralatan kalibrasi alat pengujian kendaraan beremotor dan peralatan survai.

- Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2013, pegawai negeri sipil definitive masih kurang sehingga mempengaruhi lambatnya proses pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala Balai dan pejabat structural lainnya. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan jumlah personil yang cukup besar dan harus memiliki kualifikasi tertentu belum dapat dilaksanakan oleh pegawai Balai LLAJSDP Palu. Beberapa kualifikasi pegawai yang dibutuhkan adalah :

- Tenaga Personil sebagai Pengelola Kepegawaian
- Tenaga Personil sebagai Petugas SIMAK BMN
- Tenaga Personil sebagai Petugas Humas
- Tenaga Personil sebagai Teknisi
- Tenaga Personil sebagai Operator Radio Telekomunikasi
- Tenaga Personil sebagai Penyusun Bahan Pembangunan Prasarana LLAJ dan LLASDP
- Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A
- Tenaga Personil sebagai Penyusun Bahan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas (di jalan Nasional)
- Tenaga Personil sebagai Pengevaluasi Analisis Dampak Lalu lintas

- Tenaga Personil sebagai Pelaksanaan Kebutuhan Lalu Lintas, Penyiapan Bahan Pelaksanaan Perbaikan Lokasi Potensi Kecelakaan dan Kemacetan Lalu Lintas (di Jalan Nasional),
- Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor
- Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)
- Tenaga Personil sebagai Pengkaji Integrasi Jaringan dan Pelayanan LLAJSDP
- Tenaga Personil sebagai Penyusun Bahan Pembangunan Sarana LLAJSDP
- Tenaga Personil sebagai Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Tenaga Personil sebagai Penyiapan bahan Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang (AKAP, Pariwisata)
- Tenaga Personil sebagai Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan B3
- Tenaga Personil sebagai Pengawas Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- Tenaga Personil sebagai Pengawas Keselamatan Sarana Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)
- Tenaga Personil sebagai Petugas Monitoring Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- Tenaga Personil sebagai Penyidik Pelanggaran Bidang LLAJ
- Tenaga Personil sebagai Petugas Bimbingan Keselamatan LLAJ
- Tenaga Personil sebagai Petugas Bimbingan Keselamatan LLASDP
- Tenaga PPNS

b. Upaya Yang Dilakukan

Untuk mengatasi permasalahan di lingkungan Balai LLAJSDP Palu, upaya yang dilakukan antara lain :

- Belum memiliki kantor tetap

Dalam melaksanakan kegiatan kerja Organisasi Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sungai Danau Dan Penyeberangan (BLLAJSDP) Palu, belum di dukung dengan ketersediaan atau belum memiliki Kantor menetap. Status Kepemilikan Kantor BLLAJSDP Palu saat ini masih status Kontrak Sewa setiap tahun anggaran.

- Peralatan kerja yang masih minim

Mengusulkan pada kegiatan Tahun Anggaran 2014 untuk pengadaan Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dengan penggerak roda 4x4, peralatan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor dan peralatan survai.

- Sumber Daya Manusia

Melakukan pendekatan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat memberikan tenaga sementara yang bekerja paralel dalam kegiatan operasional dan panitia pengadaan. Melakukan sosialisasi keberadaan Balai LLAJSDP Palu pada wilayah kerja dan memberikan informasi bahwa Balai membutuhkan staf dengan kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.

- Memberikan informasi kepada Dinas Perhubungan di wilayah kerja mengenai kebutuhan SDM, apabila ada yang berkeinginan mutasi ke Balai LLAJSDP Palu.

#### **D. BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN (BLLAJSDP) PALANGKARAYA**

##### **1. Umum**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai LLAJSDP, Balai LLAJSDP Palangka Raya mempunyai visi “Terwujudnya pelayanan transportasi darat di Pulau Kalimantan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah” dan visi tersebut diturunkan kedalam misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sistem pelayanan transportasi darat yang selamat, aman dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah Pulau Kalimantan;
- b. Melaksanakan konsolidasi melalui koordinasi kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perhubungan darat;
- c. Meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi darat melalui revitalisasi peran dan fungsi sungai-sungai di Pulau Kalimantan sebagai prasarana angkutan barang;
- d. Menggali potensi dan kekhasan transportasi darat di Pulau Kalimantan guna mendukung pembangunan dan pengembangan sektor ekonomi, pariwisata, dan sektor lainnya.

Secara umum, pelaksanaan tugas Balai LLAJSDP Palangka Raya sepanjang tahun 2013 adalah melanjutkan dan menuntaskan kegiatan pengenalan wilayah kerja se-Kalimantan (5 Propinsi dan 55 Kabupaten / Kota), sosialisasi keberadaan Balai LLAJSDP dan koordinasi kelembagaan dengan Pejabat / instansi terkait, fasilitasi bimbingan teknis, serta monitoring dan pengawasan prasarana dan sarana LLAJ, dan keselamatan transportasi darat. Untuk monitoring dan pengawasan bidang prasarana dan sarana LLASDP, karena keterbatasan

personil, pelaksanaannya akan difokuskan pada tahun 2014. Dengan mengoptimalkan sumber daya dan personil yang ada, penyerapan anggaran untuk tahun anggaran 2013 mencapai 94,60%.

## 2. Kegiatan-kegiatan Strategis

Kegiatan-kegiatan strategis yang dilaksanakan Balai LLAJSDP Palangka Raya sepanjang tahun 2013 meliputi :

- a. Melakukan konsolidasi dengan jajaran Dinas Perhubungan Propinsi / Kabupaten / Kota melalui penyelenggaraan rapat-rapat teknis substansi setiap bulan dan Rapat Koordinasi Regional Perhubungan Darat se-Kalimantan, serta koordinasi dengan Pejabat / Instansi terkait;
- b. Melakukan pengenalan wilayah kerja melalui kegiatan monitoring dan pengawasan prasarana LLAJSDP, sarana LLAJSDP, dan keselamatan transportasi darat guna menginventarisasi dan mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana LLAJ dan LLASDP sebagai langkah awal mewujudkan sistem pelayanan transportasi darat yang selamat, aman dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah Pulau Kalimantan;
- c. Melakukan fasilitasi bimbingan teknis Pusat kepada Daerah sebagai bagian dari upaya dan tahapan meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi darat dan kompetensi sumber daya manusia bidang perhubungan darat;
- d. Melakukan kajian untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan berupa perlengkapan jalan pada jalan nasional di Kalimantan melalui studi SID Perlengkapan Jalan.

## 3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi darat di Kalimantan berdasarkan kegiatan-kegiatan strategis dilakukan tersebut diatas, yaitu:

- a. Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - Ditinjau dari aspek prasarana gedung, berdasarkan hasil monitoring dari 55 Kabupaten / Kota di pulau Kalimantan yang memiliki prasarana gedung pengujian sebanyak 44 Kabupaten / Kota (80,00%).
  - Ditinjau dari aspek fasilitas peralatan pengujian dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, diketahui bahwa dari 55 Kabupaten / Kota yang dilengkapi peralatan uji yang memadai (alat uji >70%) hanya sebanyak 12 Kabupaten / Kota (21,82%), sementara 6 Kabupaten / Kota (10,91%) peralatan ujinya kurang memadai /

lengkap (alat uji 50%-70%), dan 37 Kabupaten / Kota (67,27%) peralatan ujinya tidak memadai / lengkap (alat uji <50%).

- Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, diketahui bahwa di pulau Kalimantan jumlah tenaga pengujian secara keseluruhan berjumlah 190 orang PNS yang melakukan uji berkala terhadap 212.322 kendaraan bermotor wajib uji (KBWU). Dari 190 orang pengujian tersebut yang telah mendapatkan Surat Keputusan Kompetensi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 152 orang, terdiri dari jenjang Penyelia 19 orang, Pelaksana Lanjutan 30 orang, Pelaksana 66 orang, dan Pelaksana Pemula 37 orang.
  - Ditinjau dari aspek fasilitas peralatan pengujian dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, diketahui bahwa dari 55 Kabupaten / Kota yang dilengkapi peralatan uji yang memadai (alat uji >70%) hanya sebanyak 12 Kabupaten / Kota (21,82%), sementara 6 Kabupaten / Kota (10,91%) peralatan ujinya kurang memadai / lengkap (alat uji 50%-70%), dan 37 Kabupaten / Kota (67,27%) peralatan ujinya tidak memadai / lengkap (alat uji <50%).
  - Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, diketahui bahwa di pulau Kalimantan jumlah tenaga pengujian secara keseluruhan berjumlah 190 orang PNS yang melakukan uji berkala terhadap 212.322 kendaraan bermotor wajib uji (KBWU). Dari 190 orang pengujian tersebut yang telah mendapatkan Surat Keputusan Kompetensi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 152 orang, terdiri dari jenjang Penyelia 19 orang, Pelaksana Lanjutan 30 orang, Pelaksana 66 orang, dan Pelaksana Pemula 37 orang.
- b. Terminal Penumpang Tipe A (AKAP).
- Terminal Sei Ambawang di Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, memerlukan dukungan angkutan bus shuttle untuk melayani penumpang dari/ke kota Pontianak ke/dari Terminal Sei Ambawang;
  - Terminal W.A. Gara Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, memerlukan dukungan angkutan bus shuttle untuk melayani penumpang dari/ke dalam kota Palangka Raya ke/dari Terminal W.A. Gara;
  - Terminal Km.17 Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, memerlukan koordinasi yang lebih mantap dengan Pemerintah Kota Banjarmasin mengingat jarak dengan Terminal Induk Km.6 hanya terpaut 11 km.

- Terminal Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas (Propinsi Kalimantan Tengah) dan Terminal Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala (Propinsi Kalimantan Selatan) hampir tidak ada aktifitas bus dan penumpang yang masuk atau memanfaatkan terminal-terminal tersebut.
- c. Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang).
- Sebagian besar kondisi gedung dan peralatan yang dibangun sudah tidak memadai guna mengawasi kendaraan dan muatan barangnya, terlebih untuk truk-truk barang dengan kapasitas dan muatan > 40 ton dan tinggi muatan melebihi batas plafon jembatan timbang (model lama);
  - Lokasi Jembatan Timbang yang ada perlu dievaluasi terkait perubahan pola pergerakan angkutan barang akibat bertumbuhnya jaringan jalan dan daerah-daerah produksi baru, sehingga keberadaan beberapa Jembatan Timbang tidak cukup efektif lagi untuk mengawasi kendaraan dan muatan barangnya, sehingga ada wacana dari beberapa daerah untuk membangun jembatan timbang pada jalan propinsi dan/atau jalan kabupaten;
  - SDM yang melaksanakan tugas penimbangan kendaraan bermotor masih kurang memadai, baik jumlah maupun kompetensinya;
  - Terbatasnya dukungan anggaran operasional dan pemeliharaan dari APBD Propinsi;
  - Ketentuan yang mewajibkan penurunan kelebihan muatan oleh pengemudi angkutan barang jika ditemukan pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima prosen) dari daya angkut yang ditetapkan dalam buku uji, sulit dilaksanakan karena berbagai kendala seperti : pengemudi tidak bersedia menurunkan, tempat penumpukan tidak tersedia, peralatan bongkar-muat tidak ada, dan adanya keberatan dari aparat petugas lainnya.
- d. Inventarisasi dan pemetaan kondisi dan permasalahan bidang LLASDP belum dapat disajikan mengingat keterbatasan jumlah personil.

#### 4. Upaya Pemecahan

Upaya pemecahan permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi darat di Kalimantan sebagaimana disampaikan diatas dilakukan dengan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Penetapan target waktu tuntas.
- Mengacu kepada Pasal 185 PP. Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, maka pada tahun 2017 seluruh unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor harus

sudah memiliki prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian, serta tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor.

- Penataan kelembagaan.

Agar Subdit Sarana Angkutan Jalan pada Direktorat LLAJ Ditjen Perhubungan Darat fokus pada tugas pembinaan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengujian kendaraan bermotor, maka kami usulkan pembentukan Unit Layanan Perijinan / Sertifikasi pada Direktorat LLAJ.

- Penataan peraturan.

Penataan peraturan dimaksud disini kami usulkan :

- percepatan revisi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor, dengan memisahkan konsep kompetensi dan konsep jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- perumusan dan penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang "clustering" atau penggabungan beberapa unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor untuk Kabupaten / Kota yang peralatan ujiannya tidak memadai dan atau tidak lengkap (alat uji <50%) sebagai tahapan "transisi" menuju terpenuhinya peralatan uji secara lengkap sesuai ketentuan.

- Penyiapan SDM.

Untuk melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor pada 55 Kabupaten / Kota di Kalimantan saat ini dibutuhkan 255 penguji yang memiliki kompetensi, terdiri dari 75 penguji Pelaksana Pemula, 70 penguji Pelaksana, 55 penguji Pelaksana Lanjutan, dan 55 penguji Penyelia.

- Penyiapan peralatan pengujian.

Mengacu kepada PP. Nomor 38 Tahun 2007 dan PP. Nomor 55 Tahun 2012, maka Pemerintah Kabupaten / Kota wajib melengkapi prasarana, sarana, dan SDM pengujian kendaraan bermotor agar sesuai ketentuan dan beban kerja. Namun demikian, jika kemampuan APBD Daerah terbatas kiranya penyiapan peralatan pengujian dapat dibantu melalui APBN karena berkaitan dengan aspek pelayanan dan aspek keselamatan di jalan.

- Hal lain.

Terdapat hal-hal diluar kewenangan institusi Perhubungan tetapi mempengaruhi kinerja uji berkala kendaraan bermotor, seperti : pelanggaran dimensi (panjang, lebar), numpang uji, dan uji berkala pertama kali untuk mobil barang yang dibeli dari Pulau Jawa tetapi dioperasikan di Kalimantan dan tidak dibalik nama. Terhadap hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Pusat dapat mengkoordinasikan dan mendorong penyelesaian permasalahannya melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional.

b. Terminal Penumpang Tipe A (AKAP).

- Peran aktif Pusat masih sangat diharapkan dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A di Kalimantan, dan agar tidak berhenti pada tahap penetapan NSPK dan sosialisasi. Upaya bimbingan teknis penyelenggaraan terminal penumpang yang sudah dilaksanakan Pusat, agar ditingkatkan kuantitasnya supaya lebih banyak Kabupaten/Kota yang mengikuti.
- Daerah, khususnya Dishubkominfo Kabupaten/Kota, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pada terminal-terminal penumpang yang ada di wilayah kerjanya masing-masing melalui peningkatan prasarana / fasilitas terminal, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lapangan secara kontinyu, serta peningkatan kompetensi SDM penyelenggara terminal.
- Dishubkominfo Kabupaten/Kota perlu mempersiapkan pembangunan Sistim Informasi Penyelenggaraan Terminal Penumpang, sebagai langkah awal dapat mengaktifkan kembali Laporan Bulanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A kepada Ditjen Perhubungan Darat.
- Untuk meningkatkan penyelenggaraan terminal penumpang menuju kondisi yang diamanatkan dalam UU No.22 Tahun 2009, kami menyarankan dilakukan :
  - Review simpul jaringan transportasi jalan untuk Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1361/AJ.106/DRJD/2003, khususnya untuk wilayah Kalimantan;
  - Studi penyusunan Pedoman Pengelolaan Terminal Penumpang, agar nantinya setiap terminal sesuai dengan klasifikasi dan tipenya dapat menghidupi dirinya sendiri;
  - Survei Load Factor Angkutan AKAP di Kalimantan, untuk mengetahui kondisi permintaan penumpang saat ini, mengidentifikasi permasalahan yang

mempengaruhi kinerja angkutan AKAP serta merumuskan konsep kebijakan untuk penyelesaiannya dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan angkutan AKAP.

- c. Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang).
  - Para Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) perlu memperkuat pelaporan pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor ke Pusat dengan tembusan ke Balai LLAJSDP Palangka Raya, dilengkapi data dan kondisi tentang fasilitas utama dan penunjang, peralatan utama dan penunjang, SDM, serta foto kondisi UPPKB.
  - Pusat (Ditjen Hubdat) perlu membuat Masterplan Penimbangan Kendaraan Bermotor, agar pengawasan angkutan barang di jalan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif, serta menjawab keinginan Daerah untuk membangun jembatan timbang pada jalan propinsi dan/atau jalan kabupaten.
  - Pusat (Ditjen Hubdat) masih sangat diharapkan perannya dalam penyelenggaraan UPPKB, khususnya terkait pembinaan, pengawasan (monitoring dan evaluasi), pembangunan (baru atau rehabilitasi), serta peningkatan kompetensi SDM penimbangan kendaraan bermotor.
- d. Monitoring dan pengawasan bidang LLASDP untuk tahun 2014 perlu didukung dengan kekuatan atau penambahan SDM yang berkompetensi pada Balai LLAJSDP serta penganggaran yang cukup.

## **E. KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN (K-OPP) MERAK**

### **1. Informasi Umum OPP Merak**

Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat, berlokasi di pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak merupakan mandat dari Peraturan Perundang-undangan, adapun dasar hukum yang melandasinya, adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan;

d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : PM.85 Tahun 2011, pasal 16 ayat 1 butir (c) dan ayat 2 menyatakan bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak berlokasi di Provinsi Banten dan memiliki 5 (lima) wilayah kerja, yaitu :

- a. Pelabuhan Penyeberangan Merak;
- b. Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni;
- c. Pelabuhan Penyeberangan Muntok;
- d. Pelabuhan Penyeberangan Telaga Pungkur;
- e. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban;

Wilayah Kerja Kantor OPP Merak tersebut berada dalam 3 (tiga) lintasan Penyeberangan, yaitu :

- a. Lintasan Penyeberangan Merak - Bakauheni :
  - 1) Pelabuhan Merak; dan
  - 2) Pelabuhan Bakauheni.
- b. Lintasan Penyeberangan Palembang - Muntok :
  - 1) Pelabuhan Muntok
- c. Lintasan Penyeberangan Telaga Pungkur – Tanjung Uban :
  - 1) Pelabuhan Telaga Pungkur; dan
  - 2) Pelabuhan Tanjung Uban.
  - 3) Susunan Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak terdiri atas :
  - 4) Subbagian Tata Usaha;
  - 5) Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
  - 6) Seksi Operasi; dan
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Tugas Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan**

Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang di usahakan secara komersial.

## **3. Fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan juga mempunyai fungsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan desain analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
- b. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan Jaringan Jalan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan serta penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan;
- c. Penyusunan rencana induk, Daerah lingkungan kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
- d. Pelaksana pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam penjaminan ketertiban, keamanan dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di Pelabuhan penyeberangan serta keselamatan penyeberangan;
- g. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
- h. Pelaksanaan, penjaminan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di pelabuhan penyeberangan;
- i. Pelaksanaan penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan;
- j. Pelaksanaan pengawasan bongkar muat kendaraan dan naik turun penumpang serta jadwal docking kapal penyeberangan; dan
- k. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

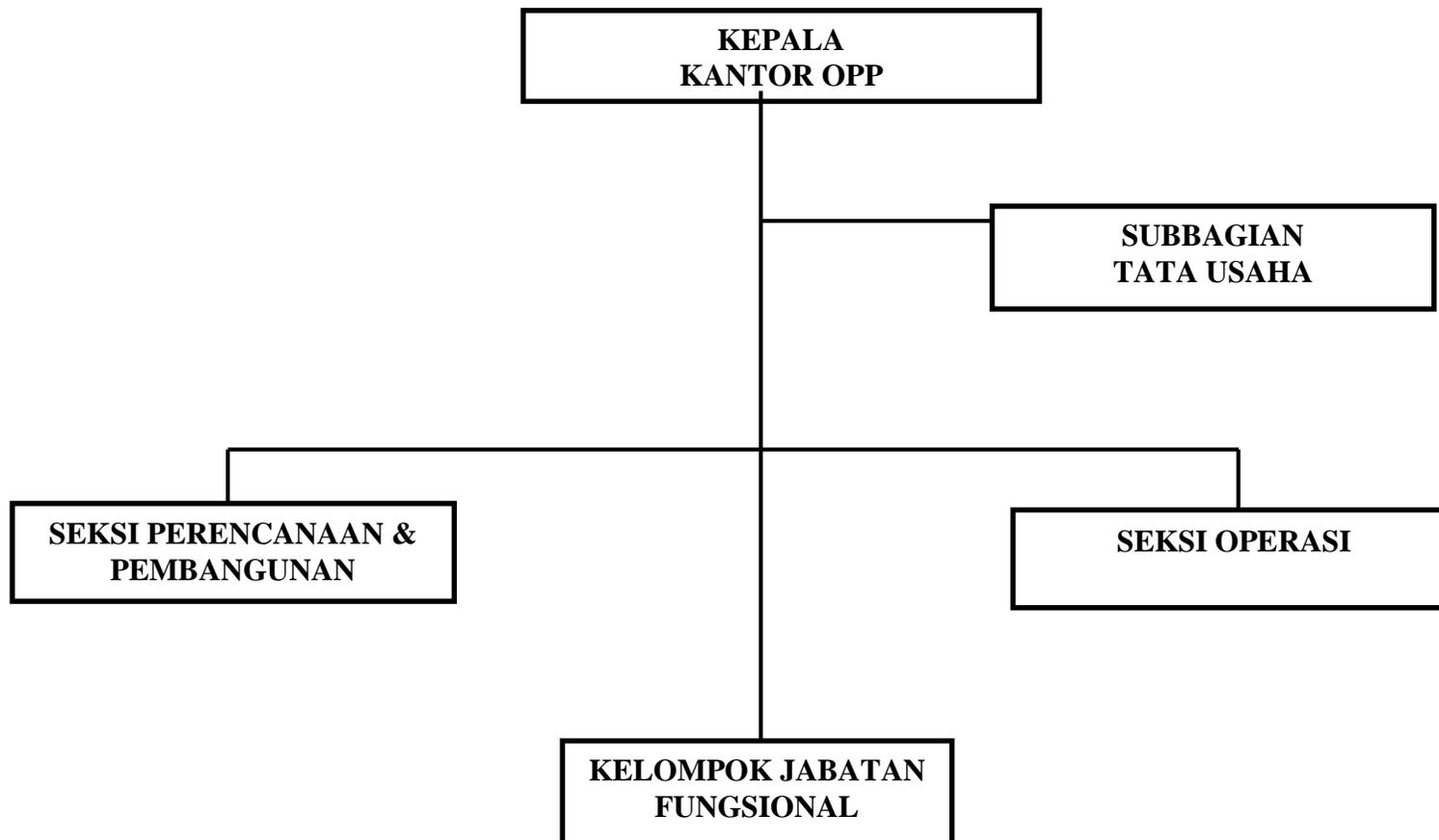
Pada saat ini personil Kantor OPP Merak memiliki 13 (tiga belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor : 1 orang
- b. Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang Kepala Seksi, dan  
1 (satu) orang staf fungsional
- c. Sub Bagian Perencanaan : 1 (satu) orang Kepala Seksi, dan

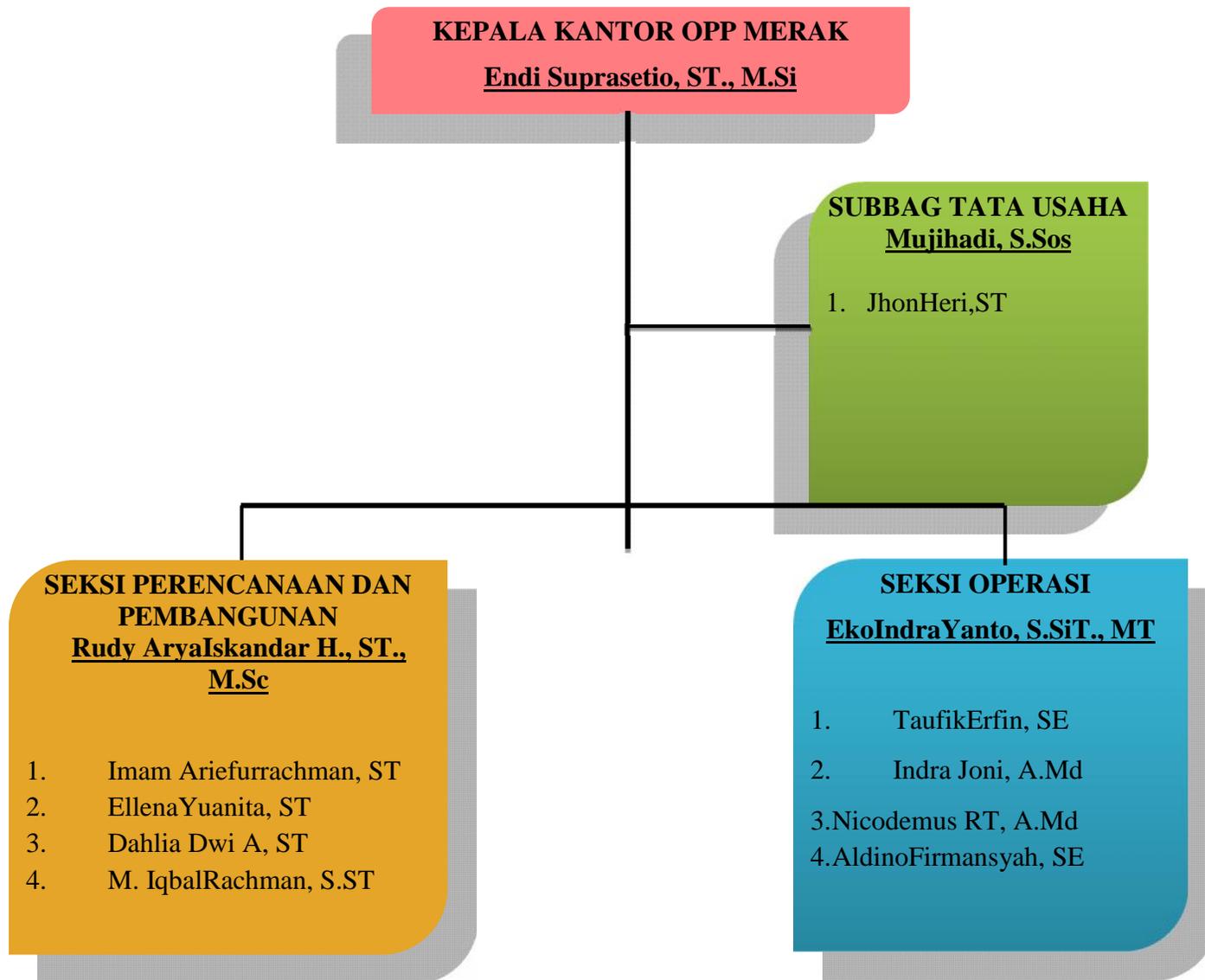
- dan Pembangunan  
d. Sub Bagian Operasi : 4 (empat) orang staf fungsional  
: 1 (satu) orang Kepala Seksi, dan  
4 (empat) orang staf fungsional

Dalam melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan peraturan yang berlaku, Kepala Kantor, para Pejabat Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan. Adapun struktur organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak terdapat pada Gambar V.3 dan Gambar V.4 Berikut ini.

**Gambar V.3. Susunan Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan  
( Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 85 Tahun 2011)**



Gambar V.4 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak



Selain Pegawai Negeri Sipil, Kantor OPP Merak menggunakan tenaga perbantuan dan tenaga pramubakti serta petugas keamanan sebanyak 26 (dua puluh enam orang) agar dapat memaksimalkan Tupoksi yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### I. Penyerapan Anggaran Tahun 2013

Kegiatan Tahun 2013, Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak dibiayai oleh Dana DIPA Satker Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak Nomor DIPA-022.03.2.606500/2013 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp. 9.999.307.000,-, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2013. Dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut:

Belanja Barang	: Rp. 5.527.000.000,-
Belanja Modal	: Rp. 4.472.307.000,-
	Rp. 9.999.307.000,-

Realisasi Penyerapan anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 5.928.762.025,- atau sebesar 59,29%.

**Tabel. V.9 Rekapitulasi Daya Serap Anggaran Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak Tahun 2013**

No	Jenis Belanja	Pagu Dana	Bobot (%)	Realisasi			Sisa Dana	Keterangan
				KEUANGAN		FISIK		
				Rp	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	-	-	
2	BELANJA BARANG	5.527.000.000	0.96	1.705.785.775	17.06	79.00	3.821.214.225	(**)
3	BELANJA MODAL	4.472.307.000	99.00	4.222.976.250	42.23	100.00	249.330.750	
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.999.307.000</b>	<b>100</b>	<b>5.928.762.025</b>	<b>59.29</b>		<b>4.070.544.975</b>	

(\*\*) Jumlah dana yang diblokir pada pagu Belanja Barang TA.2013 sebesar 3.771.680,- yang merupakan dana kegiatan Operasional Tugboat sehingga tidak terserap s.d berakhirnya TA.2013 yang disebabkan pelaksanaan kegiatan tersebut belum memiliki dasar hukum.

**Tabel V.10. Realisasi Anggaran Tahun 2013**

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keuangan
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	5.527.000.000	1.705.785.775	30,86%
Belanja Modal	4.472.307.000	4.222.976.250	94,43%
<b>Total Anggaran</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Persentase</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Hasil Rekap E-monitoring

Sumber Pendanaan	Pagu	Realisasi	% Keu
RM+ RMP	9.999.307.000	5.928.762.025	59,29%
PNBP	-	-	-
PHLN	-	-	-
<b>Total Anggaran</b>	<b>9.999.307.000</b>	<b>5.928.762.025</b>	<b>59,29%</b>

Sumber : Hasil Rekap E-monitoring

#### 4. Kegiatan Angkutan Penyeberangan

Data Prasarana Pelabuhan di Wilayah Kerja Kantor OPP Merak terdiri dari :

##### a. Pelabuhan Penyeberangan Merak

Pelabuhan Penyeberangan Merak merupakan pelabuhan penyeberangan komersil yang memiliki volume yang padat. Pelabuhan tersebut melayani lintas penyeberangan Merak –

**Bakauheni. Adapun rincian Data Fasilitas Pelabuhan Merak adalah sebagai berikut :**

##### 1) Dermaga Pelabuhan

Pelabuhan Penyeberangan Merak memiliki 5 Dermaga Movable Bridge dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Tabel V.11.

Fasilitas Dermaga Pelabuhan Merak

No	Uraian	Satuan	Dermaga				
			I	II	III	IV	V
1	Panjang	M	120	120	150	90	125
2	Lebar	M	80	80	20	20	20
3	Kedalaman Kolam	m	5,5	6,5	6,5	6,5	10
4	Breasting Dolpin	Unit	10	2	10	5	5
5	Frontal Frame	Unit	11	6	11	5	7
6	Call Fender	Unit	35	19	40	-	14
7	Morring Dolphin	Unit	-	-	-	-	4
8	Kapasitas Dermaga	GRT	5000	6000	12000	6000	12000
9	Movable Bridge (P)	M	17,80	17,80	17,82	17,82	17,82
10	Movable Bridge (L)	M	7,8	7,8	7,9	10,5	10,5
11	Side Ramp						
	Panjang	M	16	17	21	-	-
	Lebar	M	2,80	2,8	3,5	-	3,50
	Kapasitas	Ton	20	20	20	-	-
12	Kapasitas Angkut	Ton	50	50	60	50	65

Sumber : Hasil Survey

##### 2) Fasilitas Gedung Pelabuhan

Selain kelima Dermaga yang dimiliki saat ini, Pelabuhan Merak juga mempunyai beberapa Bangunan Gedung sebagai berikut:

**Tabel V.12.**  
**Fasilitas Bangunan Gedung di Pelabuhan Merak Tahun 2013**

NO.	URAIAN	JUMLAH	LUAS
1	Gedung Terminal	1 Lantai	1.535.00 M <sup>2</sup>
2	Gedung Loket	1 Lantai	770.00 M <sup>2</sup>
3	Gedung Ruang Tunggu	2 Lantai	1.760.00 M <sup>2</sup>
4	Ruang Tunggu Kpl. Cepat	1 Unit	264.00 M <sup>2</sup>
5	Gedung Waiting Lounge	3 Lantai	512.00 M <sup>2</sup>
6	Gedung Kantor	2 Lantai	1.250.00 M <sup>2</sup>
7	Gedung Bundar STC	2 lantai	
8	Loket Tolgate Utama	8 Unit	14.50 M <sup>2</sup>
9	Rumah MB I, II & III	3 Unit	46.50 M <sup>2</sup>
10	Rumah Genset	2 Unit	99.00 M <sup>2</sup>
11	Rumah Reservoir	1 Unit	50.00 M <sup>2</sup>
12	Workshop	1 Unit	300.00 M <sup>2</sup>
13	Pos I & II	2 Unit	24.60 M <sup>2</sup>
14	Rumah Hydrant I,II,III & IV (Terminal)	2 Unit	22.00 M <sup>2</sup>
15	Rumah Jembatan Timbang	1 Unit	-
16	Koridor ABCDE	5 Unit	354.60 M <sup>2</sup>
17	Acces Brigde I, II & III	-	2851.00 M <sup>2</sup>
18	Rumah Mesin Side Ramp	2 Unit	32.00 M <sup>2</sup>
19	Toilet	9 Unit	32.00 M <sup>2</sup>

Sumber : Hasil Survey

b. Pelabuhan Penyeberangan Bakauheuni

Pelabuhan Penyeberangan Bakauheuni terletak di Provinsi Lampung, pelabuhan ini menghubungkan antara Pulau Jawa dan Sumatera sama halnya dengan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheuni memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Pelabuhan Penyeberangan Merak. Pelabuhan Penyeberangan Bakauheuni memiliki 5 Dermaga Movable Bridge dan 1 Dermaga Plensengan dengan Spesifikasi sebagai berikut :

**Tabel V.13.**  
**Fasilitas Dermaga Pelabuhan Bakauheuni Tahun 2013**

No	Uraian	Satuan	Dermaga				
			I	II	III	IV	V
1	Panjang	M	165	135	165	100	125
2	Lebar	M	25	20	25	20	20
3	Kedalaman Kolam	m	10-12	8-10	10-12	10-12	10
4	Breasting Dolpin	Unit	12	-	12	3	5

5	Call Fender	Unit	40	74	43	-	10
6	Frontal Frame	Unit	-	14	13	3	5
7	Moring Dolphin	Unit	-	12	-	-	-
8	Kapasitas Dermaga	GRT	5000	6000	12000	6000	12000
9	Movable Bridge (P)	M	16	16	16	16	17,82
10	Movable Bridge (L)	M	11,60	9	11	11	7,9
11	Side Ramp						
	Panjang	M	16	-	21	-	-
	Lebar	M	2,80	-	2,80	-	-
	Kapasitas	Ton	20		20	-	-
12	Kapasitas Angkut	Ton	45	30	60	60	60

Sumber : Hasil Survey

c. Pelabuhan Penyeberangan Muntok

Pelabuhan Penyeberangan Muntok terletak di Provinsi Bangka Belitung. Pelabuhan penyeberangan muntok memiliki dua lintasan potensial yaitu lintas Tanjung Kalian (Muntok) – Palembang yang menghubungkan Pulau Bangka dengan Palembang (Sumatera Selatan) dan Tanjung Kalian (Muntok) - Tg. Api-api yang menghubungkan Pulau Bangka dengan Banyuasin. Pelabuhan Muntok memiliki Dermaga Penyeberangan 1 (satu) unit MB dengan ukuran (64,5 x 70 m) dan 1 (satu) unit Dermaga Ponton dengan Spesifikasi sebagai berikut:

Tabel V.14.

Fasilitas Dermaga Pelabuhan Muntok

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	
1	Dermaga MB/Parabolik	1	Unit
2	Panjang Dermaga	432	M
3	Kapasitas Dermaga	500	Ton
4	Dermaga Ponton	-	M2
5	Dermaga Plengsengan	-	M2
6	Kedalaman Kolam Pelabuhan	25	M
7	Luas Kolam Pelabuhan	-	M2
8	Causeway	221	M2
9	Trestel	636	M2
10	Catwalk	-	m
11	Mooring Dolphin	3	Unit
12	Breasting Dolphin	3	Unit
13	Frantal Frame	6	Unit
14	Fender	6	Unit
15	Bollard	6	Unit
16	Breakwater	-	Unit
17	Rambu Suar(Beacon/tetap)	-	M2
18	Rambu Suar (Buoy/ Apung)	-	Unit
19	Jembatan timbang	-	Unit
20	Gedung Operasional/Administrasi	1	unit
21	Luas Kantor	-	M2
22	Access Bridge	-	M2
23	Gang Way	-	M2

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	
24	Luas Areal Pelabuhan	3.000	M2
25	Luas Areal Parkir & Jalan	3.124	M2
26	Instalasi Air	1	Unit
27	Instalasi Listrik	33	KV
28	Telephone	-	Unit
29	Pemadam Kebakaran/Hydran	18	Unit
30	Fasilitas Usaha Yg menunjang kegiatan Pelabuhan	-	Unit
31	Areal Pengembangan Pelabuhan	-	Unit
32	Koordinat Pelabuhan (Dijung Cousway dg. Fasilitas Darat)	-	M2

Sumber : Hasil Survey

d. Pelabuhan Penyeberangan Telaga Pungkur

Pelabuhan Penyeberangan Telaga Pungkur terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Pelabuhan penyeberangan Telaga Pungkur – Tanjung Uban merupakan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Bintan. Pelabuhan Telaga Pungkur memiliki 1 (satu) Dermaga Penyeberangan dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Tabel V.15.

Fasilitas Dermaga Pelabuhan Telaga Pungkur

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	
1	Dermaga MB/Parabolik	1	Unit
2	Panjang Dermaga	432	M
3	Kapasitas Dermaga	500	Ton
4	Dermaga Ponton	-	M2
5	Dermaga Plengsengan	-	M2
6	Kedalaman Kolam Pelabuhan	25	M
7	Luas Kolam Pelabuhan	-	M2
8	Causeway	221	M2
9	Trestel	636	M2
10	Catwalk	-	m
11	Mooring Dolphin	3	Unit
12	Breasting Dolphin	3	Unit
13	Frontal Frame	6	Unit
14	Fender	6	Unit
15	Bollard	6	Unit
16	Breakwater	-	Unit
17	Rambu Suar(Beacon/tetap)	-	M2
18	Rambu Suar (Buoy/ Apung)	-	Unit
19	Jembatan timbang	-	Unit
20	Gedung Operasional/Administrasi	1	unit
21	Luas Kantor	-	M2
22	Access Bridge	-	M2
23	Gang Way	-	M2
24	Luas Areal Pelabuhan	3.000	M2
25	Luas Areal Parkir & Jalan	3.124	M2
26	Instalasi Air	1	Unit

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	
27	Instalasi Listrik	33	KV
28	Telephone	-	Unit
29	Pemadam Kebakaran/Hydran	18	Unit
30	Fasilitas Usaha Yg menunjang kegiatan Pelabuhan	-	Unit
31	Areal Pengembangan Pelabuhan	-	Unit
32	Koordinat Pelabuhan (Dijung Cousway dg. Fasilitas Darat)	-	M2

Sumber : Hasil Survey

e. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Pelabuhan Penyeberangan Tj. Uban terletak di Kepulauan Riau tepatnya Pulau Bintan. Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan yang melayani lintas penyeberangan Tj. Uban – Telaga Pungur Lintas ini ditetapkan dalam KM 64 Tahun 1989, dengan jarak lintas Penyeberangan Telaga Pungur – Tj. Uban sejauh 10 mil. Pelabuhan Tanjung Uban memiliki 1 (satu) Dermaga Penyeberangan dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Tabel V.16.

Fasilitas Dermaga Pelabuhan Tanjung Uban

No.	SPESIFIKASI	SATUAN	
1	Dermaga MB/Parabolik	1	Unit
2	Panjang Dermaga	-	M
3	Kapasitas Dermaga	12	Ton
4	Dermaga Ponton	-	M2
5	Dermaga Plengsengan	-	M2
6	Kedalaman Kolam Pelabuhan	3,5	M
7	Luas Kolam Pelabuhan	-	M2
8	Causeway	2200	M2
9	Trestel	168	M2
10	Catwalk	-	m
11	Mooring Dolphin	3	Unit
12	Breasting Dolphin	7	Unit
13	Frontal Frame	-	Unit
14	Fender	-	Unit
15	Bollard	-	Unit
16	Breakwater	-	Unit
17	Rambu Suar(Beacon/tetap)	-	M2
18	Rambu Suar (Buoy/ Apung)	-	Unit
19	Jembatan timbang	-	Unit
20	Gedung Operasional/Administrasi	1	unit
21	Luas Kantor	-	M2
22	Access Bridge	-	M2
23	Gang Way	-	M2
24	Luas Areal Pelabuhan	3.549	M2
25	Luas Areal Parkir & Jalan	800	M2
26	Instalasi Air	1	Unit

No.	SPESIFIKASI	SATUAN	
27	Instalasi Listrik	33	KV
28	Telephone	1	Unit
29	Pemadam Kebakaran/Hydran	-	Unit
30	Fasilitas Usaha Yg menunjang kegiatan Pelabuhan Areal	1	Unit
31	Pengembangan Pelabuhan	-	Unit
32	Koordinat Pelabuhan (Diujung Cousway dg. Fasilitas Darat)	-	M2

Sumber : Hasil Survey

Data Sarana Penyeberangan Di Wilayah Kerja Kantor OPP Merak :

- 1) Data Sarana Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni :  
Pada saat ini jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Merak sebanyak 44 kapal **Merak – Bakauheni Tahun 2013**
- 2) Data Sarana Pelabuhan Penyeberangan Muntok  
Jumlah Kapal yang beroperasi di lintasan Palembang - Muntok saat ini yaitu 9 (sembilan) unit.
- 3) Data Sarana Pelabuhan Penyeberangan Telaga Pungkur dan Tanjung Uban  
Sampai dengan saat ini kapal yang beroperasi di Lintas Penyeberangan Telaga Pungkur – Tanjung Uban yaitu sebanyak 3 (tiga) unit.

## 5. Kegiatan Strategis

### Sub Bagian Tata Usaha

Kegiatan – Kegiatan Strategis Sub Bagian Tata Usaha Kantor OPP Merak yang sudah dilaksanakan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Rapat Teknis UPT Perhubungan Darat dengan tema Peran UPT Perhubungan Darat dalam menunjang kinerja Ditjen Perhubungan Darat.
- Rapat Staf mengenai Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai, kontrak kerja jabatan fungsional dan implementasi Kontrak Kerja dengan membuat buku Harian Kerja Pegawai.
- Jumlah Surat Masuk tercatat sampai dengan Desember 2013  
= 10.556 Surat
- Jumlah Surat Keluar tercatat sampai dengan Desember 2013  
= 6.840 Surat

### Seksi Perencanaan dan Pembangunan

Pada seksi Perencanaan dan Pembangunan Kantor OPP Merak yang sudah dilaksanakan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Studi Dan Kebijakan
  - 1) Penyusunan Analisa Jabatan OPP Merak
  - 2) Masterplan Pelabuhan Penyeberangan Muntok

- 3) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan di Wilayah Kerja OPP Merak Thp I
- b. Pengadaan Barang
  - 1) Pengadaan Alkom Thp I sebanyak 1 Paket
  - 2) Pengadaan dan Pemasangan VMS sebanyak 2 unit
  - 3) Pengadaan SIM Penjadwalan Kapal sebanyak 1 Paket
  - 4) Pengadaan Tracking System sebanyak 1 Paket
  - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran sebanyak 1 Paket

Selain 2 (dua) Kegiatan diatas diinformasikan pula bahwa terdapat Kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kerja Kantor OPP Merak namun dianggarkan dan dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Darat melalui Satker PTSDP. Adapun Kegiatan dimaksud adalah :

- a. Pembangunan GESR (Gang Way Elevated Site Ramp) Dermaga V Pelabuhan  
Penyeberangan Merak – Bakauheuni Tahap Akhir;
- b. Pembangunan Dermaga VI Merak – Bakauheuni Tahap II.

#### **Seksi Operasi**

Pada Seksi Operasi ada beberapa SK/Peraturan yang sudah diterbitkan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2013, guna mengoptimalkan kinerja kapal penyeberangan yang beroperasi di Lintas Penyeberangan Merak – Bakauheni. Berikut Tata Cara/Mekanisme yang telah diterbitkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak.

#### **6. Permasalahan Dan Upaya Pemecahan**

- ***Permasalahan yang Dihadapi***

Kantor OPP sudah berjalan dalam kurun waktu ± 2 Tahun sejak berdiri pada tanggal 01 Mei 2012, dan sampai dengan saat ini terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menunjang kegiatan operasional perkantoran, antara lain :

- a. Belum adanya Juklak dan Juknis Kantor OPP Merak sebagai implementasi atau pedoman pelaksanaan dari PM. 85 tahun 2011;
- b. Kurangnya SDM Pegawai Negeri Sipil yang memadai guna menunjang kelancaraan operasional perkantoran dan teknis di lapangan;
- c. Eksistensi Kantor OPP Merak yang masih kurang keberadaannya dikarenakan hal – hal berikut ini :
  - 1) Masih dominasinya peran PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) di setiap pelabuhan penyeberangan;
  - 2) Belum adanya lahan dan bangunan untuk dipergunakan bagi Kantor OPP Merak;

- 3) Sulitnya merekrut Pegawai Staff/PNS OPP di masing - masing pelabuhan penyeberangan yang mencakup wilayah kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak;
  - 4) Aset-aset Pelabuhan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat saat ini masih dimiliki oleh PT. ASDP, sehingga salah satu tugas dan fungsi Sie. Perencanaan dan Pembangunan belum dapat berjalan dengan optimal.
- d. Daya Serap anggaran pada tahun 2013 belum optimal dikarenakan Dana Operasional Tug Boat yang sudah dianggarkan tidak dapat direalisasikan, hal tersebut dikarenakan belum adanya payung hukum yang mengatur pelaksanaan pengoperasian kapal tug boat oleh Kantor OPP;
  - e. Masih diperlukannya penambahan sarana dan prasarana guna menunjang administrasi perkantoran dan teknis di lapangan.

- ***Upaya Pemecahan Permasalahan yang Dihadapi***

Dalam kurun waktu berjalan sampai dengan saat ini, operasional Kantor OPP Merak terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terkait hal tersebut Kantor OPP Merak perlu menyikapi upaya-upaya pemecahan masalah, antara lain :

- a. Perlu dilakukan pengusulan penyusunan Juklak dan Juknis Kantor OPP Merak sehingga memperjelas dalam menunjang kelancaran Operasional Perkantoran (sebagai bahan masukan Bagian Hukum Ditjen Hubdat);
- b. Pengusulan Penambahan SDM yang memadai ke Kantor Pusat untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran dan lapangan, khususnya untuk penempatan staff/PNS di masing – masing Pelabuhan Penyeberangan di bawah pengawasan Kantor OPP;
- c. Perlu adanya alokasi Anggaran untuk pengadaan lahan bagi Kantor OPP Merak guna terbentuknya Bangunan Kantor OPP Merak yang tetap (dipercepat) telah diusulkan secara bertahap mulai Tahun 2014, sehingga tahun 2015 Pengadaan Lahan selesai dilaksanakan;
- d. Perencanaan Tahun anggaran 2014 harus lebih terinci sehingga daya serap di tahun 2014 dapat dilakukan secara optimal dan untuk sekarang ini dalam hal pengoperasian Tug Boat TB.Merak yang diserahkan terimakan pada kantor OPP Merak dilakukan kerjasama dengan PT.ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni dalam bentuk MoU;
- e. Perlu adanya tindak lanjut mengenai payung hukum guna pelaksanaan operasional Tugboat yang sudah diserahkan kepada Kantor OPP Merak;
- f. Dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana penunjang di tahun anggaran berikutnya yang bertujuan memperlancar operasional perkantoran dan teknis di lapangan.

## **F. KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN (K-OPP) GILIMANUK**

### **1. UMUM**

#### **Informasi Umum OPP Gilimanuk**

Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat, berlokasi di pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk merupakan mandat dari Peraturan Perundang – undangan, adapun dasar hukum yang melandasinya, adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : PM.85 Tahun 2011, pasal 16 ayat 1 butir (c) dan ayat 2 menyatakan bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk berlokasi di Propinsi Bali dan memiliki 7 (tujuh) wilayah kerja, yaitu :

1. Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Provinsi Bali;
2. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Provinsi Jawa Timur;
3. Pelabuhan Penyeberangan Ujung, Provinsi Jawa Timur;
4. Pelabuhan Penyeberangan Kamal, Provinsi Jawa Timur;
5. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Serdang, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Pelabuhan Penyeberangan Batu Licin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Pelabuhan Penyeberangan Penajam, Provinsi Kalimantan ;

Wilayah Kerja Kantor OPP Gilimanuk tersebut berada dalam 4 (Empat) lintasan Penyeberangan, yaitu :

1. Lintasan Penyeberangan Ketapang - Gilimanuk :
  - a. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang; dan
  - b. Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.
2. Lintasan Penyeberangan Ujung - Kamal :

- a. Pelabuhan Penyeberangan Ujung;
- b. Pelabuhan Penyeberangan Kamal;
- 3. Lintasan Penyeberangan Tanjung Serdang – Batu Licin :
  - a. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Serdang ; dan
  - b. Pelabuhan Batu Licin.
- 4. Lintasan Penyeberangan Penajam – Kariangu :
  - a. Pelabuhan Penyeberangan Penajam.

Susunan Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
- c. Seksi Operasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Tugas Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan**

Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang di usahakan secara komersial.

#### **Fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan juga mempunyai fungsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja, program dan desain analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
2. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan Jaringan Jalan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan serta penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan;
3. Penyusunan rencana induk, Daerah lingkungan kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;

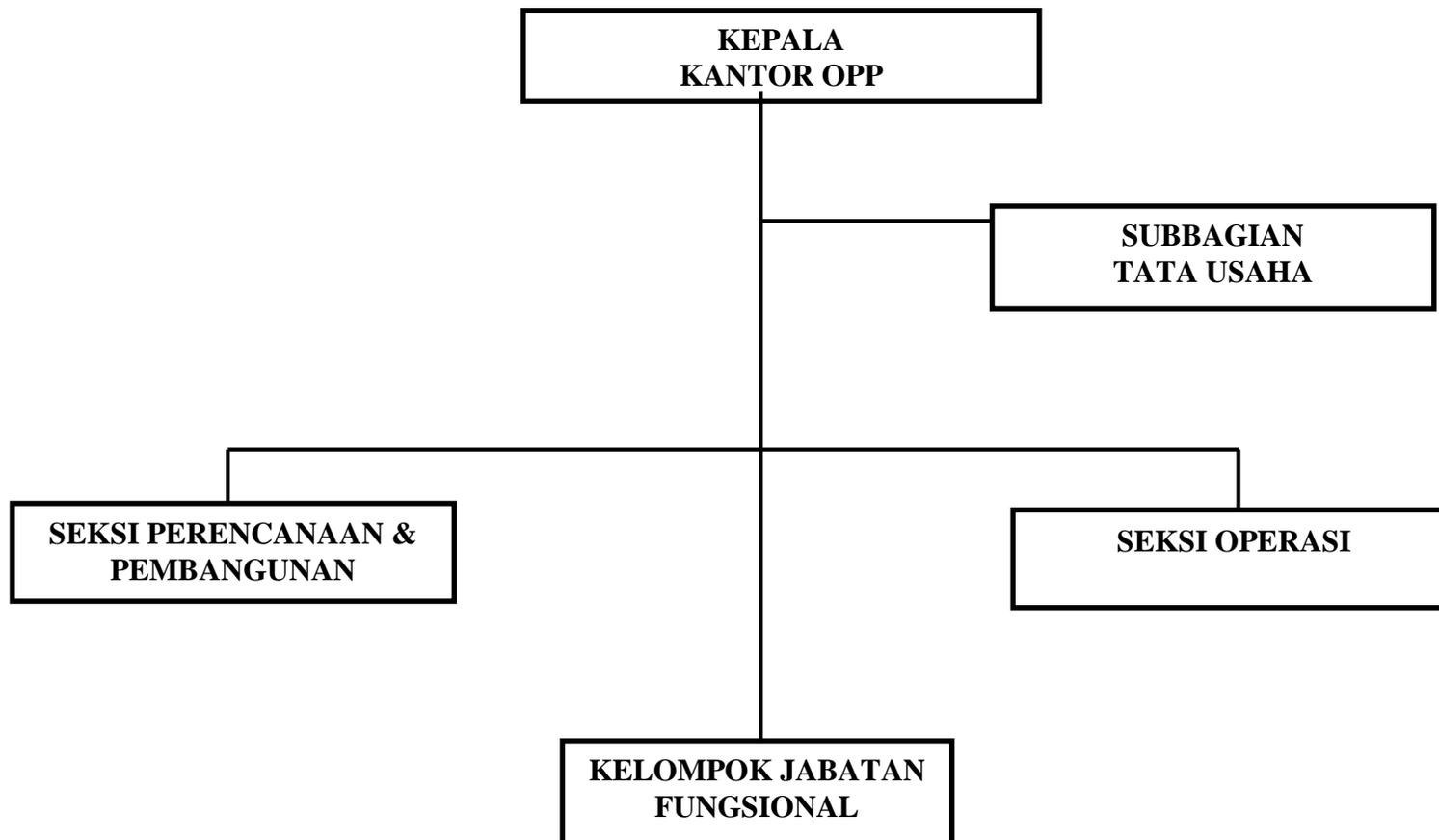
4. Pelaksana pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam penjaminan ketertiban, keamanan dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di Pelabuhan penyeberangan serta keselamatan penyeberangan;
7. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
8. Pelaksanaan, penjaminan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di pelabuhan penyeberangan;
9. Pelaksanaan penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan;
10. Pelaksanaan pengawasan bongkar muat kendaraan dan naik turun penumpang serta jadwal docking kapal penyeberangan; dan
11. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

Pada saat ini personil Kantor OPP Gilimanuk terdiri dari 7 (tujuh) orang, dengan komposisi sebagai berikut :

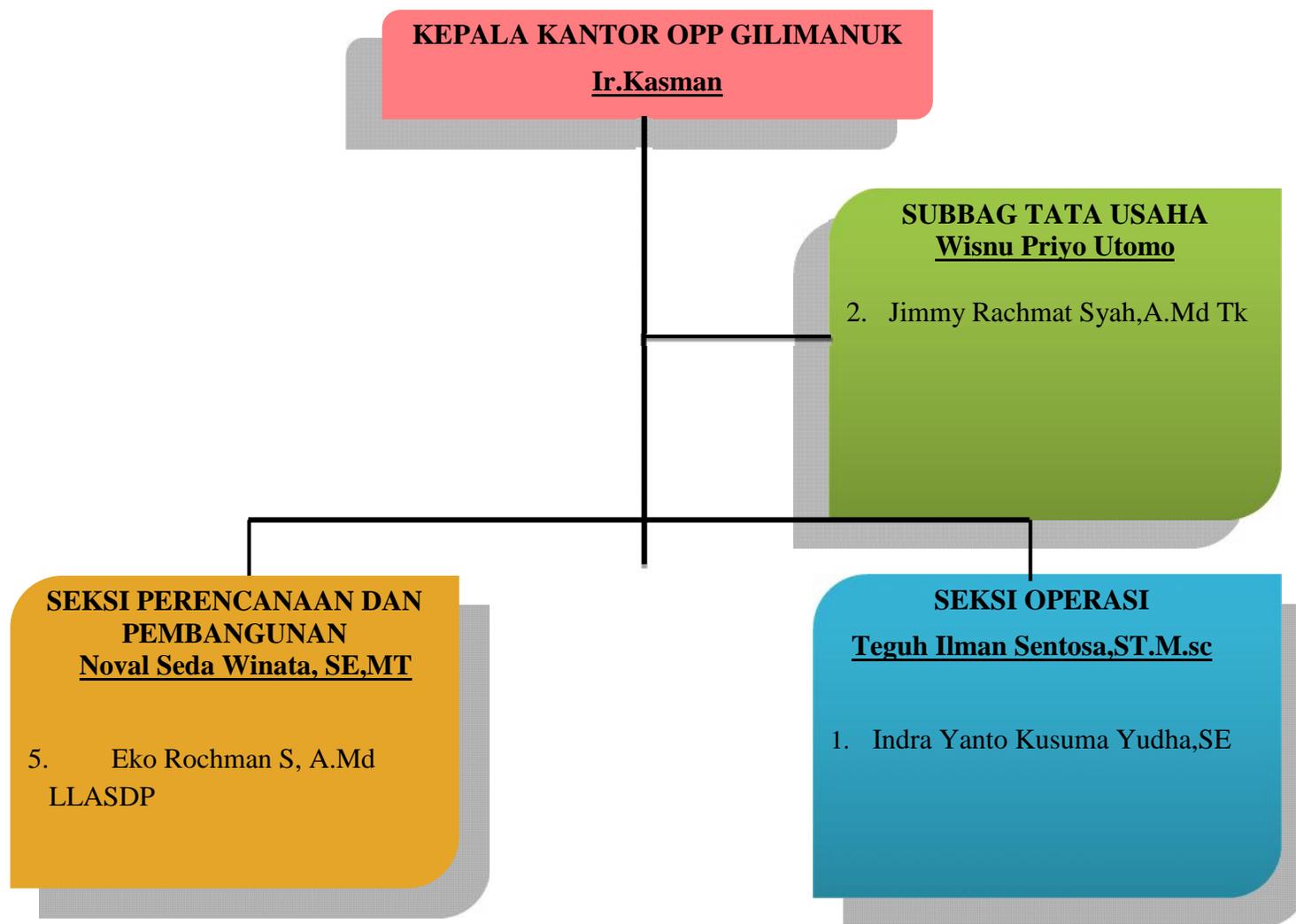
- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Kepala Kantor                          | : | 1 orang  |
| 2. Sub Bagian Tata Usaha                  | : | 1 orang Kepala Seksi, dan<br>1 (satu) orang staf fungsional        |
| 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pembangunan | : | 1 (satu) orang Kepala Seksi, dan<br>1 (satu) orang staf fungsional |
| 4. Sub Bagian Operasi                     | : | 1 (satu) orang Kepala Seksi, dan<br>1 (satu) orang staf fungsional |

Dalam melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan peraturan yang berlaku, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan penyeberangan dan para Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan. Adapun struktur organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk terdapat pada Gambar V.x dan Gambar V.x dibawah ini.

Gambar V.5 Susunan Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan  
( Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 85 Tahun 2011)



Gambar V.6 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk



Selain Pegawai Negeri Sipil, Kantor OPP Gilimanuk menggunakan tenaga perbantuan dan tenaga pramubakti serta petugas keamanan sebanyak 13 (tiga belas orang) agar dapat memaksimalkan Tupoksi yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

### Penyerapan Anggaran Tahun 2013

Kegiatan Tahun 2013, Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dibiayai oleh Dana DIPA Satker Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Nomor DIPA-022.03.2.606501/2013 tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp. 6.000.000.000,-, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2013. Dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut:

Belanja Barang	: Rp. 3.374.000.000,-
Belanja Modal	: <u>Rp. 2.262.000.000,-</u>
	Rp. 6.000.000.000,-

Realisasi Penyerapan anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 5.743.399.141,- atau sebesar 95,72%

**Tabel V.17.**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2013**

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keuangan
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.374.000.000	2.343.885.641	98.73%
Belanja Modal	3.626.000.000	3.399.513.500	93.75%
<b>Total Anggaran</b>	-	-	-
<b>Persentase</b>	-	-	-

Sumber : Hasil Rekap E-monitoring

Sumber Pendanaan	Pagu	Realisasi	% Keu
RM+ RMP	6.000.000.000	5.743.399.14	95,72
PNBP	-	-	-
PHLN	-	-	-
<b>Total Anggaran</b>	6.000.000.000	5.743.399.14	95,72

Sumber : Hasil Rekap E-monitoring

## Kinerja Angkutan Penyeberangan

### Sarana dan Prasarana

**Prasarana Pelabuhan di Wilayah Kerja Kantor OPP Gilimanuk terdiri dari :**

- Pelabuhan Penyeberangan Ketapang
- Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk
- Pelabuhan Penyeberangan Ujung
- Pelabuhan Penyeberangan Kamal
- Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Serdang
- Pelabuhan Penyeberangan Batu Licin
- Pelabuhan Penyeberangan Penajam

**Sarana Penyeberangan Di Wilayah Kerja Kantor OPP Gilimanuk terdiri dari :**

- Data Sarana Pelabuhan Penyeberangan Ketapang - Gilimanuk :

Pada saat ini jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang sebanyak 42 kapal.

- Data Sarana Pelabuhan Penyeberangan Ujung - Kamal

Jumlah Kapal yang beroperasi di lintasan Ujung - Kamal saat ini terdapat 3 (Tiga) unit kapal yang beroperasi.

- Data Sarana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Serdang – Batu Licin

Sampai dengan saat ini kapal yang beroperasi di Lintas Penyeberangan Tanjung Serdang – Batu Licin yaitu sebanyak 3 (tiga) unit.

### **Data Produksi Angkutan Penyeberangan Di Wilayah Kerja Kantor OPP Gilimanuk:**

- Data Produksi Lintas Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk

Lintas Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk seperti kita ketahui merupakan lintasan yang memiliki tingkat produktivitas yang padat, Berikut Rekapitulasi Data Produksi kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2013 :

**Tabel V.18.  
Rekapitulasi Data Produksi Angkutan di Pelabuhan Ketapang  
Tahun 2013**

Bulan	Trip	PnP	R2	R4	BUS	TRUK
Januari	6.429	416.143	58.515	33.032	7.867	45.622
Februari	6.227	318.411	42.600	27.285	6.024	43.734
Maret	6.513	19.152	59.721	36.364	7.365	43.879
April	6.777	359.478	43.662	31.061	7.063	46.009
Mei	6.950	406.213	49.378	35.052	8.324	46.770
Juni	6.798	459.366	48.173	38.123	9.689	46.323

Bulan	Trip	PnP	R2	R4	BUS	TRUK
Juli	6.764	350.178	35.829	34.277	21.815	51.650
Agustus	7.026	711.801	124.388	68.788	10.510	35.939
September	7.445	354.926	50.142	31.404	6.922	52.308
Oktober	7.699	428.917	68.254	39.800	7.422	48.086
Nopember	7.496	351.586	49.713	39.800	6.462	45.622
Desember	7.732	477.381	51.057	46.979	9.535	45.995
Jumlah	83.856	4.653.552	681.432	461.965	108.998	551.937
Rata-rata per hari	233	12.927	1.893	1.283	303	1.533
Rata-rata per bulan	6.988	387.796	56.786	38.497	9.083	45.995

Sumber : Hasil Olahan,2013

**Tabel V.19.**  
**Rekapitulasi Data Produksi Angkutan di Pelabuhan Gilimanuk**  
**Tahun 2013**

Bulan	Trip	PnP	R2	R4	BUS	TRUK
Januari	6.407	580.012	59.787	35.884	8.311	47.754
Februari	6.213	445.473	46.245	25.569	6.020	46.058
Maret	6.487	573.745	70.598	35.887	7.437	46.004
April	6.765	503.180	51.367	29.350	7.035	49.165
Mei	6.950	570.399	55.720	31.498	8.678	50.305
Juni	6.643	597.028	55.271	36.380	9.254	48.697
Juli	6.742	548.156	53.850	35.335	7.546	55.763
Agustus	7.017	874.964	128.637	67.012	10.502	37.914
September	7.421	487.046	44.726	28.597	6.852	53.018
Oktober	7.681	601.503	74.761	37.407	7.761	49.152
Nopember	7.489	493.468	48.700	29.807	6.855	48.283
Desember	7.727	636.808	61.955	40.899	9.433	49.228
Jumlah	83.542	6.911.782	751.617	433.625	95.684	581.341
Rata-rata per hari	232	19.199	2.088	1.205	266	1.615
Rata-rata per bulan	6.962	575.982	62.635	36.135	7.974	48.445

Sumber : Hasil Olahan,2013

**Tabel.V.20.**  
**Rekapitulasi Data Produksi di Lintas Penyeberangan**  
**Ketapang – Gilimanuk Tahun 2013**

Bulan	Trip	PnP	R2	R4	BUS	TRUK
Januari	12.836	996.155	118.302	68.916	16.178	93.376
Februari	12.440	763.884	88.845	52.854	12.044	89.792
Maret	13.000	592.897	130.319	72.251	14.802	89.883
April	13.542	862.658	95.029	60.411	14.098	95.174
Mei	13.900	976.612	105.098	66.550	17.002	97.075

Bulan	Trip	PnP	R2	R4	BUS	TRUK
Juni	13.441	1.056.394	103.444	74.503	18.943	95.020
Juli	13.506	898.334	89.679	69.612	29.361	107.413
Agustus	14.043	1.586.765	253.025	135.800	21.012	73.853
September	14.866	841.972	94.868	60.001	15.183	105.326
Oktober	15.380	1.030.420	143.015	77.207	14.277	96.369
November	14.985	845.054	98.413	69.607	13.317	93.905
Desember	15.459	1.114.189	113.012	87.878	18.968	95.223
Jumlah	167.398	11.565.334	1.433.049	895.590	205.185	1.132.409
Rata-rata per hari	465	32.126	3.981	2.488	570	3.146
Rata-rata per bulan	13.950	963.778	119.421	74.633	17.099	94.367

Sumber : Hasil Olahan, 2013

b. Data Produksi Lintas Penyeberangan Ujung – Kamal

Wilayah Kerja OPP Gilimanuk pada lintasan ini berada pada pelabuhan penyeberangan Ujung - Kamal, adapun data produksi pelabuhan penyeberangan Ujung - Kamal adalah sebagai berikut :

**Tabel.V.21. Data angkutan enam tahun terakhir**

Pelabuhan Ujung Surabaya				
Tahun	Penumpang	Roda 2	Roda 4	Bagasi
2008	5.660.045	1.947.585	829.886	1.558.667
2009	3.886.767	1.354.506	394.503	719.445
2010	1.941.378	814.691	69.852	19.675
2011	1.821.930	791.146	104.105	52.631
2012	1.519.187	733.437	87.714	49.103
2013	1,250,759	726,677	92,727	48,069

Pelabuhan Kamal Madura				
Tahun	Penumpang	Roda 2	Roda 4	Bagasi
<b>2008</b>	5.223.925	1.777.321	810.569	495.707
<b>2009</b>	3.986.087	1.384.136	389.976	255.024
<b>2010</b>	2.020.362	805.869	223.319	6.529
<b>2011</b>	1.794.291	784.344	108.540	10.475
<b>2012</b>	1.449.088	729.395	178.228	17.424
<b>2013</b>	1,081,234	723,702	92,143	23,393

Total Gabungan				
Tahun	Penumpang	Roda 2	Roda 4	Bagasi
<b>2008</b>	10.883.970	3.724.906	1.640.455	2.054.374
<b>2009</b>	7.872.854	2.738.642	784.479	974.469

Total Gabungan				
Tahun	Penumpang	Roda 2	Roda 4	Bagasi
2010	3.961.740	1.620.560	293.171	26.204
2011	3.616.221	1.575.490	212.645	63.106
2012	2.968.275	1.462.832	265.942	66.527
2013	2,331,993	1,450,379	184,87	71,462

c. Data Produksi Lintas Penyeberangan Tanjung Serdang – Batu Licin

Wilayah Kerja OPP Gilimanuk pada lintasan ini berada pada pelabuhan penyeberangan Tanjung Serdang – Batu Licin, adapun data produksi pelabuhan penyeberangan Tanjung Serdang – Batu Licin adalah sebagai berikut:

**Tabel.V.22. Data Produksi Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Serdang – Batu Licin**

NO	URAIAN	TAHUN						TOTAL
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Trip	15.190	16.872	18.859	9.476	18.848	16.800	96.045
2	<b>PENUMPANG</b>							
	- Dewasa	65.142	100.879	93.857	47.704	76.545	59.275	443.402
	- Anak	1.685	862	883	138	734	5.212	9.514
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>66.827</b>	<b>101.741</b>	<b>94.740</b>	<b>47.842</b>	<b>77.279</b>	<b>64.487</b>	<b>452.916</b>
3	<b>KENDARAAN</b>							
	- Gol I	321	1.727	1.850	978	1.653	1.278	7.807
	- Gol II	205.275	273.892	269.997	139.613	279.466	248.537	1.416.780
	- Gol III	6	4	61	17	34	88	210
	- Gol IVa Pnp	56.179	64.766	87.231	47.013	108.881	97.873	461.943
	- Gol IVb Brg	17.307	18.192	24.358	12.791	29.893	29.065	131.606
	- Gol Va Pnp	6.549	7.545	9.095	4.125	7.891	5.843	41.048
	- Gol Vb Brg	28.575	35.488	31.116	18.288	39.629	36.903	189.999
	- Gol VIa Pnp	4	11	11	1	-	-	27
	- Gol VIb Brg	3.343	2.838	2.827	1.879	3.940	3.770	18.597
	- Gol VII	26	114	69	31	152	118	510
	- Gol VIII	10	28	25	8	11	58	140
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>317.595</b>	<b>404.605</b>	<b>426.640</b>	<b>224.744</b>	<b>471.550</b>	<b>423.535</b>	<b>2.268.669</b>

## **Kegiatan Strategis**

### **1) Sub Bagian Tata Usaha**

Kegiatan – Kegiatan Strategis Sub Bagian Tata Usaha Kantor OPP Gilimanuk yang sudah dilaksanakan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a) Rapat Teknis UPT Perhubungan Darat dengan tema Peran UPT Perhubungan Darat dalam menunjang kinerja Ditjen Perhubungan Darat.
- b) Rapat Staf mengenai Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai, kontrak kerja jabatan fungsional dan implementasi Kontrak Kerja dengan membuat buku Harian Kerja Pegawai.

### **2) Sub Bagian Perencanaan dan Pembangunan**

Pada seksi Perencanaan dan Pembangunan Kantor OPP Gilimanuk yang sudah dilaksanakan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a) Studi Dan Kebijakan
  - Masterplan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang - Gilimanuk
  - Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan di Wilayah Kerja OPP Gilimanuk Thp I
  - Kajian Teknis Penyusunan Manajemen Pengelolaan Operasional di Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk
- b) Pengadaan Barang
  - Pengadaan Alkom Thp I sebanyak 1 Paket;
  - Pengadaan Komputer (3 unit);
  - Pengadaan Laptop (4 unit);
  - Pengadaan Printer (4 unit);
  - Pengadaan Lemari Arsip (6 unit);
  - Pengadaan Meubelair (22 unit);
  - Pengadaan AC Split (3 unit);
  - Pengadaan Alat Penghancur Kertas (1 unit);
  - Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (3 Unit);
  - Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (2 unit);

### **3) Sub Bagian Operasi**

Pada Seksi Operasi ada beberapa SK/Peraturan yang sudah diterbitkan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2013, guna mengoptimalkan kinerja kapal penyeberangan yang beroperasi di Lintas Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk. Berikut SK/Peraturan yang telah diterbitkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

## Permasalahan Dan Upaya Pemecahan

- ***Permasalahan yang Dihadapi***

Kantor OPP sudah berjalan dalam kurun waktu hampir 2 Tahun sejak 01 Mei 2012, dan sampai dengan saat ini terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menunjang kegiatan operasional perkantoran, antara lain :

1. Belum tersedianya Juklak dan Juknis Kantor OPP Gilimanuk Berdasarkan PM 85 tahun 2011;
2. Kurangnya tenaga SDM yang memadai baik jumlah maupun kompetensi yang dimiliki guna menunjang kelancaraan operasional perkantoran;
3. Eksistensi Kantor OPP Gilimanuk masih belum begitu dirasakan keberadaannya dikarenakan hal – hal berikut ini :
  - a. Masih tingginya dominasinya peran PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) di setiap pelabuhan penyeberangan;
  - b. Belum adanya lahan dan bangunan untuk dipergunakan bagi Kantor OPP Gilimanuk;
  - c. Sulitnya merekrut Pegawai Staff/PNS OPP di masing - masing pelabuhan penyeberangan yang mencakup wilayah kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk;
  - d. Aset-aset Pelabuhan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat saat ini masih dimiliki oleh PT. ASDP, sehingga salah satu tugas dan fungsi Sie. Perencanaan dan Pembangunan belum dapat berjalan dengan optimal.
4. Masih diperlukannya penambahan sarana dan prasarana guna menunjang administrasi perkantoran dan teknis dilapangan.
5. Belum tersedianya petunjuk yang jelas tentang pembagian kewenangan antara Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dengan PT. ASDP Indonesia Ferry, mana yang menjadi kewenangan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dan mana yang masih menjadi kewenangan PT. ASDP Indonesia Ferry dikaitkan dengan dua aturan yang berlaku yaitu KM. 11 Tahun 2002 dan PM. 85 Tahun 2011.

- ***Upaya Pemecahan Permasalahan yang Dihadapi***

Dalam kurun waktu berjalan sampai dengan saat ini, operasional Kantor OPP Gilimanuk terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terkait dengan hal tersebut Kantor OPP Gilimanuk perlu menyikapi upaya-upaya pemecahan masalah, antara lain :

1. Perlu dilakukan pengusulan penyusunan Juklak dan Juknis Kantor OPP Gilimanuk sehingga memperjelas dalam menunjang kelancaran Operasional Perkantoran (sebagai bahan masukan Bagian Hukum Ditjen Hubdat);

2. Pengusulan Penambahan SDM yang memadai ke Kantor Pusat untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran dan lapangan, khususnya untuk penempatan staff/PNS di masing – masing Pelabuhan Penyeberangan di bawah pengawasan Kantor OPP;
3. Perlu adanya kejelasan mengenai pengadaan lahan bagi Kantor OPP Gilimanuk guna terbentuknya Bangunan Kantor OPP Gilimanuk yang tetap, hal ini dikarenakan Seluruh tanah di Kelurahan Gilimanuk merupakan tanah negara, dan Pemkab Jembrana mendapatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL);
4. Dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana perkantoran di tahun anggaran berikutnya yang bertujuan memperlancar operasional perkantoran dan teknis di lapangan.
5. Perlu segera disiapkan petunjuk pelaksanaan yang jelas tentang hubungan kerja dan batas – batas kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan baik dengan Direktorat LLASDP sebagai Pembina teknis Otoritas Pelabuhan Penyeberangan maupun dengan PT. ASDP Indonesia Ferry dan satker sementara yang ada di daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan program dan operasional di lapangan.

## **G. KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN (K-OPP) LEMBAR**

### **1. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2012. Tujuan dibentuk nya UPT ini adalah untuk melaksanakan pemerintahan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2010, dimana ditentukan bahwa adanya pemisahan fungsi Regulator dengan Operator dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan untuk masyarakat.

### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### ***MAKSUD***

Laporan Tahunan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar Tahun 2013 disusun dengan maksud sebagai wahana informasi untuk menggambarkan kegiatan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor OPP.

#### ***TUJUAN***

Laporan Tahunan Kantor OPP Lembar Tahun 2013 disusun dengan tujuan untuk melaporkan pelaksanaan program kegiatan Kantor OPP Lembar.

- a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 85 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan, maka tugas pokok Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar adalah melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
- 2) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan serta penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan;
- 3) Penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
- 4) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan;
- 5) Pelaksanaan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dalam penjaminan ketertiban, keamanan dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan serta keselamatan penyeberangan;
- 7) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
- 8) Pelaksanaan, penjaminan, dan kelestarian lingkungan hidup penyeberangan;
- 9) pemeliharaan di pelabuhan

- 10) pelaksanaan penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan;
- 11) pelaksanaan pengawasan bongkar muat kendaraan dan naik turun penumpang serta jadwal docking kapal penyeberangan dan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

**Gambar.V.7. Stuktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar**



### 3. Visi dan Misi

#### *Visi*

“Menjadikan organisasi pemerintah yang professional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan”.

#### *Misi*

- a. Menciptakan system pelayanan angkutan penyeberangan yang aman, selamat dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Kerja;
- b. Menciptakan dan mengorganisasikan transportasi penyeberangan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan;
- c. Membangun prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang terintegrasi dengan moda lainnya.

### 4. RUANG LINGKUP

Penyusunan buku ini mencakup pelaksanaan kegiatan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang Tata Usaha

Meliputi kegiatan Tata Usaha, kepegawaian, Humas, dan Pelaporan, Penyiapan analisa jabatan pegawai kantor OPP, data nama dan kepangkatan pegawai jumlah PNS, data Inventaris kantor, data kehadiran pegawai, jumlah surat masuk dan keluar, rekapitulasi undangan.

b. Bidang Perencanaan dan Pembangunan

Meliputi kegiatan perencanaan dan pembangunan data prasarana dan sarana angkutan penyeberangan di Sembilan wilayah kerja seperti studi master plan di 2 lintasan pada 4 pelabuhan penyeberangan.

c. Bidang Operasi

Meliputi kegiatan operasional dipelabuhan yang sudah dilaksanakan, laporan jumlah trip kapal per bulan, jumlah kapal operasi per bulan, jumlah penumpang dan kendaraan yang menyeberang, besaran tarif.

## 5. GAMBARAN UMUM

a. Kinerja Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar

### ***PELABUHAN PADANGBAI DAN LEMBAR***

Lintas penyeberangan Padang Bai – Lembar menghubungkan Pulau Bali dan Pulau Lombok.

Pelabuhan Penyeberangan Padangbai terletak di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sekitar 54 KM arah Timur Laut dari Kota Denpasar. Secara geografis, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai terletak di 8°32'01,56" Lintang Selatan dan 115°30'30,27" Bujur Timur.



**Gambar.V.8. Pelabuhan Penyeberangan Lembar**



**Gambar.V.9. Pelabuhan Penyeberangan Padangbai**

- **Dermaga**

Pelabuhan penyeberangan Padangbai (dermaga I dengan konstruksi MB) mulai dibangun pada tahun 1994 dan mulai beroperasi tahun 1997, sedangkan dermaga II mulai dibangun tahun 2006 dan mulai beroperasi tahun 2010. Pelabuhan Penyeberangan padangbai dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Saat ini pelabuhan Penyeberangan Padangbai memiliki 2 buah dermaga movable bridge (MB) yaitu dermaga I dengan kapasitas 1.000 GT dan dermaga II dengan kapasitas 2.000 GT.

- **Lokasi dan Layout Pelabuhan**

Pelabuhan Penyeberangan Lembar terletak di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekitar 30KM arah Selatan dari Kota Mataram. Secara geografis, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai terletak di 8°43'43,51" Lintang Selatan dan 116°04'39,41" Bujur Timur.

- **Lintas Penyeberangan**

Lintas penyeberangan yang dilayani dari Pelabuhan Penyeberangan Lembar saat ini hanya satu yaitu ke Pelabuhan Penyeberangan Padangbai di Pulau Bali. Data lintas penyeberangan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel.V.23. Lintas Penyeberangan dari Pelabuhan Penyeberangan Lembar

No	Lintas Penyeberangan	Jarak (mil laut)	Waktu Tempuh (jam)	Klasifikasi Lintas
1.	Lembar – Padangbai (P. Bali)	36	4	Komersil

- **Dermaga**

Pelabuhan Penyeberangan Lembar mulai dibangun pada tahun 1976 (dengan satu dermaga movable bridge yaitu dermaga I) dan mulai beroperasi tahun 1984. Dermaga II (awalnya adalah dermaga Plengsengan) mulai dibangun tahun 2005 dan mulai beroperasi tahun 2009, sedangkan dermaga III (dermaga plengsengan) mulai dibangun tahun 2007. Pelabuhan Penyeberang Lembar dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Saat ini Pelabuhan Penyeberangan Lembar memiliki 3 buah dermaga terdiri dari 2 buah dermaga movable bridge (MB) yaitu dermaga I dan dermaga II dengan kapasitas 2.000 GT serta 1 buah dermaga plengsengan dengan kapasitas 1.000 GT yaitu dermaga III.

#### ***PELABUHAN KAYANGAN DAN POTOTANO***

Jumlah Kapal Penyeberangan berjumlah 18 kapal. Peningkatan jumlah kapal bertujuan meningkatkan pelayanan di rute yang menghubungkan pulau Lombok dan Sumbawa, serta mengoptimalkan keberadaan masing-masing dua unit dermaga Pelabuhan Kayangan dan Pelabuhan Pototano.



**Gambar.V.10. Pelabuhan Penyeberangan Kayangan**



**Gambar.V.11. Pelabuhan Penyeberangan Pototano**

### ***PELABUHAN SAPE DAN LABUAN BAJO***

Lintas penyeberangan Sape – Labuan Bajo merupakan jalur penyeberangan antar provinsi dari pelabuhan Sape, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Pelabuhan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan panjang lintasan sebesar 75 mill.

### ***PELABUHAN BOLOK, LARANTUKA DAN ROTE***

Pelabuhan Penyeberangan Bolok berada di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pelabuhan Peyeberangan Larantuka di Kabupaten Flores Timur sedangkan Pelabuhan Rote Pantai Baru berada di Kabupaten Rote. Panjang lintasan penyeberangan Bolok – Larantuka adalah sebesar 120 Mill dengan waktuh tempuh rata – rata adalah 16 jam, sedangkan lintasan penyeberangan Bolok – Rote ditempuh dalam waktu 4 jam dengan panjang lintasan sebesar 40 mill.

## 1) DATA PRODUKSI DUA WILAYAH KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN LEMBAR

Tabel.V.24. Data Produksi Di Pelabuhan Penyeberangan Lembar

No	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Kapasitas Muat		Jumlah Frekwensi (Trip)	Penumpang						Kendaraan									Jumlah		Load Factor(%)				
			Pnp	Roda 4		Ekonomi			Bisnis			I	II	III	IV		V		VI		VII	VIII	IX	pnp	knd	Pnp	Roda 4 (Campuran)
						Dws	Anak	Jml	Dws	Ank	Jml				Pnp	Brg	Pnp	Brg	Pnp	Brg							
1	KMP. PORT LINK II	PT. ASDP	135	25	346	31721	238	166	0	0	0	36	4471	41	993	512	37	1955	346	1839	133	8	0	31959	10371	68,42	67,32
2	KMP. RAJA ENGGANO		135	25	216	20040	267	107	0	0	1	7	3067	66	775	356	36	985	208	894	95	3	0	20307	6492	69,64	62,07
3	KMP. RODHITA		311	20	203	19652	151	144	1	0	0	4	3571	29	567	281	28	1134	170	1175	96	6	0	19803	7061	31,44	85,33
4	KMP. GERBANG SAMUDRA 3	PT. GERBANG SARANA SAMUDERA	112	25	65	5316	290	4	0	0	0	11	951	43	217	74	8	205	53	205	17	5	0	5606	1789	77,01	48,25
5	KMP. SALINDO MUTIARA I		179	25	194	13906	93	173	0	0	0	9	1720	25	407	198	9	933	100	1384	130	4	0	13999	4919	40,31	65,26
6	KMP. SWARNA CAKRA		75	38	103	8716	135	0	0	0	0	3	1662	39	340	132	22	468	58	615	72	5	1	8851	3417	114,13	43,60
7	KMP. MARINA SEGUNDA	PT. JEMBATAN NUSANTARA	189	20	177	10683	220	111	0	0	0	28	1623	39	334	213	25	626	124	788	104	4	0	10903	3908	32,65	62,76
8	KMP. MARINA TERTIERA		250	64	48	2840	2	0	0	0	0	2	518	0	73	35	4	209	28	207	33	0	0	2842	1109	23,68	19,17
9	KMP. MARINA PRIMERA		250	20	10	620	0	0	0	0	0	0	70	0	11	8	0	32	6	49	6	0	0	620	182	24,80	56,00
10	KMP. SWARNA KARTIKA		200	28	277	17694	190	128	0	0	0	13	2753	24	580	269	24	989	162	1294	168	3	0	17884	6279	32,27	44,98
11	KMP. CITRA NUSANTARA		214	25	246	16852	345	148	0	0	0	15	2670	64	460	258	34	915	146	1338	165	5	0	17197	6070	32,68	54,03
12	KMP. PERDANA NUSANTARA		183	22	158	12604	133	0	0	0	0	29	2212	51	449	187	37	687	111	885	128	3	0	12737	4779	44,05	71,54
13	KMP. SURAMADU NUSANTARA		275	23	274	18131	174	136	1	0	0	9	2756	38	575	275	34	1013	149	1185	183	4	0	18305	6221	24,29	54,24
14	KMP. PERMATA NUSANTARA		850	60	77	5686	170	0	0	0	0	53	1009	19	205	76	4	292	42	330	56	2		5856	2088	8,95	21,80
15	KMP. ANDHIKA NUSANTARA		285	17	223	13931	56	174	0	0	0	6	1964	9	354	205	28	830	109	1319	144	7	0	13987	4975	22,01	79,03
16	KMP. LASKAR PELANGI		350	28	251	17708	365	93	0	0	0	19	3001	120	567	268	41	980	178	1112	158	3	0	18073	6447	20,57	47,05
17	KMP. NUSA PENIDA	PT. PUTRA MASTER	194	25	131	8149	36	67	0	0	0	8	967	5	248	141	30	593	88	581	27	2	0	8185	2690	32,21	52,21
18	KMP. NUSA BAKTI		129	25	161	9387	81	14	0	0	0	1	1122	10	303	201	43	696	93	631	44	5	0	9468	3149	45,59	50,09
19	KMP. NUSA SEJAHTERA		162	21	84	5550	19	19	0	0	0	6	1077	2	140	98	4	373	55	369	34	1	0	5569	2159	40,85	60,78
20	KMP. NUSA SAKTI		220	20	63	4618	9	0	0	0	0	1	866	1	96	76	3	240	43	264	13	0	0	4627	1603	33,38	58,33
21	KMP. DARMA KOSALA	PT. DARMA LAUTAN	360	30	107	6907	87	0	0	0	0	1	1130	8	169	96	8	444	55	549	53	1	0	6994	2514	18,19	42,92
22	KMP. DARMA SENTOSA		179	18	146	9418	63	56	13	0	0	17	1626	9	224	158	14	441	87	709	39	0	0	9481	3324	36,28	63,62
23	KMP. DARMA KENCANA III		310	32	148	12337	194	0	0	0	0	2	1796	28	304	190	37	745	114	1022	58	3	0	12531	4299	27,23	52,06
24	KMP. PUTRI GIANYAR	PT. JEMBATAN LAUT	490	36	220	16246	268	228	0	0	0	6	2429	67	465	257	23	1036	120	1524	145	6	0	16514	6078	15,34	45,20
25	KMP. PUTRI YASMIN		275	20	186	13097	55	54	0	0	0	4	2186	32	414	212	15	851	112	780	93	1	0	13152	4700	25,71	66,61
26	KMP. SHINDU TRITAMA	PT. PEL SINDU UTAMA BAHARI	230	13	266	14119	211	122	0	0	0	18	2244	34	425	276	24	900	113	1046	174	0	0	14330	5254	23,42	85,51
27	KMP. SINDU DWITAMA		220	26	223	13493	170	89	0	0	0	9	1717	36	358	221	20	1129	80	1256	255	21	0	13663	5102	27,90	57,70
28	KMP. RAFELIA 2	PT. DARMA BAHARI UTAMA	400	37	88	8187	36	0	0	0	0	3	1332	3	180	107	14	398	77	620	52	1	0	8223	2787	23,36	44,50
29	KMP. PBK MURYATI	PT. PEWETE BAHTERA KENCANA	350	18	161	11937	144	49	0	0	0	2	1812	39	313	178	10	838	95	1028	105	5	0	12081	4425	21,38	88,49
30	KMP. TRIMAS ELLISA	PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS	300	28	3	77	0	0	0	0	0	13	0	0	1	0	8	0	18	1	0	0	77	41	8,56	33,33	
31	KMP. RHAMA GIRI NUSA	PT. SAMOEDRA JAYA GIRI NUSA	375	25	224	18565	468	207	0	0	0	5	3615	60	414	244	19	1034	154	1311	111	7	0	19033	6974	22,71	58,95
Jumlah					<b>5078</b>	<b>368.187</b>	<b>4670</b>	<b>2289</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>327</b>	<b>57.950</b>	<b>941</b>	<b>10960</b>	<b>5803</b>	<b>635</b>	<b>21979</b>	<b>3276</b>	<b>26327</b>	<b>2892</b>	<b>115</b>	<b>1</b>	<b>372.857</b>	<b>131.206</b>	<b>34,48</b>	<b>56,22</b>



**Tabel.V.26. DATA PRODUKSI DI PELABUHAN PENYEBERANGAN KAYANGAN**

No	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Kapasitas Muat		Jumlah Frekwensi (Trip)	Penumpang						Kendaraan									Jumlah		Load Factor(%)				
			Pnp	Roda 4		Ekonomi			Bisnis			I	II	III	IV		V		VI		VII	VIII	IX	pnp	knd	Pnp	Roda 4 (Camp)
						Dws	Anak	Jml	Dws	Ank	Jml				Pnp	Brg	Pnp	Brg	Pnp	Brg							
1	KMP. DINGKIS	PT. ASDP Indonesia Ferry	130	12	850	839	23	862	0	0	0	43	13860	21	2549	1001	1044	2495	285	556	50	5	1	862	21910	0,56	78,29
2	KMP. TANDEVAND		370	18	942	947	35	982	0	0	0	0	15526	28	3005	1209	1391	3201	355	711	75	15	2	982	25513	0,28	58,76
3	KMP. BALIBC		380	24	100	83	5	83	0	0	0	0	1455	2	317	149	129	447	30	94	7	6	0	88	2635	0,23	49,13
4	KMP. BELIDA		500	20	877	782	32	814	0	0	0	0	15679	37	2993	1238	1576	4320	500	1629	141	62	0	814	28325	0,19	71,89
5	KMP. MUTIARA ALAS I	PT. ATOSIV LAMPUNG PLYRN	300	30	948	1183	19	1202	0	0	0	0	13844	40	3025	1052	1190	3437	502	2031	119	28	1	1202	25279	0,42	40,07
6	KMP. MUTIARA INDONESIA		375	52	56	35	0	35	0	0	0	0	520	0	191	54	37	117	32	74	5	0	0	35	1040	0,17	17,86
7	KMP. SATYA DHARMA	PT. DHARMA LAUTAN U	250	16	716	1036	19	1055	0	0	0	0	10703	36	2550	819	891	2559	480	1812	82	10	1	1055	19953	0,57	80,43
8	KMP. WICITRA DHARMA		216	23	595	802	23	825	0	0	0	0	8835	27	2237	637	716	2150	368	986	41	4	0	825	16051	0,64	52,53
9	KMP. KALEBI	PT. JEMBATAN MADURA	250	35	808	962	30	992	0	0	0	0	10585	9	2953	935	983	2551	442	1477	78	11	1	992	20075	0,49	33,53
10	KMP. MANDALA NUSANTARA		500	25	273	411	1	412	0	0	0	0	3872	8	1013	332	338	1042	192	641	60	8	0	412	7555	0,30	53,86
11	KMP. PERSADA NUSANTARA		350	33	646	681	5	685	0	0	0	0	7927	37	2391	638	713	1843	308	693	44	1	0	686	14645	0,30	31,34
12	KMP. PERTIWI		322	20	669	729	17	745	0	0	0	0	8116	7	2305	741	858	2092	325	1197	30	8	0	746	15683	0,35	56,50
13	KMP. RENY 2		376	13	186	99	3	102	0	0	0	0	2287	3	777	212	220	745	126	480	13	6	0	102	4873	0,15	77,15
14	KMP. MARINA QUINTA		376	13	284	291	2	293	0	0	0	0	3848	8	1236	379	321	1040	206	504	11	0	0	293	7603	0,27	73,30
15	KMP. JEMLA FAJAR	PT. JEMLA FERRY	310	25	949	1364	30	1394	0	0	0	0	13878	17	2932	1157	1151	3437	472	1806	93	18	0	1394	24971	0,47	46,68
16	KMP. MUNAWAR FERRY	PT. MUNAWAR FERRY	350	18	729	833	26	859	0	0	0	0	8107	10	1513	801	868	2533	355	710	48	10	0	859	14953	0,34	52,14
17	KMP. MUNAWAR LESTARI		300	15	832	1066	39	1105	0	0	0	0	10959	35	1999	932	912	2492	386	997	60	4	0	1105	18835	0,44	62,84
18	KMP. NUSA ABADI	PT. PUTERA MASTER	120	14	417	290	3	293	0	0	0	0	6097	4	917	423	418	1028	51	46	2	0	0	293	8985	0,59	49,42
19	KMP. NUSA SENTCSA		376	16	597	435	22	457	0	0	0	0	7614	9	1212	535	708	2323	217	760	48	7	0	457	13483	0,20	61,35
20	KMP. NUSA WANGI		300	18	777	526	18	544	0	0	0	0	9802	5	2757	978	872	2047	402	1053	79	24	0	544	18029	0,23	58,79
21	KMP. GADING NUSANTARA	PT. PRIMA EXECUTIVE	194	23	705	857	16	873	0	0	0	0	9724	10	2974	846	900	2432	475	1857	81	7	0	873	19305	0,64	59,03
Jumlah					12956	14251	368	14619	0	0	0	43	183238	353	41956	15408	16236	44335	6517	20114	1167	234	6	14619	329717	0,37	55,47

Tabel.V.27. Data Produksi Di Pelabuhan Penyeberangan Pototano

No	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Kapasitas Muat		Jumlah Frekwensi (Trip)	Penumpang						Kendaraan									Jumlah		Load Factor(%)				
			Pnp	Roda 4		Ekonomi			Bisnis			I	II	III	IV		V		VI		VII	VIII	IX	pnp	knd	Pnp	Roda 4 (Camp)
						Dws	Anak	Jml	Dws	Ank	Jml				Pnp	Brg	Pnp	Brg	Pnp	Brg							
1	KMP. D'INGKIS	PT. ASDP Indonesia Ferry	180	12	774	2738	1	2739	0	0	0	1	9067	11	3021	838	727	2028	252	643	41	0	3	2735	16632	1,97	81,32
2	KMP. TANDEMAM		370	18	958	3784	3	3787	0	0	0	4	12125	17	4159	1235	1089	3083	345	952	144	4	0	3787	23157	1,06	63,19
3	KMP. BALIBO		380	24	85	226	1	227	0	0	0	0	903	1	361	116	88	275	43	113	1	0	0	227	1901	0,70	48,87
4	KMP. BEJDA		500	20	797	3558	9	3567	0	0	0	25	11270	31	3623	1090	1130	3097	481	1540	144	11	2	3567	22445	0,90	69,75
5	KMP. MUTIARA ALAS I	PT. ATOSIM LAMPUNG PLYRN	300	30	845	2612	2	2614	0	0	0	2	8140	7	2993	960	908	2521	438	1487	84	12	3	2614	17555	1,03	37,10
6	KMP. MUTIARA INDONESIA		375	52	56	139	0	139	0	0	0	0	426	2	201	54	77	132	30	59	3	1	0	139	985	0,56	19,13
7	KMP. SATYA DHARMA	PT. DHARMA LAUTAN U	260	16	680	1605	2	1607	0	0	0	4	8679	21	2301	645	941	1680	670	1184	36	3	0	1607	16164	0,91	68,57
8	KMP. WICITRA DHARMA		216	23	593	1383	1	1384	0	0	0	52	7442	24	1999	584	610	1772	408	1179	26	1	0	1384	14097	1,08	48,24
9	KMP. KALEBI	PT. JEMBATAN MADURA	250	35	653	1954	12	1966	0	0	0	5	7646	21	2495	663	737	1901	366	1129	46	3	0	1966	15014	1,20	32,12
10	KMP. MANDALA NUSANTARA		500	25	206	510	2	512	0	0	0	1	2228	12	722	228	227	531	107	334	24	1	0	512	4415	0,50	42,21
11	KMP. PERSADA NUSANTARA		350	33	583	1671	0	1671	0	0	0	1	6262	9	2027	585	625	1342	285	702	19	1	0	1671	11862	0,82	29,05
12	KMP. PERTIWI		322	20	638	1679	6	1685	0	0	0	0	7618	13	2359	673	760	1898	312	869	39	3	0	1685	14544	0,82	54,13
13	KMP. RENY 2		376	18	158	354	3	397	0	0	0	0	1941	2	671	166	199	550	118	344	10	0	0	397	4011	0,53	68,39
14	KMP. MARINA QUINTA		376	18	285	888	0	888	0	0	0	0	3328	4	1212	327	347	954	141	426	15	3	0	888	6767	0,33	66,95
15	KMP. JEMLA FAJAR	PT. JEMLA FERRY	310	25	873	3411	2	3413	0	0	0	4	11840	15	3082	971	958	2525	359	1388	74	5	0	3413	21261	1,26	43,03
16	KMP. MUNAWAR FERRY	PT. MUNAWAR FERRY	350	18	589	1242	0	1242	0	0	0	3	5585	3	1614	513	446	1270	234	774	26	3	0	1242	10471	0,50	46,03
17	KMP. MUNAWAR LESTARI		300	15	704	1872	2	1874	0	0	0	2	7656	21	2022	732	543	1431	257	770	34	4	0	1874	13562	0,89	55,71
18	KMP. NUSA ABADI	PT. PUTERA MASTER	120	14	279	821	3	824	0	0	0	0	2980	0	807	284	187	636	40	44	17	0	0	824	4995	2,46	51,59
19	KMP. NUSA SENTOSA		376	16	542	1603	1	1604	0	0	0	2	5756	3	1700	602	522	1408	220	683	56	2	0	1604	10954	0,79	59,83
20	KMP. NUSA WANGI		300	18	625	861	0	861	0	0	0	1	4395	7	2033	617	727	1585	344	1001	91	6	1	861	10813	0,46	56,93
21	KMP. GADING NUSANTARA	PT.PRIMA EXECUTIVE	194	23	643	1714	1	1715	0	0	0	3	7781	8	2462	666	854	2124	422	1373	49	4	0	1715	15746	1,37	53,73
Jumlah					11536	34665	51	34716	0	0	0	112	133068	232	41870	12553	12702	32813	5952	16994	979	67	9	34716	257351	1,00	52,20

## KEGIATAN STRATEGIS KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN LEMBAR

### 1. BIDANG PERENCANAAN

Bidang perencanaan telah melaksanakan kegiatan Tahun 2013, antara lain :

- a. Penyusunan RKA-KL tahun 2013;
- b. Penyusunan Master Plan Pelabuhan Penyeberangan Lembar dan Padangbai;
- c. Penyusunan Master Plan Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Larantuka dan Rote;
- d. Studi Inventaris Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Lingkungan Kerja OPP Lembar Tahap I (Lembar – Padangbai, Bolok –Larantuka – Rote);
- e. Studi Analisa Jabatan Kantor OPP Lembar;
- f. Koordinasi rencana Pembangunan Dermaga PT.NNT di Labuan Lombok / Kolam Pelabuhan Penyeberangan Kayangan;
- g. Pembahasan Laporan Kemajuan Pekerjaan studi di Lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar;
- h. Penyusunan rencana kegiatan Kantor OPP Lembar T.A. 2014;

### 2. BIDANG KEUANGAN

- a. Pelaksanaan Anggaran

1) Dana Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar adalah sebesar Rp. 6.000.000.000. Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.493.229.000,-selanjutnya untuk perinciannya dapat melihat pada table Berikut:

**Tabel.V.28. Dana Anggaran Belanja tahun 2013**

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keu
DIPA Reguler			
1. Rincian Sumber Dana	RM		
2. Rincian Belanja			
Belanja Pegawai	0	0	0,00 %
Belanja Barang	2.045.101.000	1.929.134.000	94.33 %
Belanja Modal	3.954.899.000	3.564.095.000	90.12 %
Total Anggaran	6.000.000.000	5.493.229.000	91.55 %

## 2) Kegiatan Studi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar 2013

**Tabel.V.29. Kegiatan Studi KOPP Lembar Tahun 2013**

No	Nama Kegiatan
1	Masterplan Pelabuhan Penyeberangan Lembar
2	Masterplan Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Larantuka dan Rote
3	Inventarisasi Sarana dan Prasana Pelabuhan Penyeberangan di Wilayah Kerja OPP Lembar
4	Analisa Jabatan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar

## 3) Kegiatan yang tidak terserap T.A. 2013

Kegiatan Monitoring Tarif adalah satu-satunya kegiatan yang tidak terserap dengan nilai Rp. 150.000.000,-. Hal ini disebabkan adanya kesalahan dalam penempatan mata anggaran kegiatan, kegiatan ini diharapkan merupakan kegiatan yg langsung dikelola oleh OPP, dengan mata anggaran belanja barang operasional lainnya, namun didalam DIPA kegiatan tersebut masuk dalam akun mata anggaran belanja modal, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh pihak ke 3 dan harus dilelangkan. Koordinasi untuk melakukan Revisi Anggaran telah dilakukan, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku revisi tersebut membutuhkan persetujuan dari DPR mengingat revisi tersebut merupakan perubahan / revisi kegiatan belanja modal menjadi belanja barang.

- b. Monitoring realisasi daya serap dan cek posisi kegiatan-kegiatan yang dikontrakan;
- c. Pelaporan secara e monitoring realisasi penggunaan anggaran secara bertahap.

**3. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN UMUM**

Kegiatan bidang kepegawaian yang sudah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2013

- a. Penyiapan Surat Pelaksanaan Tugas PNS Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang diperbantukan ke PT. ASDP cabang Sape, untuk ditugaskan kembali ke DJPD dengan penugasan ke Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar diwilayah kerja Pelabuhan Penyeberangan Lembar.
- b. Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi pegawai negeri sipil dilingkungan Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat, Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar;

- c. Memproses kenaikan Pangkat Reguler Pegawai di Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar;
- d. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (e-Procurement) di Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan;
- e. Mengikuti Rapat Koordinasi bidang Kepegawaian dan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- f. Menyiapkan Analisa Jabatan untuk pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar;
- g. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakomis) Bidang Perhubungan Darat se-Kalimantan dan Rakomis Perhubungan Darat;
- h. Mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian;
- i. Melaksanakan Kegiatan Forum Komunikasi Kehumasaan.
- j. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar berjumlah 11 (sebelas) orang.

Kegiatan pembinaan dan peningkatan pengetahuan yang diikuti oleh Pegawai adalah : Diklat Kepemimpinan PIM tk IV dan mengikuti seleksi PIM Tk II.

Bidang kepegawaian, sesuai dengan aturan pengadaan CPNS dilaksanakan oleh Kementerian, Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar ini

#### **4. BIDANG RUMAH TANGGA**

Kegiatan kerumahtanggaan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2013 guna mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar, meliputi :

- a. Pencatatan surat masuk dan surat keluar secara manual
- b. Penataan administrasi barang milik Negara dilingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar, meliputi pendataan barang inventaris kantor, pendistribusian barang inventaris kantor, computer supplies dan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan membuat laporan barang milik Negara tiap semester
- c. Pengadaan keperluan Operasional Kantor seperti alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang keperluan rumah tangga.
- d. Pengadaan pakaian dinas pegawai;
- e. Pengadaan pakaian kerja satpam dan pramuwisma;
- f. Pengadaan barang inventaris kantor seperti : Komputer, Notebook, Printer, Alat Penghancur Kertas, Lemari Arsip, AC Split,
- g. Pengadaan Kendaraan Roda 2, Kendaraan Roda 4;

- h. Pemeliharaan Gedung Kantor;
- i. Operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2.
- j. Mengikuti Rekonsiliasi / Konsolidasi Laporan BMN dan Laporan Keuangan Tahunan T.A. 2013;
- k. Mengikuti kegiatan BIMTEK Aplikasi SIMAK-BMN;

## **5. BIDANG HUKUM**

Kegiatan di bidang Hukum selama T.A. 2013 yang dilakukan meliputi memberikan masukan dan saran dalam penyusunan draft peraturan menteri dan mengikuti sosialisasi produk hukum yang baru diberlakukan antara :

- a. Menghadiri kegiatan Koordinasi Teknis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Dirjen di Bidang LLASDP;
- c. Pembahasan penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2011, dan RPM tentang Kompetensi SDM Lalu Lintas Jalan dan SDM Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

## **6. BIDANG OPERASI**

Pelaksanaan kegiatan operasional yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar, meliputi

- a. Koordinasi dengan Direktorat LLASDP tentang pelaksanaan Kegiatan Kantor OPP Lembar;
- b. Mengikuti Kunjungan Kerja Wakil Menteri Perhubungan dalam rangka "Peninjauan Fasilitas Transportasi Darat, Laut dan Udara".
- c. Melaksanakan Monitoring Pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan di Wilayah Kerja;
- d. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Lebaran Tahun 2013 di Wilayah Kerja Kantor OPP Lembar;
- e. Pemeriksaan dan evaluasi kesiapan fasilitas sarana dan prasarana dalam Rangka Angkutan Lebaran Tahun 2013;
- f. Inventarisasi sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan Padangbai, Lembar, Bolok, Rote dan Larantuka.
- g. Kegiatan pemantauan tarif di pelabuhan penyeberangan Bolok.
- h. Pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2014 di Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Nusa Tenggara Barat

## 7. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN PEMECAHANNYA

### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar khususnya adalah:

- 1) Jumlah Personil (PNS) untuk melaksanakan tupoksi OPP Lembar belum memadai, saat ini jumlah pegawai PNS Kantor OPP Lembar sebanyak 12 Orang termasuk Kepala Kantor yang terdiri dari 8 Orang di Lembar dan 4 Orang di Pelabuhan Sape (merupakan PNS dulunya di perbantukan di PT. ASDP) sedangkan wilayah kerja Kantor OPP Lembar mencakup 9 Pelabuhan yang tersebar di wilayah Bali, NTB dan NTT.
- 2) Belum adanya pembagian teknis pelaksanaan bagian di lapangan, guna memperlancar pelaksanaan tupoksi.

### b. Upaya – Upaya Pemecahan

Guna memperlancar pelaksanaan tupoksi, maka Kantor OPP Lembar perlu menambah jumlah personilnya, untuk itu Kantor OPP Lembar berkoordinasi dengan STTD dan BP2TD Palembang untuk memperbantukan alumni – alumni STTD dan BP2TD Palembang untuk bekerja sebagai tenaga bantu di Kantor OPP Lembar.

## H. KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN (K-OPP) PAGIMANA

### Kondisi Saat Ini

Pada tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2013, keberadaan KANTOR OPP PAGIMANA, di Provinsi Sulawesi Tengah, baru efektif berjalan. Organisasi Kantor OPP Pagimana dilaksanakan, formasi organisasi, terdiri dari 1(satu) Kepala Kantor OPP Pagimana(eselon III a), 1(satu) Kasubag TU (eselon IVa), dan 1(satu) Kepala Seksi Operasi (eselonIVa), dan 1 (satu) orang Bendahara pengeluaran 6 (enam) orang staf pembantu administrasi kantor sedangkan untuk Kepala Seksi Renbang (eselonIVa) masih belum terisi. Adapun pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, kegiatan rutin dan pengadaan barang inventaris kantor, maupun pelaksanaan koordinasi kelembagaan antar instansi terkait, sebagian besar dirangkap oleh pejabat struktural dan dibantu tenaga personil jasaprofesi.

Untuk menghindari keterlambatan dan upaya peningkatan dan kelancaran proses pekerjaan pada Satuan Kerja Kantor OPP Pagimana, terutama dalam penyusunan laporan administrasi perkantoran, penyusunan sistim akutansi, laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan rutin dan proses pelaksanaan pengadaan barang berupa inventaris kantor yang menjadi Milik Negara, seperti Pengadaan Meublair, (Meja, Kursi Kerja), Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2, Kantor OPP Pagimana mengajukan permohonan dan meminta bantuan personil dari Kantor Otoritas Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk.

Secara umum, pelaksanaan pekerjaan rutin dan pengadaan barang Kantor OPP Pagimana, dapat dilakukan dan dikerjakan dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal satuan organisasi di Kantor OPP Pagimana, ditambah dukungan Petugas Tenaga Sekuriti dan Tenaga Kebersihan. Adapun pemberian honorarium tenaga personil tersebut diatas berasal dari DIPA Satker Kantor OPP Pagimana No. DIPA-002.03.2.606503-00/2013, 05 Desember 2013.

#### a. Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang Administrasi di lingkungan Kantor OPP Pagimana, adalah kegiatan ketata usahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

##### 1) Urusan Umum

Ditinjau dari kegiatan administrasi perkantoran berupa surat yang dikeluarkan dan surat yang masuk selama periode Tahun Anggaran Anggaran 2013, terhitung mulai bulan Januari s/d akhir bulan Desember 2013, sebanyak 105 lalu lintas surat menyurat di lingkungan Kantor OPP Pagimana dengan rincian data sebagai berikut :

- Surat Masuk sebanyak : 69 kali
- Surat Keluar sebanyak : 36 kali

##### 2) Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana di Luwuk telah dilaksanakan dengan baik, sesuai kemampuan yang ada dioptimalkan, termasuk Pengawasan barang-barang Inventaris Kantor. Namun dalam pengelolaannya, secara jujur diakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan signifikan, sebagian besar dipengaruhi oleh kekurangan pegawai di lingkungan Kantor OPP Pagimana.

Dapat kami sampaikan para pegawai yang ditugaskan di Kantor OPP Pagimana, para petugas keamanan dan petugas kebersihan, dapat bekerjasama dengan baik, melakukan inventarisasi barang milik pemerintah dan aktif melakukan pengawasan barang-barang inventaris yang tersedia saat ini di Kantor OPP Pagimana

#### b. Bidang Kepegawaian

Untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan rutin dan penyelenggaraan pembangunan (pengadaan barang perkantoran) di lingkungan internal Kantor OPP Pagimana, dan melaksanakan TUPOKSI, maka aspek ketersediaan dan peranan

keberadaan personil (pegawai) cukup penting, termasuk kesiapan dan kemampuan baik kualitas dan kuantitas.

Pada tahun anggaran 2013, terhitung mulai Januari tahun 2013 s/d Desember 2013, jumlah Pegawai PNS dilingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana di Luwuk sebanyak 21 (dua puluh satu) orang serta 4 (empat) masih dalam proses mutasi, dan pegawai honorer sebanyak 4 (empat) yang terdiri dari Petugas Keamanan Kantor (security) sebanyak 2 orang dan Petugas Kebersihan sebanyak 1 (satu) orang dan Pengemudi sebanyak 1 (satu) orang.

#### c. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2013

DIPA Satker Kantor OPP Pagimana diterima terhitung tanggal 05 Desember 2012, dan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 2013 diterima pada tanggal 05 Desember 2012 dengan pelaksanaan pekerjaan selama 12 bulan kerja tahun 2013. Adapun daftar kegiatan yang termuat di dalam DIPA dan POK tahun 2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel V.30. Program dan Kegiatan Satker OPP Pagimana**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETL	JUMLAH BIAYA (Ribuan)
1	Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat	Rp.6.000.000
2	Rencana Teknis Pengembangan SDP	Rp.3.150.000
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 1.562.026
4	Layanan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Rp.1.408.978

Sumber : Kantor OPP Pagimana, Tahun 2013.

#### d. Realisasi Pelaksanaan DIPA Tahun 2013

Pada Tahun Anggaran 2013, terhitung mulai bulan Januari 2013, Kantor OPP Pagimana, memperoleh dana anggaran yang dituangkan dalam DIPA No. DIPA-002.03.2.606503-00/2013, 05 Desember 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Modal dan Barang yang telah direalisasikan sebesar Rp. 5.690.242.125,- atau terserap sebesar 94,84 % dan Sisa Anggaran 309.757.875 atau 5,16 %.

- a) Pertanggung Jawaban keuangan atas realisasi penggunaan anggaran tersebut secara berkala dilaporkan dalam bentuk Laporan Bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan pengiriman serta tembusan – tembusannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Pemeriksaan Kas, dilakukan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah dilaksanakan

sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku yakni setiap Triwulan disamping itu pula pada waktu – waktu tertentu dilaksanakan pemeriksaan bila diperlukan.

**e. Permasalahan yang dihadapi**

- a) Belum tersedianya kantor yang permanen, sehingga perlu ipersiapkan segera pengalokasian anggaran untuk penyediaan lahan dan bangunan Kantor OPP Pagimana
- b) Belum tersedianya pegawai yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi Kantor OPP Pagimana sedangkan penyediaan tenagaalih daya tidak disetujui, sehingga kebutuhan pegawai didapat dari tenaga magang dan bantuan sementara dari Dishubkominfo Propinsin Sulteng.
- c) Daya Serap Kantor OPP Pagimana Tahun2013 sudah optimal sebesar 94,84%
- d) Operasional dilapangan masih terkendala dengan jumlah personil dan sarana operasional yang terbatas yang dimiliki oleh Kantor OPP Pagimana.
- e) Keberadaan aturan setingkat Keputusan Menteri Perhubungan dan SK Direktur Jenderal yang tidak selarasdengan PM 85 Tahun 2011 perlu direview seperti : KM 52 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan, Sehingga selaras dengan PERMENHUB NOMOR : 85 Tahun 2011.

**f. Upaya Pemecahan**

- a) Telah diusulkan kebutuhan anggaran untuk penyediaan lahan kantor pada TA. 2014.
- b) Mengusulkan kebutuhan pegawai ke Kantor PusatdanUntuk saat ini sekiranya Kantor Pusatdapat dicarikan solusi pembiayaan buat tenaga bantu yang bukan PNS alokasi insentifnya.
- c) Meminta bantuan Pegawai sementara kelnstansi terkait seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah, DishubkominfoKab. Banggai, Kantor UPP Luwuk , Kantor Otoritas Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk melalui surat.

**I. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN KARIANGAU**

**1. PENDAHULUAN**

UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah membawa dampak sosial dan ekonomi positif terutama ketersediaan fasilitas bongkar muat yang memadai sehingga dapat memperlancar

mobilisasi dan distribusi kebutuhan pokok kendaraan maupun penumpang serta memperlancar pelaksanaan program pemerintah di kawasan hinterland Pelabuhan Penyeberangan.

Untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi dan peningkatan kinerja ekonomi yang memerlukan pengembangan sarana dan prasarana lainnya, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau melalui Pembina Teknis dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan pembenahan infrastruktur meliputi fasilitas pokok dan penunjang.

## **2. OPERASIONAL**

Selaku operator pelabuhan penyeberangan dalam kaitan aspek operasional Pelabuhan Penyeberangan Kariangau mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan yang diantaranya termasuk :

- a. Perencanaan sistem zona
- b. Perencanaan jumlah kapal
- c. Perencanaan waktu bongkar muat kapal
- d. Perencanaan penilikan, pemanfaatan dan perawatan sarana
- e. Pelaksanaan program kerja, pengawasan dan evaluasi.

## **3. PEMBANGUNAN**

Dalam aspek pembangunan ini UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau melakukan kegiatan untuk meningkatkan kinerja dengan membangun berbagai sarana termasuk revitalisasi sarana prasarana berupa perawatan agar dapat berfungsi optimal serta menjaga fasilitas yang ada didalam area kerja UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau.

#### 4. DATA PRODUKSI WILAYAH KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN KARIANGAU

Tabel.V.31. Data Produksi Angkutan Penyeberangan Lintasan Balikpapan - Mamuju

TANGGAL	KEDATANGAN													KEBERANGKATAN													Trip	
	PENUMPANG		I	II	III	IVa	IVb	Va	Vb	VIa	VIb	VII	VIII	PENUMPANG		I	II	III	IVa	IVb	Va	Vb	VIa	VIb	VII	VIII		
	DWS	ANK												DWS	ANK													
JANUARI	1.266	264	0	87	0	51	0	4	127	0	5	0	0	20	983	143	0	94	0	34	0	0	76	0	18	0	0	19
PEBRUARI	1.378	274	0	76	0	44	0	0	188	0	6	0	0	25	1.042	218	0	102	0	32	0	0	118	0	8	0	0	23
MARET	1.494	265	0	97	0	41	0	0	146	0	6	3	0	24	1.042	208	0	124	0	42	0	0	112	0	6	0	0	22
APRIL	1.531	278	0	115	0	63	0	0	144	0	8	0	0	21	1.049	171	0	106	0	52	0	0	128	0	14	3	0	21
MEI	1.540	288	0	87	0	44	0	0	104	0	4	0	0	15	1.344	228	0	111	0	40	0	0	88	0	3	0	0	15
JUNI	1.837	540	0	100	0	42	0	0	93	0	8	0	0	14	1.428	282	0	144	0	58	0	0	64	0	5	0	0	15
JULI	1.939	583	0	68	0	59	0	0	74	0	1	0	0	22	1.892	424	0	184	0	43	0	0	43	0	3	0	0	21
AGUSTUS	3.630	1.056	0	289	0	70	0	0	83	0	14	0	0	24	2.739	619	0	373	0	75	0	0	72	0	7	1	0	22
SEPTEMBER	1.773	305	0	122	0	59	0	0	201	0	71	2	0	29	1.218	220	0	99	0	52	0	0	157	0	69	2	0	30
OKTOBER	2.624	320	0	135	0	63	3	0	153	0	45	4	0	22	2.133	388	0	209	0	59	0	0	112	0	27	3	0	21
NOVEMBER	1.624	217	0	93	0	46	0	0	37	0	1	1	0	12	1.288	324	0	93	0	36	0	0	27	0	5	1	0	12
DESEMBER	1.772	258	0	85	0	37	0	0	56	0	3	3	0	15	2.059	435	0	152	0	58	0	0	43	0	6	0	0	15
<b>Jumlah</b>	<b>22.408</b>	<b>4.648</b>	<b>0</b>	<b>1.354</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1.406</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>18.217</b>	<b>3.660</b>	<b>0</b>	<b>1.791</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>236</b>

Tabel.V.32. Data Produksi Angkutan Penyeberangan Lintasan Kariangau - Penajam

TANGGAL	MUATAN													
	PENUMPANG		KENDARAAN											TRIP JML
	DWS	ANK	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IVa	GOL IVb	GOL Va	GOL Vb	GOL VIa	GOL VIb	GOL VII	GOL VIII	
			JML	JML	JML	JML	JML	JML	JML	JML	JML	JML	JML	
(UNIT)			(UNIT)	(UNIT)	(UNIT)	(UNIT)	(UNIT)	(UNIT)	(UNIT)	(UNIT)	(UNIT)	(UNIT)		
<b>JANUARI</b>	3075	3	0	6695	3	7680	4128	69	6180	409	1138	912	162	1119
<b>FEBRUARI</b>	2176	4	0	4993	7	6309	3750	69	5531	358	1188	858	155	995
<b>MARET</b>	2550	0	0	5926	17	7036	4273	91	5926	373	1260	968	158	1093
<b>APRIL</b>	2311	0	4	5693	21	6448	3869	69	5794	332	1347	1033	152	1120
<b>MEI</b>	2495	0	1	5895	36	7279	3868	136	5881	384	1301	1197	160	1115
<b>JUN</b>	3096	10	24	6516	10	7846	3924	124	5418	387	1219	986	157	1074
<b>JULI</b>	2555	3	0	6019	6	6553	4103	144	5448	384	1182	1038	171	1046
<b>AGUSTUS</b>	6948	0	0	12751	0	10913	4027	149	3490	534	778	830	177	1226
<b>SEPTEMBER</b>	3199	0	0	6527	0	6885	3917	140	4968	344	986	855	192	1078
<b>OKTOBER</b>	3629	10	0	7787	3	7829	4148	142	5016	375	976	956	203	1072
<b>NOVEMBER</b>	2879	83	10	6587	8	6568	3933	134	5523	362	979	968	211	1023
<b>DESEMBER</b>	3158	122	0	6991	5	8375	4482	167	5196	406	1090	1013	208	1063
<b>JUMLAH</b>	38071	235	39	82380	116	89721	48422	1434	64371	4648	13444	11614	2106	13024

Tabel.V.33. Data Produksi Angkutan Penyeberangan Lintasan Balikpapan – Taipa

BULAN	KEDATANGAN														KEBERANGKATAN																
	DEWASA	ANAK	I	II	III	IVa	IVb	Va	Vb	Vla	Vlb	VII	VIII	TRIP	DEWASA	ANAK	I	II	III	IVa	IVb	Va	Vb	Vla	Vlb	VII	VIII	TRIP			
JANUARI	255	26	0	28	0	14	21	0	29	0	5	1	2	6	267	20	0	27	0	13	3	0	28	0	11	6	3	6			
PEBRUARI	303	37	0	23	0	17	8	0	40	0	8	3	2	8	160	57	0	49	0	24	2	0	32	0	15	0	0	8			
MARET	358	0	15	0	13	1	3	17	1	10	1	1	2	6	199	26	0	17	0	12	2	0	19	0	4	2	0	6			
APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MEI	399	77	0	57	0	19	18	0	33	0	13	4	4	8	371	23	0	39	6	19	8	0	39	0	9	3	4	9			
JUNI	271	45	0	49	0	25	7	0	32	0	10	0	0	8	482	76	0	57	0	34	16	0	48	0	5	0	1	8			
JULI	247	37	0	23	0	19	7	0	26	0	10	0	0	7	414	49	0	38	0	28	7	0	37	0	9	1	2	7			
AGUSTUS	600	55	0	41	0	19	6	1	12	0	7	0	0	7	630	97	0	80	0	33	8	0	21	0	7	0	0	7			
SEPTEMBER	392	72	0	27	0	10	7	0	21	0	15	0	1	6	193	11	0	26	0	31	11	0	16	0	14	1	1	7			
OKTOBER	231	34	0	27	0	5	1	0	18	0	7	1	0	6	296	23	0	41	0	25	11	0	21	0	10	5	0	7			
NOVEMBER	325	45	0	16	0	12	4	0	28	0	5	1	0	6	194	11	0	36	0	30	7	0	18	0	7	7	2	7			
DESEMBER	201	32	0	22	0	15	3	0	19	0	10	1	0	6	549	59	0	47	0	77	6	0	27	0	13	0	2	7			
<b>JUMLAH</b>	3.582	460	15	313	13	156	85	18	259	10	91	12	11	74	3.755	452	0	457	6	326	81	0	306	0	104	25	15	79			
<b>JUMLAH KEDATANGAN PENUMPANG</b>										<b>(ORANG)</b>		<b>4042</b>														<b>JUMLAH KEBERANGKATAN PENUMPANG</b>		<b>(ORANG)</b>		<b>4207</b>	
<b>JUMLAH KEDATANGAN KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)</b>										<b>(UNIT)</b>		<b>642</b>														<b>JUMLAH KEBERANGKATAN KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)</b>		<b>(UNIT)</b>		<b>857</b>	
<b>LOAD FACTOR KEDATANGAN PENUMPANG</b>										<b>%</b>		<b>13,66</b>														<b>LOAD FACTOR KEBERANGKATAN PENUMPANG</b>		<b>%</b>		<b>13,31</b>	
<b>LOADFACTOR KEDATANGAN KEND. RODA 4 (EMPAT)</b>										<b>%</b>		<b>39,43</b>														<b>LOADFACTOR KEBERANGKATAN KEND. RODA 4 (EMPAT)</b>		<b>%</b>		<b>49,31</b>	

**Keterangan :**

- Ferry yang beroperasi untuk lintasan Kariangau - Taipa adalah 1 (satu) unit Ferry yaitu:

**1. KMP. MADANI ( PT. ASDP INDONESIA FERRY(PERSERO) )**

Keterangan : Kapasitas penumpang = **400 orang**, dan kendaraan Roda 4 = **22 unit**

## J. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN GORONTALO

### 1. LATAR BELAKANG

Perhubungan merupakan salah satu Kementerian Teknis yang secara langsung membina dan mengawasi keseluruhan moda angkutan dengan sejumlah instrument sebagai perangkat pendukung bersama instansi teknis lainnya.

Kementerian Perhubungan mengatur kompleksitas kegiatan angkutan yang meliputi darat, laut dan udara yang kegiatannya terakomodir dalam berbagai substansi yang selanjutnya untuk mempertajam pencapaian sasaran maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat membawahi Unit Pelaksana Teknis yang ada untuk mengimplementasikan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pelabuhan Penyeberangan secara umum merupakan simpul transportasi moda penyeberangan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan bongkar muat terkait arus barang dan penumpang yang sangat berkaitan erat dengan aspek-aspek ekonomi dan sosial yang berada dalam jangkauan pelayanan angkutan penyeberangan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawali pengoperasian sejak Tahun 1997 telah membawa dampak sosial dan ekonomi positif terutama ketersediaan fasilitas bongkar muat yang memadai sehingga dapat memperlancar mobilisasi dan distribusi kebutuhan pokok kendaraan maupun penumpang serta memperlancar pelaksanaan program pemerintah di kawasan hinterland Pelabuhan Penyeberangan.

Dampak peningkatan aksesibilitas transportasi adalah peningkatan kinerja ekonomi yang memerlukan pengembangan sarana dan prasarana lainnya, untuk itu Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo melalui Pembina Teknis dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan pembenahan infrastruktur meliputi fasilitas pokok dan penunjang lainnya antara lain Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo, Pembangunan Elevated Gang Way Dermaga II beserta kegiatan Belanja Modal lainnya.

Dengan melihat bahwa betapa pentingnya Pelabuhan Penyeberangan termasuk Gorontalo yang ikut memberikan kontribusi bagi sosial maupun ekonomi terutama ketersediaan moda angkutan penyeberangan yang pasti dan berkelanjutan maka sebagai bahan evaluasi yang tertuang dalam berbagai kegiatan yang menggambarkan capaian, kendala serta solusi selama Tahun Anggaran 2013.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan Laporan Komprehensif Tahun Anggaran 2013 adalah memberikan gambaran yang menyeluruh atas keseluruhan kegiatan kepelabuhanan yang dilakukan baik capaian, kendala maupun solusi meliputi kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang dicapai sekaligus sebagai acuan untuk menindaklanjuti hal-hal yang kiranya dirasakan masih kurang untuk optimalisasi kegiatan kepelabuhanan.

### a. DASAR HUKUM

- 1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- 7) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa beserta Perubahan Kedua pada Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012;
- 8) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Penyeberangan.
- 9) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
- 10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
- 12) DIPA UPT. Kantor Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Nomor 022.03.1.603920/2014 Tanggal 5 Desember 2013.

### 3. PEMERINTAHAN

#### a. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo maka aspek ketersediaan personil (pegawai) cukup penting menyangkut kualitas dan kuantitas. Adapun jumlah SDM yang ada saat ini sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai, terdiri dari 11 (sebelas) orang PNS, 7 (tujuh) orang tenaga honorer serta 9 (sembilan) orang tenaga kontrak (data terlampir).

Dengan melihat dari jumlah yang ada maka dapat mendukung kegiatan operasional yang semakin meningkat seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa angkutan penyeberangan yang berkesinambungan. Sedangkan dari segi kualitas masih dirasakan masih kurang dan masih harus melakukan diklat atau pelatihan terkait tupoksi masing-masing personil. Oleh karena itu pada Tahun 2013 kami telah mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti diklat teknis antara lain Diklat Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan di Balai Diklat Transportasi Darat Palembang, Diklat Bendaharawan di Pusdiklat Perbendaharaan Negara di Gadog dan Diklat Teknis pada Pusat Pendidikan Aparatur Perhubungan di Bogor.

Menilik pada kondisi yang ada maka telah diupayakan agar dengan Sumber Daya Manusia serta infrastruktur yang ada dapat menumbuhkan kinerja yang berkelanjutan serta berusaha untuk membenahi hal-hal yang dirasakan masih kurang. Diharapkan dengan upaya dimaksud dapat lebih meningkatkan kemampuan untuk kelancaran operasional sesuai bidang tugas masing-masing.

Secara umum untuk melakukan tugas kepelabuhanan yang optimal maka dilakukan pembagian tugas operasional setiap bulan serta pada tatanan administrasi dibuat pembagian tugas/Job Description (terlampir) yang masing-masing bertanggung jawab kepada atasan langsung sehingga melakukan koordinasi intern dan antar pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan kepelabuhanan.

Hal-hal yang turut mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai antara lain :

- 1) Keikutsertaan dalam diklat/kursus teknis fungsional serta komposisi diklat yang pernah diikuti dirasakan masih kurang bila dihubungkan dengan kebutuhan. Hal yang menjadi kendala yaitu alokasi dana diklat yang cukup terbatas.
- 2) Dengan melihat data pegawai maka komposisi Tenaga Honorer serta Tenaga Kontrak yang mencapai 64% (enam puluh empat persen) dan sudah kami usulkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan kiranya mereka dapat dipertimbangkan untuk diakomodir dalam database sesuai ketentuan yang berlaku.

## **b. Tata Kelola Keuangan**

### **1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)**

Sebagai konsekuensi kegiatan operasional maka Pemerintah telah menetapkan regulasi pentarifan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Sebagai tindak lanjut dari penetapan tarif tersebut maka dijabarkan dalam bentuk karcis pas masuk dan dilakukan pelayanan jasa sesuai peruntukan pas tersebut dengan masing-masing nominal sesuai ketentuan.

Hasil pelayanan jasa dilakukan oleh Fungsional Lalu Lintas dan Jasa dan Bendahara Penerima untuk disetor ke kas negara. Untuk target PNPB Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo sebesar Rp. 75.000.000,- dimana sampai dengan bulan Desember 2013 telah mencapai Rp. 83.647.000,- atau 111 % (Seratus Sebelas Persen).

### **2) Anggaran Rutin**

Pada Tahun Anggaran 2013, Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo mendapat alokasi dana dalam DIPA sebesar Rp. 12.175.026,-. Dengan total realisasi keuangan adalah 100% dan realisasi fisik 100%.

### **3) Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (LKMN)**

Keberadaan barang inventaris milik negara sebagai sarana penting untuk mendukung optimalisasi kegiatan kepelabuhanan. Dalam hal pengusulan penghapusan untuk mengetahui kondisi fisik BMN maka telah dikeluarkan opname untuk menentukan efektif dan tidaknya keseluruhan inventaris yang dikelola sesuai ketentuan Inventaris Kekayaan Milik Negara Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo, yang berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagai wewenang Menteri Perhubungan dalam rangka pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut maka MAK PB Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo melakukan inventarisasi dan pelaporan berkala yang meliputi keseluruhan barang yang dimiliki. Untuk mengisi kekosongan Barang Inventaris akan diusulkan penggantian agar operasional kepelabuhanan tidak terganggu pada Tahun Anggaran 2014.

### c. Operasional

Operasional meliputi keseluruhan kegiatan kepelabuhanan termasuk pelayanan jasa, kondisi yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman serta penataan lalu lintas angkutan di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan pengamanan areal kolam pelabuhan. Secara umum Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo melayani 3 (tiga) lintasan yaitu:

1) Gorontalo – Pagimana ( setiap hari )

Dilayani oleh KMP. Baronang 526 GT dengan kapasitas muat 250 orang penumpang dan 21 unit kendaraan campuran serta KMP. Adhi Swadarma III 511 GT dengan kapasitas muat 210 orang penumpang dan 17 unit kendaraan campuran.

2) Gorontalo – Wakai – Ampana (2 x seminggu)

Dilayani oleh KMP. Tuna Tomini 546 GT dengan kapasitas muat 240 orang penumpang dan 14 unit kendaraan campuran.

3) Marisa – Dolong – Ampana – Parigi (2 x seminggu)

Dilayani oleh KMP. Cengkih Afo 510 GT dengan kapasitas muat 220 orang penumpang dan 14 unit kendaraan campuran.

Mengingat pentingnya ketersediaan layanan angkutan yang berperan penting dalam sistem transportasi nasional maka seringkali terjadi komplain dari pihak pengguna jasa ketika salah satu kapal yaitu KMP. Adhi Swadarma keluar lintasan sejak Bulan November 2013 untuk melaksanakan docking namun hingga saat ini kapal tersebut belum kembali ke lintasan Gorontalo – Pagimana.

### d. Pembangunan

Kegiatan yang menyangkut pembangunan merupakan hal yang sangat penting terutama rehabilitasi dan pengembangan fisik infrastruktur. Untuk lebih mengoptimalkan penggunaan fasilitas pada Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo maka kami melakukan perawatan terhadap semua fasilitas sesuai dengan anggaran yang ada serta memberdayakan segenap staf untuk saling mengoptimalkan serta menjaga fasilitas yang ada.

Untuk Tahun Anggaran 2013 ini, kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan dan selesai pekerjaannya mencapai 100% adalah sebagai berikut :

- |  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 1) Pengerukan Kolam Pelabuhan                      | : | Rp. 3.943.957.000,- |
| 2) Kajian Lingkungan Hidup Pengerukan Kolam Plbhn: |   | Rp. 200.000.000,-   |
| 3) Pembangunan Elevated Gang Way Dermaga II        | : | Rp. 1.734.278.000,- |

4) Pengadaan 1 unit Kendaraan Ops Roda IV : Rp. 270.000.000,-

#### **4. KENDALA DAN SOLUSI**

Dengan melihat keseluruhan kegiatan yang dilakukan maka pada setiap aspek terdapat kendala antara lain :

##### **a. Aspek Operasional**

###### 1) Kendala

Terjadi komplain dari pengguna jasa ketika KMP. Adhi Swadarma tidak kembali ke lintasan Gorontalo – Pagimana setelah melaksanakan docking.

###### 2) Solusi

Kami telah meminta klarifikasi dan berdiskusi dengan pihak operator ketika terjadi docking tahunan agar pelayanan jasa angkutan dapat diberikan secara maksimal serta memuaskan para pengguna jasa serta telah melaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengenai KMP. Adhi Swadarma yang hingga saat ini belum kembali ke lintasannya.

##### **b. Aspek Pemerintahan**

###### 1) Kendala

Terdapat 56 % (lima puluh enam persen) status pegawai adalah tenaga honorer dan kontrak maka sangat mempengaruhi kinerja kepegawaian di lingkungan kerja

###### 2) Solusi

Kami akan mengusulkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat agar dapat dipertimbangkan sesuai formasi untuk dapat diangkat sebagai CPNS sesuai ketentuan.

##### **c. Aspek Pembangunan**

###### 1) Kendala

Tidak Ada Kendala.

#### **5. HARAPAN YANG DIINGINKAN**

Semoga dengan tersajikannya laporan keseluruhan kegiatan pada Tahun Anggaran 2013 ini, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sejauh mana capaian, kendala dan solusi yang sedang dan akan ditempuh agar secara bertahap dapat dilakukan perbaikan serta peningkatan kualitas pelayanan jasa Angkutan Penyeberangan demi mewujudkan pelayanan prima terhadap para pengguna jasa.

Tabel.V.34. Data Produktifitas Angkutan Lintasan Gorontalo Pagimana Tahun 2013

Bulan	Pelabuhan	Trip	Penumpang		Jml Pnp	Jm. Pnp dlm Kend	Jm. Pnp Total	Kendaraan Roda 2			Jml. Roda 2	Kendaraan Roda 4								Jml. Roda 4	Load Factor (%)	
			Dewasa	Anak2				Gol. I	Gol. II	Gol. III		Gol. IV		Gol. V		Gol. VI		Gol. VII	Gol. VIII		Pnp	Roda4
												Pnp	Brg	Pnp	Brg	Pnp	Brg					
Jan	GORONTALO (BERANGKAT)	31	2.765	288	3.053	3.442	6.495	0	265	0	265	24	9	164	0	5	0	0	0	202	73	37
	PAGIMANA ( TIBA )	31	3.014	302	3.316	3.554	6.870	0	269	0	269	26	10	166	0	7	0	0	0	209	49	31
	GORONTALO-PAGIMANA	62	5.779	590	6.369	6.996	13.365	0	534	0	534	50	19	330	0	12	0	0	0	411	61	34
Feb	GORONTALO (BERANGKAT)	28	1.883	192	2.075	783	2.858	0	160	0	160	25	18	0	147	0	3	0	1	194	36	40
	PAGIMANA ( TIBA )	27	2.048	235	2.283	642	2.925	0	149	0	149	10	12	0	125	0	7	3	0	157	37	33
	GORONTALO-PAGIMANA	55	3.931	427	4.358	1.425	5.783	0	309	0	309	35	30	0	272	0	10	3	1	351	36	36
Mar	GORONTALO (BERANGKAT)	31	1.989	237	2.226	728	2.954	5	181	0	186	18	18	0	109	0	5	1	0	151	33	28
	PAGIMANA ( TIBA )	31	1.839	190	2.029	931	2.960	0	228	0	228	31	18	0	138	0	3	1	0	191	33	35
	GORONTALO-PAGIMANA	62	3.828	427	4.255	1.659	5.914	5	409	0	414	49	36	0	247	0	8	2	0	342	33	31
Apr	GORONTALO (BERANGKAT)	30	2.568	222	2.790	806	3.596	4	159	0	163	34	26	0	124	0	3	2	0	189	42	36
	PAGIMANA ( TIBA )	30	2.327	229	2.556	830	3.386	0	234	0	234	0	30	0	150	0	1	0	0	181	40	34
	GORONTALO-PAGIMANA	60	4.895	451	5.346	1.636	6.982	4	393	0	397	34	56	0	274	0	4	2	0	370	41	35
Mei	GORONTALO (BERANGKAT)	31	2.428	343	2.771	878	3.649	2	180	0	182	32	14	0	155	0	7	1	0	209	41	39
	PAGIMANA ( TIBA )	31	2.882	287	3.169	971	4.140	0	197	0	197	31	19	0	183	0	7	1	1	242	46	45
	GORONTALO-PAGIMANA	62	5.310	630	5.940	1.849	7.789	2	377	0	379	63	33	0	338	0	14	2	1	451	44	42
Jun	GORONTALO (BERANGKAT)	30	2.916	375	3.291	952	4.243	6	222	0	228	32	15	0	151	0	2	0	0	200	50	38
	PAGIMANA ( TIBA )	30	3.414	386	3.800	967	4.767	1	227	0	228	25	16	0	173	0	4	0	0	218	55	42
	GORONTALO-PAGIMANA	60	6.330	761	7.091	1.919	9.010	7	449	0	456	57	31	0	324	0	6	0	0	418	53	40
Juli	GORONTALO (BERANGKAT)	31	2.955	364	3.319	1.085	4.404	3	296	0	299	41	10	0	129	0	2	0	0	182	50	34
	PAGIMANA ( TIBA )	31	3.197	348	3.545	1.011	4.556	0	231	0	231	35	26	0	158	0	3	0	0	222	52	41
	GORONTALO-PAGIMANA	62	6.152	712	6.864	2.096	8.960	3	527	0	530	76	36	0	287	0	5	0	0	404	51	37
Agust	GORONTALO (BERANGKAT)	31	3.316	341	3.657	1.864	5.521	7	578	11	596	82	9	0	121	0	0	1	0	213	62	40
	PAGIMANA ( TIBA )	31	5.950	588	6.538	2.313	8.851	0	772	0	772	115	0	0	97	0	0	0	0	212	101	39
	GORONTALO-PAGIMANA	62	9.266	929	10.195	4.177	14.372	7	1.350	11	1.368	197	9	0	218	0	0	1	0	425	81	39
Sept	GORONTALO (BERANGKAT)	30	2.021	206	2.227	763	2.990	3	167	0	170	17	29	0	136	0	1	3	0	186	35	36
	PAGIMANA ( TIBA )	30	3.088	325	3.413	856	4.269	0	256	0	256	10	22	0	110	1	0	0	0	143	47	28
	GORONTALO-PAGIMANA	60	5.109	531	5.640	1.619	7.259	3	423	0	426	27	51	0	246	1	1	3	0	329	41	32
Okt	GORONTALO (BERANGKAT)	31	1.837	163	2.000	604	2.604	0	120	0	120	4	15	0	152	0	5	0	0	176	25	30
	PAGIMANA ( TIBA )	31	2.197	220	2.417	673	3.090	0	150	0	150	1	15	0	163	0	6	0	0	185	28	31
	GORONTALO-PAGIMANA	62	4.034	383	4.417	1.277	5.694	0	270	0	270	5	30	0	315	0	11	0	0	361	27	31
Nop	GORONTALO (BERANGKAT)	22	1.903	188	2.091	676	2.767	0	143	0	143	6	18	0	156	0	6	0	0	186	42	44

	PAGIMANA ( TIBA )	22	2.312	246	2.558	679	3.237	0	148	0	148	1	18	0	167	0	4	0	0	190	44	42
	GORONTALO-PAGIMANA	44	4.215	434	4.649	1.355	6.004	0	291	0	291	7	36	0	323	0	10	0	0	376	43	43
Des	GORONTALO (BERANGKAT)	15	2.016	219	2.235	938	3.173	0	204	0	204	26	15	0	180	0	5	0	0	226	48	72
	PAGIMANA ( TIBA )	16	2.276	238	2.514	1.023	3.537	0	203	0	203	49	0	0	185	0	1	0	0	235	50	35
	GORONTALO-PAGIMANA	31	4.292	457	4.749	1.961	6.710	0	407	0	407	75	15	0	365	0	6	0	0	461	49	71
Total	GORONTALO (BERANGKAT)	341	28.597	3.138	31.735	13.519	45.254	30	2.675	11	2.716	341	196	164	1.560	5	39	8	1	2.314	44,64	39,33
	PAGIMANA ( TIBA )	372	37.309	3.882	41.191	17.892	59.083	1	3.329	0	3.330	358	195	330	1.649	13	36	5	1	2.587	48,50	36,23
	GORONTALO-PAGIMANA	713	65.906	7.020	72.926	31.411	104.337	31	6.004	11	6.046	699	391	494	3.209	18	75	13	2	4.901	46,57	37,78

Tabel.V.35. Data Produktifitas Angkutan Lintasan Gorontalo – Wakai Ampana Tahun 2013

Bulan	Pelabuhan	Trip	Penumpang		Jml Pnp	Jm. Pnp dim Kend	Jm. Pnp Total	Kendaraan Roda 2			Jml. Roda 2	Kendaraan Roda 4								Jml. Roda 4	Load Factor (%)		
			Dewasa	Anak2				Gol. I	Gol. II	Gol. III		Gol. IV		Gol. V		Gol. VI		Gol. VII	Gol. VIII		Pnp	Roda4	
												Pnp	Brg	Pnp	Brg	Pnp	Brg						
Jan	GORONTALO (BERANGKAT)	8	954	102	1.056	104	1.160	0	34	0	34	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	52	7
	WAKAI AMPANA ( TIBA )	8	911	86	997	119	1.116	0	45	0	45	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	50	5
	GORONTALO-WAKAI AMPANA	16	1.865	188	2.053	223	2.276	0	79	0	79	11	0	0	5	0	0	0	0	0	0	51	6
Feb	GORONTALO (BERANGKAT)	8	655	68	723	84	807	0	17	0	17	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	7
	WAKAI AMPANA (TIBA)	8	572	54	626	61	687	0	22	0	22	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	31	3
	GORONTALO-WAKAI AMPANA	16	1.227	122	1.349	145	1.494	0	39	0	39	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	33	5
Mar	GORONTALO (BERANGKAT)	9	869	111	980	86	1.066	0	41	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	42	1
	WAKAI AMPANA (TIBA)	9	581	78	659	91	750	0	29	0	29	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	30	6
	GORONTALO-WAKAI AMPANA	18	1.450	189	1.639	177	1.816	0	70	0	70	5	4	0	1	0	1	0	0	0	0	36	4
Apr	GORONTALO (BERANGKAT)	3	219	27	246	14	260	0	6	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	31	2
	WAKAI AMPANA (TIBA)	3	332	58	390	24	414	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0
	GORONTALO-WAKAI AMPANA	6	551	85	636	38	674	0	18	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	40	1
Mei	GORONTALO (BERANGKAT)	9	646	88	734	60	794	0	24	0	24	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	32	2
	WAKAI AMPANA ( TIBA )	9	633	96	729	84	813	0	28	0	28	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32	5
	GORONTALO-WAKAI AMPANA	18	1.279	184	1.463	144	1.607	0	52	0	52	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	32	4
Jun	GORONTALO (BERANGKAT)	9	786	89	875	59	934	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	1
	WAKAI AMPANA ( TIBA )	9	836	109	945	70	1.015	0	28	0	28	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	40	3
	GORONTALO-WAKAI AMPANA	18	1.622	198	1.820	129	1.949	0	55	0	55	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	39	2
Juli	GORONTALO (BERANGKAT)	10	1.001	92	1.093	97	1.190	0	40	0	40	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	43	2
	WAKAI AMPANA (TIBA)	10	997	117	1.114	84	1.198	0	10	0	10	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	43	10
	GORONTALO-WAKAI AMPANA	20	1.998	209	2.207	181	2.388	0	50	0	50	13	7	0	1	0	0	0	0	0	0	43	6
Agust	GORONTALO (BERANGKAT)	9	1.409	161	1.570	190	1.760	0	88	0	88	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	70	3
	WAKAI AMPANA ( TIBA )	9	1.454	138	1.592	218	1.810	0	93	0	93	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	72	7

	GORONTALO-WAKAI AMPANA	18	2.863	299	3.162	408	3.570	0	181	0	181	6	3	0	5	0	0	0	0	0	71	5
Sept	GORONTALO (BERANGKAT)	8	599	39	638	64	702	0	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
	WAKAI AMPANA ( TIBA )	9	679	69	748	59	807	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1
	GORONTALO-WAKAI AMPANA	17	1.278	108	1.386	123	1.509	0	59	0	59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
Okt	GORONTALO (BERANGKAT)	9	525	63	588	48	636	0	19	0	19	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25	3
	WAKAI AMPANA (TIBA)	9	577	64	641	56	697	0	24	0	24	0	4	0	0	0	0	0	0	0	28	3
	GORONTALO-WAKAI AMPANA	18	1.102	127	1.229	104	1.333	0	43	0	43	0	9	0	0	0	0	0	0	0	26	3
Nop	GORONTALO (BERANGKAT)	9	572	67	639	64	703	0	20	0	20	0	4	1	0	0	0	0	0	0	28	3
	WAKAI AMPANA ( TIBA )	9	564	57	621	60	681	0	27	0	27	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	2
	GORONTALO-WAKAI AMPANA	18	1.136	124	1.260	124	1.384	0	47	0	47	0	7	1	0	0	0	0	0	0	27	3
Des	GORONTALO (BERANGKAT)	9	539	56	595	75	670	0	25	0	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3
	WAKAI AMPANA ( TIBA )	9	633	57	690	122	812	0	46	0	46	6	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4
	GORONTALO-WAKAI AMPANA	18	1.172	113	1.285	197	1.482	0	71	0	71	11	0	0	0	0	0	0	0	0	29	4
Total	GORONTALO (BERANGKAT)	100	8.774	963	9.737	945	10.682	0	373	0	337	29	9	1	8	0	2	0	0	0	37,75	2,89
	WAKAI AMPANA ( TIBA )	109	9.723	1.085	10.808	1.152	11.960	0	425	0	425	46	27	0	9	0	0	0	0	0	38,80	3,96
	GORONTALO-WAKAI AMPANA	209	18.497	2.048	20.545	2.097	22.642	0	798	0	762	75	36	1	17	0	2	0	0	0	38,28	3,42

**Tabel.V.36. Data Produktifitas Angkutan Lintasan Marisa – Dolong Ampana Parigi Tahun 2013**

Bulan	Pelabuhan	Trip	Penumpang		Jml Pnp	Jm. Pnp dlm Kend	Jm. Pnp Total	Kendaraan Roda 2			Jml. Roda 2	Kendaraan Roda 4								Jml. Roda 4	Load Factor (%)		
			Dewasa	Anak2				Gol. I	Gol. II	Gol. III		Gol. IV		Gol. V		Gol. VI		Gol. VII	Gol. VIII		Pnp	Roda4	
												Pnp	Brg	Pnp	Brg	Pnp	Brg						
Jan	GORONTALO (BERANGKAT)	9	1.286	122	1.408	48	1.456	0	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0
	DOLONG AMPANA PARIGI ( TIBA )	10	757	65	822	30	852	1	14	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	19	2.043	187	2.230	78	2.308	1	38	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0
Feb	GORONTALO (BERANGKAT)	8	496	41	537	46	583	0	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
	DOLONG AMPANA PARIGI (TIBA)	9	411	29	440	34	474	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	17	907	70	977	80	1.057	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
Mar	GORONTALO (BERANGKAT)	8	380	38	418	37	455	0	15	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1
	DOLONG AMPANA PARIGI(TIBA)	9	343	47	390	41	431	0	17	1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	17	723	85	808	78	886	0	32	2	34	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1
Apr	GORONTALO (BERANGKAT)	7	240	27	267	22	289	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
	DOLONG AMPANA PARIGI (TIBA)	7	273	27	300	30	330	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	14	513	54	567	52	619	0	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
Mei	GORONTALO (BERANGKAT)	6	231	11	242	24	266	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0

	DOLONG AMPANA PARIGI ( TIBA )	6	192	9	201	18	219	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	12	423	20	443	42	485	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
Jun	GORONTALO (BERANGKAT)	6	561	66	627	44	671	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0
	DOLONG AMPANA PARIGI ( TIBA )	6	402	46	448	26	474	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	12	963	112	1.075	70	1.145	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0
Juli	GORONTALO (BERANGKAT)	9	621	68	689	54	743	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
	DOLONG AMPANA PARIGI (TIBA)	9	539	49	588	62	650	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	18	1.160	117	1.277	116	1.393	0	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
Agust	GORONTALO (BERANGKAT)	9	822	88	910	98	1.008	0	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0
	DOLONG AMPANA PARIGI( TIBA )	9	861	95	956	100	1.056	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	18	1.683	183	1.866	198	2.064	0	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0
Sept	GORONTALO (BERANGKAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DOLONG AMPANA PARIGI ( TIBA )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Okt	GORONTALO (BERANGKAT)	2	65	5	70	12	82	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
	DOLONG AMPANA PARIGI (TIBA)	2	46	10	56	4	60	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	4	111	15	126	16	142	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
Nop	GORONTALO (BERANGKAT)	10	341	32	373	36	409	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
	DOLONG AMPANA PARIGI( TIBA )	12	326	33	359	26	385	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	22	667	65	732	62	794	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
Des	GORONTALO (BERANGKAT)	11	314	26	340	30	370	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
	DOLONG AMPANA PARIGI ( TIBA )	13	293	35	328	42	370	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	24	607	61	668	72	740	0	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Total	GORONTALO (BERANGKAT)	85	5.357	524	5.881	451	6.332	0	222	1	212	1	0	0	0	0	0	0	0	28,16	0,05
	DOLONG AMPANA PARIGI ( TIBA )	101	5.729	567	6.296	461	6.757	1	226	1	228	1	0	0	0	0	0	0	0	22,15	0,05
	GORONTALO-DOLONG AMPANA PARIGI	186	11.086	1.091	12.177	912	13.089	1	448	2	440	2	0	0	0	0	0	0	0	25,15	0,05

Keterangan : KMP. Cengkih Afo Docking di Bulan September s/d Pertengahan Oktober

## K. UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN KALABAH

Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi merupakan satu – satunya Pelaksana Teknis Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang berlokasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan langkah yang tertuang dalam Visi : *Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi adalah satu – satunya Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur, dengan pelayanan prima dan kehandalan infrastruktur serta komitmen yang kuat, untuk menjadi akses alih moda transportasi yang nyaman dan terkendali serta menjadi indikator perekonomian di masa depan.* Sedangkan Misi : *Membangun mobilitas kepelabuhanan yang berbasis kinerja meliputi tatakelola pelabuhan serta pengendalian operasional untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan yang nyaman, aman dan berkelanjutan. Secara umum pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.*

Sesuai rumusan tersebut di atas bahwa Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi dalam kiprahnya sejak pertengahan 1996 membawa dampak sosial ekonomi yang positif dimana animo masyarakat akan kebutuhan jasa kepelabuhanan mengalami peningkatan.

Seiring dengan pertumbuhan tersebut maka Pihak Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi berbenah diri dengan melakukan berbagai upaya untuk mengimbangi perkembangan tersebut diantaranya melakukan penilikan dan perawatan infrastruktur yang intensif termasuk menilai prosentasi nilai ekonomis berbagai Barang Milik Negara untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Lintasan penyeberangan yang dilayani adalah masing – masing dari Kalabahi tujuan Teluk Gurita, Bolok dan Baranusa hingga Larantuka dengan menggunakan Lintasan Perintis dan Komersil.

Dengan melihat karakteristik angkutan penyeberangan antara lain :

- a. Mengangkut kendaraan – kendaraan dan penumpang secara bersama
- b. Mengangkut barang yang berada dalam kendaraan
- c. Mudah dalam bongkar muat yaitu dengan menggunakan sistim Roll – On / Roll Of (Ro/Ro)

d. Pelayanan tarif bersifat reguler dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain (pada beberapa lintasan terdapat 3 atau lebih pelabuhan dengan jadwal tetap dan dengan frekwensi trip yang tinggi).

Apabila dihubungkan konstruksi sistem Ro/Ro dengan karakteristik tersebut yang berlaku pada Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi maka tidak sepenuhnya dapat terpenuhi diantaranya muatan barang dominan diletakkan pada car deck yang mestinya khusus untuk kendaraan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kecepatan bongkar muat kapal.

Sebagaimana ditegaskan Keputusan Menteri Perhubungan KM. 60 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan, bahwa pelabuhan penyeberangan mempunyai tugas melakukan urusan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan, pemeliharaan, perawatan swarana prasarana pelabuhan serta kemandirian dan ketertiban dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Pelabuhan Penyeberangan.
- b. Pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan serta pelayanan jasa kepelabuhanan
- c. Pelaksanaan pemilikan, pemeliharaan dan perawatan bangunan, dll
- d. Pelaksanaan urusan penerimaan pendapatan jasa pelabuhan
- e. Urusan keamanan dan ketertiban serta bantuan SAR

Lebih lanjut dalam undang – undang nomor 17 tahun 2001 tentang Pelayaran bahwa angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan melihat realitas yang ada pada Pelabuhan Penyeberangan kalabahi maka pengembangan fasilitas dan refitalisasi prasarana menjadi kebutuhan agar dapat tersedia layanan jasa kepelabuhanan yang memadai untuk memacu pembangunan di sektor perhubungan yang ikut meningkatkan nilai sosial ekonomi bagi masyarakat.

## 1. UMUM

Secara umum pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal sandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat labuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi dalam operasionalnya menggunakan struktur organisasi Klas II dan merupakan home base untuk lintasan pelayaran dari Kalabahi menuju Kupang, Teluk Gurita dan Baranusa hingga Larantuka, Flores Timur.

Pelabuhan penyeberangan termasuk salah satu pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan dan angkutan penyeberangan itu sendiri berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Penetapan lintasan angkutan penyeberangan yang merupakan trayek tetap dan teratur dengan mempertimbangkan aspek :

- a. Pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan.
- b. Fungsi sebagai jembatan.
- c. Hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu.

## **2. OPERASIONAL**

Selaku operator pelabuhan penyeberangan dalam kaitan aspek operasional mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan yang diantaranya termasuk :

- a. Perencanaan sistem zona
- b. Perencanaan jumlah kapal
- c. Perencanaan waktu bongkar muat kapal
- d. Perencanaan penilikan, pemanfaatan dan perawatan sarana
- e. Pelaksanaan program kerja, pengawasan dan evaluasi.

## **3. PEMBANGUNAN**

Dalam aspek ini disamping, mobilitas sumber daya manusia, perencanaan yang didalamnya termasuk pelaksanaan dan hingga evaluasi kerja maka aspek pembangunan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kinerja dengan membangun berbagai sarana termasuk revitalisasi sarana prasarana berupa perawatan agar dapat berfungsi optimal.

## **4. DASAR HUKUM**

Yang merupakan dasar hukum dari pembuatan laporan tahunan ini adalah :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan nomor : KM. 60 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan
- b. Undang – undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran
- c. DIPA Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi nomor : 0836/022-03,1,01/22/2012

- d. Keputusan Menteri Perhubungan nomor : 52 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
- e. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK. N. 2681/AP.005/DJPD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan
- f. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
- g. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 26 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
- h. Perdirjen No. SK. 242/HK.204/DJPD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalulintas Penyeberangan

## 5. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari laporan tahun 2013 adalah menyajikan data yang meliputi berbagai aspek termasuk pemerintahan, operasional dan pembangunan termasuk didalamnya kendala, solusi agar dapat memenuhi unsur karakteristik pelabuhan penyeberangan itu sendiri.

Sedangkan yang menjadi tujuannya bahwa penyajian ini diharapkan sebagai referensi atau indikator dalam membuat kebijakan serta pola perencanaan yang antisipatif yang berbasis pada misi Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi yaitu membangun mobilitas kepelabuhanan yang berbasis kinerja meliputi tata kelola pelabuhan serta pengendalian operasional untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

## 6. KINERJA ANGKUTAN PENYEBERANGAN (Lintas, Sarana dan Produksi)

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari cakupan laporan tahunan ini adalah :

### a. Pemerintahan

#### 1) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tercapainya tujuan pokok dan fungsi pelabuhan penyeberangan maka ketersediaan sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas sangat penting. Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi hingga sekarang memiliki jumlah pegawai operasional sebagai berikut :

**Tabel.V.37. Data Pegawai Operasional UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi**

No	NAMA / NIP	GOL	STATUS	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Venny W.Loho	Penata Muda TK. I, III b	PNS	SI
2.	Musa E. Thonak	Penata Muda TK. I, III b	PNS	SI
3.	Jermias Meda	Penata Muda, III a	PNS	SI
4.	Marcelinus Ceunfin	Pengatur Tk I, II d	PNS	SMA
5.	Indra Brilian	Pengatur, II c	PNS	D IV

No	NAMA / NIP	GOL	STATUS	PENDIDIKAN TERAKHIR
6.	Yaan Sem Appah	Pengatur, II c	PNS	D IV
7.	Yohanis Frans	Pengatur, II c	PNS	D III
8.	Yunus A. Saku	Pengatur, II c	PNS	D III
9.	Semi Rosidi Manit	Pengatur, II c	PNS	D III
10.	Strina Alita Lifu	-	Honor	SI
11.	Maqbul Dalang	-	Honor	SMA
12.	M. Syamsudin	-	Honor	SMA
13.	Maria Y.M. Sibü	-	Honor	SMA
14.	Happy Wardhani	-	Honor	SMA
15.	Seprison Sibü	-	Honor	SMA
16.	Frederikus Sanang	-	Honor	SMA
17.	Ahmad Saputra	-	Honor	SMA
18.	Burhanudin Laara	-	Honor	SMA
19.	Arianto Bala	-	Honor	SMP
20.	Dominggus M.	-	Honor	-
21.	Rajab P. Pakh	-	Honor	SMP
22.	Semuel Selly	-	Honor	SD

Alokasi tenaga honorer tersebut dimulai sejak tanggal 1 januari 2005 yang kehadiran mereka sangat membantu untuk semua kegiatan kepelabuhanan terkecuali tugas – tugas yang hanya boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai kelanjutan dari kebutuhan tersebut maka sesuai hasil verifikasi maka terdapat 10 (sepuluh) tenaga honorer yang mengikuti seleksi.

Dengan melihat tingkat perbandingan status yang relative besar maka kondisi tersebut dapat mempengaruhi kinerja demi untuk mempertahankan jumlah pegawai yang sudah ada, maka sangat diharapkan tenaga honorer yang bertugas di Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi kiranya dapat lolos dalam seleksi dimaksud.

Dari segi kualitas maka telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM dengan Pegawai Negeri Sipil dalam berbagai kursus dan pelatihan. Selain Diklat tersebut yang sudah dan sedang dilaksanakan yang sebagian besar dibiayai oleh penyelenggara juga belum tersedianya sumber daya manusia untuk menunjang tugas operasional yaitu kualifikasi kepelautan untuk operasional speed boat 2 (dua) buah baik nautika maupun mesin dan juga pengelolaan BMN untuk memberikan kepastian layanan.

Untuk mengantisipasi hal – hal tersebut maka telah dilakukan perencanaan secara berkala agar PNS yang bersangkutan dapat menerima hak sesuai ketentuan termasuk pengusulan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan gaji berkala maka para PNS menerima perubahan gaji berkala sebanyak 2 (dua) orang dan selebihnya kenaikan pangkat pilihan 1 (satu) orang.

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia maka dilakukan secara bertahap dan pada tahun 2013 sebagaimana tersebut diatas Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi telah mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat/Kursus Teknis/Fungsional lainnya yaitu :

- a) Diklat Bendahara Penerimaan
- b) Diklat PPNS

Disamping Diklat/khusus teknis tersebut maka untuk meningkatkan kapasitas PNS maka dilihat dalam berbagai Bimtek diantaranya keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa dan lain – lain.

- a) Diklat Barang dan Jasa Pemerintah
- b) Diklat Teknis Lainnya.

## 2) Manajemen dan Ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada sebuah pelabuhan penyeberangan sesuai ketentuan maka penerapannya dalam bentuk manajemen dan ketatausahaan, sehubungan dengan rutinitas ketatausahaan maka naskah dinas adalah :

- Surat Masuk : 184 buah
- Surat Keluar : 432 buah

### b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sebagai konsekuensi kegiatan operasional maka pemerintah telah menetapkan regulasi tarif yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2004 tentang “ Jenis dan tarif atas penerimaan negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan”

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan, Bidang transportasi darat termasuk Jasa Pelabuhan Penyeberangan Perintis dalam negeri sebagaimana tercantum pada lampiran PP. Nomor 6 tahun 2009

**Tabel.V.38. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Tahun Anggaran 2013**

BULAN	JENIS PENERIMAAN					JUMLAH	KET.
	JASA TANDA MASUK	DEMAGA	SANDAR	SEWA TANAH	SEWA RUANGAN/LISTRIK		
JANUARI	688.900	49.900	312.576	-	252.237	1.303.613	
PEBRUARI	635.000	64.000	734.621	-	252.237	1.938.095	
MARET	640.800	55.700	-	-	-	696.500	
APRIL	1.655.500	92.600	746.799	-	252.237	2.747.136	
MEI	1.751.700	68.400	698.866	39.000	252.237	2.810.203	

<b>JUNI</b>	1.597.600	130.500	755.177	-	252.237	<b>2.735.514</b>
<b>JULI</b>	2.374.000	139.300	613.783	-	252.237	<b>3.379.320</b>
<b>AGUSTUS</b>	1.801.400	104.000	812.330	-	252.237	<b>2.969.967</b>
<b>SEPTEMBER</b>	1.836.700	131.400	715.082	-	252.237	<b>2.935.419</b>
<b>OKTOBER</b>	1.479.800	105.800	758.668	-	252.237	<b>2.596.505</b>
<b>NOPEMBER</b>	1.554.000	120.100	524.205	-	252.237	<b>2.450.542</b>
<b>DESEMBER</b>	584.800	36.300	-	-	-	<b>621.100</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.600.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>6.672.107</b>	<b>39.000</b>	<b>2.774.607</b>	<b>27.183.914</b>

### c. Inventarisasi Barang Milik Negara

Barang Milik Negara perlu mendapat penanganan mulai dari perencanaan hingga realisasi termasuk didalamnya kegiatan inventaris berupa pencatatan dalam berbagai dokumen inventaris kantor.

Berikut Barang Milik Negara yang merupakan aset :

**Tabel.V.39. Inventarisasi Barang Milik Negara**

No	Nama Barang	Satuan	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	M2	40,550	10.000.000,-	
2	Transportable Generating Set	Unit	2	28.914.000,-	
3	Transportable Water Pump	Unit	1	250.000,-	
4	Sepeda Motor	Unit	4	74.500.000,-	
5	Kendaraan/Mobil Pengawalan	Unit	1	266.182.250,-	
6	Speed Boat/Motor Tempel	Unit	2	598.175.000,-	
7	Mesin Ketik Manual Standar(14-16 inci)	Buah	1	3.000.000,-	
8	Mesin Hitung Manual	Buah	1	100.000,-	
9	Lemari Kayu	Buah	2	7.000.000,-	
10	Filling Cabinet Besi	Buah	10	26.446.000,-	
11	Brankas	Buah	1	2.959.000,-	
12	Tabung Pemadam Api	Buah	4	20.000.000,-	
13	Meja Kerja Kayu	Buah	35	37.121.000,-	
14	Kursi Kayu	Buah	13	13.000.000,-	
15	Meja Komputer	Buah	2	782.000,-	
16	Kursi Fiber Glass/Plastik	Buah	200	40.800.000,-	
17	A.C. Window	Buah	1	1.655.000,-	
18	A.C. Split	Buah	4	18.392.000,-	
19	Radio	Buah	1	1.480.000,-	
20	Televisi	Buah	2	7.080.000,-	
21	Stabilisator	Buah	2	2.000.000,-	
22	Professional Sound System	Buah	1	9.900.000,-	
23	Camera Digital	Buah	1	12.000.000,-	
24	Pesawat Telepon	Buah	1	218.000,-	
25	Handy Talky (HT)	Buah	2	518.000,-	

No	Nama Barang	Satuan	Kuantitas	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
26	Facsimile	Buah	1	5.000.000,-	
27	Telepon Lapangan	Buah	10	5.000.000,-	
28	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	Buah	1	3.000.000,-	
29	Kursi Zeis	Buah	1	1.439.000,-	
30	Uninterrupted Power System	Buah	2	16.000.000,-	
31	Kursi Gynecology	Buah	8	6.945.000,-	
32	Mesin Potong Jerami	Buah	2	11.000.000,-	
33	Laboratory Air Conditioner 1 HP	Buah	1	5.000.000,-	
34	Serial Scanner/Printer	Buah	2	9.000.000,-	
35	P.C Unit	Buah	4	27.953.000,-	
36	Laptop	Buah	5	84.525.000,-	
37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	5.148.000,-	
38	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	584.547.000,-	
39	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	3	51.148.000,-	
40	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Unit	1	0,-	
41	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Unit	2	85.010.000,-	
42	Jalan Khusus Lainnya	M2	10.210,-	764.700.000,-	
43	Bangunan Penguat Tebing / Pantai	Unit	2	587.508.000,-	
44	Bangunan Dermaga	Unit	2	7.840.066.000,-	
45	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir air Minum	Unit	1	7.975.000,-	

Barang Milik Negara tersebut senantiasa dilakukan penilikan secara berkala maupun insidental guna memastikan kondisi efektif terkini yang menunjang kinerja pelayanan. Untuk itu sebagai tindaklanjut dari hal tersebut maka sesuai Surat Keputusan Pembentukan Tim Opname Fisik BMN dan hasilnya berupa rekomendasi penghapusan dan Kuasa Pengguna Barang Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi telah mengusulkan Permohonan Pembentukan Panitia Penghapusan.

#### d. Operasional

Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sebagaimana tersebut bahwa Pelabuhan Penyeberangan mempunyai karakteristik tertentu diantaranya memiliki lintasan reguler dan tetap di pola operasi yang menggunakan system Ro/Ro.

Berikut lintasan yang dilayani adalah :

**Tabel.V.40. Lintasan Yang Dilayani Oleh Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi**

No.	Lintasan	Status	Jarak (mil)	Frekuensi/Minggu	Kapal yang beroperasi
1.	Kalabahi – Kupang	Komersil	126	3	Secara bergantian
2.	Kalabahi – Teluk Gurita – Wetar - Kiser	Perintis	80	2	Pulau Sabu
3.	Kalabahi – Baranusa, Lewoleba, Larantuka	Perintis	190	2	Nampamos

Dalam bahasan ini lebih difokuskan kepada kegiatan angkutan penyeberangan yang diterapkan dalam manajemen angkutan penyeberangan yaitu :

- Pembagian tugas operasional sesuai jadwal
- Perencanaan Zona
  - Mengingat volume angkutan serta ketersediaan prasarana yang tidak memadai maka dilaksanakan Zona sebagai berikut :
  - c) Zona A meliputi Pintu Masuk
  - d) Zona B meliputi Parkir Sepeda Motor dan Mobil termasuk yang menyeberang dan yang melakukan bongkar muat di atas kapal
  - e) Zona C meliputi parkir kendaraan debarkasi dan pintu keluar
- Jumlah kapal yang beroperasi disesuaikan dengan jumlah lintasan
- Perencanaan waktu bongkar muat dibuat seefektif mungkin terdapat waktu yang cukup untuk kegiatan embarkasi mengingat sebagian besar barang diletakan di cardeck yang seharusnya untuk kendaraan ikut mempengaruhi kinerja bongkar muat
- Perencanaan penilikan, pemanfaatan dan perawatan infrastruktur dilakukan secara efektif termasuk melaporkan keseluruhan kondisi sesuai hasil pengamatan kepada Kepala Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi guna dilakukan tindakan seperlunya
- Pelaksanaan program kerja, pengawasan dan evaluasi senantiasa dilakukan guna mengetahui sejauh mana kondisi sarana pendukung pelabuhan

#### e. Pembangunan

Pelabuhan Penyeberangan kini memiliki dua dermaga yang satu dengan sistem bongkar muat Movable Bridge dan yang lain berupa plengsengan dengan fasilitas sandar sistem

dolphin yang pentahapan telah dilakukan untuk tahun anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.687.818.000,- dan lanjutannya akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya hingga dapat berfungsi secara optimal.

**f. Hasil yang dicapai**

Melihat keseluruhan kegiatan yang dilakukan diberbagai aspek yang positif dapat meningkatkan kinerja dan keseluruhan infrastruktur dapat diketahui kondisinya secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan pokok dan fungsi dan masih banyak hal yang perlu dibenahi termasuk faktor kendala internal dan eksternal organisasi antara lain belum adanya legalitas hak tanah yang justru merupakan persyaratan untuk pengembangan prasarana penyeberangan.

**g. Kegiatan – kegiatan Strategis**

Kegiatan strategis dalam kaitan kepelabuhanan terutama infrastruktur adalah lanjutan pembangunan dermaga plengsengan Kalabahi II dengan tipe plengsengan dolphin yang kelanjutannya telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2014 hingga dapat berfungsi optimal untuk efektivitas bongkar muat penumpang dan kendaraan.

**h. Permasalahan Yang Dihadapi**

- Sumber Daya Manusia yang belum memadai dari segi jumlah untuk mengakomodir kegiatan kepelabuhanan
- Untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan, masih terkendala legalitas tanah yang sampai dengan sekarang masih merupakan asset milik Pemerintah Kabupaten Alor dan hanya diserahkan kepada pihak pelabuhan penyeberangan kalabahi berupa ijin rekomendasi penggunaan tanah seluas 11.000 m<sup>2</sup> tidak termasuk pengembangan tanah berupa urukan atau timbunan lebih kurang 5000 m<sup>2</sup>.

**i. Upaya Pemecahan**

- dari segi Sumber Daya Manusia bahwa oleh karena kegiatan kepelabuhanan sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk mengantisipasi kekurangan pegawai maka telah diadakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan status honorer dan alokasi dana bersumber dari APBN murni sejak tahun 2005 sebanyak 13 orang maka setelah dilakukan berbagai verifikasi maka terdapat 10 tenaga honorer yang lolos masuk dalam data base Kategori II dan seleksi untuk CPNS pada bulan November 2013 yang sampai sekarang belum ada pengumuman perihal hasil seleksi tersebut.

- Untuk pengembangan infrastuktur pelabuhan lainnya yang terkendala karena legalitas tanah maka kami telah mengajukan surat permohonan pengalihan status tanah ke pihak pelabuhan penyeberangan Kalabahi seluas 11.000 m2 dan sebagai informasi bahwa dari pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Alor telah menyetujuinya dan masih menunggu pertemuan dengan DPRD untuk meminta persetujuan termasuk tata cara alih status hak atas tanah tersebut sesuai ketentuan.

**BAB VI****PENUTUP**

Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2013 merupakan wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013.

Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini tercermin pelaksanaan kegiatan dibidang transportasi darat yaitu pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya tuntutan pelayanan jasa angkutan darat khususnya dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Secara umum laporan tahunan ini menggambarkan kegiatan-kegiatan transportasi darat yang meliputi bidang angkutan jalan, bidang angkutan penyeberangan dan bidang angkutan perkotaan serta keselamatan transportasi darat yang membutuhkan faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan, operasional dan pembangunan yaitu dengan adanya kebijakan dan program yang jelas, tersedianya sumber daya manusia yang memadai, sistem kerjasama dan koordinasi yang baik, serta didukung dengan peralatan kerja yang cukup.

Sedangkan Balai, KOPP dan UPT dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat perlu peningkatan pelayanan jasa angkutan, serta terus mempertahankan dan mengembangkan pelayanan jasa angkutan dengan terus melakukan peningkatan kinerja pelayanan secara berkesinambungan yaitu dengan peningkatan kinerja SDM yang ada.

# LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI

## ANGKUTAN NATAL TAHUN 2013 DAN TAHUN BARU 2014

### 1. MODA ANGKUTAN UMUM

Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014 secara umum dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Realisasi jumlah penumpang hingga tanggal 30 Desember 2013 untuk semua moda (jalan, SDP, KA, Laut dan Udara) mengalami peningkatan sebesar 8.9% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 dari 5,148,889 penumpang menjadi 5,651,709 penumpang pada tahun 2013

Tabel 1  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Umum  
Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014

NO	MODA ANGKUTAN UMUM	JUMLAH PENUMPANG		%
		2012	2013	
1	<b>Moda Darat</b>	<b>1,066,784</b>	<b>1,378,944</b>	<b>22.64</b>
	<i>a. Angkutan Jalan</i>	<i>183,051</i>	<i>218,565</i>	<i>19.40</i>
	<i>b. Angkutan SDP</i>	<i>883,733</i>	<i>1,160,379</i>	<i>23.84</i>
2	<b>Moda Kereta Api</b>	<b>1,591,435</b>	<b>1,692,951</b>	<b>6.00</b>
	<i>a. Utama</i>	<i>675,062</i>	<i>799,699</i>	<i>15.59</i>
	<i>b. Lokal</i>	<i>916,373</i>	<i>893,252</i>	<i>-2.59</i>
3	<b>Moda Laut</b>	<b>513,016</b>	<b>430,507</b>	<b>-19.17</b>
4	<b>Moda Udara</b>	<b>1,977,654</b>	<b>2,149,307</b>	<b>7.99</b>
	<i>a. Domestik</i>	<i>1,701,387</i>	<i>1,812,429</i>	<i>6.13</i>
	<i>b. Internasional</i>	<i>276,267</i>	<i>336,878</i>	<i>17.99</i>
<b>TOTAL</b>		<b>5,148,889</b>	<b>5,651,709</b>	<b>8.90</b>

Sumber : Posko Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014

Ket:

\*) Monitoring Moda Angkutan Jalan dimulai tanggal 20 Desember 2013; data update 30 Desember 2013; (5 Terminal)

\*) Monitoring Moda Angkutan SDP dimulai tanggal 21 Desember 2013; data update 29 Desember 2013; (11 Lintasan)

\*) Monitoring Moda KA dimulai tanggal 20 Desember 2013; data update 28 Desember 2013; (9 Daop dan 3 Divre)

\*) Monitoring Moda Laut dimulai tanggal 18 Desember 2013; data update 29 Desember 2013; (52 Pelabuhan)

\*) Monitoring Moda Udara dimulai tanggal 21 Desember 2013; data update 30 Desember 2013; (23 Bandara Domestik dan 4 Bandara Internasional)

Untuk moda jalan, jumlah Terminal yang dilakukan perhitungan penumpang untuk tahun 2013 bertambah menjadi 15 (lima belas) terminal, yang semula pada tahun 2012 hanya 5 (lima) terminal, sehingga perbandingan jumlah penumpang hanya bisa dilakukan terhadap 5 (lima) terminal tersebut yaitu Kp. Rambuatan, Kalideres, Pulo Gadung, Rawamangun dan Yogyakarta.

Untuk penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014, dilakukan perhitungan jumlah penumpang di 15 (lima belas) terminal yaitu terminal Amplas, Rajabasa,

Kp. Rambutan, Kalideres, Pulo Gadung, Rawamangun, Leuwi Panjang, Cicaheum, Tegal, Purwokerto, Terboyo, Giwangan, Purabaya, Mengwi dan Ubung. Sementara itu, 7 (tujuh) terminal lainnya hanya dilakukan monitoring, yaitu terminal Makassar, Manado, Ambon, Manokwari, Jayapura, Kupang, Merak. Sedangkan terminal Lebak Bulus sedang dalam proses pemindahan.

### 1.1. PENUMPANG UMUM MODA ANGKUTAN JALAN

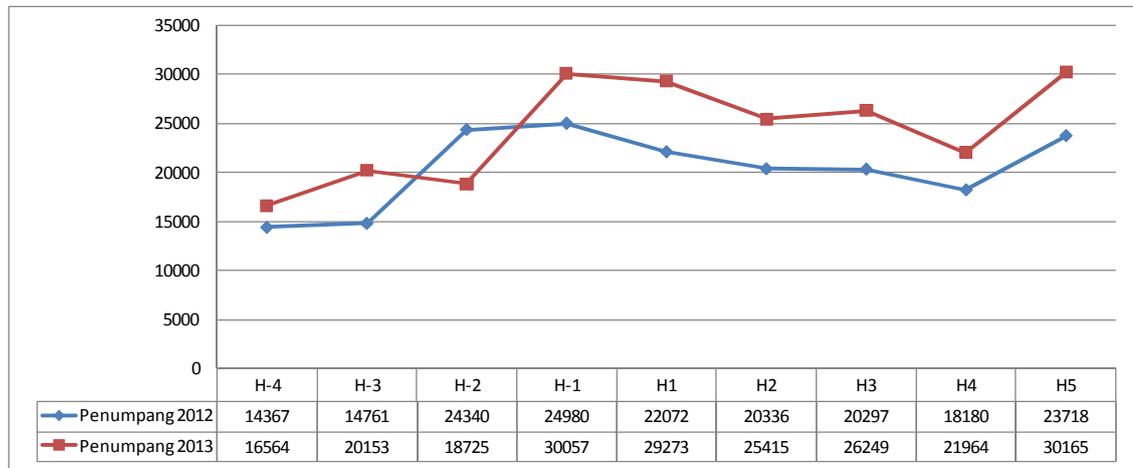
Penumpang moda angkutan jalan berdasarkan data dari H-4 (21 Desember 2013) s.d. H+5 (29 Desember 2013) pada 5 terminal, diketahui jumlah penumpang yang diberangkatkan mengalami peningkatan sebesar 19.4% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 dari 183.051 penumpang menjadi 218.565 penumpang pada tahun 2013.

Tabel 2  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Jalan  
Tahun 2012 dan Tahun 2013

PERIODE HARI	PENUMPANG		% Pertumbuhan
	2012	2013	
H-4	14,367	16,564	15.29
H-3	14,761	20,153	36.53
H-2	24,340	18,725	-23.07
H-1	24,980	30,057	20.32
H1	22,072	29,273	32.63
H2	20,336	25,415	24.98
H3	20,297	26,249	29.32
H4	18,180	21,964	20.81
H5	23,718	30,165	27.18
<b>TOTAL</b>	<b>183,051</b>	<b>218,565</b>	<b>19.40</b>

Sumber : Posko Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014

Gambar 1  
 Grafik Realisasi Jumlah Penumpang Moda Angkutan Jalan  
 Tahun 2012 dan Tahun 2013



Jumlah penumpang moda angkutan jalan datang dan berangkat di 5 terminal pantauan pada Angkutan Natal Tahun 2012 dan Tahun Baru 2013 untuk pantauan pada H-4 (21 Desember 2012) hingga H+5 (29 Desember 2013) sebesar 375.859 dan 326.325 penumpang.

Sedangkan jumlah bus yang datang dan berangkat di 5 terminal pantauan selama periode Angkutan Natal Tahun 2012 dan Tahun Baru 2013 sebesar 24.527 dan 25.836 bus.

Tabel 3  
 Realisasi Jumlah Bus dan Penumpang Moda Angkutan Jalan  
 Di 5 Terminal Tahun 2012

PERIODE HARI	2012			
	BUS		PENUMPANG	
	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT
H-4	1,513	1,391	16,688	14,992
H-3	1,378	1,267	17,243	15,413
H-2	2,388	2,298	32,896	31,619
H-1	3,956	3,668	56,781	56,408
H1	2,287	2,139	35,631	32,799
H2	1,981	3,591	54,205	50,598
H3	4,393	3,802	47,768	43,064
H4	1,982	3,468	50,689	36,730
H5	4,649	4,212	63,958	44,702
<b>TOTAL</b>	<b>24,527</b>	<b>25,836</b>	<b>375,859</b>	<b>326,325</b>

Sumber : Posko Angkutan Natal Tahun 2012 dan Tahun Baru 2013

Jumlah penumpang moda angkutan jalan datang dan berangkat di 15 terminal pantauan pada Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014 untuk pantauan pada H-5

(20 Desember 2013) hingga H+5 (29 Desember 2013) sebesar 1.098.447 dan 1.285.231 penumpang.

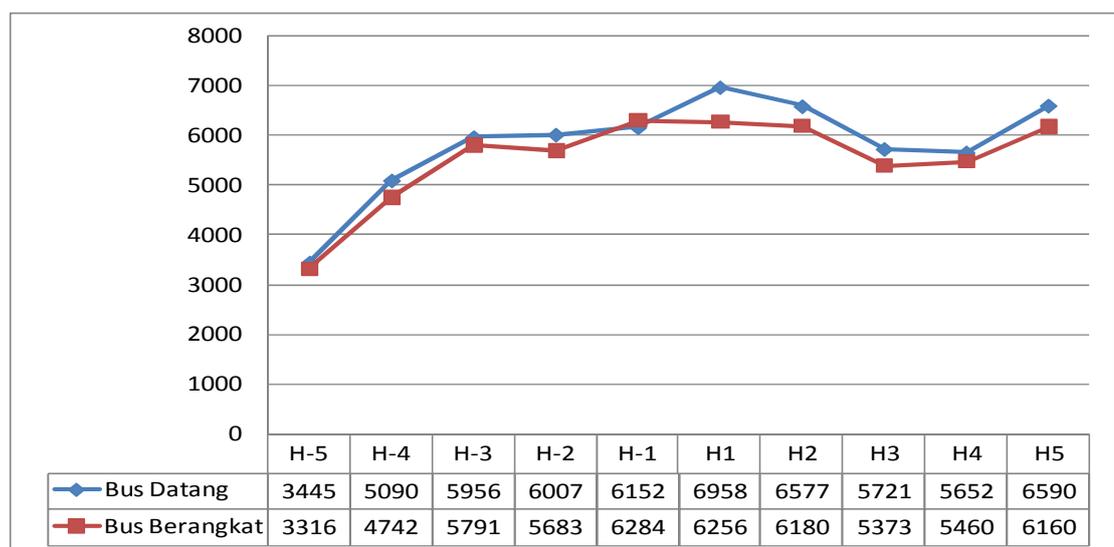
Sedangkan jumlah bus yang datang dan berangkat di 15 terminal pantauan selama periode Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014 sebesar 58.148 dan 55.245 bus.

Tabel 4  
Realisasi Jumlah Bus dan Penumpang Moda Angkutan Jalan  
Di 15 Terminal Tahun 2013

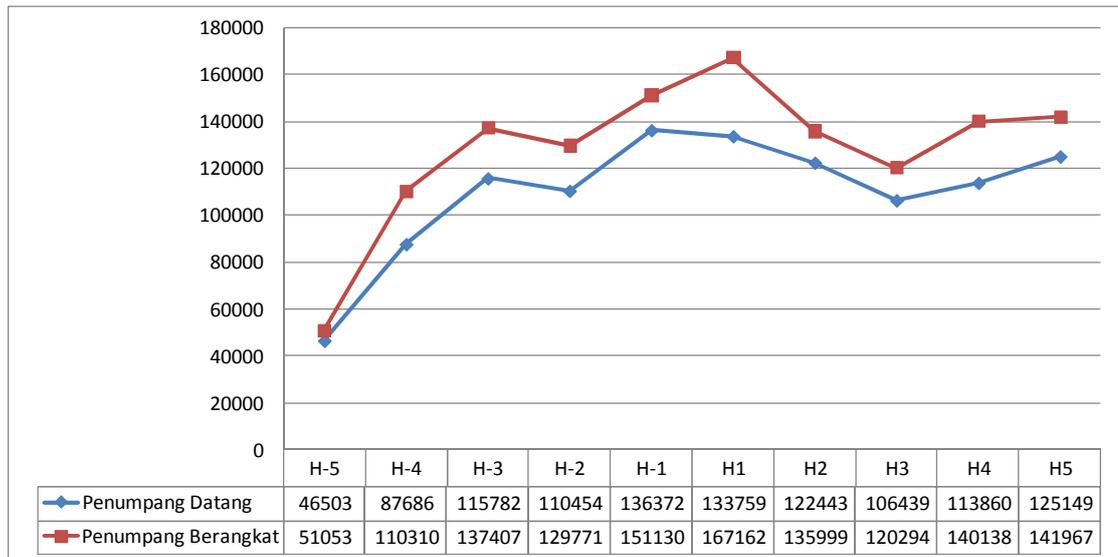
PERIODE HARI	2013			
	BUS		PENUMPANG	
	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT
H-5	3,445	3,316	46,503	51,053
H-4	5,090	4,742	87,686	110,310
H-3	5,956	5,791	115,782	137,407
H-2	6,007	5,683	110,454	129,771
H-1	6,152	6,284	136,372	151,130
H1	6,958	6,256	133,759	167,162
H2	6,577	6,180	122,443	135,999
H3	5,721	5,373	106,439	120,294
H4	5,652	5,460	113,860	140,138
H5	6,590	6,160	125,149	141,967
<b>TOTAL</b>	<b>58,148</b>	<b>55,245</b>	<b>1,098,447</b>	<b>1,285,231</b>

Sumber : Posko Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014

Gambar 2  
Grafik Realisasi Jumlah Bus Moda Angkutan Jalan  
Di 15 Terminal Tahun 2013



Gambar 3  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Jalan  
Di 15 Terminal



## 1.2. PENUMPANG MODA ANGKUTAN PENYEBERANGAN

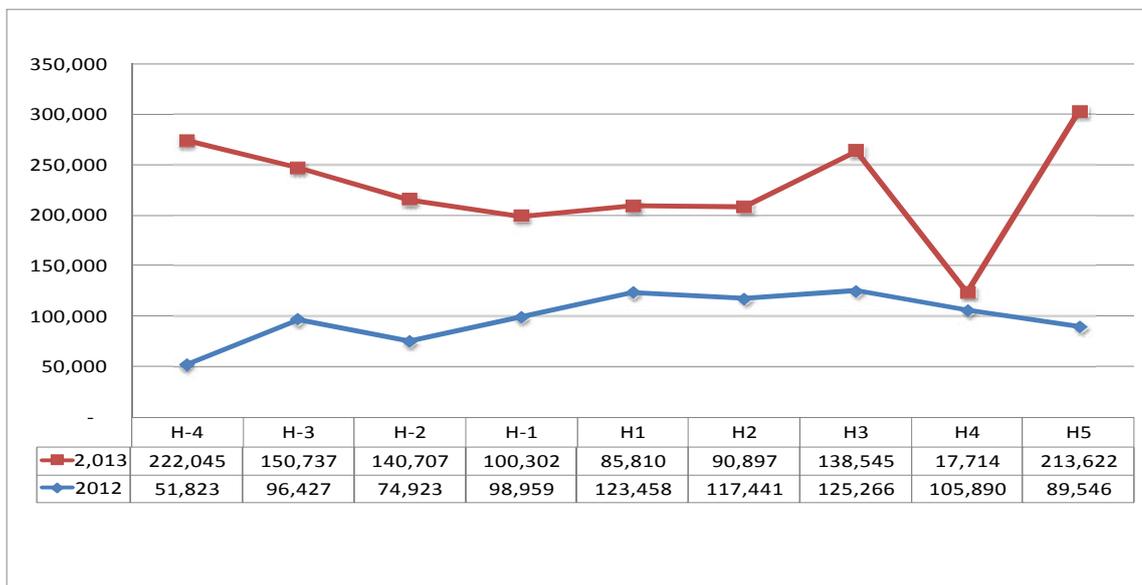
Penumpang moda angkutan penyeberangan berdasarkan data dari H-4 (21 Desember 2013) s.d. H+5 (29 Desember 2013) pada 11 lintasan penyeberangan, diketahui jumlah penumpang yang diberangkatkan mengalami peningkatan sebesar 31.3% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 dari 883.733 penumpang menjadi 1.160.379 penumpang pada tahun 2013.

Tabel 5  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Penyeberangan  
pada 11 Lintasan Penyeberangan

No	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
		2012	2013	
1	H-4	51,823	222,045	328.47
2	H-3	96,427	150,737	56.32
3	H-2	74,923	140,707	87.80
4	H-1	98,959	100,302	1.36
5	H1	123,458	85,810	-30.49
6	H2	117,441	90,897	-22.60
7	H3	125,266	138,545	10.60
8	H4	105,890	17,714	-83.27
9	H5	89,546	213,622	138.56
<b>TOTAL</b>		<b>883,733</b>	<b>1,160,379</b>	<b>31.30</b>

Sumber : Posko Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014

Gambar 4  
Grafik Realisasi Penumpang Moda Angkutan Penyeberangan  
Pada 11 Lintasan Penyeberangan



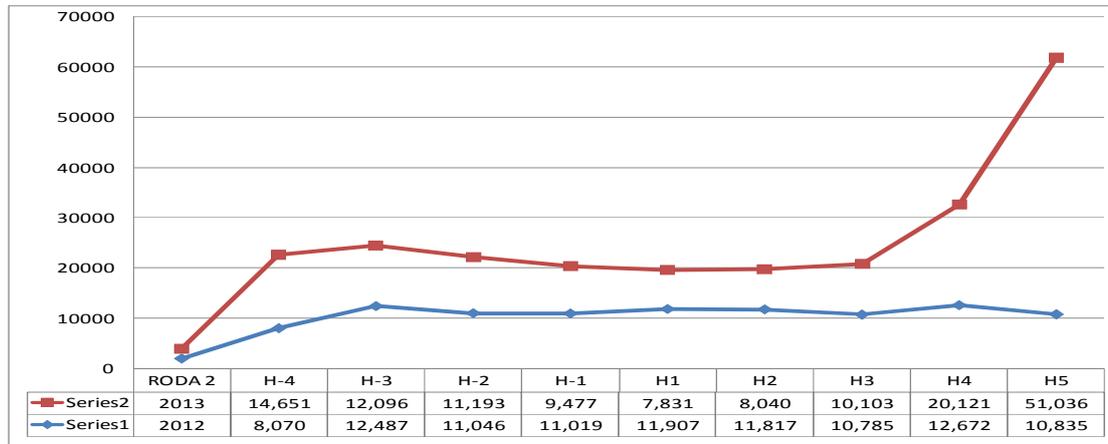
Realisasi jumlah kendaraan Roda Dua dan Roda Empat/Lebih moda angkutan penyeberangan pada periode angkutan natal tahun 2013 dan tahun baru 2014 dari H-4 hingga H+4 dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5. Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4/Lebih Moda Angkutan Penyeberangan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 43.63% dan 57.9% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 dari 100.638 Kendaraan Roda 2 dan 146.826 Kendaraan Roda 4/Lebih menjadi 144.548 Kendaraan Roda 2 dan 231.836 Kendaraan Roda 4 pada tahun 2013.

Tabel 6  
Realisasi Kendaraan Roda 2 Moda Angkutan Penyeberangan  
Pada 11 Lintasan Penyeberangan

No	PERIODE HARI	JUMLAH R-2		%
		2012	2013	
1	H-4	8,070	14,651	81.55
2	H-3	12,487	12,096	-3.13
3	H-2	11,046	11,193	1.33
4	H-1	11,019	9,477	-13.99
5	H1	11,907	7,831	-34.23
6	H2	11,817	8,040	-31.96
7	H3	10,785	10,103	-6.32
8	H4	12,672	20,121	58.78
9	H5	10,835	51,036	371.03
<b>TOTAL</b>		<b>100,638</b>	<b>144,548</b>	<b>43.63</b>

Sumber : Posko Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014

Gambar 5  
 Grafik Realisasi Kendaraan Roda 2 Moda Angkutan Penyeberangan  
 pada 11 Lintas Penyeberangan

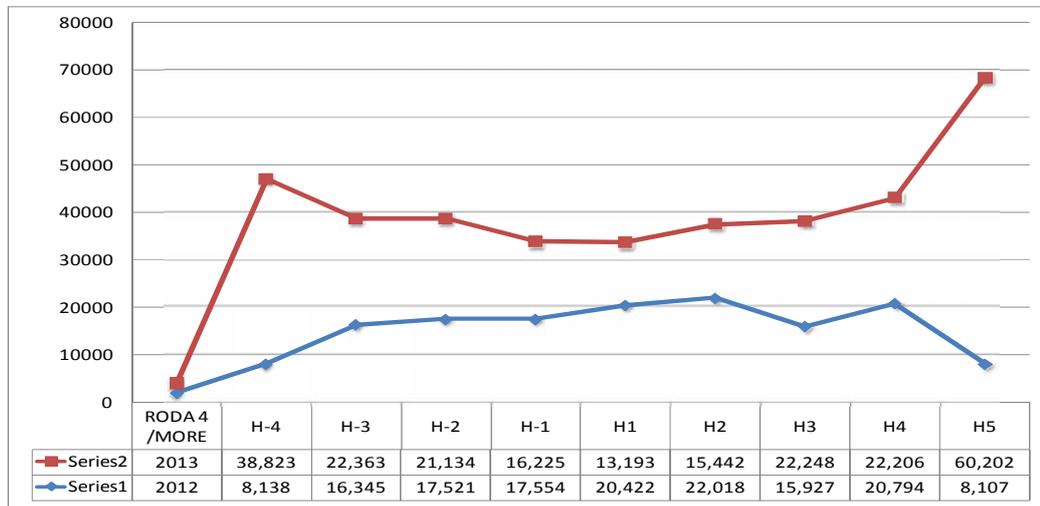


Tabel 7  
 Realisasi Kendaraan Roda 4/ Lebih pada Moda Angkutan Penyeberangan  
 Pada 11 Lintasan Penyeberangan

No	PERIODE HARI	JUMLAH R-4/LEBIH		%
		2012	2013	
1	H-4	8,138	38,823	377.06
2	H-3	16,345	22,363	36.82
3	H-2	17,521	21,134	20.62
4	H-1	17,554	16,225	-7.57
5	H1	20,422	13,193	-35.40
6	H2	22,018	15,442	-29.87
7	H3	15,927	22,248	39.69
8	H4	20,794	22,206	6.79
9	H5	8,107	60,202	642.59
<b>TOTAL</b>		<b>146,826</b>	<b>231,836</b>	<b>57.90</b>

Sumber : Posko Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014

Gambar 6  
 Grafik Realisasi Kendaraan Roda 4/Lebih Moda Angkutan Penyeberangan  
 Pada 11 Lintasan Penyeberangan



### 1.3. PENUMPANG MODA ANGKUTAN KERETA API

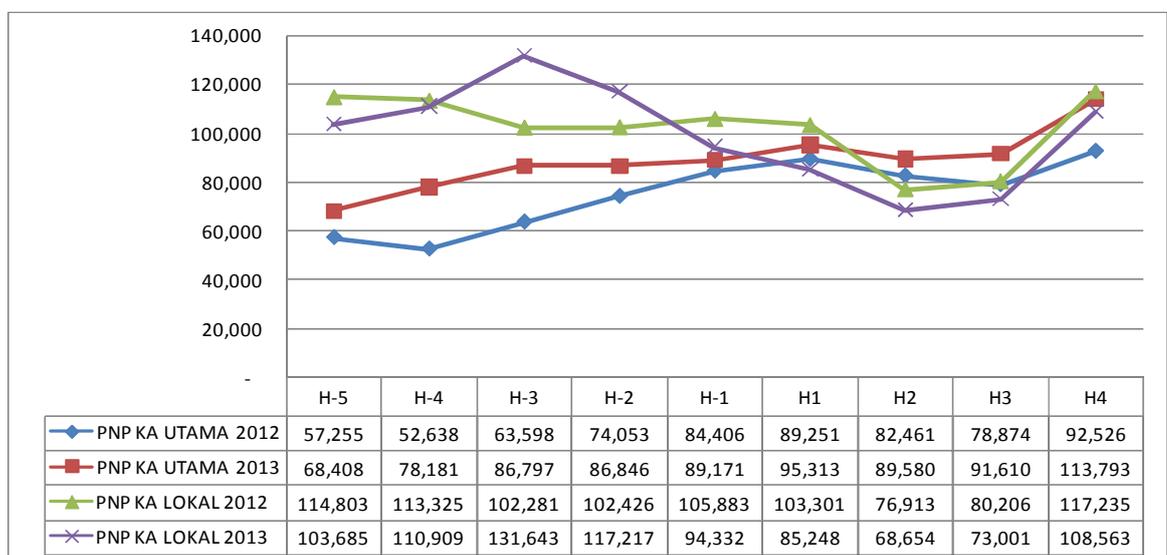
Penumpang moda angkutan kereta api yang dihimpun pada 9 Daop dan 3 Divre di Pulau Jawa dan Sumatera pada periode H-5 (20 Desember 2013) s.d H+4 (28 Desember 2013) mengalami peningkatan jumlah penumpang utama sebesar 18.46 % dari periode yang sama tahun lalu dari 675.062 penumpang menjadi 799.699 penumpang. Sedangkan untuk penumpang kereta lokal mengalami penurunan sebesar 2.52% dari periode yang sama tahun 2012 dari 916.373 penumpang menjadi 893.252 penumpang.

Tabel 8  
Realisasi Penumpang Kereta Api Utama dan Lokal  
di 9 Daop dan 3 Divre

PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG						PERTUMBUHAN JUMLAH PENUMPANG (%)		
	2012			2013			UTAMA	LOKAL	TOTAL
	UTAMA	LOKAL	TOTAL	UTAMA	LOKAL	TOTAL			
H-5	57,255	114,803	172,058	68,408	103,685	172,093	19.48	-9.68	0.02
H-4	52,638	113,325	165,963	78,181	110,909	189,090	48.53	-2.13	13.94
H-3	63,598	102,281	165,879	86,797	131,643	218,440	36.48	28.71	31.69
H-2	74,053	102,426	176,479	86,846	117,217	204,063	17.28	14.44	15.63
H-1	84,406	105,883	190,289	89,171	94,332	183,503	5.65	-10.91	-3.57
H1	89,251	103,301	192,552	95,313	85,248	180,561	6.79	-17.48	-6.23
H2	82,461	76,913	159,374	89,580	68,654	158,234	8.63	-10.74	-0.72
H3	78,874	80,206	159,080	91,610	73,001	164,611	16.15	-8.98	3.48
H4	92,526	117,235	209,761	113,793	108,563	222,356	22.98	-7.40	6.00
	<b>675,062</b>	<b>916,373</b>	<b>1,591,435</b>	<b>799,699</b>	<b>893,252</b>	<b>1,692,951</b>	<b>18.46</b>	<b>-2.52</b>	<b>6.38</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Gambar 7  
Realisasi Penumpang Kereta Api Umum dan Lokal  
di 9 Daop dan 2 Divre



## 1.4. PENUMPANG MODA ANGKUTAN LAUT

Jumlah penumpang naik moda angkutan laut pada periode H-7 (18 Desember 2013) s.d. H+5 (29 Desember 2013) mengalami penurunan 16.08% dari periode yang sama tahun 2012 yaitu 513.016 penumpang menjadi 430.507 penumpang di tahun 2013 yang terpantau pada 52 pelabuhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

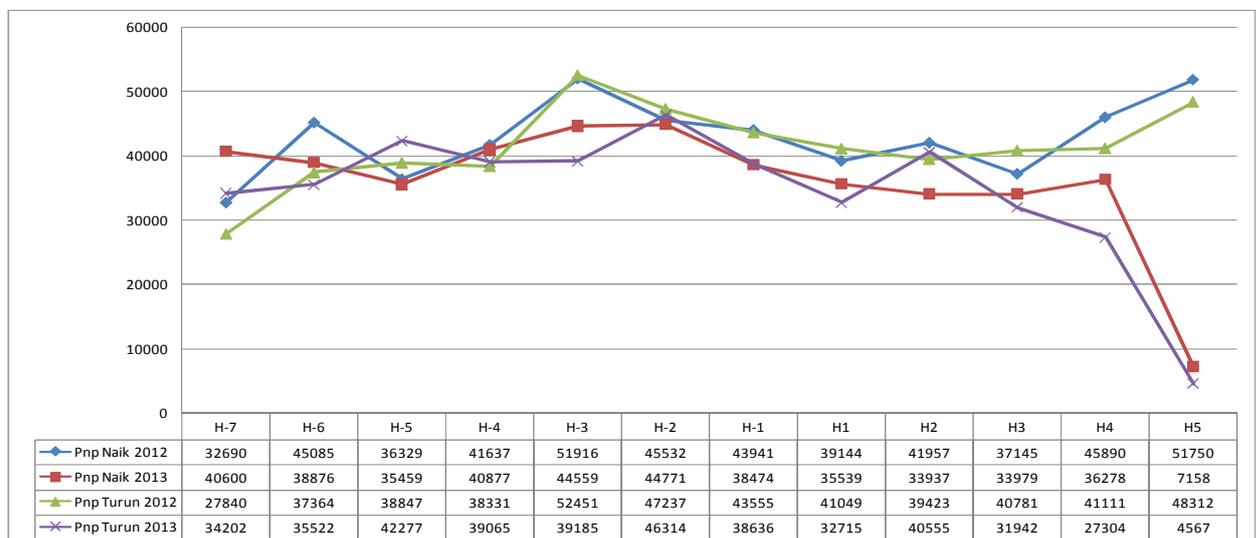
Sedangkan jumlah penumpang turun moda angkutan laut pada periode H-7 (18 Desember 2013) s.d. H+5 (29 Desember 2013) mengalami penurunan 16.93% dari periode yang sama tahun 2012 yaitu 496.301 penumpang menjadi 412.284 penumpang di tahun 2013

Tabel 9  
Perbandingan Jumlah Penumpang Naik dan Turun Angkutan Laut

No.	Periode Hari	Jumlah Penumpang Tahun 2012			Jumlah Penumpang Tahun 2013			Pertumbuhan %		
		Naik	Turun	Total	Naik	Turun	Total	Naik	Turun	Total
1	H-7	32.690	27.840	60.530	40.600	34.202	74.802	24.20	22.85	23.58
2	H-6	45.085	37.364	82.449	38.876	35.522	74.398	-13.77	-4.93	-9.76
3	H-5	36.329	38.847	75.176	35.459	42.277	77.736	-2.39	8.83	3.41
4	H-4	41.637	38.331	79.968	40.877	39.065	79.942	-1.83	1.91	-0.03
5	H-3	51.916	52.451	104.367	44.559	39.185	83.744	-14.17	-25.29	-19.76
6	H-2	45.532	47.237	92.769	44.771	46.314	91.085	-1.67	-1.95	-1.82
7	H-1	43.941	43.555	87.496	38.474	38.636	77.110	-12.44	-11.29	-11.87
8	H1	39.144	41.049	80.193	35.539	32.715	68.254	-9.21	-20.30	-14.89
9	H2	41.957	39.423	81.380	33.937	40.555	74.492	-19.11	2.87	-8.46
10	H3	37.145	40.781	77.926	33.979	31.942	65.921	-8.52	-21.67	-15.41
11	H4	45.890	41.111	87.001	36.278	27.304	63.582	-20.95	-33.58	-26.92
12	H5	51.750	48.312	100.062	7.158	4.567	11.725	-86.17	-90.55	-88.28
TOTAL		513,016	496,301	1,009,317	430,507	412,284	842,791	-16.08	-16.93	-16.50

Sumber : Posko Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014

Gambar 8  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Laut  
di 52 Pelabuhan



## 1.5. PENUMPANG MODA ANGKUTAN UDARA

Kedatangan dan keberangkatan penumpang moda angkutan udara yang terpantau di 23 Bandara Domestik selama periode H-4 (21 Desember 2013) hingga H+6 (30 Desember 2013) mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7.41% dan 6.53% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 dari 1.654.485 penumpang dan 1.701.387 penumpang menjadi 1.777.110 penumpang dan 1.812.429 penumpang pada tahun 2013.

Tabel 10  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Udara di 23 BANDARA DOMESTIK

HARI KE	KEDATANGAN						KEBERANGKATAN					
	2012		2013		PROSENTASE PERTUMBUHAN		2012		2013		PROSENTASE PERTUMBUHAN	
	PSWT	PNP	PSWT	PNP	PSWT	PNP	PSWT	PNP	PSWT	PNP	PSWT	PNP
H - 4	-	-	1,305	181,226	-	-	-	-	1,250	176,119	-	-
H - 3	1,514	207,733	1,512	208,988	-0.13	0.60	1,518	215,786	1,520	217,713	0.13	0.89
H - 2	1,514	198,312	1,569	212,787	3.63	7.30	1,503	203,657	1,551	213,143	3.19	4.66
H - 1	1,518	181,844	1,539	201,768	1.38	10.96	1,507	189,326	1,517	201,679	0.66	6.52
H 1	1,470	186,604	1,355	184,280	-7.82	-1.25	1,460	192,053	1,391	185,710	-4.73	-3.30
H 2	1,500	189,548	1,540	199,398	2.67	5.20	1,504	191,912	1,542	200,703	2.53	4.58
H 3	1,487	186,787	1,504	188,815	1.14	1.09	1,472	189,837	1,499	187,190	1.83	-1.39
H 4	1,490	181,447	1,445	192,344	-3.02	6.01	1,476	191,431	1,474	194,246	-0.14	1.47
H 5	1,453	187,337	1,222	162,665	-15.90	-13.17	1,450	193,707	1,265	173,956	-12.76	-10.20
H6	1,042	134,873	359	44,839	-65.55	-66.75	1,031	133,678	471	61,970	-54.32	-53.64
<b>TOTAL</b>	<b>12,988</b>	<b>1,654,485</b>	<b>13,350</b>	<b>1,777,110</b>	<b>2.79</b>	<b>7.41</b>	<b>12,921</b>	<b>1,701,387</b>	<b>13,480</b>	<b>1,812,429</b>	<b>4.33</b>	<b>6.53</b>

Keterangan ■ Final  
■ Sementara

Sumber : Posko Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014

Gambar 9  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Udara di 23 BANDARA DOMESTIK



Kedatangan dan keberangkatan penumpang moda angkutan udara yang terpantau di 4 Bandara Internasional selama periode H-4 (21 Desember 2013) hingga H+6 (30 Desember 2013) mengalami peningkatan masing-masing sebesar 17.98% dan 21.94% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 dari 248.706 penumpang dan 276.267 penumpang menjadi 293.431 penumpang dan 336.878 penumpang pada tahun 2013.

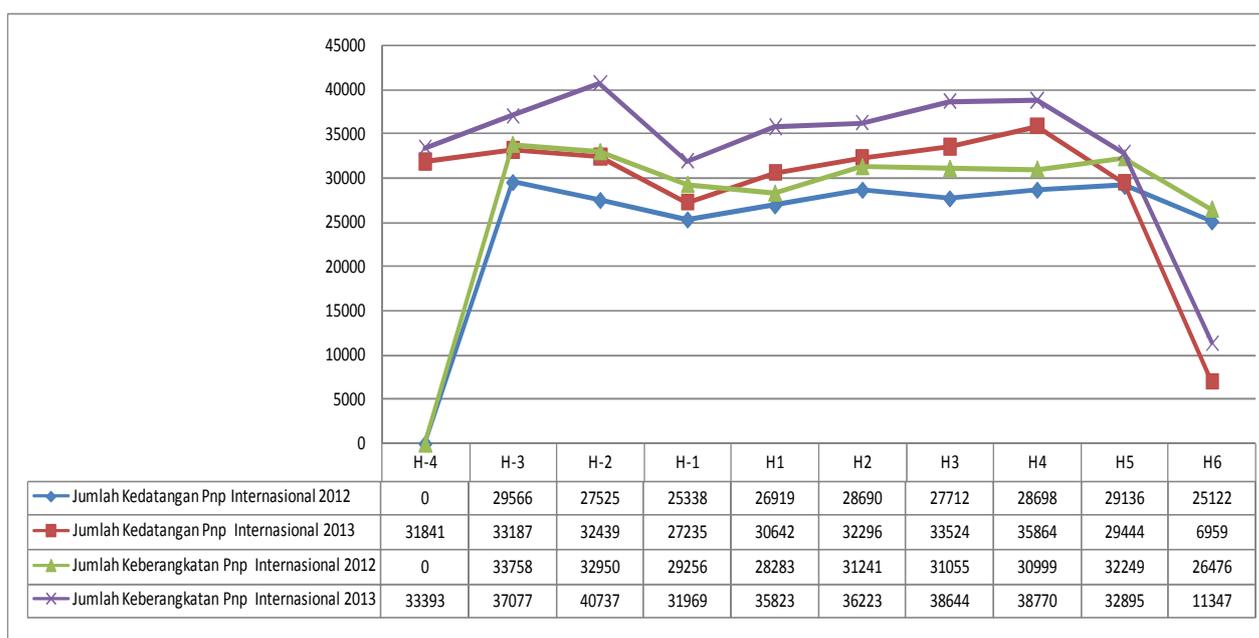
Tabel 11  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Udara di 4 BANDARA INTERNASIONAL

HARI KE	KEDATANGAN						KEBERANGKATAN					
	2012		2013		PROSENTASE PERTUMBUHAN		2012		2013		PROSENTASE PERTUMBUHAN	
	PSWT	PNP	PSWT	PNP	PSWT	PNP	PSWT	PNP	PSWT	PNP	PSWT	PNP
H - 4	-	-	211	31,841	-	-	-	-	210	33,393	-	-
H - 3	193	29,566	226	33,187	17.10	12.25	193	33,758	229	37,077	18.65	9.83
H - 2	202	27,525	232	32,439	14.85	17.85	197	32,950	231	40,737	17.26	23.63
H - 1	191	25,338	214	27,235	12.04	7.49	193	29,256	206	31,969	6.74	9.27
H 1	193	26,919	229	30,642	18.65	13.83	192	28,283	230	35,823	19.79	26.66
H 2	195	28,690	224	32,296	14.87	12.57	197	31,241	221	36,223	12.18	15.95
H 3	191	27,712	238	33,524	24.61	20.97	196	31,055	237	38,644	20.92	24.44
H 4	198	28,698	238	35,864	20.20	24.97	194	30,999	233	38,770	20.10	25.07
H 5	196	29,136	198	29,444	1.02	1.06	195	32,249	201	32,895	3.08	2.00
H6	174	25,122	50	6,959	-71.26	-72.30	173	26,476	72	11,347	-58.38	-57.14
<b>TOTAL</b>	<b>1,733</b>	<b>248,706</b>	<b>2,060</b>	<b>293,431</b>	<b>18.87</b>	<b>17.98</b>	<b>1,730</b>	<b>276,267</b>	<b>2,070</b>	<b>336,878</b>	<b>19.65</b>	<b>21.94</b>

Keterangan ■ Final  
■ Sementara

Sumber : Posko Angkutan Natal Tahun 2013 dan Tahun Baru 2014

Gambar 10  
Grafik Realisasi Penumpang Moda Angkutan Udara di 4 BANDARA INTERNASIONAL



## 2. KECELAKAAN LALU LINTAS NON TOL

1. Pemblokiran bandara Turelelo SoA Kabupaten Ngada oleh Bupati Ngada dan Satpol PP pada tanggal 21 Desember 2013 pukul 6.15 sampai dengan 09.00 WITA yang disebabkan oleh Bupati tidak memperoleh tiket pesawat merpati rute Kupang – Bajawa untuk menghadiri rapat DPRD. Hal tersebut mengakibatkan penerbangan pesawat dengan rute Kupang – Bajawa membawa 54 penumpang gagal mendarat dan harus kembali ke El Tari Kupang;
2. Kecelakaan lalu lintas pada tanggal **28 Desember 2013** pukul 16.00 WIB terjadi di Tongas, Probolinggo melibatkan mobil pick up Mitsubishi T 120 SS membawa 35 penumpang dengan nomor polisi B 2625 XCU bertabrakan dengan truk gandeng bernomor polisi P 8568 UL menyebabkan 18 (delapan belas) orang meninggal dunia;
3. Kecelakaan lalu lintas pada tanggal **30 Desember 2013** jam 04.00 WIB terjadi antara angkutan pedesaan dan truk tengki pengangkut minyak goreng curah di jalan raya Ajibarang-Pakuncen, Banyumas, Jawa Tengah yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 4 orang luka-luka. Kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu kendaraan pedesaan dengan nomor kendaraan R 1299 E dan truk tengki dengan nomot kendaraan H 1837 DF;
4. Kecelakaan lalu lintas (tunggal) di Bergas, Kabupaten Semarang tanggal **31 Desember 2013** pukul 02.15 WIB yaitu bus GUNUNG HARTA dengan nomor kendaraan N 7580 TA dari arah Semarang ke Solo menabrak jembatan kembar di Jl. Soekarno-Hatta (depan rumah sakit KEN SARAS) kemudian Bus tercebur jurang/sungai ± 5 meter dari permukaan jalan. Penumpang berjumlah 39 orang, korban meninggal dunia 3 (tiga) orang yaitu 1. Hadi Purwanto, pengemudi bus (49 th), Salatiga; 2. Perempuan, identitas belum diketahui; 3. Bayi perempuan ± 1 tahun, identitas belum diketahui; dan korban luka-luka sebanyak 16 orang masih dirawat di RS. Ken Saras. Penyebab masih belum diketahui, namun diperkirakan sopir mengantuk.

---

Jakarta, 31 Desember 2013

**LAPORAN EVALUASI REALISASI  
DAYA SERAP DIPA TA. 2013  
DI LINGKUNGAN  
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT  
POSISI 31 DESEMBER 2013**



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

## LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN TA.2013

POSISI 31 DESEMBER 2013

DI LINGKUNGAN DJEN PERHUBUNGAN DARAT

### 1. PAGU ANGGARAN

a. Total Pagu DIPA TA.2013 sebesar **Rp. 2.842.471.214.000,-**

- Rincian per Sumber Dana :

RM	: Rp.	2.826.671.032.000,-	(98,72%)
PNBP	: Rp.	1.800.093.000,-	( 0,09 %)
PLN	: Rp.	14.000.089.000,-	(1,19%)

- Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	: Rp.	51.775.276.000,-	(1,52 %)
Belanja Barang	: Rp.	1.698.380.536.000,-	(60,76 %)
Belanja Modal	: Rp.	1.092.315.402.000,-	(37,72 %)

b. Total Pagu Revisi DIPA TA.2013 sebesar **Rp. 3.014.777.225.000,-**

- Rincian per Sumber Dana :

RM	: Rp.	2.998.977.225.000,-	(99,48 %)
PNBP	: Rp.	1.800.093.000,-	( 0,06 %)
PLN	: Rp.	14.000.089.000,-	(0,46%)

- Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	: Rp.	51.775.276.000,-	(1,72 %)
Belanja Barang	: Rp.	1.834.066.890.000,-	(60,84 %)
Belanja Modal	: Rp.	1.128.935.059.000,-	(37,45 %)

- Rincian per :

Dana Optimalisasi	: Rp.	125.000.000.000,-
Penghematan/Pemotongan	: Rp.	21.601.898.000,-
Anggaran Belanja Tambahan (ABT)	: Rp.	68.907.909.000,-

c. Total Pagu Revisi DIPA TA.2013 sebesar **Rp. 3.013.165.225.000,-**

- Rincian per Sumber Dana :

RM	: Rp.	2.997.365.223.000,-	(99,48 %)
PNBP	: Rp.	1.800.093.000,-	( 0,06 %)
PLN	: Rp.	14.000.089.000,-	( 0,46%)

- Rincian per Jenis Belanja :
  - Belanja Pegawai : Rp. 51.775.276.000,- ( 1,72 %)
  - Belanja Barang : Rp. 1.833.346.939.000,- (60,84 %)
  - Belanja Modal : Rp. 1.128.043.010.000,- (37,45 %)
- Rincian per :
  - Pemotongan terkait Tunjangan Kinerja : Rp. 1.612.000.000,-

**2. JUMLAH UPT/SATKER DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT: 82 UPT/SATKER TERDIRI DARI :**

- a. Program LLAJ : 35 Satker
- b. Program LLASDP : 34 Satker
- c. UPT : 13 Kantor

**3. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2013 POSISI 31 DESEMBER 2013**

Realisasi penyerapan DIPA TA.2013 terhadap pagu APBNP sebesar **Rp.3.013.165.225.000,-** posisi per 31 Desember 2013, Keuangan **Rp.2.674.676.606.000,-(88,77%)**; Fisik = **91,19%** terdiri dari :

- Rincian per Sumber Dana :
  - RM : Rp. 2.674.225.774.000,-(88,72%);
  - PNBP : Rp. 1.629.095.000,-( 0,05%)
  - PLN : Rp. 0,-(0,00%)
- Rincian per Jenis Belanja :

BELANJA	PAGU	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	51.775.276.000	34.006.656.000	65,68%
Belanja Barang	1.833.346.939.000	1.629.700.370.000	88,89%
Belanja Modal	1.128.043.010.000	1.010.969.580.000	89,62%
<b>Jumlah</b>	<b>3.013.165.225.000</b>	<b>2.674.676.606.000</b>	<b>88,77%</b>

**4. KEGIATAN YANG BERTANDA BINTANG :**

- a. Dana blokir/bertanda bintang awal sebesar Rp.2.760.644.573.000,- telah dicairkan dengan revisi DIPA otomatis sebesar Rp.2.493.118.979.000,- sisa blokir sebesar Rp.267.525.594.000,-
- b. Dana blokir/bertanda bintang revisi sebesar Rp.267.525.594.000,- telah dicairkan dengan revisi DIPA reguler sebesar Rp.242.991.914.000,- sisa blokir sebesar Rp.24.533.680.000,-
- c. Sisa Dana blokir Reguler sebesar Rp.24.533.680.000,- dikurangi pemotongan sebesar Rp.2.505.404.000,- menjadi sebesar Rp.22.028.275.000,-
- d. Blokir Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp.60.000.000.000,- sehingga blokir menjadi sebesar Rp.82.028.275.000,-

- e. Sisa blokir menjadi sebesar Rp.82.028.275.000,- telah dicairkan dengan revisi DIPA regular sebesar Rp.102.530.638.000,- sisa blokir sebesar Rp.71.497.637.000,-
- f. Sisa blokir menjadi sebesar Rp. 71.497.637.000,- telah dicairkan dengan revisi DIPA regular sebesar Rp.2.109.493.000,- sisa blokir sebesar Rp.69.388.142.000,-
- g. **Sisa Dana blokir sebesar Rp.69.388.142.000,-**dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Tidak di usulkan sebesar Rp.69.388.142.000,- terdiri dari :
    - a) Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :

Pengadaan Peralatan Poliklinik (Dana Non Alokasi) sebesar Rp. 101.594.000,- dikarenakan (dana non alokasi/selisih perhitungan);
    - b) Satker Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
      - Kegiatan Dukungan KTM OKI , Pembayaran sebesar Rp.968.650.000,- sisa perhitungan hasil audit BPKP;
      - Operasional Pelaksanaan Sail Morotai sebesar Rp.1.045.820.000,- sisaperhitungan hasil audit BPKP;
      - Kegiatan Dukungan MTQ Nasional (Pembayaran) sebesar Rp.1.200.000.000,- dikarenakan menunggu hasil audit BPKP.
    - c) Satker Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau Penyeberangan :
      - Pembayaran Ops.KMP Bili & KMP Kerapu III di Lts Penyeber. Tenggara Kota-Tenggara Seberang (Pasca Runtuhnya Jemb.Kukar) sebesar Rp.1.519.362.000,- pada dikarenakan menunggu hasil audit BPKP;
      - Pembayaran Penugasan Pengoperasian KMP Rokatenda untuk Mengangkut Bus Dalam Rangka Mendukung Kelancaran MTQ di Ambon sebesar Rp.281.037.000,- sisa perhitungan hasil audit BPKP.
    - d) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur:

Pemb. Derm. Penyeberangan Simanggaris Tahap I (Termasuk Supervisi) sebesar Rp.450.000.000,- dikarenakan masih menunggu surat pengesahan lahan dari Pemda setempat;
    - e) Satker Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Provinsi Bali:

Pengadaan Kendaraan Operasional R-4 (Dana Non Alokasi) sebesar Rp.50.000.000,- dikarenakan pengeluaran yang tidak memiliki dasar hukum/ tidak diperbolehkan;
    - f) Satker Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak di Provinsi Banten :

Operasional Tug Boat sebesar Rp.3.771.680.000,- dikarenakan belum ada dasar hukum kalau OPP Merak yang mengoperasikan Tug Boatnya sedang dibuat MoU antara OPP Merak dengan PT. ASDP (persero).

g) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Timur :

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ di Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.3.771.680.000,- dikarenakan belum ada surat penyampaian persetujuan usulan ABT oleh Kementerian Perhubungan kepada Menteri Keuangan.

h) Satker Direktorat LLAJ :

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ untuk menunjang Angkutan Lebaran sebesar Rp.10.000.000.000,- dikarenakan belum ada surat penyampaian persetujuan usulan ABT oleh Kementerian Perhubungan kepada Menteri Keuangan.

i) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Timur :

Lanjutan Peningkatan Terminal Batu Ampar Kaltim (termasuk supervisi) sebesar Rp.1.200.000.000,-dikarenakan belum ada surat penyampaian persetujuan usulan ABT oleh Kementerian Perhubungan kepada Menteri Keuangan.

j) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur :

Pembangunan Dermaga Sungai Kunjang Tahap II (termasuk supervisi) sebesar Rp.12.000.000.000,-dikarenakan belum ada surat penyampaian persetujuan usulan ABT oleh Kementerian Perhubungan kepada Menteri Keuangan.

k) Satker Pengembangan LLASDP Maluku Utara:

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Gebe Tahap II (termasuk supervisi) sebesar Rp. 10.000.000.000,- dikarenakan belum ada surat penyampaian persetujuan usulan ABT oleh Kementerian Perhubungan kepada Menteri Keuangan.

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kayoa Tahap II (termasuk supervisi) sebesar Rp. 5.120.000.000,-dikarenakan belum ada surat penyampaian persetujuan usulan ABT oleh Kementerian Perhubungan kepada Menteri Keuangan.

l) Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Timur :

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ndao (termasuk supervisi) sebesar Rp.10.000.000.000,-dikarenakan belum ada surat penyampaian persetujuan usulan ABT oleh Kementerian Perhubungan kepada Menteri Keuangan.

m) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Tenggara :

Pengerukan Alur Pelayaran Dermaga Penyeberangan Wanci :

Desain Pengerukan Alur Penyeberangan Wanci sebesar Rp.350.000.000,-dikarenakan belum adasurat penyampaian persetujuan usulan ABT oleh Kementerian Perhubungan kepada Menteri Keuangan.

Fisik Pekerjaan Pengerukan Alur Penyeberangan Wanci sebesar Rp.1.330.000.000,-dikarenakan belum adasurat penyampaian persetujuan usulan ABT oleh Kementerian Perhubungan kepada Menteri Keuangan

## 5. KEGIATAN YANG DIKONTRAKKAN DI LINGKUNGAN DJEN PERHUBUNGAN DARAT

a. **Total rencana Kegiatan dikontrakkan : 996 Paket (termasuk kegiatan APBN-P),** terdiri dari :

- 1) Kegiatan APBN (Reguler) : 972 Paket, terdiri :
  - a) Kontrak Strategis : 490 Paket
    - ✓ Reguler : 490 Paket
    - ✓ Pemotongan : 2 Paket
  - b) Non Kontrak Strategis : 484 Paket
- 2) Kegiatan APBN-P : 24Paket, terdiri :
  - a) Kontrak Strategis : 24 Paket
    - ✓ Optimalisasi : 13 Paket
    - ✓ ABT : 11 Paket

b. **Sudah Kontrak : 954Paket,** terdiri :

- 1) Kontrak Strategis : 485 Paket
- 2) Non Kontrak Strategis : 469 Paket

c. **BelumKontrak : 42 Paket,** terdiri :

- 1) Kontrak Strategis : 27 Paket
  - a) Sudah lelang : 0 Paket
  - b) Belum lelang : 27 Paket
- 2) Non Kontrak Strategis : 15 Paket
  - a) Sudah lelang : 5 Paket
  - b) Belum lelang : 10 Paket

d. **Penjelasan Kegiatan dikontrakkanyang belum lelang sebanyak 42 Paket yaitu :**

- 1) Kegiatan diblokir sebanyak 18 Paket dengan rincian sebagai berikut:
  - Kegiatan masih menunggu hasil audit BPKP terlebih dahulu 6 Paket
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Simanggaris di Kalimantan Timur 1 Paket
  - Operasional Tug Boat di OPP Merak, Banten 1 Paket

- Kegiatan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 10 Paket
- 2) Belum dilakukan serah terima operasional gedung arsip 6Paket
- 3) Belum adanya balasan surat No Objection Letter (NOL) dari Sesditjen Perhubungan Darat kepada Direktur Bimtek Kementerian PU sebagai Project Manager Unit (PMU) 2 Paket;
- 4) Gagal Lelang sebanyak 5 Paket;
- 5) Koordinasi dengan instansi lain terkait desain/penyesuaian kondisi lapangan sebanyak 4 paket;
- 6) Adanya permasalahan studi Amdal sebanyak 3 Paket;
- 7) Adanya permasalahan lahan sebanyak 1 Paket;
- 8) Adanya dokumen pengadaan yang masih perlu penyempurnaan disesuaikan dengan dokumen e-procurement sebanyak 3 Paket.

**6. KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN SEBESAR RP.55.868.934.000,-**

- a. Satker Bina Sistem Transportasi Perkotaan pada kegiatan :
  - Kajian Teknis Penerapan Fas. Angkutan Perkotaan bagi Penumpang yg Berkebutuhan Khusus sebesar Rp.550.000.000,- dikarenakan gagal lelang ulang;
  - Perencanaan Database Kinerja Angk. Perkotaan di kota-kota Metropolitan sebesar Rp.800.000.000,- dikarenakan tidak ada peminat dari peserta lelang;
- b. Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Kegiatan :
  - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Arsip sebesar Rp.2.345.440.000 dikarenakan belum adanya serah terima operasional Gedung Arsip.
  - Renovasi Ruang ULP sebesar Rp.75.000.000,- dikarenakan belum tersedianya ruang ULP;
  - Loan ADB (*Integrated Vehicle Overloading Control Strategy*) sebesar Rp.4.000.089.000,- dikarenakan belum adanya balasan Surat NOL (*No Objection Letter*) dari Sesditjen Perhubungan Darat kepada Direktur Bimtek Kementerian PU sebagai Project Manager Unit (PMU).
  - Loan ADB (*Road Safety Awareness Campaign and Training*) sebesar Rp.10.000.000.000,- dikarenakan belum adanya balasan Surat NOL (*No Objection Letter*) dari Sesditjen Perhubungan Darat kepada Direktur Bimtek Kementerian PU sebagai Project Manager Unit (PMU).

- c. Satker Direktorat Keselamatan Transportasi Darat pada Kegiatan :
- Pelaksanaan Hari Korban Keselakaan sebesar Rp.400.000.000,- dikarenakan gagal lelang.
- d. Satker Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Kegiatan :
- Pengadaan Buku Tilang pada Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sebesar Rp.100.000.000 dikarenakan belum adanya payung hukum/RPP.
- e. Satker Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Kegiatan :
- Pembayaran Dukungan Kegiatan Sail Komodo Tahun 2013 di Proponsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.2.500.000.000 dikarenakan keterbatasan waktu dalam pengusulan.
- f. Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Timur pada Subsidi Operasi Bus Perintis Trayek Sambas – Aruk sebesar Rp.289.943.000,-; Trayek Bengkayang - Jagol Babang sebesar Rp.309.205.000,- dan Trayek Pontianak - Pangkalan Bun sebesar Rp.670.678.000,- dikarenakan Gagal lelang/ tidak ada yang melakukan penawaran.
- g. Satker Pengembangan LLAJ Banten pada kegiatan Rehabilitasi Terminal Tipe A Pakupatan lanjutan (termasuk supervisi) sebesar Rp.3.000.000.000,- dan Rehabilitasi Terminal Terpadu Merak lanjutan (termasuk supervisi) sebesar Rp.3.000.000.000,- karena waktu pelaksanaan tidak memungkinkan akibat adanya perbaikan gambar desain
- h. Satker Pengembangan LLASDP Maluku pada kegiatan :
- Pemb. Derm. Penyeb Wailey Thp. IV (Termasuk Supervisi) sebesar Rp.8.500.000.000,- karena Ada Permasalahan Gugatan Kepemilikan Lahan Yang Belum Diselesaikan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBT), sehingga Pelaksanaan Lelang s/d Kontrak tidak dapat dilanjutkan.
  - Rehab Pelabuhan Penyeberangan Namlea sebesar Rp.5.000.000.000,- karena belum ada Studi AMDAL dan Pengesahan Gambar belum juga terealisasi.
  - Rehab Pelabuhan Penyeberangan Galala sebesar Rp.5.000.000.000,- karena belum ada Studi AMDAL, juga ada Claim kepemilikan Lahan dari Masyarakat dan Pengesahan Gambar belum juga terealisasi
- i. Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah pada kegiatan Rehabilitasi Terminal Mamboro Tahap II (termasuk supervisi) sebesar Rp.2.000.000.000,- karena tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak memungkinkan akibat adanya perbaikan gambar desain.

- j. Satker Pengembangan LLAJ Maluku pada kegiatan Pembangunan Terminal Tipe B Passo (termasuk supervisi) sebesar Rp.2.000.000.000,- karena tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak memungkinkan akibat adanya perbaikan gambar desain.
- k. Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur pada kegiatan Pengerukan Alur Penyeberangan Sungai Wain Balikpapan 1 jt m<sup>3</sup> (Termasuk supervisi) sebesar Rp.5.000.000.000,- karena hasil pengerukan harus dibuang di darat, sehingga perlu Amdal (tidak diperoleh) dan tidak ada lokasi lokasi darat untuk pembuangannya.
- l. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi pada kegiatan Pemeliharaan Alat Uji Emisi (EURO 2) Passanger Car sebesar Rp.200.000.000,- dikarenakan waktu pelaksanaan tidak memungkinkan akibat adanya perbaikan gambar desain.

**7. KEGIATAN YANG TELAH/SEDANG DILAKSANAKAN DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT**

- a. Kegiatan yang sudah kontrak sebanyak 947 Paket
- b. Kegiatan yang belum kontrak dan belum lelang sebanyak 49 Paket terdiri :
  - Kegiatan yang sudah lelang tetapi belum kontrak sebanyak 5 paket (gagal lelang);
  - Kegiatan yang belum lelang dan belum kontrak sebanyak 44 paket.

**8. ADAPUN RENCANA REALISASI DAYA SERAP BELUM TERCAPAI DISEBABKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

- a. Kegiatan diblokir
- b. Adanya pekerjaan yang didahului dengan Desain
- c. Gagal lelang
- d. Adanya revisi anggaran
- e. Koordinasi dengan instansi terkait
- f. Adanya dokumen pengadaan yang masih perlu penyempurnaan disesuaikan dengan dokumen e-procurement
- g. Menunggu pelaksanaan penunjang kegiatan operasional dan administrasi perkantoran yang dilakukan secara periodik
- h. Penyesuaian dengan kondisi lapangan

**9. DANA REKOMPOSISI (OPTIMALISASI) SEBESAR RP.125.000.000.000,- DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :**

- 1) Satker Pengembangan LLASDP Riau Kepulauan
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Matak (Kep. Anambas) Tahap III sebesar Rp.1.500.000.000,-;

- 2) Satker Pengembangan LLASDP Jawa Tengah
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kendal Tahap II sebesar Rp.4.500.000.000,-;
- 3) Satker Pengembangan LLASDP Bali
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Gunaksa Tahap VI sebesar Rp.5.000.000.000,-;
- 4) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Barat
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ciremai Tahap III sebesar Rp.20.000.000.000,-;
- 5) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Tenggara
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Labuan Tahap IV sebesar Rp.4.500.000.000,-;
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Amolengu Tahap II sebesar Rp.4.500.000.000,-;
- 6) Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Timur
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Baranusa Tahap III sebesar Rp.11.500.000.000,-;
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ndao Tahap II sebesar Rp.5.000.000.000,-;
- 7) Satker Pengembangan LLASDP Solor Nusa Tenggara Timur
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Solor Tahap II sebesar Rp.20.000.000.000,-;
- 8) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Marore Tahap III sebesar Rp.10.000.000.000,-;
- 9) Satker Pengembangan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Merak VI Tahap II sebesar Rp.18.500.000.000,-;
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Bakauheuni VI Tahap II sebesar Rp.10.000.000.000,-;
- 10) Satker Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ untuk menunjang Angkutan Lebaran sebesar Rp.10.000.000.000,-;

**10. DANA ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT) TA. 2013 SEBESAR RP.68.907.909.000,-**

**DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:**

- 1) Satker Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - Pengangkutan Sepeda Motor Dengan Moda Angkutan Jalan Rayasebesar Rp.2.672.373.000,-;
  - Lanjutan Pembangunan Terminal Wonogiri (termasuk supervisi) sebesar Rp.10.000.000.000,-.
- 2) Satker Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
  - Pengangkutan Sepeda Motor Dengan Moda Angkutan Penyeberangansebesar Rp.6.235.536.000,-.
- 3) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Timur
  - Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ di Propinsi Jawa Timursebesar Rp.10.000.000.000,-.
- 4) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Timur
  - Lanjutan Peningkatan Terminal Batu Ampar Kaltim (termasuk supervisi)sebesar Rp.1.200.000.000,-.
- 5) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur
  - Pembangunan Dermaga Sungai Kunjang Tahap II (termasuk supervisi)sebesar Rp.12.000.000.000,-.
- 6) Satker Pengembangan LLASDP Maluku Utara
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Gebe Tahap II (termasuk supervisi)sebesar Rp.10.000.000.000,-
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kayoa Tahap II (termasuk supervisi) sebesar Rp.5.120.000.000,-.
- 7) Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Timur
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ndao (termasuk supervisi)sebesar Rp.10.000.000.000,-.
- 8) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Timur
  - Pengerukan Alur Pelayaran Dermaga Penyeberangan Wanci :
  - Desain Pengerukan Alur Penyeberangan Wancisebesar Rp.350.000.000,-;
  - Fisik Pekerjaan Pengerukan Alur Penyeberangan Wanci Rp.1.330.000.000,-.

**Catatan :**

Dana ABT sebesar Rp.68.907.909.000,-terdiri dari :

- 1) Pengangkutan Sepeda Motor (angkutan lebar) sebesar Rp.8.907.909.000,- (moda angkutan jalan raya sebesar Rp.2.672.373.000,- dan moda angkutan penyeberangan sebesar Rp.6.235.536.000,-).
- 2) Diblokir sebesar Rp.60.000.000.000,- karena tidak ada surat usulan Menteri Perhubungan ke Menteri Keuangan.

**11. PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI :**

Alokasi Loan	:	a. Alokasi Loan ADB (Road Safety Awareness Campaign and Training) sebesar USD.3.000.000,-.
		b. Alokasi Loan ADB (Integrated Vehicle Overloading Control Strategy) sebesar USD.800.000,-.
Kegiatan Proyek tahun 2013	:	a. Loan ADB (Road Safety Awareness Campaign and Training) sebesar Rp.10.000.000.000,-.
		b. Loan ADB (Integrated Vehicle Overloading Control Strategy) sebesar Rp. 4.000.089.000,-
Nilai Kontrak	:	-
Realisasi s.d bulan 31Desember2013	:	• Pagu DIPA 2013 : Rp. 14.000.089.000,- • Keuangan : Rp. 0,- (0,00 %) • Fisik : (0,00 %)
Realisasi Kumulatif s.d 30Desember 2013	:	• Keuangan : Rp. 0,- (0,00 %) • Fisik : (0,00 %)
Keterangan	:	dikarenakan TOR belum mendapat persetujuan dari Pihak ADB, kemudian jika TOR telah disetujui proses pelelangan baru dapat dilakukan dengan memakan waktu ± 6 bulan.

**12. LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN :**

- a. Melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi anggaran satker untuk mengetahui progress kegiatan masing-masing satker secara terperinci;
- b. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi masing-masing satker;
- c. Melakukan koordinasi dengan para satuan kerja;
- d. Mendiskusikan masalah yang ditemukan untuk mencari solusi yang tepat dalam memecahkan masalah tersebut dengan Direktorat Teknis;
- e. Menerapkan ketentuan yang diatur dalam Permenkeu Nomor: 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja secara tertib dan konsekuen.

**LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI**  
**REALISASI DATA PENUMPANG ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2013 (1434 H)**  
**PERIODE ARUS MUDIK (H-7 S.D. H+1)**

**1. MODA ANGKUTAN UMUM**

Realisasi jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi (darat, kereta api, laut dan udara) berdasarkan pemantauan pada H-7 hingga H+1 Angkutan Lebaran Tahun 2013 sejumlah **7.880.872** pemudik.

**Tabel 1**  
**Prosentase Realisasi Penumpang Moda Angkutan Umum**  
**Angkutan Lebaran Tahun 2012 & 2013**  
**(Periode H-7 s.d H+1)**

NO	MODA ANGKUTAN UMUM	JUMLAH PEMUDIK		%
		2012	2013	
1	Moda Darat	5,205,184	4,291,100	-17.56
	a. Angkutan Jalan	3,476,822	2,865,797	-17.57
	b. Angkutan SDP*)	1,728,362	1,425,303	-17.53
2	Moda Kereta Api	1,591,435	1,239,328	-22.13
	a. KA Utama (Jarak Jauh)	675,062	795,552	17.85
	b. KA Lokal (Jarak Menengah)	916,373	443,776	-51.57
3	Moda Laut	501,571	426,983	-14.87
4	Moda Udara	1,839,125	1,923,461	4.59
	a. Domestik	1,542,337	1,606,357	4.15
	b. Internasional	296,788	317,104	6.85
<b>Total Angkutan Umum</b>		<b>9,137,315</b>	<b>7,880,872</b>	<b>-13.75</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

\*) Data Angkutan SDP s.d. H2 (9 Agustus 2013) Pukul 08.00 WIB

**1.1. PENUMPANG UMUM MODA ANGKUTAN JALAN**

Penumpang moda angkutan jalan pada Angkutan Lebaran Tahun 2013 (1434 H) pada pantauan H-7 hingga H2 mengalami **penurunan** sebesar **17,57 %** jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 dari **3.476.822** penumpang menjadi **2.865.797** penumpang tahun 2013.

**Tabel 2**  
**Realisasi Penumpang Moda Angkutan Jalan**  
**Di 12 Provinsi pada 45 Terminal Utama/Bantuan**

PERIODE HARI	PERIODE HARI	JUMLAH BUS		SELISIH BUS 2013:2012	%	JUMLAH PENUMPANG		SELISIH PENUMPANG	%
		2012	2013			2012	2013		
ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)	H-7	15,050	14,200	-850	-5.65	261,995	232,807	-29,188	-11.14
	H-6	17,192	18,455	1,263	7.35	309,000	309,996	996	0.32
	H-5	17,004	<b>22,064</b>	5,060	29.76	320,358	<b>455,212</b>	134,854	42.09
	H-4	19,004	20,491	1,487	7.82	394,019	439,573	45,554	11.56
	H-3	<b>23,018</b>	17,088	-5,930	-25.76	<b>525,350</b>	368,959	-156,391	-29.77
	H-2	20,393	15,189	-5,204	-25.52	510,814	342,016	-168,798	-33.04
	H-1	18,008	12,612	-5,396	-29.96	409,465	247,900	-161,565	-39.46
	H1	14,041	10,978	-3,063	-21.81	332,965	189,654	-143,311	-43.04
	H2	15,998	11,541	-4,457	-27.86	412,856	279,680	-133,176	-32.26
<b>TOTAL</b>		<b>159,708</b>	<b>142,618</b>	<b>-17,090</b>	<b>-10.70</b>	<b>3,476,822</b>	<b>2,865,797</b>	<b>-611,025</b>	<b>-17.57</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Puncak Arus Mudik

## 1.2. PENUMPANG MODA ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Penumpang moda angkutan penyeberangan berdasarkan data dari H-7 s.d. H2 pada 7 lintas utama penyeberangan, diketahui jumlah penumpang yang diberangkatkan mengalami **penurunan** sebesar **17,53%** jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 dari **1.728.362 penumpang** menjadi **1.425.303 penumpang** pada tahun 2013.

**Tabel 3**  
**Realisasi Penumpang Moda Angkutan Penyeberangan di 14 Lintas Penyeberangan**

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		SELISIH PENUMPANG	%
		2012	2013		
ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)	H-7	154,097	146,672	(7,425)	-4.82
	H-6	153,847	245,266	91,419	59.42
	H-5	181,500	<b>258,319</b>	76,819	42.32
	H-4	253,301	193,771	(59,530)	-23.50
	H-3	<b>288,947</b>	156,058	(132,889)	-45.99
	H-2	231,026	187,386	(43,640)	-18.89
	H-1	158,713	127,453	(31,260)	-19.70
	H1	155,425	44,992	(110,433)	-71.05
	H2	151,506	145,452	(6,054)	-4.00
<b>Total</b>		<b>1,728,362</b>	<b>1,505,369</b>	<b>(222,993)</b>	<b>-12.90</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Puncak Arus Mudik

Realisasi jumlah kendaraan **Roda Dua** dan **Roda Empat/Lebih** moda angkutan penyeberangan pada periode angkutan lebaran 2013 dari H-7 hingga H2 dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5. Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4/Lebih Moda Angkutan Penyeberangan mengalami **penurunan** masing-masing sebesar **27,32%** dan **19,84%** jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 dari **232.829** Kendaraan Roda 2 dan **191.298** Kendaraan Roda 4/Lebih menjadi **169.210** Kendaraan Roda 2 dan **153.339** Kendaraan Roda 4 pada tahun 2013.

**Tabel 4**  
**Realisasi Kendaraan Roda 2 Moda Angkutan Penyeberangan**

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH R-2		SELISIH R2 2013:2012	%
		2012	2013		
ARUS MUDIK	H-7	14,859	15,121	262	1.76
	H-6	16,437	22,910	6,473	39.38
	H-5	21,571	<b>28,823</b>	7,252	33.62
	H-4	35,571	23,198	(12,373)	-34.78
	H-3	<b>50,677</b>	16,099	(34,578)	-68.23
	H-2	35,017	26,849	(8,168)	-23.33
	H-1	19,777	19,136	(641)	-3.24
	H1	19,373	6,617	(12,756)	-65.84
	H2	19,547	18,947	(600)	-3.07
<b>Total</b>		<b>232,829</b>	<b>177,700</b>	<b>(55,129)</b>	<b>-23.68</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Puncak Arus Mudik

**Tabel 5**  
**Realisasi Kendaraan Roda 4/ Lebih Moda Angkutan Penyeberangan**

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH R-4/LEBIH		SELISIH R4/LEBIH 2013:2012	%
		2012	2013		
ARUS MUDIK	H-7	21,263	22,081	818	3.85
	H-6	20,521	26,058	5,537	26.98
	H-5	22,560	<b>27,858</b>	5,298	23.48
	H-4	26,792	19,918	(6,874)	-25.66
	H-3	24,991	16,639	(8,352)	-33.42
	H-2	<b>29,370</b>	18,262	(11,108)	-37.82
	H-1	16,594	5,214	(11,380)	-68.58
	H1	13,961	11,398	(2,563)	-18.36
	H2	15,246	16,211	965	6.33
<b>Total</b>		<b>191,298</b>	<b>163,639</b>	<b>(27,659)</b>	<b>-14.46</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Puncak Arus Mudik

### 1.3. PENUMPANG MODA ANGKUTAN KERETA API

Penumpang moda angkutan kereta api yang dihimpun pada 9 Daop di Pulau Jawa dan 2 Divre (Sumatera Utara dan Sumatera Selatan) pada periode H-7 s.d H2 mengalami **peningkatan** jumlah penumpang **utama** sebesar **17,85 %** dari periode yang sama tahun lalu dari **675.062 penumpang** menjadi **795.552 penumpang**, sedangkan penumpang **lokal** mengalami **penurunan** sebesar **51,57%** dari **916.373 penumpang** menjadi **443.776 penumpang**.

**Tabel 6**  
**Realisasi PENUMPANG UTAMA Moda Angkutan Kereta Api di 9 Daop (Pulau Jawa) dan 2 Divre**

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		SELISIH PENUMPANG UTAMA	% UTAMA 2013 / UTAMA 2012
		2012	2013		
		UTAMA	UTAMA		
ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)	H-7	57,255	68,408	11,153	19.48%
	H-6	52,638	70,945	18,307	34.78%
	H-5	63,598	86,797	23,199	36.48%
	H-4	74,053	86,846	12,793	17.28%
	H-3	84,406	89,171	4,765	5.65%
	H-2	89,251	95,313	6,062	6.79%
	H-1	82,461	89,580	7,119	8.63%
	H1	78,874	91,613	12,739	16.15%
	H2	<b>92,526</b>	<b>116,879</b>	24,353	26.32%
<b>TOTAL</b>		<b>675,062</b>	<b>795,552</b>	<b>120,490</b>	<b>17.85%</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Puncak Arus Mudik

**Tabel 7**  
**Realisasi PENUMPANG LOKAL Moda Angkutan Kereta Api di 9 Daop (Pulau Jawa) dan 2 Divre**

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		SELISIH PENUMPANG LOKAL	% LOKAL 2013 / LOKAL 2012
		2012	2013		
		LOKAL	LOKAL		
ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)	H-7	114,803	62,884	(51,919)	-45.22%
	H-6	113,325	66,304	(47,021)	-41.49%
	H-5	102,281	<b>70,373</b>	(31,908)	-31.20%
	H-4	102,426	67,098	(35,328)	-34.49%
	H-3	105,883	42,769	(63,114)	-59.61%
	H-2	103,301	41,280	(62,021)	-60.04%
	H-1	76,913	33,831	(43,082)	-56.01%
	H1	80,206	36,072	(44,134)	-55.03%
	H2	<b>117,235</b>	23,165	(94,070)	-80.24%
<b>TOTAL</b>		<b>916,373</b>	<b>443,776</b>	<b>(472,597)</b>	<b>-51.57%</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Puncak Arus Mudik

#### 1.4. PENUMPANG MODA ANGKUTAN LAUT

Penumpang moda angkutan laut pada periode H-7 s.d. H2 mengalami **penurunan 14,87 %** dari periode yang sama tahun 2012 yaitu **501.571** penumpang menjadi **426.983** penumpang di tahun 2013 yang terpantau pada 52 pelabuhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

**Tabel 8**  
**Realisasi Penumpang Moda Angkutan Laut di 52 Pelabuhan H-15 s.d. H-8**

PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
	2012	2013	
H-15	37,365	37,528	0.44
H-14	35,129	30,353	-13.60
H-13	29,948	34,631	15.64
H-12	35,527	37,671	6.03
H-11	35,895	42,590	18.65
H-10	40,894	42,523	3.98
H-9	40,617	30,782	-24.21
H-8	51,604	44,782	-13.22
<b>TOTAL</b>	<b>306,979</b>	<b>300,860</b>	<b>-1.99</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Ket:

Perhitungan Data Angkutan Laut dimulai pada H-15 s.d. H+15, namun untuk total jumlah penumpang yang dilakukan analisa merupakan data H-7 s.d. H+ (sebagaimana Tabel...).

**Tabel 9**  
**Realisasi Penumpang Moda Angkutan Laut di 52 Pelabuhan H-7 s.d. H2**

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
		2012	2013	
ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)	H-7	53,297	44,928	-15.70
	H-6	57,671	46,818	-18.82
	H-5	56,788	<b>70,040</b>	23.34
	H-4	74,045	60,077	-18.86
	H-3	64,856	64,367	-0.75
	H-2	<b>81,510</b>	68,252	-16.27
	H-1	43,538	39,080	-10.24
	H1	25,021	23,323	-6.79
	H2	44,845	10,098	-77.48
<b>TOTAL</b>		<b>501,571</b>	<b>426,983</b>	<b>-14.87</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Puncak Arus Mudik

## 1.5. PENUMPANG MODA ANGKUTAN UDARA

Penumpang moda angkutan udara yang terpantau di 24 bandara domestik dan 4 bandara internasional selama periode H-7 hingga H2 mengalami peningkatan sebesar 5,17 % jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 dari 1.800.298 penumpang menjadi 1.893.369 penumpang pada tahun 2013.

**Tabel 10**  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Udara di 24 Bandara Penerbangan Domestik dan 4 Bandara Penerbangan Internasional

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		SELISIH PENUMPANG 2012:2011	%
		DOMESTIK + INTERNASIONAL			
		2012	2013		
ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)	H-7	183,978	204,464	20,486	11.14
	H-6	189,324	227,976	38,652	20.42
	H-5	190,454	<b>238,949</b>	48,495	25.46
	H-4	185,560	215,796	30,236	16.29
	H-3	193,977	225,168	31,191	16.08
	H-2	218,895	229,681	10,786	4.93
	H-1	<b>228,912</b>	214,092	-14,820	-6.47
	H1	194,056	146,255	-47,801	-24.63
H2	215,142	190,988	-24,154	-11.23	
<b>Total</b>		<b>1,800,298</b>	<b>1,893,369</b>	<b>93,071</b>	<b>5.17</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Puncak Arus Mudik

**Tabel 11**  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Udara di 24 **BANDARA DOMESTIK**

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG		SELISIH PENUMPANG 2013:2012	%
		DOMESTIK			
		2012	2013		
ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)	H-7	154,877	172,986	18,109	11.69
	H-6	161,768	190,773	29,005	17.93
	H-5	161,853	<b>200,069</b>	38,216	23.61
	H-4	155,746	177,464	21,718	13.94
	H-3	163,975	183,978	20,003	12.20
	H-2	181,886	192,130	10,244	5.63
	H-1	190,439	175,718	-14,721	-7.73
	H1	<b>194,056</b>	146,255	-47,801	-24.63
H2	177,737	166,984	-10,753	-6.05	
<b>Total</b>		<b>1,542,337</b>	<b>1,606,357</b>	<b>64,020</b>	<b>4.15</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Puncak Arus Mudik

**Tabel 12**  
**Realisasi Penumpang Moda Angkutan Udara di 4 BANDARA INTERNASIONAL**

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	JUMLAH PENUMPANG INTERNASIONAL		SELISIH PENUMPANG 2013:2012	%
		2012	2013		
		ARUS MUDIK (H-7 s.d. H2)	H-7		
H-6	27,556		37,203	9,647	35.01
H-5	28,601		38,880	10,279	35.94
H-4	29,814		38,332	8,518	28.57
H-3	30,002		<b>41,190</b>	11,188	37.29
H-2	37,009		37,551	542	1.46
H-1	38,473		38,374	-99	-0.26
H1	<b>38,827</b>		30,092	-8,735	-22.50
H2	37,405		24,004	-13,401	-35.83
<b>Total</b>		<b>296,788</b>	<b>317,104</b>	<b>20,316</b>	<b>6.85</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Puncak Arus Mudik

## 2. MODA ANGKUTAN PRIBADI

**Tabel 13**  
**Prosentase Realisasi Angkutan Pribadi Angkutan Lebaran Tahun 2012 & 2013 (Periode H-7 s.d. H2)**

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	MOBIL PRIBADI		SELISIH MOBIL PRIBADI 2013:2012	%	SEPEDA MOTOR		SELISIH SEPEDA MOTOR 2013:2012	%
		2012	2013			2012	2013		
ARUS MUDIK	H-7	33.081	26.382	-6.699	-20.25	56.652	34.051	-22.601	-39.89
	H-6	34.590	39.421	4.831	13.97	59.921	50.852	-9.069	-15.13
	H-5	43.533	60.687	17.154	39.40	68.573	83.878	15.305	22.32
	H-4	65.899	65.015	-884	-1.34	115.466	121.040	5.574	4.83
	H-3	89.553	78.458	-11.095	-12.39	208.426	125.908	-82.518	-39.59
	H-2	85.766	82.504	-3.262	-3.80	249.062	123.103	-125.959	-50.57
	H-1	74.699	55.017	-19.682	-26.35	154.074	89.209	-64.865	-42.10
	H1	70.979	46.844	-24.135	-34.00	82.817	59.476	-23.341	-28.18
	H2	66.262	55.430	-10.832	-16.35	89.940	68.594	-21.346	-23.73
<b>TOTAL</b>		<b>564,362</b>	<b>509,758</b>	<b>-54,604</b>	<b>-9.68</b>	<b>1,084,931</b>	<b>756,111</b>	<b>-328,820</b>	<b>-30.31</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

**Keterangan:**

Pemantauan di 6 (enam) lokasi yaitu Ciasem, Sadang, Merak, Ciamis, Cicurug, dan Cisarua.

Berdasarkan pemantauan, di **6 (enam) titik (Ciasem, Sadang, Merak, Ciamis, Cicurug, dan Cisarua)** pada tabel 1b.1 periode H-7 (1 Agustus 2013) hingga H2 (9 Agustus 2013) jumlah **mobil pribadi** mengalami **penurunan** sebesar **9,68%** dari jumlah mobil pribadi **564.362 kendaraan** menjadi **509.758 kendaraan** pada tahun 2013. Sedangkan jumlah sepeda motor mengalami **penurunan** sebesar **30,31%** dari **1.084.931 kendaraan** menjadi **756.111 kendaraan** pada tahun 2013 di periode yang sama.

**Tabel 14**  
**Prosentase Realisasi Pemudik Angkutan Pribadi**  
**Angkutan Lebaran Tahun 2012 & 2013**  
**(Periode H-7 s.d. H1)**

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	MOBIL PRIBADI		SELISIH PEMUDIK	%	SEPEDA MOTOR		SELISIH PEMUDIK	%
		2012	2013			2012	2013		
ARUS MUDIK	H-7	165,405	131,910	-33,495	-20.25	113,304	68,102	-45,202	-39.89
	H-6	172,950	197,105	24,155	13.97	119,842	101,704	-18,138	-15.13
	H-5	217,665	303,435	85,770	39.40	137,146	167,756	30,610	22.32
	H-4	329,495	325,075	-4,420	-1.34	230,932	242,080	11,148	4.83
	H-3	447,765	392,290	-55,475	-62	416,852	251,816	-165,036	-79
	H-2	428,830	412,520	-16,310	-19	498,124	246,206	-251,918	-101
	H-1	373,495	275,085	-98,410	-132	308,148	178,418	-129,730	-84
	H1	354,895	234,220	-120,675	-170	165,634	118,952	-46,682	-56
H2	331,310	277,150	-54,160	-82	179,880	137,188	-42,692	-47	
<b>TOTAL</b>		<b>2,821,810</b>	<b>2,548,790</b>	<b>-273,020</b>	<b>-9.68</b>	<b>2,169,862</b>	<b>1,512,222</b>	<b>-657,640</b>	<b>-30.31</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Ket: Pemantauan di 6 (enam) lokasi yaitu Ciasem, Sadang, Merak, Ciamis, Cicurug, dan Cisarua.

Berdasarkan pemantauan, di **6 (enam) titik (Ciasem, Sadang, Merak, Ciamis, Cicurug, dan Cisarua)** pada tabel 1c.1 periode H-7 (1 Agustus 2013) hingga H2 (9 Agustus 2013) jumlah pemudik yang menggunakan **mobil pribadi** mengalami **penurunan** sebesar **9,68%** dari jumlah pemudik yang menggunakan mobil pribadi sebesar **2.821.810** pemudik pada tahun 2012 menjadi **2.548.790** pemudik pada tahun 2013 di periode yang sama, sedangkan **jumlah pemudik sepeda motor** mengalami **penurunan** sebesar **30,31 %** dari **2.169.862** pemudik pada tahun 2012 menjadi **1.512.222** pemudik pada tahun 2013.

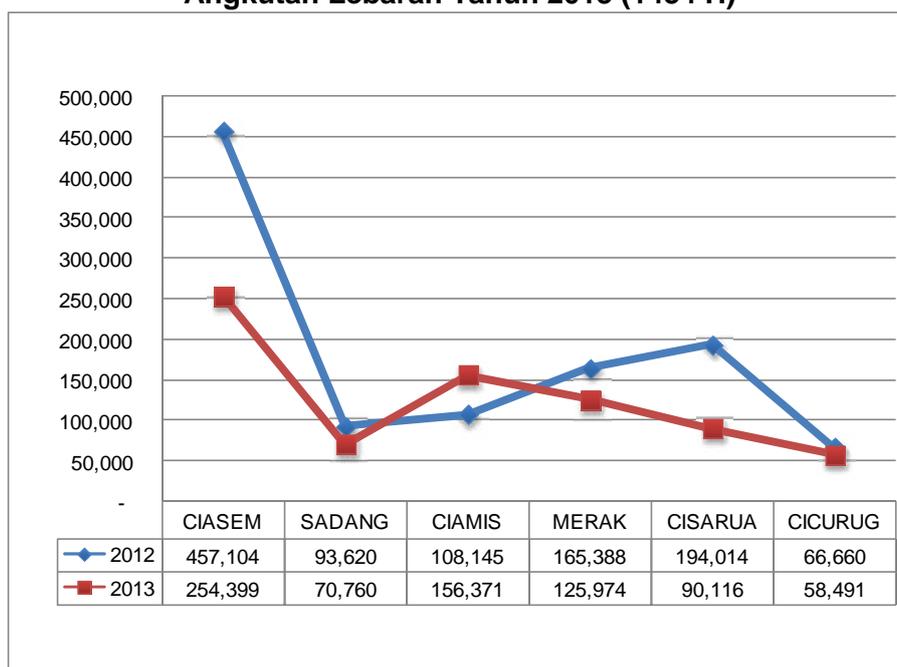
### 3. DATA VOLUME ARUS LALU LINTAS

**Tabel 15**  
**Total SEPEDA MOTOR Di 6 Titik Pemantauan Dari H-7 S.D. H2 Angkutan Lebaran 2013/1434 H**

PERIODE	TAHUN	CIASEM	SADANG	CIAMIS	MERAK	CISARUA	CICURUG	TOTAL (TANPA CILEUNYI)	CILEUNYI	TOTAL (DENGAN CILEUNYI)
<b>Arus Mudik Angkutan Lebaran 2013</b>										
H-7	2012	15,813	10,753	8,392	3,569	11,097	7,028	56,652	-	56,652
	2013	5,397	4,005	7,321	4,282	7,573	5,473	34,051	13,163	47,214
	%	-65.87	-62.75	-12.76	19.98	-31.76	-22.13	-39.89	-	-
H-6	2012	18,248	10,559	8,650	3,885	12,650	5,929	59,921	-	59,921
	2013	9,718	7,433	12,707	5,691	9,057	6,246	50,852	12,786	63,638
	%	-46.74	-29.61	46.90	46.49	-28.40	5.35	-15.13	-	-
H-5	2012	20,518	6,563	8,971	11,761	14,522	6,238	68,573	-	68,573
	2013	27,808	9,917	14,152	12,783	12,158	7,060	83,878	26,254	110,132
	%	35.53	51.10	57.75	8.69	-16.28	13.18	22.32	-	-
H-4	2012	45,011	10,889	11,852	22,191	19,175	6,348	115,466	-	115,466
	2013	59,382	6,806	10,808	21,540	13,907	8,597	121,040	13,163	134,203
	%	31.93	-37.50	-8.81	-2.93	-27.47	35.43	4.83	-	-
H-3	2012	112,875	13,506	15,064	31,073	29,754	6,154	208,426	-	416,852
	2013	53,707	11,462	19,436	22,361	11,663	7,279	125,908	30,449	251,816
	%	-52.42	-15.13	29.02	-28.04	-60.80	18.28	-39.59	-	-
H-2	2012	143,750	13,348	18,898	33,186	32,971	6,909	249,062.00	-	249,062
	2013	46,139	8,088	29,267	23,671	9,658	6,280	123,103.00	30,449	153,552
	%	-67.90	-39.41	54.87	-28.67	-70.71	-9.10	-50.57	-	-
H-1	2012	71,408	9,341	14,398	25,062	26,630	7,235	154,074.00	-	154,074
	2013	25,508	8,675	27,126	13,767	9,172	4,961	89,209.00	34,695	123,904
	%	-64.28	-7.13	88.40	-45.07	-65.56	-31.43	-42.10	-	-
H1	2012	16,053	9,310	9,958	18,108	21,773	7,615	82,817	-	82,817
	2013	11,136	6,692	19,125	9,872	8,422	4,229	59,476	23,681	83,157
	%	-30.63	-28.12	92.06	-45.48	-61.32	-44.46	-28.18	-	-
H2	2012	13,428	9,351	11,962	16,553	25,442	13,204	89,940	-	89,940
	2013	15,604	7,682	16,429	12,007	8,506	8,366	68,594	23,681	92,275
	%	16.20	-17.85	37.34	-27.46	-66.57	-36.64	-23.73	-	-
<b>TOTAL MUDIK (H-7 s.d. H2)</b>	2012	<b>457,104</b>	<b>93,620</b>	<b>108,145</b>	<b>165,388</b>	<b>194,014</b>	<b>66,660</b>	<b>1,084,931</b>	-	<b>1,203,417</b>
	2013	<b>254,399</b>	<b>70,760</b>	<b>156,371</b>	<b>125,974</b>	<b>90,116</b>	<b>58,491</b>	<b>756,111</b>	<b>184,640</b>	<b>967,616</b>
	%	<b>-44.35</b>	<b>-24.42</b>	<b>44.59</b>	<b>-23.83</b>	<b>-53.55</b>	<b>-12.25</b>	<b>-30.31</b>	-	<b>-19.59</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran. 2013

**Gambar.1**  
**Perbandingan Volume SEPEDA MOTOR di 6 Titik Pemantauan Periode H-7 s.d H2**  
**Angkutan Lebaran Tahun 2013 (1434 H)**

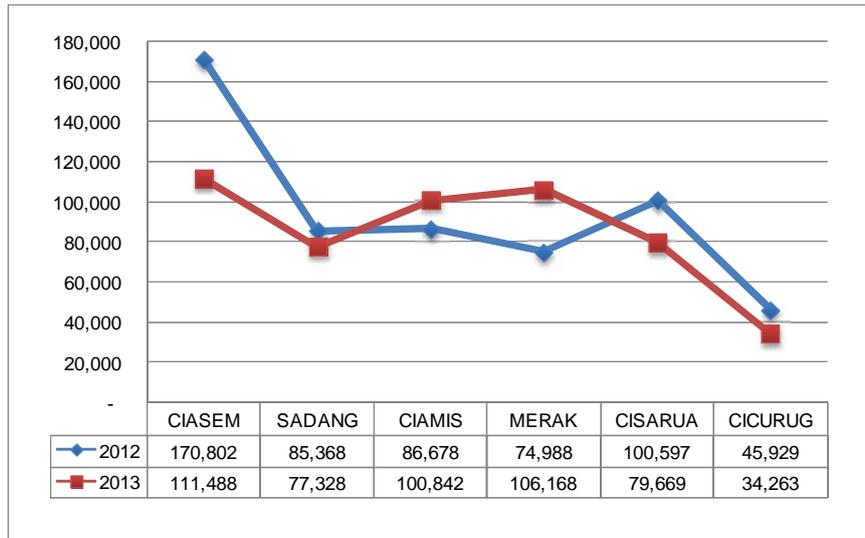


**Tabel 16**  
**Total MOBIL PRIBADI Di 6 Titik Pemantauan Dari H-7 S.D H2 Angkutan Lebaran 2013/1434 H**

PERIODE	TAHUN	CIASEM	SADANG	CIAMIS	MERAK	CISARUA	CICURUG	TOTAL (TANPA CILEUNYI)	CILEUNYI	TOTAL (DENGAN CILEUNYI)
<b>Arus Mudik Angkutan Lebaran 2013</b>										
H-7	2012	10,561	2,420	4,272	4,820	6,686	4,322	33,081	-	33,081
	2013	5,667	2,822	4,536	3,142	7,045	3,170	26,382	7,635	34,017
	%	-46.34	16.61	6.18	-34.81	5.37	-26.65	-20.25	-	-
H-6	2012	11,241	1,553	4,876	6,044	7,599	3,277	34,590	-	34,590
	2013	8,645	6,726	7,622	3,995	8,701	3,732	39,421	11,614	51,035
	%	-23.09	333.10	56.32	-33.90	14.50	13.88	13.97	-	-
H-5	2012	15,417	3,838	5,424	7,797	7,385	3,672	43,533	-	43,533
	2013	11,694	13,465	10,181	10,862	10,103	4,382	60,687	14,195	74,882
	%	-24.15	250.83	87.70	39.31	36.80	19.34	39.40	-	-
H-4	2012	20,980	12,478	8,098	11,798	8,558	3,987	65,899	-	65,899
	2013	11,370	12,953	7,168	17,289	11,288	4,947	65,015	23,818	88,833
	%	-45.81	3.81	-11.48	46.54	31.90	24.08	49.04	-	-
H-3	2012	34,487	14,705	11,821	12,730	11,000	4,810	89,553	-	179,106
	2013	15,097	13,163	15,113	21,563	9,088	4,434	78,458	78,458	156,916
	%	-56.22	-10.49	27.85	69.39	-17.38	-7.82	5.33	-	-
H-2	2012	22,255	16,566	14,554	10,060	16,872	5,459	85,766	-	85,766
	2013	22,827	9,324	18,699	18,255	9,593	3,806	82,504	26,646	109,150
	%	2.57	-43.72	28.48	81.46	-43.14	-30.28	-3.80	-	-
H-1	2012	18,698	12,902	14,464	8,373	14,759	5,503	74,699	-	74,699
	2013	12,079	4,364	13,767	13,442	8,321	3,044	55,017	28,617	83,634
	%	-35.40	-66.18	-4.82	60.54	-43.62	-44.68	-26.35	-	-
H1	2012	20,809	12,287	10,419	7,290	14,092	6,082	70,979	-	70,979
	2013	10,316	7,304	11,351	7,788	7,284	2,801	46,844	23,681	70,525
	%	-50.43	-40.56	8.95	6.83	-48.31	-53.95	-34.00	-	-
H2	2012	16,354	8,619	12,750	6,076	13,646	8,817	66,262	-	66,262
	2013	13,793	7,207	12,405	9,832	8,246	3,947	55,430	-	55,430
	%	-15.66	-16.38	-2.71	61.82	-39.57	-55.23	-16.35	-	-
<b>TOTAL MUDIK (H-7 s.d. H2)</b>	2012	<b>170,802</b>	<b>85,368</b>	<b>86,678</b>	<b>74,988</b>	<b>100,597</b>	<b>45,929</b>	<b>564,362</b>	<b>-</b>	<b>587,653</b>
	2013	<b>111,488</b>	<b>77,328</b>	<b>100,842</b>	<b>106,168</b>	<b>79,669</b>	<b>34,263</b>	<b>509,758</b>	<b>214,664</b>	<b>668,992</b>
	%	<b>-34.73</b>	<b>-9.42</b>	<b>16.34</b>	<b>41.58</b>	<b>-20.80</b>	<b>-25.40</b>	<b>-9.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

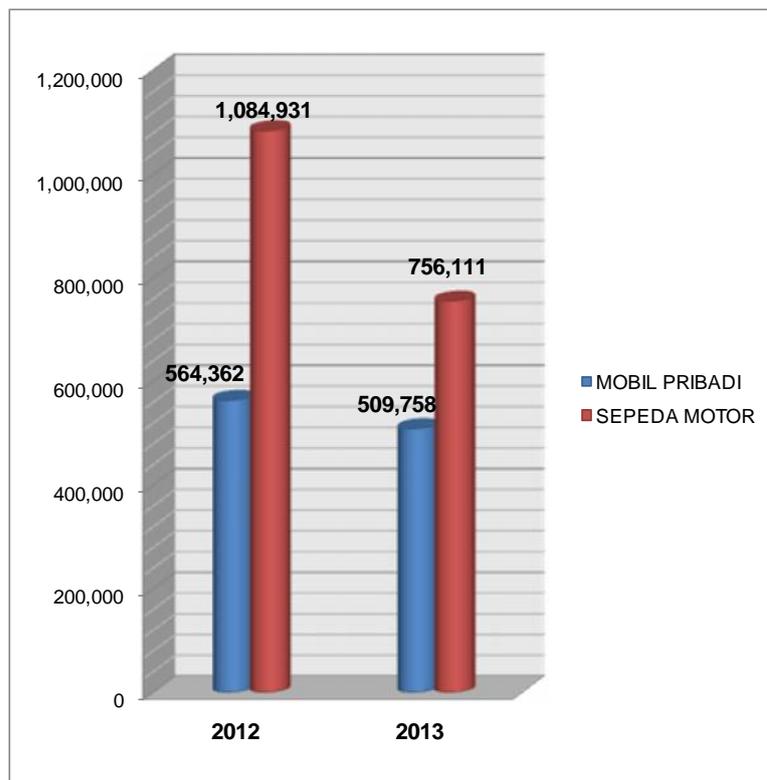
Sumber : Posko Angkutan Lebaran. 2013

**Gambar.2**  
**Perbandingan Volume MOBIL PRIBADI di 6 Titik Pemantauan Periode H-7 s.d H2**  
**Angkutan Lebaran Tahun 2013 (1434 H)**



*Keterangan : \*) Titik lokasi Cileunyi merupakan titik pemantauan baru tahun 2013, sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2012)*

**Gambar.3**  
**Total Volume Lalu Lintas di 6 Titik Pemantauan Dari H-7 S.D H2 Angkutan Lebaran 2013/1434 H**



Berdasarkan data yang diperoleh dari 6 (enam) titik lokasi pemantauan, diketahui bahwa volume lalu lintas untuk **sepeda motor** mengalami **penurunan** sebesar **30,31%** selama pemantauan Angkutan Lebaran 2013 dari H-7 s.d. H2 dari jumlah **1.084.931** kendaraan pada tahun 2012 menjadi **756.111** kendaraan di tahun 2013, sedangkan **mobil pribadi** mengalami **penurunan** sebesar **9,68%** dari **564.362** kendaraan pada tahun 2012 menjadi **509.758** kendaraan pada tahun 2013.

#### 4. KECELAKAAN LALU LINTAS NON TOL

Berdasarkan pemantauan Operasi Ketupat Korlantas POLRI Tahun 2013, jumlah kecelakaan lalu lintas non tol yang terpantau pada H-7 s.d. H2 terjadi 1.832 jumlah kejadian laka, 384 orang meninggal dunia, 616 orang mengalami luka berat dan 2.300 orang luka ringan. Dibandingkan dengan tahun 2012 pada periode yang sama mengalami **penurunan jumlah kejadian laka sebesar 31,85%, 23,35% meninggal dunia, 21,23% luka berat dan 12,28% luka ringan.**

**Tabel 17**  
**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Dari H-7 S.D. H2 Angkutan Lebaran 2013/1434 H**

PERIODE HARI	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN LAKA	MENINGGAL DUNIA	LUKA BERAT	LUKA RINGAN
H-6	2012	329	42	57	295
	2013	99	12	26	112
	%	-69.91	-71.43	-54.39	-62.03
H-5	2012	346	74	81	311
	2013	224	60	71	260
	%	-35.26	-18.92	-12.35	-16.40
H-4	2012	350	85	136	314
	2013	243	47	74	335
	%	-30.57	-44.71	-45.59	6.69
H-3	2012	367	66	96	342
	2013	266	59	86	326
	%	-27.52	-10.61	-10.42	-4.68
H-2	2012	314	58	96	293
	2013	292	54	95	344
	%	-7.01	-6.90	-1.04	17
H-1	2012	373	62	112	388
	2013	267	55	92	314
	%	-28.42	-11.29	-17.86	-19
H1	2012	303	52	123	325
	2013	207	44	83	279
	%	-31.68	-15.38	-32.52	-14
H2	2012	306	62	81	354
	2013	234	53	89	330
	%	-23.53	-14.52	9.88	-7
TOTAL	2012	2,688	501	782	2,622
	2013	1,832	384	616	2,300
	%	-31.85	-23.35	-21.23	-12.28

Sumber: Posko POLRI 2013

## 5. PEMANTAUAN GPS

**Tabel 18**  
**Pemantauan GPS Pada H-7 s.d. H2 Angkutan Lebaran 2013/1434 H**

KLASIFIKASI	PERIODE HARI	LINTASAN (Km/Jam)											
		LINTASAN 1			LINTASAN 2			LINTASAN 3			LINTASAN 4		
		2012	2013	%	2012	2013	%	2012	2013	%	2012	2013	%
ARUS MUDIK H-7 s.d. H2	H-7	73.34	62.00	-15.46	76.67	69.15	-9.81	52.23	55.80	6.84	46.42	39.40	-15.12
	H-6	62.87	44.10	-29.85	75.85	60.30	-20.50	48.13	36.40	-24.37	34.51	29.65	-14.08
	H-5	53.93	45.10	-16.37	72.59	55.80	-23.13	53.51	24.95	-53.37	37.54	25.15	-33.02
	H-4	53.47	58.75	9.88	66.71	66.00	-1.06	40.09	15.45	-61.46	31.12	30.67	-1.43
	H-3	42.41	66.60	57.06	57.94	66.95	15.56	15.80	29.91	89.30	21.85	36.28	66.04
	H-2	43.76	69.30	58.38	44.99	66.15	47.03	5.43	40.81	651.47	14.09	34.54	145.23
	H-1	72.65	69.38	-4.49	72.89	69.11	-5.19	26.13	58.99	125.76	29.08	36.45	25.35
	H1	65.10	57.62	-11.49	60.27	72.59	20.44	36.83	26.41	-28.31	47.36	33.23	-29.84
	H2	68.07	63.18	-7.18	56.56	72.89	28.87	52.00	65.50	25.97	29.45	25.33	-14.01
<b>Kecepatan Tertinggi</b>		<b>73.34</b>	<b>69.38</b>		<b>76.67</b>	<b>72.89</b>		<b>53.51</b>	<b>65.50</b>		<b>47.36</b>	<b>39.40</b>	
<b>Kecepatan Terendah</b>		<b>42.41</b>	<b>44.10</b>		<b>44.99</b>	<b>55.80</b>		<b>5.43</b>	<b>15.45</b>		<b>14.09</b>	<b>25.15</b>	

Sumber : Data Posko 2013

Keterangan:

Lintasan I : Jalan Tol Jakarta - Cikampek

Lintasan II : Jalan Tol Cipularang

Lintasan III : Cikampek – Cirebon (Jalur Pantura)

Lintasan IV : Cileunyi – Banjar (Jalur Pansela)

Berdasarkan data kecepatan hasil pantauan GPS di 4 (empat) lintasan pada H2 tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa **kecepatan tertinggi** terdapat pada **Jalan Tol Cipularang** dengan kecepatan **72,89 km/jam** dan **kecepatan terendah** terjadi di **Cileunyi – Banjar (Jalur Pansela)** dengan **kecepatan 25,33 km/jam**.

Dari hasil pantauan data **GPS tahun 2012** pada periode arus mudik H-7 s.d. H2, terjadi perbedaan titik pantauan **kecepatan tertinggi** berada di **lintasan 2 (Jalan Tol Cipularang)** dengan kecepatan **76,67 km/jam yang terjadi pada H-7** dan **kecepatan terendah** berada di **lintasan 3 (Cikampek–Cirebon (Jalur Pantura))** sebesar **5,43 km/jam yang terjadi pada H-2**.

## 6. MUDIK GRATIS

Kegiatan mudik gratis pada Angkutan Lebaran Tahun 2013 (1434 H) diselenggarakan oleh instansi Pemerintah (Kementerian Perhubungan) dan Mitra Kerja Swasta.

### 6.1 Mudik Gratis Kementerian Perhubungan

**Tabel 17**  
**Mudik Gratis Angkutan Laut-Ditjen Perhubungan Laut**

No	Penyelenggara	Tanggal Keberangkatan	Jumlah Penumpang (Orang)	Jumlah Sepeda Motor (Unit)
1	PT. PELNI (Kapal KM. Dobonsolo)	3 Agustus 2013	2,213	1,515
2	PT. PELNI (Kapal KM. Dobonsolo)	5 Agustus 2013	1,512	802
3	PT. PELNI (Kapal KRI Banda Aceh)	6 Agustus 2013	982	483
<b>Total</b>			<b>4,707</b>	<b>2,800</b>

**Tabel 18**  
**Mudik Gratis Angkutan SDP-Ditjen Perhubungan Darat**

No	Penyelenggara	Tanggal Keberangkatan	Jumlah PNP (Orang)	Jumlah Sepeda Motor
1	PT. ASDP	3 Agustus 2013	124	70
2		4 Agustus 2013	108	61
3		5 Agustus 2013	117	69
<b>Total</b>			<b>349</b>	<b>200</b>

**Tabel 19**  
**Mudik Gratis Angkutan Laut-Ditjen KA dan PT.KAI**

No	Lintasan	Tanggal Keberangkatan	Jumlah Sepeda Motor (Unit)	Keterangan
1	Lintas Utara (Jakarta Gudang-SemarangPoncol)	3 Agustus 2013	26	Tujuan Lintas Utara: Cirebon, Tegal dan Semarang
		4 Agustus 2013	18	
		5 Agustus 2013	11	
		6 Agustus 2013	14	
<b>Total</b>			<b>69</b>	
2	Lintas Selatan (Jakarta Gudang-Solo Jebres)	3 Agustus 2013	52	Tujuan Lintas Selatan Kutoarjo, Lempuyang dan Solo Jebres
		4 Agustus 2013	24	
		5 Agustus 2013	41	
		6 Agustus 2013	10	
<b>Total</b>			<b>127</b>	

**Tabel 20**  
**Mudik Gratis Sepeda Motor Diangkut Truk-Ditjen Perhubungan Darat**

NO	KOTA TUJUAN	SEPEDA MOTOR (UNIT)	PENUMPANG (ORANG)	SARANA ANGKUT
1	SOLO	270	596	26 TRUK DAN 69 BUS
2	WONOSOBO	40	69	
3	YOGYAKARTA	143	290	
4	KEBUMEN	90	193	
5	WONOGIRI	176	286	
6	PURWOKERTO	94	215	
7	MAGELANG	105	240	
8	LAMPUNG	25	96	
9	SOLO GEL .II	59	135	
10	TEGAL	139	326	
11	TASIKMALAYA	16	34	
12	CIREBON	26	71	
13	CILACAP	80	177	
<b>TOTAL</b>		<b>1,263</b>	<b>2,728</b>	

Berdasarkan data **mudik gratis** yang diselenggarakan oleh **Kementerian Perhubungan** (darat, laut dan kereta api), jumlah keseluruhan penumpang yang melaksanakan mudik gratis sebanyak **7.784 orang** dengan **sepeda motor yang diberangkatkan** sebanyak **4.459 unit sepeda motor**.

## 6.2 Mudik Gratis Mitra Kerja Swasta

Kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan oleh **Mitra Kerja Swasta** sebanyak **20 perusahaan** dengan jumlah keseluruhan penumpang yang melaksanakan mudik sebanyak **36.594 penumpang** dan bus yang diberangkatkan berjumlah **2.323 bus**.

## 7. KESIMPULAN

a. Secara keseluruhan jumlah penumpang **Moda Angkutan Umum** periode H-7 s.d. H2 **Angkutan Lebaran Tahun 2013** berjumlah **7.880.872 penumpang**

- 1) **Moda Angkutan Jalan** mengalami **penurunan** sebesar **17,57%** jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 dari **3.476.822 penumpang** menjadi **2.865.797 penumpang tahun 2013**.
- 2) **Moda Angkutan Penyeberangan** mengalami **penurunan** sebesar **17,53%** jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 dari **1.728.362 penumpang** menjadi **1.425.303 penumpang** pada tahun 2013.
- 3) **Moda Angkutan Kereta Api** mengalami **peningkatan** jumlah penumpang **utama** sebesar **17,85 %** dari periode yang sama tahun lalu dari **675.062 penumpang** menjadi **795.552 penumpang**, sedangkan penumpang **lokal** mengalami **penurunan** sebesar **51,57%** dari **916.373 penumpang** menjadi **443.776 penumpang**.
- 4) **Moda Angkutan Laut** mengalami **penurunan 14,87 %** dari periode yang sama tahun 2012 yaitu **501.571 penumpang** menjadi **426.983 penumpang** di tahun 2013 yang terpantau pada 52 pelabuhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
- 5) **Moda Angkutan Udara** mengalami **peningkatan** sebesar **5,17 %** jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 dari **1.800.298 penumpang** menjadi **1.893.369 penumpang** pada tahun 2013.

b. **Moda Angkutan Pribadi sepeda motor** mengalami **penurunan sebesar 30,31%** dari **1.084.931 kendaraan** di tahun 2012 menjadi **756.111 kendaraan** pada periode yang sama di tahun 2013, Sedangkan **mobil pribadi** mengalami **penurunan sebesar 9,68%** dari **564.362 kendaraan** di tahun 2012 menjadi **509.758 kendaraan** di tahun 2013.

c. Berdasarkan pemantauan kecepatan melalui GPS, kondisi volume lalu lintas pada H2 masih dalam keadaan normal dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 25,15 km/jam sampai dengan 39,40 km/jam.

d. Secara umum, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas mengalami **penurunan** sebesar **31,85%** dari 2.688 kejadian di tahun 2012 menjadi 1.832 kejadian di tahun 2013 pada periode yang sama.

---

Jakarta, 09 Agustus 2013